Falizar Rivani
KOMUNIKASI POLITIK SOSIOKULTURAL
Studi Dinamika Politik PKB pada Pemilu 2019
PARTAI KEBANGKITAN
Parist
PARADIGMA INSTITUTE

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Syarif Hidayatullah

JAKARTA – INDONESIA

KOMUNIKASI POLITIK SOSIOKULTURAL

Studi Dinamika Politik PKB Pada Pemilu 2009

FALIZAR RIVANI

Parist
PARADIGMA INSTITUT

KOMUNIKASI POLITIK SOSIOKULTURAL
Studi Dinamika Politik PKB Pada Pemilu 2009

Penulis : Falizar Rivani
Komunikasi Politik Sosiokultural:
Studi Dinamika Politik PKB Pada Pemilu 2009

Editor : Ma'rufin

Design dan layout : Arie MS dan Abu Khaer

Cetakan Pertama, Desember 2013

Diterbitkan oleh
Parist Kudus
cet 1. – Kudus: Parist, 2013
Penerbit Parist Kudus
Jl. Conge Ngembalrejo Bae Kudus Jawa Tengah
www.paradigmainstitute.com
email: paradigmainstitutyahoo.com
melalui www.nulisbuku.com

ISBN 978-602-18571-8-2

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah. Puji syukur hak mutlak bagi-Nya Allah Swt, atas segala karunia, nikmat dan limpahan kasih sayang-Nya yang telah diberikan kepada kita semua. Shalawat bersenandungkan salam semoga senantiasa tetap dilimpah-curahkan kepada ruh junjungan kita, Nabi Muhammad Saw., keluarga dan sahabatnya, serta pengikutnya, umatnya, dan alam semesta.

Buku yang telah selesai ditulis ini merupakan hasil penelitian akhir penulisan tesis dalam studi Program Magister. Dengan selesainya buku ini pula tentu saja tidak dapat dipisahkan berkat bantuan, uluran tangan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA Direktur Sekolah Pascasarjana, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta serta kepada yang terhormat para deputi direktur, Prof. Dr. Suwito, MA Ketua Program Doktor, dan Dr. Yusuf Rahman, MA Ketua Program Magister.

Selanjutnya rasa terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga penulis sampaikan kepada: Prof. Andi Faisal Bakti, Ph. D. MA, selaku dosen pembimbing dan editor. Dalam pertemuan-pertemuan kami, diskusi yang terjadi di dalamnya banyak memberikan motivasi, bimbingan dan pengarahan hingga buku ini dapat selesai. Salah satu nasihat yang tidak terlupakan agar selalu menambah pengetahuan dan bacaan sebanyak mungkin, kalau bisa diukur dari Ciputat sampai Chicago. Dan juga kepada seluruh para dosen sekolah pascasarjana yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuannya selama penulis belajar.

Secara khusus penulis persembahkan kepada kedua orang tua yang tercinta, Ayahanda M. Syufini Jaya, dan Ibunda Harminiwati. Penulis selalu mendoakan "Ya Allah yang maha kuasa, jangan persulit hamba untuk menggapai cita-cita, agar doa & air mata yang mengalir dari orang tua tidak sia-sia." Begitu juga para saudara-saudara kakak Farozah Galvani, Farnia Sari dan adik Fradito Harseno atas doa, harapan serta dukungan moril & materil kalian, begitu banyak membantu dengan caranya sendiri. Merupakan bukti pengorbanan yang diberikan tiada tara.

Selanjutnya ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat civitas akademik, para dosen dan pengelola sekolah pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,

terutama pihak Perpustakaan Pascasarjana dan perpustakaan utama UIN Jakarta yang telah memberikan pelayanan dan penyediaan buku-buku referensi.

Kepada seluruh jajaran pengurus DPP PKB, khususnya kang Darussalam, fungsionaris partai yang dengan cepat memberikan nomor kontak dan mengenalkan saya ke pengurus-pengurus partai, saya haturkan banyak terima kasih. Tidak lupa terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Wahyuddin Kessa, Marwan Ja'far dan Pak Saiful Bahri Anshori yang telah dan masih memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi kebingungan.

Rekan-rekan sesama mahasiswa Pascasarjana angkatan tahuan 2010 UIN Syaraif Hidayatullah ataupun di kampus lainnya, terima kasih atas kerjasamanya. Rekan-rekan Forum Mahasiswa Alumni Lirboyo (FORMAL), JAUSAN dan rekan-rekan di Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa (GEMASABA), begitu juga teman-teman di kosan Abu dkk. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kepada teman, kawan dan sahabat. Harapan penulis semoga segala dukungan dalam bentuk apapaun menjadi amal shaleh yang diridlai Allah swt. *Jāzakumūllah Aḥ sanal Jāza*. Amin!

Akhir kata, penulis sangat menyadari, buku ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan, masih terdapat kekurangan dan kekhilafan. Namun karena kelelahan dan kealpaan, tentu kesalahan masih ditemukan. Oleh karena itu, penulis mohon kepada para pembaca dan para pakar atas saran dan kritik konstrukif agar pada masa mendatang dapat disempurnakan lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Amin.

Wassalam,
Penulis

Ciputat, 30 September 2013

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
ALA-LC ROMANIZATION TABLES

A. Huruf Konsonan

Initial	Romanization	Initial	Romanization
ا	omit	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘ (ayn)
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	ه	h
س	s	و	w
ش	sh	ي	y
ص	ṣ	ء	’
ض	ḍ		

B. Huruf Vokal: Vokal Pendek, Panjang dan Dipthong

ـَ	a	ـَا	ā	ـِي	ī
ـُ	u	ـَي	á	ـَو	aw
ـِ	i	ـُو	ū	ـَي	ay

DAFTAR SINGKATAN

DPAC	:	Dewan Pengurus Anak Cabang
DPARt	:	Dewan Pengurus Anak Ranting
DPC	:	Dewan Pengurus Cabang
DPP	:	Dewan Pengurus Pusat
DPW	:	Dewan Pengurus Wilayah
F-KB	:	Fraksi Kebangkitan Bangsa
IS	:	Interaksionalisme Simbolik
KPU	:	Komisi Pemilihan Umum
LPP	:	Lembaga Pemenangan Pemilu
LSI	:	Lembaga Survey Indonesia
MLB	:	Muktamar Luar Biasa
NU	:	Nahdlatul Ulama
P3KPU	:	Panitia Persiapan Pembentukan Komisi Pemilihan Umum
PAN	:	Partai Amanat Nasional
PBB	:	Partai Bulan Bintang
PBNU	:	Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
PBR	:	Partai Bintang Reformasi
PDI-P	:	Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan
PITI	:	Pembina Iman Tauhid Islam
PKB	:	Partai Kebangkitan Bangsa
PKD	:	Partai Kejayaan Demokrasi
PKNU	:	Partai Kebangkitan Nasional Ulama
PKU	:	Partai Kebangkitan Uma
PNU	:	Partai Nahdlatul Ummah
PPNUI	:	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia
PPP	:	Partai Persatuan Pembangunan
PPP	:	Partai Persatuan Pembangunan
PSDA	:	Pengelolaan Sumber Daya Alam
PT	:	Parliamentary Threshold
RUU	:	Rancangan Undang-Undang
SUNI	:	Solidaritas Uni Nasional Indonesia

DAFTAR ISI

Kata Pengantar___iii
Pedoman Transliterasi ___v
Daftar Singkatan___vi
Daftar Isi___vii

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah___1
B. Permasalahan___13
C. Tujuan Penelitian___14
D. Manfaat Penelitian___14
E. Kajian Terdahulu yang Relevan___15
F. Landasan Teori___18
G. Metodologi Penelitian___21
H. Sistematika Penelitian___24

BAB II Paradigma Komunikasi Politik dalam Pendekatan Teori Sosiokultural

A. Sosialisasi: Interaksi Simbolik___25
B. Konstruksi Ide: Memperkenalkan Diri___32
C. Konstruksi Emosi: Sebagai Alat Kampanye___39
D. Pembawaan Diri: Pengolahan Kesan ___44

BAB III Komunikasi Politik Sosiokultural di PKB

A. Sejarah Berdirinya PKB ___53
B. Struktur Organisasi PKB___56
C. Hubungan Komunikasi Politik PKB dan NU Berdasarkan Unsur Sosiokultural___60
D. Mendeklarasikan Partai Advokasi dan sebagai Partai Terbuka___63

BAB IV **Aplikasi Komunikasi Politik: Dinamika Keterlibatan PKB Pada Pemilu 2009**

A. Interaksi Simbolik di PKB ___69
B. PKB Memperkenalkan Diri ___83
C. Ikatan Emosional PKB dengan Masyarakat Nahdliyin___91
D. Pengolahan Kesan: Pendekatan PKB kepada Warga Nahdliyin___99

BAB V **Penutup**

A. Kesimpulan___133
B. Saran___136

Daftar Pustaka___135
Glosarium___149
Indeks___155
Biografi Penulis___158

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak awal berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Ciganjur, 23 Juli 1998 dipelopori oleh lima kyai besar Nadlatul Ulama (NU),[1] telah menarik perhatian banyak kalangan seperti politisi, pengamat politik, peneliti, dan lain sebagainya. Daya tarik itu lebih banyak disebabkan oleh pengaruh dan nama besar dari organisasi sosial Nahdlatul Ulama (NU), sebagai lembaga yang menaunginya serta kharisma para tokoh NU yang sebagian besar merapat ke PKB. Sebagai sebuah parpol, PKB mengandalkan program komunikasi yang bersifat tradisional dan kultural yang sebagaimana yang menjadi ciri khas organisasi NU. Melalui dukungan yang besar dari warga *Nahdliyyin,* pada pemilu 1999, PKB mampu meraup suara terbanyak ketiga[2] di bawah Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) dan Golongan karya, dan mengalahkan partai "seniornya," Partai Persatuan Pembangunan (PPP).[3]

Namun, pada pemilu 2004 dan 2009, berturut-turut suara yang diperoleh PKB mengalami penurunan drastis.[4] Baik di tingkat local maupun nasional pada pemilu 2004, perolehan PKB sebesar 11.989.564 suara atau sekitar 10,57% jumlah suara yang diperebutkan. Jumlah itu mengalami penurunan yang signifikan sekitar 1.347.418 jumlah suara atau sekitar 10% dibanding angka Pemilu tahun 1999. Bahkan PKB gagal pula mengantarkan Abdurrahman Wahid (1940-2009) sebagai tokoh central maju sebagai calon presiden pada pemilu

---

[1]Lima kyai besar NU tersebut, adalah K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) (Jakarta), K.H. Mustofa Bisri (Rembang), K.H. Munasir Ali (Mojokerto), K.H. Muchit Muzadi (Jember), dan K.H. Ilyas Ruchiyat (Tasikmalaya) pada 23 Juli 1998. A. Effendi Choirie, "Menjadikan PKB Partai Nasional dan Terbuka," dalam Yenny Zanuba Wahid, dkk (Ed), *9 Tahun PKB, Kritik dan Harapan (*Jakarta: Panitia Nasional Harlah ke-9 PKB, 2007), 186.

[2]Faisal Ismail, *Dilema Nahdlatul Ulama di Tengah Badai Pragmatisme Politik* (Jakarta: PT. Mitra Cendikia, 2004), 49.

[3]Asep Saeful Muhtadi, *Komunikasi Politik Indonesia Dinamika Islam Politik Pasca-Orde Baru* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 165.

[4]Marwan Ja'far, *Aswaja dari Teologi ke Aksi* (Yogyakarta: PT LKis Printing Cemerlang, 2011), 113.

2004 setelah terganjal atau diganjal persyaratan kesehatan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).[5]

Sebagai partai politik yang berawal mengandalkan pendekatan kultural dan figur sentral, kekalahan PKB pada pemilu 2004 dan 2009, berlawanan dengan teori komunikasi politik dari Lasswell dan McLuhan.[6] Dengan memakai paradigma sosiokultural komunikasi mekanistis atau *hypodermicneedle theory* dari Lasswell dan McLuhan meniscayakan bahwa *khalayak Pasif* NU akan menerima dan mengikuti apapun pesan dari komunikator NU yang dalam hal politik mayoritas mendukung dan menjadi anggota PKB. Artinya, pesan politik apapun yang disampaikan oleh PKB pada khalayak NU, pasti menimbulkan efek yang positif berupa dukungan yang sangat besar terhadap suara PKB di Pemilu dan menjadi partai pemenang.

Menariknya, teori model komunikasi politik mekanistis yang menyatakan *khalayak pasif* yang selama ini dipegang untuk menggambarkan warga NU, perlu dikoreksi. Perubahan sosial yang terjadi telah mengubah ketradisionalan paradigma para *Nahdliyyin* menjadi model *active recipient* atau paradigma sosiokultural interaksionisme. Model ini dikembangkan oleh Lee Thayer,[7] R.J. Ravault,[8] Andi Faisal Bakti,[9] Walter Lippmann dan John Dewey. Mereka berpendapat bahwa berdasarkan paradigma interaksionisme, konstituen NU telah beralih dari pemilih tradisional menjadi pemilih rasional. Pemilih rasional adalah orang yang menentukan pilihan politiknya berdasarkan perhitungan untung dan rugi. Pemilih rasional

---

[5]Faisal Ismail, *Dilema Nahdlatul Ulama di Tengah Badai Pragmatisme Politik,* 194.

[6] Marshal McLuhan, *Understanding Media:The extension of Man* (New York. McGraw-Hill book Company, 1964).

[7]Lihat Lee Thayer, *Communication and Communication System, in Organization, Management, and interpersonal Relations* (Homewood, III: Ricard Irwing, Inc, 1968); Lee Thayer, *on Communication: Essay in Understanding* (Norwood, Ner Jersey: Ablex Publishing Company, 1987)

[8]R.J. Revault, "Some Possible Economic Dysfuncition of The Anglo-America Practice of International Communications" *(A Theoretical Approach)* (Iowa: Ph. D Dissertations, The University of Lowa, 1980); R.J. Ravult, "Down to Earth Communication: From Space Technologies and Global Economic to … Petty Humans and Their Parochial Culters!" dalam *Canadian Journal of Communication,* Vol. 17 (1992), 531-543.

[9]Andi Faisal Bakti, *Communication and Family Planning in Islam in Indonesia; South Sulawesi Muslim Perceptions of a Global Development Program* (Jakarta: INIS, 2004), 41.

akan memilih partai politik yang menurut perhitungan pribadinya akan membawa keuntungan baginya di masa depan, apa pun bentuk keuntungan itu, terlepas dari kharismatik atau budaya asal *nunut* (ikut-ikutan, tanpa sikap kritis). Lebih jauh bisa digambarkan peranan penting komunikasi politik dalam memelihara dan meningkatkan kualitas kehandalan suatu sistem politik yang sudah mapan.

Berkembangnya paradigma komunikasi politik di atas, tidak dapat dilepaskan dari perkembangan demokrasi dan kebebasan informasi *(freedom of information)* yang meliputi kebebasan mengeluarkan pendapat *(freedom of expression)* dan kebebesan pers *(freedom of the press),* sebagai hak asasi manusia. Telah dikemukakan bahwa demokrasi adalah sebuah bentuk sistem politik suatu negara dan juga budaya politik suatu bangsa.[10] Dengan kata lain, komunikasi politik menyambungkan semua bagian dari sistem politik dan juga masa kini dengan masa lampau, sehingga dengan demikian aspirasi dan kepentingan dikonversikan menjadi berbagai kebijakan.

Pengertian dan pemahaman demokrasi memang luas dan sangat beragam. Justru itu banyak model demokrasi yang sudah diterapkan oleh berbagai negara di dunia ini karena memang ciri dan model demokrasi "tidak universal."Demokrasi sebagai sistem dan budaya politik serta komunikasi politik yang menyertainya ternyata tidak sama di semua negara. Tidak ada pelaksanaan demokrasi dan komunikasi politik yang berlaku secara universal, karena konsepsi demokrasi itu memang sangat kompleks dan masih terdapat konflik konsepsi.[11]

Menurut Andi Faisal Bakti,[12]makna umum demokrasi adalah

---

[10]Andi Faisal Bakti, "Demokrasi, Tata Kelola Pemerintahan, dan Masyarakat Madani di Indonesia" dalam Andi Faisal Bakti, dkk., Eds. *Literasi Politik dan Konsolidasi Demokrasi* (Ciputat: Churia Press, 2012), 2. "Namun, menurut Bakti, yang menjadi masalah adalah bagaimana cara kita mencapai makna umum dan inti itu. Selama ini yang dipahami adalah dengan cara pemilihan umum. Siapa yang mendapatkan suara terbanyak, maka dialah yang diangkat menjadi pemimpin. Upaya yang dilakukan seseorang agar bisa mendapatkan suara terbanyak tentu perlu perjuangan. Idealnya adalah konstituen mengenal dan meneliti benar siapa calon pemimpin yang akan dipilihnya."

[11]Anwar Arifin, *Komunikasi Politik Filsafat-Paradigma-Teori-Tujuan-Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 243.

[12]Secara harfiah, makna demokrasi terambil dari kata Yunani: *demos* (rakyat) dan *kratos* (kekuasaan). Istilah ini muncul sejak abad ke-5 SM, sebagai reaksi terhadap perlakuan buruk sistem monarki dan otoriter zaman Yunani kuno. Warga negaranya kemudian membentuk majelis rakyat, yaitu lembaga pembuat hukum,

kepemimpinan dan kedaulatan dan jujur itu. Inti dari pada demokrasi itu adalah kemampuan rakyat melakukan negosiasi sejajar dengan pihak pemimpin, terutama pihak eksekutif. Dalam upaya melakukan negosiasi untuk memengaruhi kebijakan publik, terutama dalam pembuatan undang-undang dan peraturan lainnya oleh pemerintah dan parlemen, maka partai politik berjuang memperoleh kekuasaan melalui pemilihan umum. Hal ini juga disampaikan oleh Budiharjo.[13]

Partai politik merupakan salah satu perjuangan institusi inti dari pelaksanaan demokrasi modern. Demokrasi modern mengandaikan sebuah sistem yang disebut keterwakilan *(representativeness),* baik keterwakilan dalam lembaga formal kenegaraan seperti lembaga legislatif maupun keterwakilan aspirasi masyarakat dalam institusi kepartaian. Berbeda dengan demokrasi langsung di masa Yunani Kuno, demokrasi modern dengan sebagai demokrasi tidak langsung membutuhkan media penyampai pesan politik kepada negara (pemerintah) yang biasa disebut partai politik dan keberadaannya diatur dalam konstitusi negara modern.[14] Sehubungan dengan itu komunikasi politik, menurut Anwar Arifin[15] berkaitan juga dengan partai politik, karena partai politik di negara demokrasi menyelenggarakan fungsi sebagai sarana komunikasi politik. Selain itu partai politik juga berfungsi sebagai sarana sosialisasi politik dan rekrutmen politik. Sedang dalam aplikasi dan proses sosialisai politik dan rekrutmen politik tergantung pada komunikasi politik. Justru itu komunikasi politik menyentuh semua aspek sistem politik. Aktivitas partai politik yang pada umumnya adalah: pemikiran politik, pembicaraan politik, dan tindakan politik. Sedangkan partai politik

---

sekaligus sebagai lembaga pemerintahan dan pengadilan. Namun, belum ada pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Bentuknya masih sederhana, kendati sudah merupakan langkah awai ke arah pelaksanaan kedaulatan rakyat. Hal ini dimungkinkan karena penduduk kota Yunani waktu itu baru sekitar 10.000 orang, apalagi perempuan dan anak-anak tidak ikut dalam pembentukan itu. Andi Faisal Bakti, "Demokrasi, Tata Kelola Pemerintahan, dan Masyarakat Madani di Indonesia" dalam Andi Faisal Bakti, dkk., Eds. *Literasi Politik dan Konsolidasi Demokrasi,* 5. Lihat Anwar Arifin, *Komunikasi Politik Filsafat-Paradigma-Teori-Tujuan-Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia,* 33.

[13]Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), 406.

[14]Koirudin, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi: Menakar Kinerja Partai Politik Era Transisi di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 1.

[15]Anwar Arifin, *Komunikasi Politik Filsafat-Paradigma-Teori-Tujuan-Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia,* 28.

menjadi jembatan arus informasi timbal balik dari "mereka yang memerintah" *(the rulers)* dengan "mereka yang diperintah" *(the ruled)*. Dalam menjalankan fungsi itulah maka partai politik dapat menjadi bursa ide-ide *(clearing house of ideas)* yang hidup dan dinamis.[16]

Sigmun Neumann[17] merumuskan bahwa partai politik adalah organisasi artikulatif yang terdiri atas pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat yaitu yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat dengan beberapa kelompok lain yang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Sejalan dengan itu Ichlasul Amal[18] menulis bahwa partai politik merupakan suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol atau memengaruhi tindakan-tindakan pemerintah.

Menjelang Pemilu 1999 tak kurang dari 141 partai telah didaftarkan di Departemen Kehakiman. Sebanyak 106 di antaranya kemudian mendaftar ke Panitia Persiapan Pembentukan Komisi Pemilihan Umum (P3KPU) untuk menjadi kontestan Pemilu 1999. Namun, pada tahap seleksi berikutnya, hanya 60 partai yang memenuhi syarat untuk diverifikasi. Dari jumlah itu, Panitia P3KPU memutuskan hanya 48 partai politik yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 1999.[19] Tentu saja, lahirnya banyak partai tersebut, didorong oleh perubahan komunikasi politik[20] yang semula searah dari

---

[16]Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 406. Aspirasi rakyat berupa tuntutan dan kepentingan yang beragam yang disampaikan dalam berbagai cara, ditampung oleh partai politik, kemudian diolah dan dirumuskan sehingga bisa diteruskan kepada pemerintah dan pembuat kebijakan publik lainnya, dalam bentuk tuntutan atau usul kebijakan umum *(public policy)*. Proses merumuskan kepentingankepentingan rakyat itu dinamakan "perumusan kepentingan" atau "artikulasi kepentingan" *(interest articulation)*. Sedang proses menggabungkan menjadi satu berbagai macam tuntutan dari berbagai kelompok tentang hal yang relatif sama, dinamakan "agregasi kepentingan" *(interest aggregation)* atau "penggabungan kepentingan".

[17]Sigmun Neumann "Ke Arah Suatu Studi Perbandingan Partai-Partai Politik" dalam Miriam Budiharjo (ed). *Partisipasi Politik Politik dan Partai Politik-Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Gramedia, 1982), 61.

[18]Ichlasul Amal. (ed), Teori-Teori *Muktahir Partai Politik* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1988), xi.

[19]Salomo Simanungkalit (Ed), *Indonesia Dalam Krisis. 1997-2002* (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2002), 185-189.

[20]Komunikasi politik merupakan kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Komunikasi politik yang

atas ke bawah mengikuti suara rezim dan berubah ke komunikasi politik yang sejajar antar pelaku komunikasi: elit kekuasaan, media dan masyarakat warga negara. Bahkan persaingan perebutan kekuasaan di kalangan elit kepemimpinan politik Muslim memberikan sumbangan berarti atas terjadinya fragmentasi politik dan sosial lebih luas di kalangan partai-partai berorientasi Islam.[21]

PKB sebagai salah satu partai yang lahir di era Reformasi.[22] Meskipun PKB lahir dari organisasi keagamaan Islam terbesar, kalangan NU, namun Islam yang dianut PKB adalah Islam moderat dan inklusif yang kemudian mendasari platform PKB sebagai partai terbuka.[23] Menurut Yudi Latif,[24] keberadaan PKB merupakan kelanjutan dari tradisi pemikiran dan gerakan NU yang berpijak pada keislaman yang moderat dan keindonesiaan yang multikultural. Sebagaimana NU, pandangan keislaman dan kebangsaan PKB adalah khas ulama-ulama *ahlusunnah wa al-jama'ah* (aswaja) yang memelihara hal-hal lama yang baik dan menerima hal-hal baru yang lebih baik. Karakter inilah yang menjadi dasar dari tradisi politik

---

dimaksudkan dalam penelitian ini adalah komunikasi yang memiliki pengaruh aktual dan potensial mengenai pernyataan (pesan) politik atau entitas politik lainnya sebagaimana yang didefinisikan oleh Blake dan Haroldaen melalui karya mereka, "Critical Events Analysis" dalam Steven H. Chaffee, *Political Communication: Issues and Strategies for Research* v. 4 (Beverly Hills: Sage Publications, 1975).

[21]Azyumardi Azra, "Islam Politik pada Masa Pasca Soeharto," dalam A.M. Fatwa, Satu Islam Multi Partai: *Membangun Integritas Di Tengah Pluralitas* (Bandung: Mizan, 2000), 16.

[22]Tri Ratnawati, "Beberapa Masalah Pelembagaan Partai Kebangkitan Bangsa dan Alternatif Solusi," dalam Lili Romli (Ed), *Pelembagaan Partai Politik Pasca-Orde Baru: Studi Kasus Partai Golkar, PKB, PBB, PBR dan PDS (*Jakarta: P2P LIPI, 2008), 72. Lihat Faisal Ismail, *Dilema NU di Tenggah Badai Pragmatisme Politik* (Jakarta: PT.Mitra Cendikia, 2004), 49. Asep Saeful Muhtadi *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif* (Jakarta: Penerbit Pustaka LP3ES, 2004), 227.

[23]Tri Ratnawati, "Beberapa Masalah Pelembagaan Partai Kebangkitan Bangsa dan Alternatif Solusi," dalam Lili Romli (Ed), *Pelembagaan Partai Politik Pasca-Orde Baru: Studi Kasus Partai Golkar, PKB, PBB, PBR dan PDS (*Jakarta: P2P LIPI, 2008), 72. Lihat Faisal Ismail, *Dilema NU di Tenggah Badai Pragmatisme Politik* (Jakarta: PT.Mitra Cendikia, 2004), 49. Asep Saeful Muhtadi *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif* (Jakarta: Penerbit Pustaka LP3ES, 2004), 227.

[24]Yudi Latif, "Transformasi PKB: Dari Jaringan Kultural ke Jaringan Fungsional," dalam Yenny Zanuba Wahid, dkk (Ed), *9 Tahun PKB, Kritik dan Harapan,* 145. Lihat Greg Fealy dan Greg Barton. (ed), *Tradisionalisme Radikal Persinggungan Nahdlatu Ulama-Negara* (Yogyakarta: LKis, 1996), 130.

aswaja, cenderung terbuka pada kompromi dan konsensus, tidak ekstrim, bersikap *tawazun* (keseimbagan)*, tasamuh* (toleran) dan *tawasuṭ* (moderat), terhadap perbedaan pandangan dan sikap politik.

Di samping itu, PKB memiliki prinsip dasar Islam tentang politik *(as-siyāsah ad-dunya)* adalah mewujudkan keadilan dan kemakmuran rakyat secara umum (*al-maslahah al-'ammah*), karena tujuan fundamental dari diturunkannya agama berikut syariatnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemuliaan martabat manusia. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, dalam terminologi fiqih dikenal istilah "*as-siyāsah as-shar'iyyah,"* yaitu teori yang menyatakan bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan umum, seorang pemimpin atau penguasa (*imam*) bisa mengambil atau memutuskan suatu kebijakan khusus untuk mewujudkan tujuan itu, meskipun hal tersebut tidak ditetapkan secara jelas oleh *nash* atau al-Quran dan Hadis Nabi.[25]

Menurut Muhaimin[26] teori "*as-siyāsah as-shar'iyyah,"* memberi ruang luas kepada para pemimpin politik untuk melakukan *ijtihād* dalam rangka mewujudkan tujuan partai yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat. Kalau tujuan itu bisa direalisasikan sesuai dengan harapan masyarakat, maka agama bukan hanya menunjukan relevansinya dalam kehidupan, tetapi juga menjadi semakin jelas bahwa Islam diturunkan untuk memuliakan anak cucu Adam dalam situasi yang adil dan makmur.

Para sosiolog agama menyatakan agama[27] memiliki dua peran sekaligus di masyarakat. *Pertama*, agama mempunyai peran mempersatukan, mengikat dan melestarikan nilai-nilai sosial, memelihara dan menstabilkan masyarakat. *Kedua*, selain agama

---

[25]Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *at-Turuq al- Ḥukmiyyah* (Kairo: al-Muassasah al-'Arabiyyah, 1961), 15.

[26]Bagi PKB, dengan adanya teori *"as-siyāsah as-shar'iyyah"* yang menjadi rujukan kiai-kiai ahli fiqih pesantren juga menjadi dasar bagi kosmopolitanisme dan keterbukaan ajaran Islam dalam hubungannya dengan berbagai sendi dan persoalan kehidupan, termasuk persoalan politik dalam arti luas. Dengan teori itu juga politik kiai yang direpresentasikan oleh PKB, tanpa harus terjebak dalam formalisme syariat atau menjadi partai agama, bisa tetap berada dalam trayek dan misi Islam yang bersifat universal. A. Muhaimin Iskandar, *Melampaui Demokrasi Merawat Bangsa dengan Visi Ulama Refleksi Sewindu Partai Kebangkitan Bangsa* (Jogjakarta: DPP PKB dan Kajian dan Layanan Informasi untuk Kedaulatan Rakyat (KLIK.R), 2006), 113.

[27]Elizabet K. Nottingham, *Agama dan Masyarakat Suatu Pengantar Sosiologi Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 42-48.

berfungsi sebagai pemersatu dalam masyarakat yang begitu kuat, agama bisa memerankan sebagai kekuatan yang pemecah belah. mencerai-beraikan dan menghancurkan potensi yang ada di masyarakat. Pengamatan para sosiolog agama dalam melihat perilaku keagamaan seseorang, komunitas atau organisasi di atas memang tidak bisa disalahkan, karena memang kenyataannya agama yang tumbuh subur dan berkembang di masyarakat diwarnai oleh konsensus dan ketegangan, integrasi dan konflik. Kanalisasi dari yang jelas-jelas berbeda pada wilayah cabang perilaku keagamaan inilah yang penang didialogkan secara dewasa, arif dan tidak anarkis, sehingga keragamaan bukan sebagai awai terjadinya konflik, tapi justru keragamaan paham, wacana atau tafsir atas nilai-nilai agama menjadi pintu terwujudnya konsensus, kebersamaan dan kedamaian. Dalam praktik nilai-nilai keagamaan ini, suasana integrasi, keterpaduan dan stabilitas masyarakat merupakan persoalan mendasar yang harus dijaga, agar keberadaan agama atau aktifitas keagamaan tidak mendapat citra negatif.

Dalam pandangan yang ada selama ini, memang sulit untuk mengingkari bahwa PKB adalah 'anak kandung' NU.[28] Fakta sejarah ini tidak dapat dipungkiri sampai kapan pun, bahwa PKB merupakan satu-satunya "anak kandung" NU yang memiliki ideologi yang sama dalam konteks keagamaan, kenegaraan, kebangsaan dan kemasyarakatan. Garis besar perjuangan partai ini tertuang secara jelas dalam visi, misi dan tujuan sebagaimana dapatdilihat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.[29]

Namun, ini tidak berarti semua warga NU memberikan suara mereka kepada PKB dalam pemilu. Khususnya pada pemilu 2009, pemilih berlatar belakang NU sekitar 21 persen, dan jika mereka memilih partai terkait NU, seperti PKB, PPP, dan PKNU seharusnya total suara yang diperoleh sekitar 21 persen. Namun yang terjadi, PPP hanya memperoleh 5, 32 persen, PKB 4, 94 persen, dan PKNU 1, 47 persen. Totalnya hanya 11 persen. Berarti, ada separuh pemilih NU yang menyalurkan aspirasi politiknya ke partai politik lain, seperti

---

[28]Tim Kompas, *Partai-partai Politik Indonesia, Ideologi dan Program 2004-2009 (*Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004), 255. Lihat juga "Pasang Surut Hubungan NU dengan Parpol," *Kompas,* 24 Maret 2010, 5.

[29]AD/ART PKB Hasil Muktamar Luar Biasa Partai Kebangkitan Bangsa I di Ancol (Jakarta: Sekretariat Jenderal DPP PKB, 2008), 12-17.

Partai Golkar, PDI-P, dan Partai Demokrat.[30] Hal ini berbeda jauh dengan perolehan suara PKB Pemilu 2004 sebesar 11.965.622 (10.64%), dan berada di urutan ketiga, setelah Partai Golkar dengan 24.296.862 (21.60%), dan PDI-P dengan 20.832.016 (18.52%). Sedangkan untuk perolehan kursi di DPR, PKB menempati urutan ke lima dengan 52 kursi (9.45%).[31] Jumlah itu mengalami penurunan sekitar 1.347.418 suara (10%), dibandingkan Pemilu 1999. Sebagai pemenang Pemilu 1999 ini adalah PDI-P yang meraih 35.689.073 suara atau 33,74 persen dengan perolehan 153 kursi. Dengan perolehan Golkar memperoleh 23.741.758 suara atau 22,44 persen, maka Golkar mendapatkan 120 kursi atau kehilangan 205 kursi dibanding Pemilu 1997. Hasil perolehan suara PKB masuk tiga besar pada Pemilu 1999 sebesar 13.336.982 suara atau 12,61 persen, dan mendapatkan 51 kursi.[32] PKB dapat dikatakan sebagai pemenang utama di antara partai-partai baru, sebab dua partai di atasnya adalah partai lama.

Demikian pula halnya dengan Gus Dur sebagai tokoh yang membidani lahirnya PKB. Di antara keduanya seringkali 'identik' bahkan ada yang menyebutkan Gus Dur adalah 'roh' PKB. Hampir dalam setiap kampanye 1999 yang dilakukannya, PKB lebih mengedepankan Gus Dur ketimbang ketua umumnya sendiri, Matori Abdul Jalil. Atau, sekurang-kurangnya, Matori didampingi Wahid. Dalam kampanye yang disiarkan secara berulang-ulang di layar televisi, misalnya, dengan semboyan utamanya "maju tak gentar, membela yang benar," Gus Dur terlihat lebih dominan daripada Matori.[33]

---

[30]"Pasang Surut Hubungan NU dengan Parpol," *Kompas*, 24 Maret 2010, 5.

[31]Koirudin, *Menuju Partai Advokasi* (Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara), 85. Perolehan kursi PKB tertinggi tetap dipegang Jawa Timur dengan 28 kursi, kemudian Jawa Tengah 13 Kursi, Jabar 3 Kursi, Banten 2 Kursi, DIY 1 kursi. Kemudian daerah luar Jawa yang mendapat 1 kursi adalah Riau, Lampung, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan dan Papua (kebangkitanbangsa.org, 3 Mei 2004).

[32]Saifullah Ma'shum, *Lima Tahun FKB DPR-RI Menghadapi Diktator Mayoritas di Parlemen* (Jakarta: Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR RI, 2004), 13. Pemilu ini dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 1999, diikuti oleh 48 partai politik. Dengan demikian perolehan suara yang diraih PKB sebesar 12,61 % tersebut bisa dipastikan berasal dari pendukung setia NU dan pendukung fanatik dari para kiai ternama mereka yang menjadi deklarator PKB.

[33]Asep Saeful Muhtadi *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif,* 229.

Seperti dikatakan Rush dan Althoff, [34] sosok figur memainkan peranan yang amat penting di dalam suatu sistem politik karena menjadi bagian yang menentukan dari proses-proses sosialisasi politik, partisipasi politik, dan rekrutmen politik, maka dalam partai politik semacam PKB pemeranan komunikasi politik dapat diduga dilakukan oleh pemimpin kharismatik dengan kekhasan tertentu yang dimilikinya. Seperti juga diungkapkan oleh H.Z. Arifin Junaidi:

Kelahiran dan kehadiran PKB dalam kancah kehidupan politik tak dapat dipisahkan dari sosok Gus Dur. Gagasan-gagasannya mewarnai secara dominan seluruh dokumen historis PKB. Gus Dur juga yang menentukan nama-nama yang masuk dalam tim yang ditugasi PBNU untuk membentuk partai politik. Gus Dur pula yang menentukan poin-poin penting dalam pokok-pokok pikiran NU mengenai reformasi politik, *mabda' siyasī y*, hubungan partai politik dengan NU, AD/ART, naskah deklarasi dan lambang PKB. Gus Dur pula yang menentukan sebagian besar nama-nama yang masuk dalam kepengurusan DPP PKB hasil deklarasi. Hari dan tanggal deklarasi pun Gus Dur yang menentukan. Nama-nama yang menjadi deklarator pun Gus Dur yang menentukan.[35]

Jika NU cenderung mementingkan tradisi dan tokoh ketimbang sistem atau organisasi, [36] demikian pula halnya dengan PKB yang mengikuti kecenderungan itu. Akibatnya upaya pelembagaan PKB sebagai partai modern dan demokratis yang tidak tergantung pada satu figur tertentu menghadapi sejumlah kendala.[37] Hal ini dibuktikan dari sering munculnya konflik internal di dalam tubuh PKB selama hampir satu dasawarsa partai ini berdiri. Tiga di antara konflik beberapa konflik besar adalah: *pertama*, konflik antara Gus Dur (Ketua Dewan Syuro PKB) - Alwi Shihab (Ketua Dewan Tanfidz PKB) dengan Matori Abdul Djalil (Mantan Ketua Dewan Tanfidz PKB), tahun 2001; *kedua,* konflik Gus Dur - Muhaimin Iskandar (Ketua Dewan Tanfidz PKB) dengan Alwi Shihab - Saifullah Yusuf (Sekjen PKB), (2005);

---

[34]Michael Rush dan Phillip Althof, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Rajawali Press: 1997), 22- 24.

[35]H.Z. Arifin Junaidi, "Belajar dari Sejarah PKB," dalam Yenny Zanuba Wahid, dkk (Ed), *9 Tahun PKB, Kritik dan Harapan,* 32.

[36]Kang Young Soon, *Antara Tradisi dan Konflik: Kepolitikan Nahdlatul Ulama* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2008), 14.

[37]Tri Ratnawati, "Beberapa Masalah Pelembagaan Partai Kebangkitan Bangsa dan Alternatif Solusi," dalam Lili Romli (Ed), *9 Tahun PKB, Kritik dan Harapan,* 75.

dan *ketiga*, Gus Dur - Yenny Wahid (Sekjen PKB) dengan Muhaimin Iskandar - Lukman Edy (2008).[38]

Setelah tiga kali melakukan pemilu sejak Era Reformasi, yakni Pemilu 1999, 2004 dan 2009 serta terjadinya tiga konflik internal dan penurunan suara di tingkat nasional yang cukup besar sehingga melemahkan kohesivitas atau kesolidan partai, adakah perubahan proses komunikasi politik yang terjadi dalam internal PKB. Konflik yang terjadi di internal PKB ini lagi-lagi menjadi konsumsi publik di media massa. Menurut pengamat politik dari Indo Barometer Muhammad Qodari, salah satu kekeliruan yang dilakukan pimpinan PKB yang mengakibatkan perolehan suaranya menurun karena pengurus PKB tidak fokus mengakomodasi aspirasi kaum Nahdliyin, tapi banyak mengurusi berbagai hal. Karena itu, aspirasi kaum Nahdliyin yang merasa tidak tersalurkan sehingga disalurkan ke partai lainnya.[39]

Hal ini mengindikasikan bahwa komunikasi yang diterapkan PKB tidak terkelola dengan baik. Salah satu tujuan komunikasi politik adalah membentuk citra politik yang baik bagi khalayak.[40] Citra seseorang yang terkait dengan politik yang terjalin melalui pikiran, perasaan, dan kesucian subjektif akan memberi kepuasan baginya, dan memiliki paling sedikit tiga kegunaan. *Pertama*, memberi pemahaman tentang peristiwa politik tertentu. *Kedua*, kesukaan atau ketidaksukaan umum kepada citra seseorang tentang politik menyajikan dasar untuk menilai objek politik. *Ketiga*, citra diri seseorang dalam cara menghubungkan diri dengan orang lain.[41]

---

[38]Ainur Rofieq, Fungsi Rekrutmen Politik Pada Calon Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 2009 (Bekasi: Jurnal Penerbit Universitas Islam 45), 68.

[39] Mustafa Helmy, "Menyatukan Suara Nahdliyin." Dalam Risalah Nahdlatul Ulama Edisi 18 / TAHUN III / 1431 H / 2010. 8-9.

[40]Berdasarakan penjelasan di atas, citra politik dapat dirumuskan sebagai gambaran tentang politik (kekuasaan, kewenangan, otoritas, konflik, dan konsensus) yang memiliki makna kendatipun tidak selamanya sesuai dengan realitas politik yang sebenarnya. Citra politik tersusun melalui kepercayaan, nilai, dan pengharapan dalam bentuk pendapat pribadi yang selanjutnya dapat berkembang menjadi pendapat umum. Citra politik itu terbentuk berdasarkan informasi yang kita terima, baik langsung maupun melalui media politik, termasuk media massa yang bekerja untuk menyampaikan pesan politik yang umum dan aktual. Ardial, *Komunikasi Politik*, 44-45.

[41]Dan Nimmo, *Komunikasi Politik (Khalayak dan Efek).* Terjemahan Tjun Sujaman (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 6-7.

Berarti citra politik seseorang akan membantu dalam pemahaman, penilaian, dan pengindetifikasian peristiwa, gagasan, tujuan, atau pemimpin politik, citra politik juga membantu seseorang dalam memberikan alasan yang dapat diterima secara subjektif tentang mengapa segala sesuatu hadir sebagaimana tampaknya tentang referensi politik. Citra politik akan menjadi perhatian penting jika seseorang menganggap bahwa dalam memenuhi kebutuhan fisik, sosial, dan psikologis, hanya dapat diatasi dan dilakukan oleh negara. Orang bertukar citra politik melalui komunikasi politik sebagai cara untuk menyelesaikan konflik dan mencari konsensus dalam upaya manusia dan masyarakat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya.[42]

Pembentukan citra politik sangat terkait dengan *sosialisasi politik*. Hal ini disebabkan karena citra politik terbentuk melalui *proses pembelajaran politik* baik secara langsung maupun melalui pengalaman empirik. Berkaitan dengan ini Arifin[43] menegaskan, citra politik mencakup tiga hal, yaitu:

1. Seluruh pengetahuan politik seseorang (*kognisi*), baik benar maupun keliru.
2. Semua referensi (afeksi) yang melekat pada tahap tertentu dari peristiwa politik yang menarik.
3. Semua pengharapan (konasi) yang dimiliki orang tentang apa yang mungkin terjadi jika ia berperilaku dengan cara berganti-ganti terhadap objek dalam situasi itu.

Melalui fenomena dan dinamika dari deskripsi di atas penulis berpendapat bahwa, komunikasi politik partai politik memengaruhi citra politik dan citra politik memengaruhi dinamika partai politik untuk mendapatkan dukungan dari konstituen. Kegagalan PKB membangun komunikasi politik yang efektif, berakibat pada citra

---

[42]Dengan demikian, pernimpin politik sangat berkepentingan dalam pembentukan citra politik melalui komunikasi politik dalam usaha menciptakan stabilitas sosial dengan memenuhi tuntutan rakyat. Misalnya, pengumuman presiden bahwa kesulitan ekonomi sudah teratasi. Pernyataan ini dengan sendirinya akan membangkitkan citra ten tang masa jabatan presiden itu perlu diperjanjang dengan memilihnya kembali dalam pernilihan umum yang akan datang. Justru itu, para politikus dan pemimpin politik membangkitkan citra yang memuaskan, supaya dukungan pendapat umum dapat diperoleh dari rakyat sebagai khalayak komunikasi politik. Ardial, *Komunikasi Politik*, 46.

[43]Anwar Arifin, *Komunikasi Politik: Paradigma-Teori-Aplikasi-Strategi & Komunikasi Politik di Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 2003), 107.

politik sehingga mengalami proses prilaku politik yang dialami pada Pemilu 2009. Dari sinilah penulis ingin melihat apakah indikasi tersebut dipengaruhi oleh faktor komunikasi sosiokultural PKB menjelang Pemilu 2009 dengan komunikasi politiknya.

B. Permasalahan

Keterbatasan ruang, waktu dan kemampuan penulis sendiri, secara alamiah membatasi objek kajian penelitian ini. Karena itu, penulis akan membahas sejauh terkait dengan identifikasi, pembatasan dan rumusan masalah seperti disebutkan berikut ini.

1. Identifikasi Masalah

Kekalahan PKB pada pemilu legislatif dan presiden tahun 2004 dan 2009 menggambarkan adanya kegagalan komunikasi politik secara sosio-kultural. Kegagalan ini menggambarkan pula kegagalan komunikasi politik mekanistik dari partai PKB, sehingga tidak maksimal dalam mendapatkan dukungan dari warga *Nahdliyyin* maupun publik dalam pemilu 2009.

2. Pembatasan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah di atas, maka permasalahan penelitian ini dibatasi sesuai dengan pertanyaan utama (*sentral question*) Bagaimana komunikasi politik PKB sebagai komunikator yang dilakukan menjelang Pemilu 2009 yang mengalami penurunan suara? Namun dikarenakan begitu luasnya batasan pembahasan tersebut, maka penulis menfokuskannya hanya dengan empat pertanyaan turunan *(minor)* sebagai batasannya, yaitu:

a. Bagaimana PKB melakukan interaksi dan sosialisasi dengan konstituen?
b. Bagaimana PKB memperkenalkan diri kepada masyarakat, figur siapa saja yang ditampilkan?
c. Isu apa saja yang diangkat, yang sifatnya merangsang emosional konstituen dalam pemilu?
d. Bagaimana PKB mengelola kesan politiknya kepada kostituen?

3. Perumusan Masalah

Dengan pembatasan masalah diharapkan penelitian ini efektif seperti dirumuskan dalam perumusan masalah. Mengapa komunikasi politik sosio-kultural PKB gagal dalam memenangkan suara mayoritas pada pemilu 2009?

C. Tujuan dan Pernyataan Penelitian

1. Tujuan

Penelitian ini bertujuan mengungkap dan mengetahui serta menganalisis komunikasi yang digunakan PKB sebagai komunikator dalam Pemilu 2009, serta upaya yang dilakukan untuk mencari, mempertahankan, dan meningkatkan dukungan politik, dengan tinjauan sosiokutural. Komponen tersebut difokuskan dengan empat tujuan, yaitu

a. Untuk mengetahui bagaimana PKB melakukan interaksi dan sosialisasi dengan konstituennya.
b. Untuk menjelaskan bagaimana PKB memperkenalkan diri dengan masyarakat, serta figur siapa saja yang ditampilkan.
c. Untuk mengetahui isu apa saja yang diangkat, yang sifatnya merangsang emosional konstituen dalam pemilu tahun 2009.
d. Untuk mengetahui bagaimana PKB mengelola kesan politiknya kepada kostituen dalam pemilu tahun 2009.

2. Pernyataan Penelitian

Pada elemen komunikator yang perlu diketahui posisinya sebagai pimpinan partai sehingga memengaruhi terhadap pengolahan pesan yang disampaikan serta program komunikasi PKB dalam Pemilu 2009. Penelitian ini ingin menunjukkan bahwa tingat keberhasilan dan kegagalan partai dalam sosialisasi politik, kampanye politik dan citra politik tidak terlepas dari peran komunikator politik yang menentukan masa depan partai.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dan pernyataan penelitian di atas, ada dua manfaat yang bisa didapat dari penelitian ini, yaitu manfaat secara teoritis dan praktis.

Secara akademis tesis ini bermanfaat untuk menambah khazanah keilmuwan di bidang komunikasi dan politik yang berkaitan dengan masalah sistem politik dan tindakan politik.

Adapun manfaat dari segi praktis adalah dalam rangka memetakan problematika yang dihadapi partai politik dalam pelaksanaan pemilu maupun kampanye sehingga dapat dirasakan langsung hasilnya oleh konstituen pendukung partai. Untuk itu penelitian yang bersifat empiris perlu terus menerus dilakukan.

Sementara manfaat praktis penelitian ini di antaranya, berfungsi sebagai: sumber bacaan bagi peminat ilmu komunikasi politik yang berkaitan dengan politik khazanah Islam dan menumbuhkan minat penelitian pada kegiatan kampanye partai politik dan pada penggunaan simbol-simbol politik.

E. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Kajian mengenai PKB telah banyak dilakukan oleh para peneliti, praktisi politik, ilmuan, maupun mahasiswa. Beberapa di antaranya memberikan sumbangan otoritatif, baik secara akademik ataupun jika dimanfaatkan untuk memahami arah perpolitikan Indonesia kontemporer. Salah satunya buku yang ditulis oleh Zainal Abidin Amir[44] berupaya melihat PKB sebagai kemunculan kembali Islam Politik dalam politik ke-Indonesiaan pasca Orde Baru. Meskipun PKB sejak awal mengklaim sebagai partai terbuka, namun beberapa ciri partai Islam dapat ditemukan seperti basis massa, pola keorganisasian dan kepemimpinan, dan simbol-simbol partai. Diskripsi mengenai hal itu diorientasikan untuk menggambarkan keragaman pola dan paradigma Islam politik pasca reformasi.

Asmawi[45] berisi tahapan pendirian PKB yang dilakukan oleh Gus Dur dan sejumlah ulama penting di NU, berikut naskah deklarasi, platform, serta visi ideologis yang menjadi landasannya. Buku ini juga memuat laporan media, artikel, polemik, dan komentar pengamat yang merespon berdirinya partai politik dari rahim NU. Kemudian disusul oleh Studi yang dilakukan oleh Asep Saeful Muhtadi,[46] merupakan kajian yang secara spesifik mengkaji komunikasi politik NU sejak tahun 1970-an-2001. Menurutnya komunikasi politik yang dijalankan NU selalu mengalami pergeseran dan perubahan bentuk sejalan dengan pasang surut kekuasaan rezim, serta antara kekuasaan radikal dan akomodatif di tubuh NU sendiri. Pasca reformasi, komunikasi politik NU semakin berjalan dengan intens yang berujung pada lahirnya PKB sebagai partai yang resmi dibentuk oleh PBNU serta beberapa partai lain yang mengklaim memiliki ikatan tertentu dengan NU. PKB sebagai partai yang baru muncul kemudian mampu menyedot

---

[44] Zainal Abidin Amir, *Peta Islam Politik Pasca Socharto* (Jakarta: LP3ES, 2003).

[45] Asmawi, *PKB: Jendela Politik Gus Dur* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1999).

[46] Asep Saeful Muhtadi *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif* (Jakarta: Penerbit Pustaka LP3ES, 2004).

perhatian jutaan pemilih. Studi ini melihat bahwa fenomena itu menunjukkan bahwa di Indonesia proses demokratisasi dan pembaharuan politik lebih dimungkinkan lahir dari gerakan sosial keagamaan daripada lembaga politik formal.

Sedangkan Khoirul Anam[47] dalam penelitiannya mengangkat isu tentang respon PKB terhadap penegakan Syaria't Islam dan kemudian membandingkannya dengan PKS. Menurutnya terdapat perbedaan yang fundamental antara garis kepartaiaan yang dipilih PKB dan PKS. PKB sejak awal memilih tidak mendukung penerapan syari'at Islam dalam wujud apapun dan mencoba mengitegrasikan nilai-nilai syari'at dengan kehidupan kebangsaan, sedangkan PKS mendukung penerapan syari'at Islam di Indonesia sesuai dengan konteks sosial dan kebutuhan masyarakatnya.

Lukman Edy[48] Edy berusaha melakukan pembacaan terhadap struktur, basis sosial, kekuatan, kelemahan, serta reformulasi PKB dimasa depan. Sebagai partai yang lahir dari tradisionalisme Islam, PKB sedapat mungkin harus melakukan universalisasi terhadap nilai-nilainya sejalan dengan tuntutan nasionalisme dan modernisasi. Modernisasi yang harus dilakukan mencakup pola kaderisasi, demokratisasi, serta penguatan ekonomi dan soliditas di tubuh partai.

Terkait dengan kajian komunikasi partai politik ini, dilakukan penelusuran tesis atau disertasi dari penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya:

Asep Saiful Muhtadi, [49] NU memiliki sistem komunikasi politik tersendiri. Komunikasi tersebut berlangsung melalui proses pemilihan, penggabungan dan pengungkapan aspirasi politik berdasarkan aturan yang telah disepakati. Komunikasi itu memiliki dua arah yakni meneruskan informasi politik dari atas ke bawah dan menyalurkan aspirasi rakyat pada penguasa.

---

[47]Khoirul Anam, "Kontroversi Penegakan Syari'at Islam di Indonesia Menurut Partai-Partai Islam; Studi Komparatif Tentang Perbedaan Konsep Penegakan Syari'at Islam di Indonesia Menurut PKB dan PKS" (Yogyakarta: Tesis Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2006).

[48] Muhammad Lukman Edy, *Reformulasi Gerakan PKB* (Yogyakarta: DPP PKB, Iskandarsyah Institute, KLIK.R, 2006).

[49]Asep Saeful Muhtadi, *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama* "*Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif*" (Jakarta: LP3ES, 2004), 270. Kajian Asep tersebut merupakan disertasi di Universitas Padjajaran Bandung.

Kang Young Soon,[50] menyimpulkan tradisi di NU cenderung identik dengan tradisi pesantren (subkultur), yang terdiri dari para *jama'ah* (organisasi perkumpulan/ kelompok kultural). Kelahiran PKB merupakan suatu formalisme pelembagaan politik warga NU. Secara kelembagaan (struktur) PKB tidak memiliki hubungan dengan NU, tetapi secara historis dan kultural PKB adalah partai warga NU.

Firdaus,[51] mengkaji komunikasi politik elite NU, bukan pada perilaku politik *an sich,* meskipun penulis sedikit menyentuh aspek perilaku politik, tetapi sekadar ditempatkan sebagai bagian komunikasi politik dengan asumsi bahwa, perubahan sikap, perilaku, tindakan dan partisipasi politik sebagai efek dari proses komunikasi politik secara intens oleh kalangan elite.

Ichwan Arifin (2008),[52] meskipun didirikan oleh PBNU, namun PKB didesain sebagai partai terbuka. Yang mana keterbukaan PKB bersifat unik karena nuansa Islam tradisional masih menyelimuti gerak langkah keseharian partai. Simbol-simbol partai, bahasa komunikasi politik dan atribut partai lainnya menegaskan bahwa keterbukaan PKB berada dalam payung tradisi NU.

Heintje Hendrik Daniel Tamburian,[53] budaya NU sangat kental dalam tubuh PKB sehingga strategi komunikasi PKB memiliki corak NU. PKB menjangkau masyarakat melalui peran para *opinion leaders* seperti kiai, tokoh adat, dan pemuka agama lainnya. Karakteristik masyarakat Indonesia yang masih tradisional memang memengaruhi strategi komunikasi PKB.

Berbeda dari penelitian di atas, studi ini menfokuskan diri pada objek penelitian yang berkaitan komunikasi politik dengan perspektif sosiokultural disiplin ilmu komunikasi yang ada di internal PKB sebagai komunikator politik. Oleh karena itu penelitian ini lebih mengedepankan aspek komunikator dengan pendekatan interaksi simbolik dan konstruksi sosial. Interaksi itu sendiri membutuhkan

---

[50]Kang Young Soon, "Antara Tradisi dan Konflik: Kepolitikan Nahdlatul Ulama, 1984-199" (Jakarta: Disertasi, Penerbit Universitas Indonesia, 2008).

[51]Firdaus, "Komunikasi Politik Elit Nahdlatul Ulama Pasca Orde Baru" (Jakarta: Disertasi Pada Nama Kampus UIN Syarif Hidayatullah 2008).

[52]IChwan Arifin, *Kiai dan Politik Studi Kasus Perilaku Politik Kiai dalam Konflik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pasca Muktamar II Semarang* (Semarang, Tesis yang tidak diterbitkan pada kampus Universitas Diponegoro, 2008), 149-150.

[53]Heintje Hendrik Daniel Tamburian, "Strategi Komunikasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dalam Memenangi Pemilu" (Depok, Tesis pada kampus Universitas Indonesia, 2004), 130-131.

simbol-simbol tertentu. Simbol itu biasanya disepakati bersama dalam skala kecil pun skala besar. Simbol-misalnya bahasa, tulisan dan simbol lainnya yang dipakai-bersifat dinamis dan unik.

Sedangkan konstruksi sosial menurut pakar sosiolog Peter L. Berger dan Thomas Luckman dalam buku[54] menggambarkan proses sosial melalui tindakan dan interaksinya, dimana individu menciptakan secara terus menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif.

F. Landasan Teori

Landasan teori paradigma interaksional yang penulis jadikan acuan dalam penelitian ini, mengikuti landasan teori yang telah dibangun oleh George Herbert Mead, dapat dipahami karena paradigma atau perspektif ini berkembang secara tidak langsung dari cabang sosiologi yang dikenal sebagai *Interaksionalisme Simbolik (IS).* Paradigma interaksional yang memberi penekanan pada faktor *manusiawi,* sangat tepat dan relevan diterapkan dalam komunikasi politik dan demokratis. Konsep demokrasi yang memandang manusia (komunikator) sebagai makhluk rasional dan menunjang hak-hak asasi manusia serta mengembangkan prinsip-prinsi *egaliter* dan *populis* sangat sesuai dengan paradigma interaksional. Komunikasi politik yang menghendaki adanya "partisipasi politik" yang tinggi misalnya, sudah seyogianya menerapkan komunikasi yang bersifat dialogis.[55]

Penelitian ini juga menggunakan landasan teori konstruksi sosial mengenai realitas *(the social construction of reality)*, yang mencoba menyelidiki bagaimana pengetahuan manusia dihubungkan

---

[54] Proses penyusunan buku oleh kedua sosiolog ini berlangsung kurang lebih 4 tahun dalam rentang waktu 1962-1966. Bukunya pertama kali terbit tahun 1966. Lihat, Peter L Berger and Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality A Treatise in the Sociology of Knowledge* (New York: 1966). Sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa termasuk ke dalam Bahasa Indonesia. Lihat Peter L Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial atas Kenyataan* Terj. Hasan Basari (Jakarta: LP3S, 2012), 28.

[55]Dalam komunikasi *dialogis,* konteks kultural menempati posisi yang penting. "komunikasi tidaklah bebas nilai" sehingga dengan paradigma ini, kita dapat membicarakan komunikasi politik yang khas Indonesia. Anwar Arifin, *Komunikasi Politik: Filsafat-Paradigma-Teori-Aplikasi-Strategi & Komunikasi Politik di Indonesia* (Jakarta: Graha Ilmu, 2011), 98. Lihat Anwar Arifin, *Komunikasi Politik dan Pers Pancasila* (Jakarta: Media Sejahtera, 1992). Dengan kata lain, komunikasi politik yang dimaksud ialah *musyawarah* dan *mufakat,* dapat dibahas dari perspektif interaksional.

melalui interaksi sosial.[56] Dengan kata lain komunikator memahami diri mereka sebagai individu dengan berbagai perbedaan yang ada dan bagaimana perbedaan itu dikonstruksikan atau dibentuk secara sosial dan bukan ditentukan oleh mekanisme biologi dan psikologi yang bersifat tetap. Interaksi akan membentuk rasa diri *(sense of self)* yang menyatu, namun fleksibel. Berkaitan mengenai simbol harus diawali dengan konsep 'tanda' (*sign*). Tanda dapat disebut sebagai unsur yang digunakan untuk mewakili unsur lain. Dari tanda dan simbol tersebut, kita memberikan makna. Singkatnya selain interaksi simbolik teori yang terkait dengan diri *(self),* yaitu konstruksi sosial diri, kontruksi sosial emosi, dan pembawaan diri.

Sedangkan bagan metodologi di samping ini merupakan interprestasi dari teori yang disebutkan di atas. Kemudian hasil dari teori menghasilkan pengamatan objek penelitian yang menjadi acuan dalam menganalisis data-data. Adapun data yang ditemui di lapangan ini berkaitan dengan tradisi sosiokultural politik NU dalam studi kasus dinamika politik PKB menjelang dan setelah Pemilu 2009.[57]

[56]Peter L Berger and Thomas Luckmann*, Tafsir Sosial atas Kenyataan*, 28.

[57]Sumber berdasarkan data DPP PKB dan Asep Saiful Muhtadi. http://www.pkb.or.id/ dan Asep Saeful Muhtadi *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif* (Jakarta: Penerbit Pustaka LP3ES, 2004).

Bagan 01.01
Metodologi Penelitian

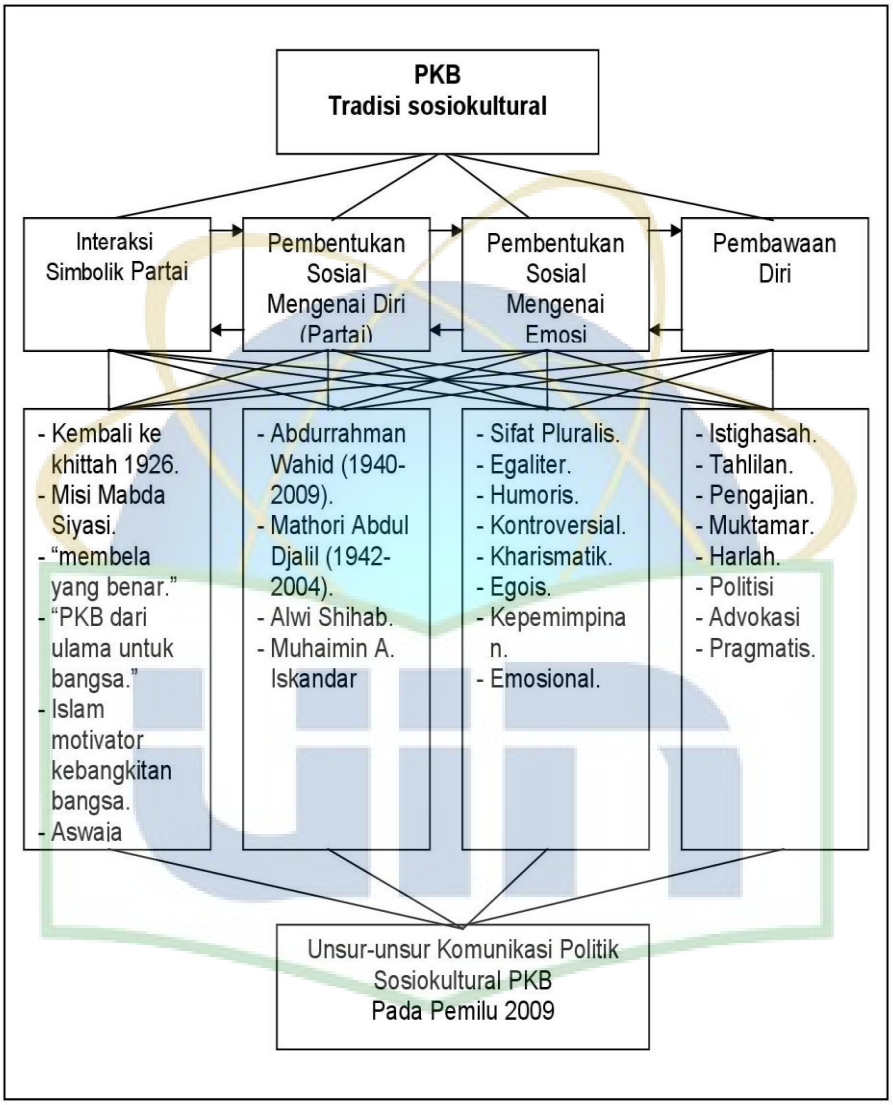

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kualitatif.[58] Pada sisi lain dalam penelitian ini data-data yang diperlukan berupa ungkapan-ungkapan, pernyataan-pernyataan, catatan-catatan, aktivitas, program, tingkah laku orang yang terobservasi dan berbagai simbol yang bermakna dan dapat diinterpretasikan.[59] Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, akan terungkap secara mendalam dan komprehensif tentang makna, kerangka berpikir filosofis, norma, peran dan peraturan yang ada pada objek penelitian yakni PKB sebagai komunikator.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus (*case study*).[60] Penelitian studi kasus adalah suatu penelitian empiris yang menyelidiki fenomena di dalam kehidupan nyata bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tidak tampak tegas.[61] Sedangkan teknik penelitian yang digunakan

---

[58]Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Di mana peneliti sebagai instrument kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara Triangulasi analisis data bersifat induktif hasil penelitiannya lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian dilakukan pada objek yang almiyah yaitu objek yang berkembang apa adanya. Dalam penelitian ini instrumennya orang (*Human Instrument*) yaitu peneliti itu sendiri. Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2007), 9.

[59]Robert Bodgan dan Steven J. Taylor, *Kualitatif Dasar-dasar Penelitian* (Surabaya:Usaha Nasional, 1993), 30.

[60]Studi Kasus adalah uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program atau suatu situasi sosial. Penelitian *case study* atau penelitian lapangan (*field study*) dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah keadaan dan posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya (*given*). Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi atau masyarakat. Penelitian *case study* merupakan studi mendalam mengenai unit sosial tertentu dan hasil penelitian tersebut memberikan gambaran luas serta mendalam mengenai unit sosial dalam hal ini fokus penelitian di partai PKB menjelang Pemilu 2009. Subjek yang diteliti relatif terbatas, namun variabel-variabel dan fokus yang diteliti sangat luas dimensinya Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 201.

[61]Fenomena yang dimaksud adalah dinamika PKB dalam keterlibatan Pemilu 2009. Sedangkan konteksnya bentuk-bentuk komunikasi sosiokultural PKB

melalui pendekatan fenomenologi sering disebut sebagai paradigma interpretif (*interpretive paradigm*)[62] dengan sampling teori atau *purposeful sampling*, dalam hal ini PKB sebagai komunikator dapat dilihat dengan konsep interaksi simbolik, konstruksi sosial diri, kontruksi sosial emosi, dan pembawaan diri.

2. Sumber data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data primer penelitian ini bersumber dari data-data yang diperoleh langsung dari lapangan baik dalam bentuk wawancara dengan pengurus dan fungsionaris DPP PKB,[63] buku-buku terbitan Lembaga Pemenangan Pemilu Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (LPP DPP PKB), dan album.

Sedangkan sumber sekunder[64] didapat dari informasi cetak, catatan pengamatan, data dari buku, jurnal ilmiah, pelbagai jenis materi baik pustaka ataupun audiovisual, data dari halaman web (internet), *slide* hasil penelitian, rekaman video dan audio baik secara langsung (*off-air*) yaitu direkam ketika ditayangkan[65] dan direkam secara sengaja (*purpose-record*) misalnya, rekaman video yang membahas sejarah dinamika PKB di situs youtube.

---

dan efektifitas komunikasi sosialkultural dalam PKB. Robert K.Yin, *Studi Kasus Desain dan Metode* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 18.

[62]Thomas R. Lindlof, *Qualitative Communication Research Methods* (California USA: Sage Publications, 1995), 27-58. Metode kualitatif dengan paradigma interpretif ini merupakan tradisi Sosiologi dan Antropologi, akan tetapi menjadi bagian penting dalam penelitian komunikasi. Engkus Kuswarno "Tradisi Fenomenologi pada Penelitian Komunikasi Kualitatif: Sebuah Pengalaman Akademis" dalam *Mediator*, Vol. 7 No.1 Juni 2006, 48. Dalam paradigma tersebut dijelaskan bahwa realitas sosial yang ditunjukkan oleh interaksi sosial yang secara esensial adalah dasar dari komunikasi, bukan saja menampakkan fenomena lambang atau bahasa yang digunakan, tetapi juga menampakkan komunikasi interpersonal di antara anggota-anggota sosial tersebut. Oleh karenanya, komunikasi antarpribadi merupakan bagian penting dalam membentuk realitas sosial: *"interpersonal communication is the primary medium through which social reality is conctructed."* Thomas R. Lindlof, *Qualitative Communication Research Methods,* 414.

[63]Pada dasarnya wawancara ini bertujuan untuk membangun konfidensi periset pada informannya (respondennya). Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta: Kencana Media Group, 2008), 99.

[64]Penjelasan tentang sumber data informasi penelitian komunikasi dapat dilihat dalam buku, Will Barton dan Andrew Beck, *Bersiap Mempelajari Kajian Komunikasi* (Yogyakarta: Jalansutra, 2010), 175.

[65]Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 6-7.

a. Dokumentasi

Studi dokumentasi diperoleh dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) yang disimpan di kantor, yang merupakan bahan penting dalam penelitian kualitatif.[66] Dokumen ini dikumpulkan dan dipergunakan untuk mencari data-data notulensi yang berkenaan dengan tema penelitian, karena kebanyakan situasi yang dikaji mempunyai sejarah dan dokumen-dokumen yang menjelaskan sebagian aspek situasi tertentu.[67] Di antara dokumen tersebut adalah: buku LPP DPP PKB dan AD/ART partai PKB Pasca Muktamar Luar Biasa Ancol 2008 serta website resmi DPP PKB.

b. Wawancara mendalam (*in-depth interview*)

Wawancara mendalam sebenarnya bagian dari pengamatan terlibat. Berkaitan dengan proses wawancara ini dilakukan dengan sistem tak terstruktur, agar lebih mudah dalam memperoleh data. Hanya saja peneliti ingin menekankan kegunaan utama dari wawancara mendalam, yakni menggali pendapat dari para responden fungsionaris partai (ketua, mantan ketua dan anggota partai lainnya). Maka dalam hal ini, penulis mewawancarai beberapa pengurus yang berada pada tingkat Dewan Pimpinan Pusat PKB, yang mengetahui saksi sejarah dan mengalami langsung dinamika perpolitikan di PKB. Wawancara yang dilakukan diantanya dengan Wahyuddin Kessa Sekretaris Dewan Syuro DPW PKB se-Sulsel, Saiful Bahri Anshori (Ketua DPP PKB), Marwan Ja'far (anggota DPR RI), dan Darussalam (fungsionaris partai).

c. Pengamatan Non Observasi

Jenis observari yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan. Observari non partisipan merupakan metode observasi dimana periset hanya bertindak mengobervasi tanpa ikut terjun melakukan aktivitas seperti yang dilakukan kelompok yang diteliti, baik kehadirannya diketahui atau tidak.[68] Jadi, penulis hanya datang ke tempat penelitian objek yang diamati, tetapi tidak ikut dalam kegiatan mereka.

---

[66] Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* 180.
[67] Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* 180.
[68]Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, 110.

d. Analisis data adalah pengorganisasian data, dan membuat kategori dengan mengelompokkan data dalam tema masing-masing sehingga pola data menjadi jelas; menguji hipotesis mengunakan data yang ada sesuai dengan konsep yang dibangun. Serta memberikan penjelasan tentang makna data tersebut.[69]

H. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan penulisan tesis ini dalam menguraikan masalah dan menganalisisnya maka penulis membagi sistematika pembahasannya dalam 5 (Lima) bab sebagai berikut:

Bab Pertama, adalah pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, bingkai teoritis, bingkai metodologis, kajian terdahulu yang relevan, sistematika penulisan.Selanjutnya adalah bab kedua, yang memaparkan teori komunikator sebagai pendekatan hubungan kepada masyarakat, yang meliputi pentingnya figur yang berhubungan pelaku-pelaku politik, mengkomunikasikan ide (mempekenalkan diri), emosi yang ditampilkan sebagai alat kampanye, dan perkenalan diri sebagai suatu cara mendekati masyarakat.

Berikutnya adalah bab ketiga yang menjelaskan hubungan antara NU dan PKB serta peran pesantren dalam historis politik NU dan PKB, selanjutnya arena perjuangan PKB sebagai partai advokasi, undang-undang pembentukkan partai hijau dan PKB sebagai partai terbuka.

Kegunaan inti analisis teori ini ada pada bab empat yang lebih menekankan pada aplikasi partai yang berkaitan dengan dinamika PKB salah satunya turunnya perolehan suara PKB pada Pemilu 2009, yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan yang berisi pembahasan hubungan PKB dengan masyarakat, PKB memperkenalkan diri, ikatan emosional PKB dengan masyarakat, serta Pendekatan dengan Masyarakat

Akhirnya pada bab kelima sebagai penutup, yang terdiri atas kesimpulan yang merupakan jawaban ringkas terhadap masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini dan rekomendasi merupakan implikasi dari kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini.

---

[69]Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Aplikasi untuk Penelitian Pendidikan, Hukum, Ekonomi, Manajemen, Sosial dan Humaniora, Politik, Agama dan Filsafat)* (Jakarta: GP Press, 2009), 226.

BAB II
PARADIGMA KOMUNIKASI POLITIK DALAM PENDEKATAN TEORI SOSIOKULTURAL

Bab ini memperkenalkan empat pendekatan teori yang digunakan dalam kajian ini, yakni, interaksi simbolik,[1] konstruksi ide, konstruksi emosi, dan pembawaan diri pendekatan ini dikembangkan untuk mengkaji komunikasi politik dalam aspek komunikator yang ada di PKB. Tokoh PKB dalam penelitian ini difungsikan sebagai komunikator. Keempat pendekatan teori tersebut merupakan bagian yang berasal dari tradisi sosiokultural.[2]

Tradisi sosiokutural ini memfokuskan diri pada bentuk-bentuk interaksi antar manusia dari pada karakteristik individu atau model mental. Tradisi sosiokultural ini diaplikasikan dalam penelitian komunikasi politik yang ada di PKB ketika menjelang Pemilu 2009. Hal inilah yang diperkuat oleh Nimmo[3] bahwa partai politik dan kandidat yang akan dipilih dalam suatu pemilu, ditentukan juga oleh *citra partai, citra kandidat* dan *isu politik* dalam kampanye, penentuan tersebut tidak terlepas dari bagian tradisi sosiokultural dalam hal ini ormas NU. Di bawah ini akan dijelaskan teori-teori yang berkenaan dengan komunikator dalam tradisi sosiokultural.

A. Sosialisasi: Interaksi Simbolik

Interaksi adalah istilah dari garapan sosiologi; sedangkan simbolik adalah garapan komunikologi atau ilmu komunikasi.[4] Kontribusi utama sosiologi pada pekembangan ilmu psikologi sosial

---

[1]Ide pokok dari paham interaksi simbolis telah diadopsi dan diclaborasi oleh banyak pakar sosial serta saat ini dimasukkan ke dalam kajian kelompok, emosi, diri, politik, dan struktur sosial. Stephen W. Littlejohn dan Karen A. Foss, *Teori Komunikasi*, Edisi. 9, Penerjemah: Mohammad Yusuf Hamdan (Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2009), 67.

[2]Sudut pandang kedua yang sangat berpengaruh pada pendekatan sosiokultural adalah paham konstruktivisme sosial dengan istilah *the social construction of reality,* hasul penelitian Peter Berger dan Thomas Luckmann, sudut pandang ini telah melakukan penyelidikan tentang bagaimana manusia dibentuk melalui interaksi sosial. Stephen W. Littlejohn dan Karen A. Foss, *Teori Komunikasi*, 67.

[3]Dan Nimmo, *Komunikasi Politik (Khalayak dan Efek)* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), 184-185.

[4]Dadi Ahmadi,"Interaksi Simbolik: Suatu Pengantar," dalam *Mediator,* Vol. 9. No. 2 Desember 2008, 301.

yang melahirkan perspektif interaksi simbolik.[5] Teori interaksi simbolik (IS)[6] menggunakan paradigma individu sebagai subjek utama dalam percaturan sosial maupun politik, meletakkan individu sebagai pelaku aktif dan proaktif. Pada dasarnya teori IS mengetengahkan soal diri sendiri (*the self*) dengan segala atribut luarnya. Menurut pandangan interaksi simbolik, manusia dipandang sebagai pelaku, pelaksana, pencipta, dan pengarah bagi dirinya sendiri. Manusia adalah makhluk yang memiliki jiwa dan semangat bebas dilihat dari kualitas manusia yang tercipta secara sosial. Prinsip-prinsip lain yang digunakan oleh ahli IS dalam riset ilmiah adalah mengamati dan mendeskripsikan subjek penelitian dalam setting nyata, yakni bagaimana politisi berinteraksi dengan orang lain dan dirinya sendiri dalam situasi yang harus dilalui.

Para ahli IS berpendapat bahwa tindakan ada dua macam, yaitu tindakan nyata dan tersembunyi. Tindakan tersembunyi berarti memasuki pikiran manusia. Bagi seorang ilmuwan itu sendiri, untuk mengerti sesuatu, diperlukan kemampuan menempatkan diri sendiri pada posisi individu atau kelompok. Proses pengoperan lambang-lambang atau simbol-simbol komunikasi yang berisi pesan-pesan politik dari seseorang atau kelompok kepada orang lain bertujuan untuk membuka wawasan atau cara berfikir, serta memengaruhi sikap

---

[5]Dadi Ahmadi,"Interaksi Simbolik: Suatu Pengantar," dalam *Mediator,* Vol. 9. No. 2Desember 2008, 301.

[6]Barbara Ballis Lal,"Symbolic Interaction Theories," *American Behavioral Scirntist* 38, (1995): 421-441. Lihat juga, Joel M. Charon, *Symbolic Interactionism: An Introduction, an Interpretation, an Integration* (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1992); Larry T. Reynolds, *Interactionism: Exposition and Critique* (Dix Hills, NY: General Hall, 1990); Jerome G. Manis dan Bernard N. Meltzer, ed. *Symbolic Interaction* (Boston: Allyn and Bacon, 1978). Untuk meneruskan dalam cakupan IS, lihat editor jurnal *Studies in Symbolic Interaction.* George Herbert Mead menggunakan ide ini untuk menunjukkan bagaimana individu dihubungkan dengan lingkungan sosialnya dalam perkembangan seorang anak. Mead menganggap bahwa konsepsi diri adalah suatu proses yang berasal dari interaksi sosial individu dengan orang lain."Diri" didefinisikan sebagai sesuatu yang dirujuk dalam pembicaraan biasa melalui kata ganti orang pertama tunggal, yaitu"aku" (*I*),"daku" (*me*),"milikku" (*mine*), dan"diriku" (*myself*). Mead berargumentasi bahwa anak-anak belajar tentang konsepsi diri melalui hubungan antara"*I*" dan"*Me*". Anak-anak membentuk konsepsi diri secara perlahan melalui orang tuanya, sehingga mempunyai kemampuan untuk memandang orang lain sekaligus memandang dirinya sendiri. Sebagai individu, setiap diri mempunyai beragam identitas : sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai mahasiswa dan seterusnya. Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), 73.

dan tingkah laku khalayak yang menjadi target politik,[7] Merupakan tindakan nyata.

Berdasarkan apa yang menjadi dasar dari kehidupan kelompok manusia atau masyarakat, beberapa ahli dari paham IS menunjuk pada "komunikasi" sebagai kunci untuk memahami kehidupan manusia itu. IS menunjuk pada sifat khas dari interaksi antarmanusia. Artinya manusia saling menerjemahkan dan mendinifisikan tindakannya, baik dalam interaksi dengan orang lain maupun dengan dirinya sendiri. Proses interaksi yang terbentuk melibatkan pemakaian simbol-simbol bahasa, ketentuan adat istiadat, agama dan pandangan-pandangan.[8] Kaitan antara simbol dengan komunikasi terdapat dalam salah satu prinsip-prinsip komunikasi yang dikemukakan Mulyana,[9] mengenai komunikasi adalah salah satu proses simbolik.

Komunikator dalam komunikasi politik adalah pihak yang memprakarsai dan mengarahkan suatu tindak komunikasi. Seperti dalam peristiwa komunikasi pada umumnya, komunikator dalam komunikasi politik dapat dibedakan dalam wujud individu, lembaga, ataupun berupa kumpulan orang. Jika seorang tokoh, pejabat ataupun rakyat biasa, misalnya, bertindak sebagai sumber dalam suatu kegiatan komunikasi politik, maka dalam beberapa hal ia dapat dilihat sebagai sumber individual *(individual source)*. Sedang pada momentum yang lain, meskipun individu-individu itu yang berbicara tapi karena ia mewakili suatu lembaga atau menjadi juru bicara dari .suatu organisasi, maka pada saat itu ia dapat dipandang sebagai sumber kolektif *(collective Source)*. Dalam pandangan Dan Nimmo,[10] komunikator politik ini memainkan peran-peran sosial yang utama, terutama dalam proses pembentukan opini publik. Para pemimpin organisasi ataupun juru bicara partai-partai politik adalah pihak-pihak yang menciptakan opini publik, karena mereka berhasil membuat sejumlah gagasan yang mula-mula ditolak, kemudian dipertimbangkan, dan akhirnya diterima publik.

---

[7]Alwi Dahlan,"Teknologi Informasi dan Demokrasi" dalam *Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, Vol. IV/Oktober 1999, Bandung: PT Remaja Rosdakarya

[8]Joel M. Charon, *Symbolic Interactionism An Introduction, an Interpretation, an Integration* (Upper Saddle River (NJ): Prentice Hall Inc, 1979), 61.

[9]Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu pengantar* (Bandung: Remadja Rosdakarya, 2000), 83-120.

[10]Dan Nimmo, *Komunikasi Politik* (Dua Jilid), 29.

Karena itu, lanjut Nimmo, sikapnya terhadap khalayak serta martabat yang diberikannya kepada mereka sebagai manusia dapat memengaruhi komunikasi yang dihasilkannya. Baik sebagai sumber individual maupun kolektif. Setiap komunikator politik merupakan pihak potensial yang ikut menentukan arah sosialisasi, bentuk-bentuk partisipasi, serta pola-pola rekrutmen massa politik untuk meneapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pada masa Orde Lama, misalnya, Soekarno telah berhasil membentuk opini masyarakat dalam berbagai sikap politik yang diambilnya baik menyangkut kebijakan politik dalam negeri maupun luar negeri. Demikian pula Soeharto selama masa Orde Baru, melalui langkah-Iangkah komunikasi politik yang diperankannya telah berhasil membentuk sedemikian rupa opini masyarakat terutama tentang pentingnya stabilitas politik untuk membangun ekonomi. Dan bagi warga *nahdliyin*, Gus Dur adalah komunikator utama yang telah berhasil memainkan unsur-unsur *ethos*, *pathos* dan *logos*[11] yang dimilikinya.

Secara rinci, contoh kelompok-kelompok komunikator politik yang termasuk pada kategori individual ataupun kolektif dapat dilihat pada tabel berikut:

Sumber (Komunikator) Individual dan Kolektif dalam Komunikasi Politik[12]

[11] *Ethos*, *pathos*, dan *logos* adalah tiga istilah retorika yang digunakan sejak zaman Yunani oleh Aristoteles. Whitman dan Foster, *Speaking in Public* (New York: Macmillan Publishing Company, 1987), 17, yang dimaksud dengan *ethos* (*ethical proof*) adalah menyangkut kredibilitas etis yang dimiliki komunikator; *pathos* (*emotional proof*) menyangkut efektivitas respons dari komunikan; dan *logos* (*logical proof*) menyangkut rasionalits argumentasi yang digunakan seorang komunikator. Lihat Asep Saeful Muhtadi, *Komunikasi Politik Indonesia Dinamika Islam Politik Pasca-Orde Baru* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), 32.

[12] Tabel daftar komunikator ini dimodifikasi dari Zulkarimein Nasution, *Komunikasi Politik: Suatu Pengantar* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 43.

Sumber Individu	Sumber Kolektif
Pejabat (birokrat)	Pemerintah (birokrasi)
Politisi (aktor politik)	Partai politik
Pemimpin opini (tokoh masyarakat atau kiai)	Organisasi kemasyarakatan
Jurnalis	Media massa
Aktivis	Kelompok penekan
Lobbyis	Kelompok elit
Pemimpin (figur masyarakat dan kepala suku)	Badan / perusahaan komunikasi
Komunikator professional	

Komunikator dalam komunikasi politik, yaitu pihak yang memprakarsai dan mengarahkan suatu tindak komunikasi. Seperti dalam peristiwa komunikasi pada umumnya, komunikator dalam komunikasi politik dapat dibedakan dalam wujud individu, lembaga, ataupun berupa kumpulan orang. Jika seorang tokoh, pejabat ataupun rakyat biasa, misalnya, bertindak sebagai sumber dalam suatu kegiatan komunikasi politik, maka dalam beberapa hal ia dapat dilihat sebagai sumber individual *(individual source)*. Sedangkan pada momentum yang lain, meskipun individu-individu itu yang berbicara, tapi karena ia mewakili suatu lembaga atau menjadi juru bicara dari suatu organisasi, maka pada saat itu ia dapat dipandang sebagai sumber kolektif *(collective source)*.

Ketokohan adalah orang yang memiliki kredibilitas *(al-amīn)*, daya tarik, dan kekuasaan, yang Rakhmat yang mengutip Aristoteles, menyebutnya sebagai ethos, yaitu gabungan antara kredibilitas, atraksi, dan kekuasaan. Orang yang memiliki ketokohan dapat disebut juga sebagai pahlawan politik.[13] Beberapa hasil studi menunjukan bahwa pemberi suara dalam pemilihan umum cenderung menjatuhkan pilihannya kepada pahlawan politik (figur), yaitu kandidat yang sesuai dengan citra jabatan ideal baginya. Citra jabatan ideal yang dimaksud itu ialah politikus yang memiliki ketokohan, karena mempunyai sifat-sifat utama seperti kecakapan, kedewasaan, keberanian, dan sebagainya, serta memiliki "rekam jejak" yang baik dalam perjuangan politik terutama perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan. Karakteristik kepahlawanan politik itu, juga dipublikasikan oleh media massa atau media sosial, sehingga tercipta citra dan Opini Publik yang positif baginya di kalangan publik.

---

[13]Dan Nimmo, *Komunikasi Politik, Khalayak dan Efek* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 182.

Fenomena seperti ini secara sederhana dapat digambarkan dengan melihat interaksi-interaksi antar individu yang berlangsung secara simbolik *(symbolic interactionism)*,[14] sehingga terjadi proses orientasi, peniruan dan peneguhan untuk memerankan sesuatu perilaku, seperti apa yang diperankan orang lain. Perlambangan yang merupakan suatu identitas merek yang dibawakan dalam komunikasi politik merupakan jalan untuk mencitrakan sesuatu yang bertujuan untuk dikenal dan dilekatkan ke benak publik. Bagi personal yang memiliki identitas yang khas dan spesifik akan memudahkan untuk diidentifikasi di antara yang lainnya. Dalam hal ini, pencitraan yang difokuskan adalah kepada personal atau tokoh.[15]

Endorser merupakan salah satu komponen dari proses pencitraan dalam komunikasi politik. Dalam kajian komunikasi politik, *endorser* adalah strategi penonjolan sosok ketokohan dalam sebuah partai. Merawat ketokohan dan memantapkan kelembagaan. Ketokohan adalah orang yang memiliki kredibilitas, daya tarik, dan kekuasaaan. Dengan kata lain, ketokohan merupakan gabungan antara kredibilitas, atraksi, dan kekuasaan.[16] Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan komunikasi politik, yaitu membentuk citra politik yang baik bagi khalayak.[17] Citra politik itu terbentuk berdasarkan informasi yang

---

[14]Konsep yang digagas oleh George Herbert Mead (l863-1931) ini melukiskan terjadinya proses internalisasi perilaku melalui interaksi secara simbolik antar individu. Lihat, misalnya, Henry L. Tischler, *Introduction to Sociology,* 106-107; Haralambos and Holborn, *Sociology: Themes and Perspectives*, 891.

[15]Menurut Anwar Arifin, pencitraan merupakan suatu tujuan dari komunikasi politik yang terbentuk berdasarkan informasi yang diterima oleh khalayak. Pencitraan dalam politik berkaitan dengan pembentukan pendapat umum yang terbangun melalui citra politik dan hal ini terwujud sebagai konsekuensi kognitif dari komunikasi politik. Anwar Arifin, *Komunikasi Politik : Paradigma-Teori-Aplikasi-Strategi & Komunikasi Politik di Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 107

[16]Anwar Arifin, *Komunikasi Politik : Paradigma-Teori-Aplikasi-Strategi & Komunikasi Politik di Indonesia*, 146.

[17]Berdasarakan penjelasan di atas, citra politik dapat dirumuskan sebagai gambaran tentang politik (kekuasaan, kewenangan, otoritas, konflik, dan konsensus) yang memiliki makna kendatipun tidak selamanya sesuai dengan realitas politik yang sebenarnya. Citra politik tersusun melalui kepercayaan, nilai, dan pengharapan dalam bentuk pendapat pribadi yang selanjutnya dapat berkembang menjadi pendapat umum. Citra politik itu terbentuk berdasarkan informasi yang kita terima, baik langsung maupun melalui media politik, termasuk media massa yang bekerja untuk menyampaikan pesan politik yang umum dan aktual. Ardial, *Komunikasi Politik*, 44-45.

diterima, baik langsung maupun melalui media politik, termasuk media massa yang bekerja untuk menyampaikan pesan politik yang umum dan aktual.

Teori IS yang merupakan salah satu pendekatan dalam studi ilmu komunikasi, yaitu sekitar awal abad ke-19 sampai akhirnya teori IS terus berkembang sampai saat ini, di mana secara tidak langsung IS merupakan cabang sosiologi dari perspektif interaksional.[18] Akar pemikiran IS mengasumsikan realitas sosial sebagai proses dan bukan sebagai sesuatu yang statis-dogmatis. Artinya, masyarakat dilihat sebagai sebuah IS bagi individu-individu yang ada di dalamnya.

Berikut bagan mengenai IS:

Bagan 02.01
Teori Interaksi Simbolik (IS)

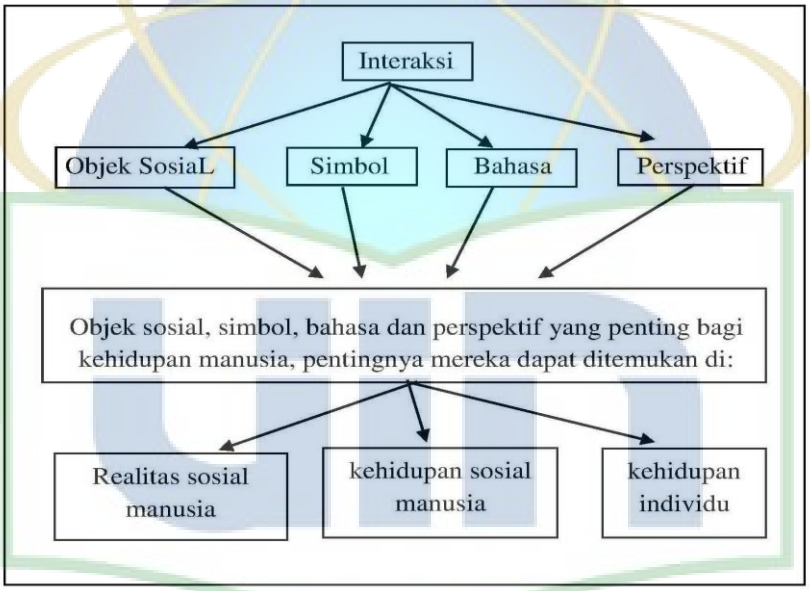

Pada hakikatnya tiap manusia bukanlah "barang jadi" melainkan barang yang "akan jadi", karenanya teori IS membahas pula konsep mengenai "diri" yang tumbuh berdasarkan "negoisasi makna" dengan orang lain. Interaksionisme simbolis sendiri sebagai sebuah gerakan, ada untuk meneliti cara-cara manusia berkomunikasi, memusat, atau dapat membagi makna.

---

[18]Elvinaro Ardianto, dan Bambang Q-Anees, *Filsafat Ilmu Komunikasi* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2007), 40.

Sebab, seperti konsep umum yang berlaku dalam komunikasi, ketika penerima itu memberikan *feedback* dalam sesuatu proses komunikasi politik, atau pada saat ia meneruskan pesan-pesan itu kepada khalayak lain dalam kesempatan komunikasi yang berbeda, maka pada saat itu peran penerima telah berubah menjadi sumber atau komunikator. Khalayak komunikasi politik dapat memberikan respons atau umpan balik, baik dalam bentuk pikiran, sikap maupun perilaku politik yang diperankannya. Dalam berbagai riset tentang sosialisasi politik, menurut Kraus dan Davis,[19] diperoleh indikasi bahwa komunikator tahap kedua (yang sebelumnya berperan sebagai khalayak) memainkan peran yang signifikan pada komunikasi berikutnya. Dengan memfokuskan objek risetnya pada keluarga (*family*) dan kelompok sebaya (*peers*), para peneliti menyimpulkan bahwa keluarga memiliki peran yang cukup besar dalam proses sosialisasi politik. Orang tua dapat menyampaikan pesan-pesan politik sesuatu partai dengan pendekatan yang khas dalam satu lingkungan keluarga.

Dalam komunikasi politik, warga negara atau publik sebagai konstituen para politisi dapat berperan sebagai komunikator ketika menyalurkan aspirasi atau tuntutan, dan pada saat yang sama mereka juga berperan sebagai khalayak komunikasi ketika menerima pesan-pesan dari para politisi ataupun aparat birokrasi. Perilaku politik mereka dipengaruhi oleh interaksi dengan lingkungannya masing-masing. Rodee *et.al.*, misalnya, menyebutkan beberapa arena interaksi politis yang pokok, yaitu (1) komunitas, tempat pengetahuan publik berkembang dari pengalamannya mengikuti pola budaya masyarakat sehingga rasa kesetiaan pun terbentuk, dan sikap terhadap adat-istiadat serta aturan-aturan lainnya terkondisikan; (2) institusi sosial seperti rumah, sekolah, tempat ibadah, dan pemerintah, juga memengaruhi pembentukan nilai-nilai personal dan sistem kepercayaan; dan (3) area gejala politis seperti para politisi, lembaga kebijakan, dan perilaku yang mem-bentuk budaya politik. Karena itu, singkatnya, dampak interaksi antara totalitas kepribadian dengan

[19]Sidney Kraus dan Dinnie Davis, *The Effects of Mass Communication on Political Behavior* (Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 1978), 15.

totalitas pengalaman politis menyediakan bahan baku bagi pembentukan sikap dan ekspresi pendapat-pendapat individual.[20]

Lalu bagaimana peran komunikasi politik dalam proses pembentuklan opini publik. Berkenaan dengan hal itu, dapat dianalisis faktor-faktor penting yang mendorong terbentuknya opini publik. Menurut Bernard Henness, seperti digambarkan dalam rumusan definisinya di atas, ada lima faktor penting yang menyebabkan terbentuknya opini publik. Pertama adanya isu, yang secara sederhana, adalah opini publik yang dapat diilustrasikan semacam konsensus yang terbentuk dalam suatu arus perbincangan tentang sesuatu isu. Dalam rumusan yang berbeda, mereka yang menjadi pemimpin karena alasan-alasan tertentu, seperti karena kepribadiannya, keeliteannya dalam suatu komunitas, atau karena kharisma dan senioritas yang dimilikinya dalam komunitas tersebut, dan bukan karena posisi formalnya dalam organisasi. Secara sosiologis, mereka biasa disebut sebagai pemimpin simbolik.[21]

Politikus sebagai komunikator politik memainkan peran sosial yang utama, terutama dalam proses pembentukan opini publik. Politikus atau politikus itu wakil suatu kelompok dan pesan-pesan politikus itu adalah untuk mengajukan dan atau melindungi tujuan kepentingan politik. Artinya, komunikator politik mewakili

---

[20]Dalam bukunya, Rodee (ct.al) *Introduction to Political Science* (Auckland: McGraw-Hill, 1981), 278. Mengelaborasi area interaksi politik ini dalam konteks sosialisasi politik, khususnya berkaitan dengan persoalan bagaimana dan di mana individu-individu dalam masyarakat dapat memperoleh pengetahuan tentang politik.

[21]Berbeda dengan pemimpin organisasi, pemimpin simbolik biasanya tidak memiliki posisi formal dalam organisasi. Mereka sangat dikenal di dalam masyarakat karena faktor-faktor tertentu, sehingga komunikasinya tetap efektif. Lihat, Dan Nimmo, *Komunikasi Politik:Khalayak dan Efek* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993), 46. Dalam perspektif komunikasi politik, meminjam istilah Nimmo (1993: 33), kiai dapat dikategorikan kepada kelompok komunikator profesional yang dapat mengendalikan keteramp ilan yang khas dalam mengolah simbol-simbol untuk membangun jaringan antarindividu dalam suatu kelompok. Seorang komunikator profesional, kata Nimmo, adalah seorang makelar simbol, orang yang menerjemahkan sikap, pengetahuan, dan minat suatu komunitas bahasa ke dalam istilah-istilah komunitas bahasa lain yang berbeda-beda tetapi dipandang menarik dan dapat dimengerti. Oleh karena itu, komunikator profesional, seperti halnya seorang kiai dalam komunitas muslim, berperan sebagai sosok yang dapat menghubungkan golongan elitee atau sesuatu komunitas tertentu dengan khalayak umum. Secara horizontal, kiai juga berperan sebagai penghubung dua komunitas bahasa yang berbeda pada tingkat struktur sosial yang sama.

kepentingan kelompok, sehingga jika dirangkum maka politikus mencari pengaruh lewat komunikasi.

Beberapa hasil studi menunjukkan bahwa pemberi suara dalam pemilihan umum cenderung menjatuhkan pilihannya kepada pahlawan politik, yaitu kandidat yang sesuai dengan citra jabatan ideal baginya. Citra jabatan ideal yang dimaksud itu ialah politikus yang memiliki ketokohan, karena mempunyai sifat-sifat utama seperti kecakapan, kedewasaan kejujuran, keberanian, dan sebagainya. Hal itu merupakan sifat-sifat kepahlawanan politik.

Dengan demikian pahlawan politik memiliki daya tarik sendiri, yang dalam proses komunikasi politik untuk memengaruhi khalayak, terutama calon pemilih. Seseorang tokoh politik yang disebut sebagai pahlawan politik pada dasarnya dalah seorang pemimpin formal atau informal, yang mendapat kepercayaan dari publik atau khalayak. [22]

Dalam komunikasi politik, terutama retorika politik atau pidato politik di hadapan massa, pada hakikatnya khalayak akan memperhatikan siapa (tokoh politik) ketimbang apa (pesan politik) yang akan disampaikan. Artinya, khalayak akan tertarik bukan pada isi pidato, melainkan kepada tokoh politik yang akan tampil berpidato. Hal ini menunjukkan bahwa ketokohan adalah hal yang sangat utama dalam komunikasi politik. [23]

Dapat disimpukan bahwa ketokohan sebagai komunikator dalam politik kemudian melahirkan kepahlawanan politik dan kharisma diperoleh secara krediblitas, yaitu dapat dipercaya karena karakter dan moralitas yang teruji dalam pergaulan di tengah-tegah masyarakat. [24] Kepercayaan itu juga tumbuh karena adanya keahlian atau kemampuan dan keterampilan dalam menyampaikan substansi pesan yang dikuasainya. Keahlian diperoleh dalam waktu yang lama melalui proses pembelajaran atau pendidikan formal maupun informal.

---

[22] Anwar Arifin, *Komunikasi Politik: Paradigma-Teori-Aplikasi-Strategi & Komunikasi Politik di Indonesia*, 146.

[23] Anwar Arifin, *Komunikasi Politik : Paradigma-Teori-Aplikasi-Strategi & Komunikasi Politik di Indonesia*, 147.

[24] Anwar Arifin, *Komunikasi Politik : Paradigma-Teori-Aplikasi-Strategi & Komunikasi Politik di Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 2003), 148.

B. Konstruksi Ide: Memperkenalkan Diri

Konstruksi ide dalam pandangan konstruktivisme merupakan sebuah pandangan, gagasan, maupun cara berfikir kolektif dari suatu kelompok yang dipengaruhi oleh interaksi individu dengan individu lainnya, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Konstruksi ide juga dipengaruhi oleh agen-agen dalam suatu kelompok sosial melalui kegiatan *communicative action.*

Teori konstruksi ide adalah realitas yang merupakan ide atau prinsip utama dalam tradisi sosiokultural. Ide ini menyatakan bahwa dunia sosial tercipta karena adanya interaksi antara manusia.[25] Dalam paradigma interaksional tersebut, semua pihak yang berkomunikasi atau berinteraksi memiliki posisi yang sama dan sederajat, sehingga tercipta suasana yang dialogis. Komunikasi interaksional dikenal sebagai komunikasi yang manusiawi, karena semua pihak diangkat derajatnya ke posisi yang mulia.[26]

Di antara para ahli sosial kontemporer yang membuat banyak asumsi mengenai konstruksi sosial ide adalah Rom Harre.[27] Ia mengakui bahwa manusia memiliki aspek individual dan sosial, seperti pengalaman lainnya, diri manusia dibentuk oleh teori pribadinya. Orang pada dasarnya mencoba untuk memahami dirinya dengan menggunakan ide atau teori mengenai manusia *(personhood)* dan teori mengenai diri *(selfhood).* Politikus yang memiliki konsep diri yang positif adalah orang yang transparan (tembus pandang) atau terbuka bagi orang lain[28] dan oleh karena itu dapat menjadi politikus dan pelobi yang baik. Pada umumnya seorang politikus memang

---

[25]Cara bagaimana kita berkomunikasi sepanjang waktu mewujudkan pengertian kita mengenai pengalaman, termasuk ide kita mengenai diri kita sebagai manusia dan sebagai komunikator. Dengan demikian, setiap orang pada dasarnya memiliki teorinya masing-masing kehidupan. Teori itu menjadi model bagi manusia untuk memahami pengalaman hidu Teori berkembang dan diperbaiki terus-menerus sepanjang waktu kehidupan manusia mel berbagai interaksi. Morissan dan Andy Corry Wardhani, *Teori Komunikasi, tentang Komunikator, Pesan, Percakapan, dan Hubungan* (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2009), 40.

[26]Anwar Arifin, *Komunikasi Politik : Paradigma-Teori-Aplikasi-Strategi & Komunikasi Politik di Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 2003), 263.

[27]Rom Harre, *Social Being: A Theory for Social Behavior* (Littlefield, Adams, 1979). Lihat juga *Personal Theory for Individual Psychology* (Cambridge, MA, Harvard University Press, 1984).

[28]S. Jourard, *Self Disclosure An Experimental Analysis of TheTransparant Self* (New York, Wiley. 1971).

mempunyai konsep diri yang positif, meskipun kadarnya berbeda antara politikus yang satu dengan politikus yang lain. Artinya, politikus tidak memiliki konsep diri yang negatif.

Menurut Rom Harre manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial, sehingga ia menekankan pada cara individu-individu itu mempertanggung jawabkan tingkah laku mereka pada peristiwa itu. Konsep diri yang negatif ialah tipe orang yang selalu atau suka berpikir negatif dan peka pada kritik, cepat marah atau emosional, bersikap *hiperkritis* dan cenderung selalu merasa tidak disenangi orang lain, serta bersikap pesimistis dan tidak berani bersaing secara sehat karena selalu merasa tidak percaya diri. Justru itu, orang yang memiliki konsep diri yang negatif tidak dapat melahirkan kehangatan dan keakraban dalam pergaulan, sehingga sukar menjadi politikus dan pelobi yang baik.[29]

Selanjutnva, konsep diri juga memengaruhi perilaku komunikasi politik dalam aktivitas lobi, terutama dalam membuka diri untuk memilah dan memilih gagasan atau konsep baru dalam usaha membangun konsensus. Dengan membuka diri, berarti konsep diri menjadi lebih dekat dengan kenyataan. Jika konsep diri sesuai dengan pengalaman sendiri, maka ia akan lebih terbuka untuk menerima gagasan baru dari orang lain, dan lebih cenderung menghindari sikap defensif dan lebih cermat memandang diri sendiri dan orang lain, sehingga lebih mudah membangun konsensus. Selain itu, orang-orang yang sukses dalam bidang apapun, pada umumnya mendapat simpati dari orang banyak.[30] Di samping itu, kesediaan membuka diri, juga akan lebih mudah jika ada hubungan ketergantungan satu sama lain *(dependent)* atau hubungan struktural, baik vertikal maupun horizontal.[31]

Akhirnya, dapat dikatakan bahwa untuk membuka diri sama halnya dengan membangun konsensus, dimulai dengan kesediaan membuka diri sehingga dapat mengembangkan seni berkompromi. Itulah salah satu strategi dasar yang perlu dipahami dan diamalkan bagi orang yang akan menjadi politikus atau politikus yang ingin sukses dalam melakukan komunikasi politik.

---

[29]Ardial, *Komunikasi Politik* (Jakarta: Permata Puri Media, 2009), 119.

[30]Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: Remadja Rosdakarya. 2005), 111-117.

[31]Anwar Arifin, *Komunikasi Politik : Paradigma-Teori-Aplikasi-Strategi & Komunikasi Politik di Indonesia,* 265.

Teori mengenai diri dipelajari melalui pengalaman berinteraksi (membuka diri) dengan orang lain. Seluruh pemikiran, keinginan dan emosi dipelajari melalui interaksi sosial, namun teori mengenai diri ini berbeda-beda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, yang disebabkan kondisi sosial dan kebudayaan yang juga berbeda.[32] Selain itu, ada juga beberapa faktor yang mendorong lahirnya kesediaan membuka diri, yakni adanya kesamaan karakteristik personal, daya tarik fisik, *familiarity*, kedekatan *(proximity)*, dan kemampuan *(competence)*. Hasil studi menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki persamaan karakteristik personal, seperti kesamaan nilai-nilai, sikap, keyakinan, tingkat sosioekonomi, agama, ideologi, atau partai politik cenderung saling menyukai.

Menurut Harre, manusia adalah makhluk yang terlihat atau diketahui secara publik serta memiliki sejumlah atribut dan sifat yang terbentuk di dalam kelompok budaya dan sosial. Misalnya, masyarakat berkebudayaan Barat (Eropa dan Amerika) pada umumnya memandang manusia sebagai makhluk otonom yang membuat pilihannya sendiri untuk mencapai tujuannya, sedangkan diri adalah ide atau pandangan pribadi yang bersangkutan sebagai manusia. Dengan demikian, terdapat dua ide dalam hal ini, yaitu ide 'saya

[32]Misalnya, pada budaya masyarakat Barat terdapat teori mengenai diri yang menekankan pada keseluruhan, tidak terbagi serta independen. Sebaliknya, orang Jawa melihat diri mereka menjadi dua bagian yang independen, yaitu perasaan yang berada di dalam diri serta tingkah laku luar yang dapat diamati. Orang Maroko di Afrika Utara memiliki teori berbeda mengenai diri, yaitu perwujudan dari tempat dan situasi. Dengan demikian, identitas mereka selalu terikat kepada situasi di mana mereka berada. Morissan dan Andy Corry Wardhani, *Teori Komunikasi, tentang Komunikator, Pesan, Percakapan, dan Hubungan*, 77. Lihat juga, Stephen W. Littlejohn dan Karen A. Foss, *Teori Komunikasi*, Edisi. 9, 123. Sebaliknya, orang-orang Jawa melihat diri mereka sendiri sebagai makhluk dengan dua bagian yang berbeda—bagian dalamnya adalah perasaan dan bagian luarnya adalah perilaku-perilaku yang diamati; dengan kata lain, dirlsendin yang memiliki perasaan dan seseorang yang dipandang dibentuk oleh orang lain. Orang Maroko memiliki teori sendiri tentang diri sendiri—sebagai perwujudan tempat dan situasi—dan identitas mereka selalu dihubungkan dengan situasi-situasi ini. Lihat Clifford Geertz, *Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology* (New York: Basic, 1983), 60. Oleh sebab. itu, apakah diri sendiri itu, sebagian besar merupakan kegunaan pem ahaman akan identitas dalam hubungannya dengan kebudayaan di mana individu tersebut menjadi bagiannya.

sebagai manusia' yang bersifat publik dan ide mengenai 'diri' yang bersifat pribadi atau privat. [33]

Teori ini menjelaskan, 'diri' terdiri atas seperangkat elemen yang dapat ditinjau ke dalam tiga dimensi. Dimensi *pertama* adalah dimensi penunjukan *(display),* yaitu apakah aspek dari diri itu dapat ditunjukkan kepada pihak luar *(public)* atau merupakan sesuatu yang pribadi atau privat. Misalnya, orang dapat menganggap emosinya sebagai sesuatu yang pribadi, sementara kepribadiannya *(personality)* adalah berdimensi publik. Pada kebudayaan lain, emosi dapat dinilai sebagai memiliki dimensi publik.[34]

Para politikus yang akan melakukan lobi untuk mencari solusi dengan membangun konsensus harus memulai dengan kesediaan membuka diri. Memang, dalam lobi terjadi proses saling memberi dan menerima *(give and take)*. Para pelobi harus siap membuka diri, yaitu menerima pengalaman baru atau gagasan baru, sesuai dengan konsep diri yang ada pada masing-masing politikus yang berbeda pendapat. Konsep diri merupakan faktor yang sangat menentukan komunikasi politik interaksional atau lobi karena setiap orang termasuk para politikus, bertingkah laku sesuai dengan konsep dirinya. Harre menamakan hal demikian sebagai prinsip singularitas ganda *(double singularity principle).*[35] Teori-teori mengenai diri merupakan tentang kesadaran diri secara terus-menerus sebagai manusia yang satu karena jika tidak, akan dinilai abnormal atau sakit jiwa. Dengan kata lain, manusia itu memiliki rasa yang menyatu atau koheren *(sense* of *coherence)* serta konsisten di antara berbagai atribusi diri yang dimiliki.

Namun paling tidak ada tiga aspek utama yang harus diperhatikan ketika membangun sebuah komunikasi yang harmonis yaitu aspek psikologi, sosial, dan budaya dari masing-masing partisipannya. Ketiga aspek tersebut kemudian membentuk bidang pengalaman *(field* of *experience)* dan kerangka rujukan *(frame* of *reference)* seseorang. *Field of experience* dan *frame of reference*

---

[33]Stephen W. Littlejohn dan Karen A. Foss, *Teori Komunikasi*, Edisi. 9, Penerjemah: Mohammad Yusuf Hamdan, 123.

[34]Rom Harre, "An Outline of the Social Constructionist Viewpoint," dalam *The Social Construction of Emotion,* ed., Rom Harre (New York: Blackwell, 1986), 2-14.

[35]Rom Harre, *Is There Still Q Problem About The Self?* Communication Yearbook, Stanley Deetz (ed.), dalam Littlejohn dan Foss (Sage: Thousand Oak, 1994), 84.

menurut Severin, ialah seorang komunikator dan komunikan yang mewarnai suatu peristiwa komunikasi.[36]

C. Konstruksi Emosi: Sebagai Alat Kampanye

Kelompok teori lain dalam sudut pandang interaksionis simbolis berhadapan dengan pembentukan emosi. Sementara itu, biasanya tidak berfikir bahwa emosi terbentuk, tampilan emosinal, berbeda menurut kebudayaannya. Harre menyatakan, bahwa emosi emosi merupakan konsep-konsep yang tersusun, seperti aspek lain dari pengalaman manusia karena mereka ditentukan oleh bahasa lokal dan tata susunan dari moral, kebudayaan, atau kelompok sosial.

Menurut James Averill,[37] emosi adalah sistem kepercayaan yang akan memandu definisi seseorang mengenai situasi yang dihadapinya. Emosi terdiri atas norma-norma sosial internal serta aturan tentang bagaimana mengatur perasaan. Berbagai norma dan aturan ini memberikan petunjuk kepada seseorang bagaimana menentukan dan merespons emosi. Emosi memiliki unsur atau komponen psikologi di dalamnya, namun mengidentifikasi serta memberi label pada perasaan merupakan hal yang dipelajari secara sosial di dalam kebudayaan. Dengan kata lain, kemampuan untuk memahami emosi itu adalah dikonstruksikan secara sosial.[38]

Jadi, emosi bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja. Emosi ditentukan dan ditangani menurut apa yang telah dipelajari dalam interaksi sosial dengan orang lain. Proses komunikasi merupakan

---

[36]Alo. Liliweri, *Memahami Peran Komunikasi Massa dalam Masyarakat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), 22.

[37]James Averill, A *Constructivist View* of *Emotion* dalam *Theories* of *Emotion,* K. Plutchik dan H Kellerman (ed.) (New York, 1980), dalam Littlejohn dan Foss, 125-126. Di antara semua tulisan James Averill yang paling berhubungan dalam rentetan karya ini adalah"A Constructivist View of Emotion," dalam *Theories of Emotion,* ed., K. Plutchilkand H. Kellerman (New York: Academic. 1980), 305-339. "On the Paucity of Positive Emoticns," dalam *Assesment and Modification of Emotional Behavior,* ed., K.R. Blankstein, P. Pilner, dan J. Polivy (New York: Plenum, 1980), 7-45; *Anger and Aggression: An Essay on Emotion* (New York: Springer-Verlag, 1982); dan "The Acquisition of Emotions During Adulthood," dalam *The Social Construction of Emotions,* ed., Rom Harre (New York: Blackwell, 1986), 98-119.

[38]Morissan dan Andy Corry Wardhani, *Teori Komunikasi, tentang Komunikator, Pesan, Percakapan, dan Hubungan*, 79. Lihat Stephen W. Littlejohn dan Karen A. Foss, *Teori Komunikasi*, Edisi. 9, Penerjemah: Mohammad Yusuf Hamdan, 125.

kegiatan sosialisasi yang melibatkan perasaan (emosi) seseorang karena ia mencerminkan harapan komunikator. Sehingga proses komunikasi didahului oleh suatu proses seleksi penyaringan dan susunan berdasarkan faktor-faktor yang diingat, diinginkan atau tidak diinginkan oleh komunkator. Hal ini diperkuat oleh Onong Uchjana Effendy mendefinisikan komunikasi sebagai proses penyampaian suatu pesan sebagai paduan pikiran dan perasaan oleh seseorang untuk mengubah sikap, opini, atau perilaku orang lain dengan upaya memperoleh tanggapan.[39] Dengan kata lain proses komunikasi melibatkan perpaduan pikiran dan perasaan dalam mengambil dan mengubah tindakan seseorang.

Biasanya emosi terdiri dari norma-norma sosial yang dipelajari dan aturan yang mengatur perasaan. Emosi memiliki sebuah komponen psikologis, tetapi mengenali dan memahami perasaan-perasaan jasmani dipelajari secara sosial dalam sebuah kebudayaan. Dengan kata lain, kemampuan untuk memahami emosi terbentuk secara sosial. Bertolak dari paradigma khalayak aktif di negara demokrasi, sesungguhnya khalayaklah yang menentukan pesan politik yang harus disampaikan oleh para politikus dalam kampanye politiknya, baik dalam menggunakan retorika politik (pidato) yang merangsang emosi maupun melalui media politik, pesan politik disusun setelah mengetahui kondisi khalayak, hal itulah yang disebut sebagai persuasi dalam arti yang sesungguhnya (positif) dalam membangun konstruksi emosi yang positif.

Averill memiliki penjelasan mengapa orang cenderung berpandangan negatif terhadap kata-kata yang menggambarkan emosi. Menurutnya, orang akan cenderung memberikan label positif kepada emosi yang berorientasi pada tindakan atau aksi, dan label negatif kepada emosi yang muncul di luar kontrol atau kemampuan seseorang. Jadi, misalnya, keberanian merupakan emosi sebagai hasil dari tindakan yang berani, sedangkan kecemburuan merupakan akibat dari situasi yang tidak menguntungkan. Lebih jauh, emosi secara umum cenderung dipandang masyarakat sebagai sesuatu yang berada di luar kontrol, sesuatu yang hanya terjadi begitu saja. Jadi, adalah logis jika emosi yang dipandang positif tadi bukanlah sebagai emosi dan lebih dipandang sebagai suatu tindakan, sedangkan emosi negatif lebih sering dianggap sebagai emosi yang sesungguhnya. Hal ini menjadi

[39]Onong U. Effendy, *Hubungan Masyarakat: Suatu Studi Komunikologis* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), 52.

alasan mengapa kata atau istilah mengenai emosi lebih banyak dipandang negatif daripada positif. Pada kebudayaan yang berbeda, hasil dari studi Averill itu bisa menjadi berbeda.[40]

Selanjutnya, Wilbur Schramm[41] mengajukan syarat-syarat untuk berhasilnya suatu pesan kampanye yaitu (1) pesan harus direncanakan dan disampaikan sedemikian rupa sehingga pesan itu dapat menarik perhatian khalayak; (2) pesan haruslah menggunakan tanda-tanda yang sudah dikenal oleh komunikator dan khalayak sehingga kedua pengertian itu bertemu; (3) pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi daripada sasaran dan menyarankan agar cara-cara tersebut dapat mencapai kebutuhan itu; dan (4) pesan harus menyarankan sesuatu jalan untuk memperoleh kebutuhan yang layak bagi khalayak.

Sesungguhnya syarat-syarat yang dikemukakan di atas pada prinsipnya hanyalah terdiri atas intensitas dan pokok persoalannya. Jika diterapkan dalam komunikasi politik, intensitas pesan politik dapat dilakukan, misalnya pada tanda-tanda komunikasi *(sign of communication)* dan isi komunikasi politik. lsi pesan politik yang menarik perhatian apabila memuat pemenuhan kebutuhan pribadi, *(personal needs)* dan kelompok *(social needs)* dalam masyarakat. Suatu pesan politik hanya akan menarik perhatian selama ia memberikan harapan atau hasil-yang kuat relevansinya dengan persoalan kebutuhan *(needs)* tersebut.

Bahasa di dalam pesan kampanye, menurut Burke[42] selalu bermuatan emosional sehingga tidak ada kata-kata yang netral.

---

[40]Morissan dan Andy Corry Wardhani, *Teori Komunikasi, tentang Komunikator, Pesan, Percakapan, dan Hubungan*, 80. Lihat Catherine Lutz, "Morality, Domination, and Understandings of'Justifiable Anger' Among theIfaluk," dalam *Everyday Vr.derstanding: Social and Scientific Implications,* ed., Gun R. Semin dan Kenneth J. Gergen (London: Sage, 1990), 204-226.

[41]Lihat Wilbur Schramm, *The Nature of Mass Communication the Press and Effect of Mass Comunication* (Urban: University of Illionis Press, 1955). Anwar Arifin, *Komunikasi Politik Filsafat-Paradigma-Teori-Tujuan-Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 243.

[42]Untuk gagasan Burke tentang identifikasi dan divisi, lihat Kanneth Burke, *A Rhetoric of Motives* (Berkely: University of California Press, 1969), 21-23. Dalam identifikasi publik itu dapat dilihat bahwa semakin modern hidup seseorang, semakin banyak kelompok rujukannya *(reference group)*, dan semakin luas pula lingkup rujukannya *(frame of reference)*. Sebaliknya semakin tradisional seseorang, semakin kecil kelompok rujukannya, dan semakin sempit pula lingkup rujukannya. Artinya semakin modern seseorang semakin kurang dan renggang hubungannya dengan

Sebagai hasilnya maka sikap, penilaian dan perasaan khalayak secara bergantian muncul dalam bahasa yang digunakannya. Bahasa memiliki sifat selektif dan abstrak dengan fokus perhatian pada aspek-aspek tertentu dari realitas dan mengabaikan aspek-aspek lainnya. Emosi terdiri atas norma-norma sosial internal serta aturan tentang bagaimana mengatur perasaan. Berbagai norma dan aturan ini memberikan petunjuk kepada seseorang bagaimana menentukan dan merespons emosi.

Menurut Firmanzah, hubungan antara pemilih dengan kandidat atau partai politik akan sangat bersifat emosional ketimbang rasional.[43] Bertolak belakang dengan ikatan rasional, ikatan emosional bersifat lebih dalam dan stabil. Ikatan ini tidak mudah dipengaruhi dan diubah. Program-program dan termasuk pesan kampanye pemilu yang paling bagus pun sulit sulit sekali menarik perhatian pendukung yang memiliki ikatan kuat.

Syarat-syarat yang perlu diperhatikan dalam menyusun pesan politik yang bersifat persuasif, adalah menentukan tema dan materi yang sesuai dengan kondisi dan situasi khalayak. Syarat utama dalam memengaruhi khalayak dari pesan tersebut ialah harus mampu membangkitkan perhatian, selain keinginan khalayak untuk menyaksikan politikus yang akan menyajikan pesan-pesan politik tersebut.

Tema dan materi dari isi pesan politik yang akan dilontarkan kepada khalayak harus disesuaikan dengan kondisi khalayak dan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Dalam hal itu dikenal dua bentuk penyajian permasalahan yaitu yang bersifat *one side issue* (sepihak)[44] dan *both side issue* (kedua belah pihak).[45]

---

kelompok. Sebaliknya, semakin bersifat tradisional seseorang, semakin kuat dan erat hubungannya dengan kelompoknya.

[43]Firmanzah, *Mengelola Partai Politik Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 235.

[44]Penyajian yang bersifat *one side issue* (sepihak) adalah penyajian masalah yang hanya mengemukakan hal-hal yang positif saja, ataukah hal-hal yang negatif saja kepada khalayak. Selain itu, dapat juga berarti bahwa untuk memengaruhi khalayak hanya diperlukan konsepsi dari komunikator tanpa mengusik pendapat-pendapat yang telah berkembang pada khalayak. Model ini banyak dilakukan dalam kegiatan agitasi politik dan propaganda politik. Anwar Arifin, *Komunikasi Politik Filsafat-Paradigma-Teori-Tujuan-Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*, 250.

[45]Sebaliknya, penyajian yang bersifat *both side issue* adalah menyampaikan permasalahan, baik dari sisi negatifnya maupun segi positifnya. Dalam memengaruhi khalayak, permasalahan itu harus diketengahkan, baik secara konsepsi dari

Hasil studi dari Carl I Hoveland, Arthur A. Limsdale, dan Fried D. Sheffield dalam Arifin, menyimpulkan bahwa penyajian yang bersifat *both side issue* lebih efektif dilakukan kepada khalayak yang berbeda pendapat dengan komunikator dan kepada orang-orang yang terpelajar. Sebaliknya, penyajian yang bersifat *one side issue*, lebih efektif diberikan kepada khalayak yang sudah sependapat dengan komunikator atau kepada khalayak yang tidak

Harus disadari bahwa individu-individu dalam saat yang bersamaan selalu dirangsang oleh banyak pesan dari berbagai sumber, termasuk pesan politik. Akan tetapi, tidaklah semua rangsagan itu dapat memengaruhi responskhalayak karena tidak menimbulkan perhatian atau pengamatan yang terfokus. Artinya, tidak semua yang diamati dapat menimbulkan perhatian kecuali pesan yang memenuhi syarat. Menurut Averill,[46] tidak ada respons tunggal yang mampu untuk menentukan suatu emosi karena seluruh respons yang muncul harus dilihat secara bersama-sama. Ia menyebut kondisi ini sebagai sindrom emosi *(emotion syndromes*), yaitu satu perangkat atau satu *set respons* yang muncul bersama-sama. Sindrom emosi dikonstruksikan secara sosial karena orang melalui interaksi dalam menentukan respons atau tingkah laku yang mana yang akan untuk memaknai suatu emosi serta bagaimana menunjukkan emosi itu. Emosi ditunjukkan cara-cara khusus yang dipelajari melalui komunikasi. Sebagai contoh bagaimana kesedihan itu ditunjukkan dapat berbeda pada masyarakat berbeda pula.

Komunikasi adalah hasil persepsi dan persepsi banyak melibatkan perasaan *(emotion)* manusia. Oleh karena komunikasi merupakan hasil persepsi maka sebuah proses komunikasi selalu berpangkal pada persepsi yang dimiliki oleh setiap partisipannya. Persepsi merupakan hasil pengalaman indera manusia. Cohen Fisher mendefinisikan persepsi sebagai interpretasi terhadap berbagai sensasi sebagai representasi dan objek-objek eksternal, jadi persepsi adalah pengetahuan tentang apa yang dapat ditangkap oleh indera.[47]

---

komunikator maupun pendapat-pendapat yang telah berkembang pada khalayak. Model ini dikembangkan dalam kegiatan komunikasi politik yang dikenal dengan *public relations* politik. Anwar Arifin, *Komunikasi Politik Filsafat-Paradigma-Teori-Tujuan-Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*, 250.

[46]Stephen W. Littlejohn dan Karen A. Foss, *Teori Komunikasi*, Edisi. 9, Penerjemah: Mohammad Yusuf Hamdan (Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2009), 123.

[47]Astrid S. Susanto, *Filsafat Komunikasi* (Bandung: Binacipta 1995), 1.

Dalam kampanye politik dikenal adanya kegiatan retorika persuasif, Malik dan Iriantara, mengutip Nelson & Pearson, mengatakan bahwa retorika persuasif adalah pesan yang disampaikan kepada kelompok khalayak oleh seorang pembicara yang hadir untuk memengaruhi pilihan khalayak melalui pengisian, penguatan atau pengubahan tanggapan mereka terhadap gagasan, issue, konsep atau produk.[48] Upaya tersebut akan berhasil baik bila pesan yang disampaikan memiliki akibat sesuai dengan yang diharapkan. Pesan tersebut dalam beberapa hal memengaruhi pilihan khalayak. Dalam batas-batas yang mudah diperoleh haruslah diperhatikan cara melakukan konstruksi penyusunan pesan-pesan komunikasi politik sehingga tujuan komunikasi politik itu dapat tercapai. Jadi, komunikator politik perlu menetapkan tema yang tepat dan materi relevan dengan situasi khalayak.

D. Pembawaan Diri: Pengolahan Kesan

Terdapat berbagai bentuk komunikasi politik yang biasa dilakukan oleh politikus atau aktivis politik untuk mencapai tujuan politiknya. Teknik kegiatan komunikasi[49] yang dilakukan diarahkan untuk mencapai dukungan-legitimasi (otoritas sosial), yang meliputi tiga level, yaitu pengetahuan, sikap sampai dengan perilaku khalayak. Menurut Erving Goffman[50] situasi atau *setting* dalam kehidupan sehari-hari dapat diumpamakan sebagai panggung pertunjukan dan manusia adalah para aktor yang menggunakan pertunjukan drama itu

[48]Dedy Djamaludin Malik, & Yosal Iriantara, *Komunikasi Persuasif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), 147.

[49]Dipandang dalam konteks analisis kerangka. Sebuah *perjumpaan muka* terjadi ketika manusia saling berinteraksi dalam sebuah cara yang terfokus. Sumber terbaik untuk presentasi diri adalah Erving Goffman, *The Presentation of Self in Everyday Life* (Garden City, NY: Doubleday, 1959); dan Goffman, *Relations in Public.*

[50]Erving Goffman, *Frame Analysis: An Essay on the Organizntion of Experience* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1974). Lihat juga Jef Verhoeven,"Goffman's Frame Analysis and Modern Micro-Sociological Paradigms." dalam *Micro-Sociological Theory: Perspectives on Sociological Theory,* ed., H J. Helle and S. N. Eisentadt (Beverly Hills, CA: Sage, 1985), 2 71-100, Stuart J. Sigman, /1 *Perspective on Social Communication* (Lexington, MA: Lexington Books, 1987), 41-56; Spencer Cahill,"Erving Goffman," dalam *Symbolic Interactionism: An Introduction, an Interpretation, an Integration,* ed., Joel M. Charon (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1992), 185-200.

untuk memberikan kesan kepada para penonton.[51] Kegiatan komunikasi politik meliputi juga, upaya yang dilakukan politikus untuk mencari, mempertahankan dan meningkatkan dukungan politik dengan jalan melakukan kesan pencitraan dan membina opini publik yang positif.

Erving Goffman[52] memulai teorinya dengan asumsi bahwa manusia harus berupaya memahami setiap peristiwa atau situasi yang tengah dihadapinya.[53] Peristiwa atau situasi menurut Andi Faisal Bakti, adalah proses re/interpretasi yakni, mengalami proses dua level: bagaimana seseorang mendefinisikan pengamalan dan pengalaman mereka, lalu bagaimana peneliti (subjek) menjelaskan definisi tersebut.[54] Interpretasi yang diberikan terhadap situasi yang tengah dihadapi merupakan definisi dari situasi tersebut.

Menurut Goffman, definisi dari satu situasi dapat dibagi ke dalam 'garis' *(strip)* dan 'bingkai' *(frames).* Analisis bingkai *(frame analysis),* dengan demikian, merupakan proses untuk menentukan bagaimana individu mengatur dan memahami tingkah lakunya dalam situasi tertentu. Analisis bingkai memungkinkan aktor atau politikus untuk mengidentifikasi dan memahami peristiwa, memberikan makna kepada peristiwa dan segala kegiatan hidup manusia. Analisis bingkai

---

[51]Pembawaan diri berarti pengolaan kesan. Ada banyak literatur yang berpengaruh dalam manajemen pengolaan kesan. Untuk ringkasannya, lihat Sandra Metts and Erica Grohskopf,"Impression Management: Goals, Strategies, and Skills," dalam *Hardbook of Communication and Social Interaction Skills,* ed., John O. Greene and Brant R. Burleson (Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, 2003), 357-399.

[52]Goffman adalah seorang sosiolog terkenal pada abad ke-20, yang menggambarkan kehidupan sebagai perumpamaan pentas pertunjukan drama *(the atrical).*

[53]Ketika Anda memasuki suatu situasi, Anda akan bertanya kepada diri Anda,"Apa yang sedang terjadi di sini?" Jawaban yang Anda berikan terhadap pertanyaan merupakan definisi situasi tersebut. Ada kalanya definisi pertama kurang memadai sehingga terjadi kesalahan atau salah paham maka Anda harus membaca ulang situasi tadi. Erving Goffman, *Frame Analysis: An Essayon the Organization* of *Experince,* Harvard University Press, 1975. Lihat juga, Morissan dan Andy Corry Wardhani, *Teori Komunikasi, tentang Komunikator, Pesan, Percakapan, dan Hubungan*, 81.

[54]Andi Faisal Bakti, Makalah dipresentasikan pada acara"Launching Jurnal Studi al-Qur'an dan Seminar Pro-Kontra Hermeneutika sebagai Manhaj Tafsir," yang diselenggarakan oleh Pusat Studi al-Qur‟ an, 1. (Jakarta, pada Sabtu 25 Februari 2006, di Auditorium Gedung Ikhlas PSQ, Jl. KH. Fakhruddin No. 6, Tanah Abang, Jakarta). Dosen Ilmu Komunikasi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan Program Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri, Syarif Hidayatullah, Jakarta.

terdiri atas bingkai kerja natural *(natural framework),* yaitu peristiwa alam yang tidak terduga yang harus bisa di atasi oleh manusia, seperti hujan badai, gempa bumi, dan sebagainya. Sebaliknya, 'bingkai kerja sosial' *(social framework)* adalah hal yang dapat dikontrol, yang dibimbing oleh kecerdasan manusia.[55]

Goffman mengakui bahwa panggung depan mengandung anasir struktural dalam arti bahwa panggung depan cenderung terlembagakan alias mewakili kepentingan organisasi atau partai politik. Sering ketika aktor politik melaksanakan perannya, peran tersebut telah ditetapkan lembaga atau partai tempat dia bernaung. Meskipun berbau struktural, daya tarik pendekatan Goffman terletak pada interaksi.[56] Ia berpendapat bahwa umumnya orang-orang berusaha menyajikan diri mereka yang diidealisasikan dalam pertunjukan mereka di pangung depan, merasa bahwa mereka harus menyembunyikan hal-hal tertentu dalam pertunjukannya. [57]

Menurut Goffman, orang yang terlibat dalam suatu percakapan tatap muka pada dasarnya menyajikan drama kepada lawan bicaranya. Mereka memilih karakter tertentu dan menunjukkan karakter itu pada situasi dan lawan bicara yang sesuai dengan karakter yang telah dipilih. Dalam hal ini, seseorang harus membuat daftar dari berbagai situasi di mana ia akan menyajikan bermacam karakter berbeda yang dimilikinya.[58] Pada setiap situasi di mana aktor politik berada, maka

---

[55]Kedua tipe bingkai kerja tersebut masing-masing saling berhubungan karena bingkai kerja sosial pada dasarnya bertindak dan dipengaruhi oleh fenomena alam. Morissan dan Andy Corry Wardhani, *Teori Komunikasi, tentang Komunikator, Pesan, Percakapan, dan Hubungan*, 82.

[56]Dalam sifat interaksi berhadapan langsung, lihat Erving Goffman, *Encounters: Two Studies in the Sociology of Interaction* (Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1961); *Behavior in Public Places* (New York: Free Press, 1963); *Interaction Ritual: Essays on Face-to-Face Behcvior* (Garden City, NY: Double Day, 1967); dan *Relations in Public* (New York: Basic, 1971).

[57]Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2004), 166.

[58]Morissan dan Andy Corry Wardhani, *Teori Komunikasi, tentang Komunikator, Pesan, Percakapan, dan Hubungan*, 82. Lihat juga, Stephen W. Littlejohn dan Karen A. Foss, *Teori Komunikasi*, Edisi. 9, Penerjemah: Mohammad Yusuf Hamdan (Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2009), 129. Dalam sifat interaksi berhadapan langsung, lihat Erving Goffman, *Encounters: TwoStudies in the Socialogy of Interaction* (Indianapolis: Bobbs-Merril, 1961); *Behavior in Public Places* (New York: Free Press, 1963); *Interaction Ritual: Essays on Face-to-Face Behavior* (Garden City, NY: Doubleday, 1967); dan *Relation in Public* (New York: Basic, 1971)

politikus akan memilih suatu peran atau karakter tertentu dan memainkannya pertunjukkan pentas, kampanye politik.

Orang berupaya untuk mengolah tingkah lakunya agar orang lain terkesan kepadanya. Ketika orang menyajikan atau mempresentasikan dirinya' maka ia mencoba untuk membuat orang lain terkesan. Menurut Goffman, *self-presentation is very much a matter of impression management* (penyajian diri terkait erat dengan persoalan pengelolaan kesan). Jika misalnya seseorang (misalnya A) bertingkah laku tertentu dengan tujuan agar orang lain (misalnya B) menilai diri A hebat maka A berusaha menciptakan kesan atas dirinya, atau jika misalnya A mengharapkan agar B berpikir bahwa A menilai hebat B atau agar B berpikir mengenai perasaan A yang sesua dengan keinginan A, juga merupakan-upaya untuk menciptakan kesan.[59]

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peran atau karakter yang dipilih seseorang bukanlah sesuatu yang sepele, namun betul-betul menentukan diri seorang komunikator ketika ia berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, komunikator merupakan wakil dari diri (*self*) dan setiap individu dapat saja memiliki lebih dari satu diri (*selves*) tergantung pada bagaimana cara ia menyajikan dirinya dalam berbagai situasi yang dihadapinya dalam hidup. Performa bukanlah sesuatu sepele, tetapi secara harfiah menjelaskan siapa menjadi komunikator. Komunikator merupakan perwakilan diri dan setiap orang bisa memiliki banyak bentuk diri, bergantung pada cara-cara ketika diri dihadirkan dalam banyak situasi yanaag dihadapi dalam kehidupan.

Dalam melakukan dramaturgi (pertunjukan tertentu), aktor mungkin harus mengabaikan standar lain (misal menyembunyikan hinaan, pelecehan, atau perundingan yang dibuat sehingga pertunjukan dapat berlangsung).[60] Aspek lain dari dramaturgi di panggung depan adalah bahwa aktor sering berusaha menyampaikan kesan bahwa mereka punya hubungan khusus atau jarak sosial lebih dekat dengan khalayak dari pada jarak sosial yang sebenamya. Goffman mengakui bahwa orang tidak selamanya ingin menunjukan peran formalnya dalam panggung depannya. Orang mungkin memainkan suatu perasaan, meskipun ia menggandalkan akan peran tersebut, atau

---

[59]Morissan dan Andy Corry Wardhani, *Teori Komunikasi, tentang Komunikator, Pesan, Percakapan, dan Hubungan*, 82.

[60]George Ritzer, et.al., *Teori Sosiologi Modern* (terj) (Jakarta: Prenada Media 2004), 298.

menunjukkan keengganannya untuk memainkannya padahal ia senang bukan kepalang akan peran tersebut. Akan tetapi menurut Goffman, ketika orang melakukan hal semacam itu, mereka tidak bermaksud membebaskan diri sama sekali dari peran sosial atau identitas mereka yang formal itu, namun karena ada perasaan sosial dan identitas lain yang menguntungkan mereka.[61]

Fokus perhatian Goffman sebenarnya bukan hanya individu, tetapi juga kelompok atau apa yang ia sebut tim. Selain membawakan peran dan karakter secara individu, aktor-aktor sosial juga berusaha mengelola kesan orang lain terhadap kelompoknya, baik itu keluarga, tempat bekerja, partai politik, atau organisasi lain yang mereka wakili. Semua anggota itu oleh Goffman disebut "tim pertunjukan" *(performance team)* yang mendramatiasikan suatu aktivitas. Kerjasama tim sering dilakukan oleh para anggota dalam menciptakan dan menjaga penampilan dalam wilayah depan. Mereka harus mempersiapkan perlengkapan pertunjukan dengan matang dan jalannya pertunjukan, memainkan pemain inti yang layak, melakukan pertunjukan secermat dan seefisien mungkin, dan kalau perlu juga memilih khalayak yang sesuai. Setiap anggota saling mendukung dan bila perlu memberi arahan lewat isyarat *nonverbal*, seperti isyarat dengan tangan atau isyarat mata, agar pertunjukan berjalan mulus.[62]

Keakraban atau hubungan baik antar komunikator politik dan khalayak, merupakan hal yang penting dalam proses dan efektivitas komunikasi politik. Keakrapan ini bisa dicapai jika komunikator dengan khalayak dapat hidup bersama, bekerja bersama, dan bermain bersama. Goffman menekankan bahwa pertunjukan yang dibawakan suatu tim sangat bergantung pada kesetiaan setiap anggotanya.[63] Setiap anggota tim (partai) memegang rahasia tersembunyi bagi khalayak yang memungkinkan kewibawaan tim tetap terjaga. Dalam kerangka yang lebih luas, sebenarnya khalayak juga dapat dianggap sebagai bagian dari tim pertunjukan. Artinya agar pertunjukan sukses, khalayak juga harus berpartisipasi untuk menjaga agar pertunjukan secara keseluruhan berjalan lancar.

---

[61]Edi Santoso dan Mite Setiansah, *Teori Komunikasi*, 57.

[62]Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Kamunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2004), 123.

[63]Lihat Edi Santoso dan Mite Setiansah, *Teori Komunikasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 57.

Karena setiap individu yang terlibat dalam komunikasi berupaya membuat kesan mengenai dirinya masing-masing maka muncullah suatu definisi umum yang diterima semua pihak atas situasi yang ada pada saat itu. Sekali definisi sudah ditetapkan maka terciptalah tekanan moral untuk mempertahankannya dengan menekan setiap penolakan dan keraguan. Orang boleh memperkaya definisi yang sudah tercipta, namun tidak boleh menentang atau menggugatnya. Pada umumnya, organisasi di masyarakat berdiri di atas prinsip ini.[64] Pengeolaan kesan politikus yang mencitrakan diri sebagai orang yang sangat terhormat di panggung politik memang telah makin memengaruhi kesan masyarakat terutama terhadap fenomena yang dilakukan politikus di panggung politik akhir-akhir ini.[65]

Hal ini dapat terjadi jika antara komunikator dan khalayak memiliki banyak persamaan, terutama dalam hal nilai-nilai, pendidikan, status dan sebagainya. Persamaan antara komunikator dan khalayak seperti ini, oleh Rogers dan Shoemaker, disebut dengan istilah homofili.[66] Sebaliknya jika komunikator dan khalayak terdapat banyak perbedaan, disebutnya dan istilah *heterofili*.[67] Beberapa bentuk atau jenis seni dan teknik aplikasi (penerapan) komunikasi politik yang sudah lama dikenal dan dilakukan oleh para politikus atau aktivis politik, antara lain retorika politik, agitasi politik, propaganda politik, lobi politik, dan tindakan politik yang dapat dilakukan dalam kegiatan politik yang terorganisasi seperti: *public relations* politik, pemasaran politik, dan kampanye politik. Semua bentuk komunikasi politik itu berkaitan dengan pembentukan citra dan opini publik yang positif.

Hal itu dapat berkaitan dengan upaya memenangkan pemilihan umum agar dapat meraih kekuasaan atau kedudukan politik di lembaga legislatif atau eksekutif sehingga dapat membuat kebijakan politik

---

[64]Morissan dan Andy Corry Wardhani, *Teori Komunikasi, tentang Komunikator, Pesan, Percakapan, dan Hubungan*, 83.

[65]Lely Arrianie, *Komunikasi Politik sebagai Interaksi simbolik*, dalam Deddy Mulyana dan Solatun, ed., *Metode Penelitian Komunikasi Contoh-contoh Penelitian Kualitatif dengan Pendekatan Praktis* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 41.

[66]Teori Komunikasi Politik ini juga mengatakan bahwa berkomunikasi yang dibangun atas kesamaan (*homofili*) akan lebih lancar dana efektif daripada didasarkan oleh ketidaksamaan (derajat, usia, ras, agama, ideologi, visi, misi, simbol politik, dan lain-lain. Evereet M. Rogers dan F. Flayd Shomeker, *Communication and Innovation* (New York: The Free Press, 1978).

[67]Ardial, *Komunikasi Politik* (Jakarta: Permata Puri Media, 2009), 82.

sesuai dengan visi, misi dan program politik para komunikator politik terutama para politikus dan partai politiknya.

Sesungguhnya, tindakan politik dramaturgi dalam peristiwa komunikasi politik bertujuan untuk membentuk citra (*image*) politik bagi khalayak (masyarakat), yaitu gambaran mengenai realitas politik yang memiliki makna, Robert[68] menjelaskan bahwa citra menunjukkan keseluruhan informasi menurut teori informasi tentang dunia ini yang telah diolah, diorganisasikan dan disimpan oleh individu.

Secara umum, citra adalah peta seseorang tentang realitas. Tanpa citra, seseorang akan selalu berada dalam suasana yang tidak pasti. Citra adalah gambaran tentang realitas, kendatipun tidak harus sesuai dengan realitas yang sesungguhnya. Menurut persepsi citra adalah dunia. Walter Lippman[69] menyebutnya *pictures in our head*. Pada dasarnya citra politik terbentuk berdasarkan informasi (verbal dan nonverbal) yang diterima baik langsung maupun melalui media politik termasuk media massa dan media sosial yang bekerja menyampaikan pesan politik. Dari uraian di dapat disimpulkan bahwa Proses sosial diartikan sebagai pengaruh timbal balik antara berbagai kehidupan bersama. Dalam hubungannya dengan proses sosial, komunikasi menjadi sebuah cara dalam melakukan perubahan sosial (*social change*). Untuk lebih jelas kesimpulan teori ada pada bagan di bawah ini.[70]

[68]Roberts,"The Nature of Communication Effects," in *The Process and Effects of Mass Communication,* W. Schramm dan D. F. Roberts, Editors (Urban, University of Illionis Press, 1977).

[69]Walter Lippman, *Public Opinion* (New York: Free Press, 1965).

[70]Sumber diadopsi dari Stephen W. Littlejohn dan Karen A. Foss, *Teori Komunikasi,* Edisi. 9, Penerjemah: Mohammad Yusuf Hamdan (Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2009), 120-130.

Bagan 02.02
Teori Tradisi Sosiokultural

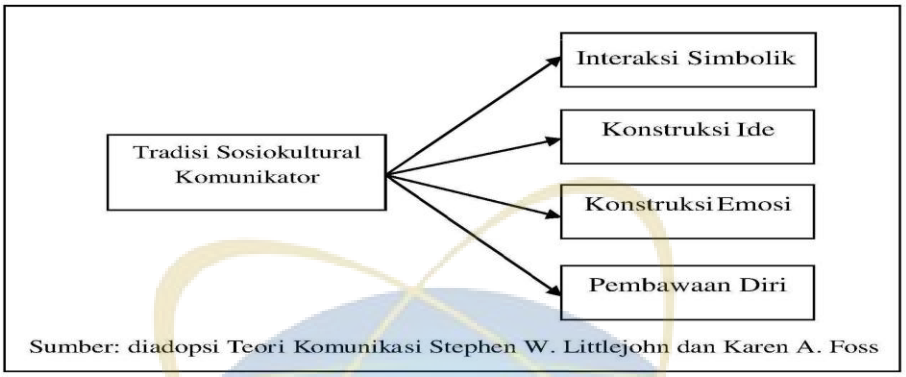

Proses sosial diartikan sebagai pengaruh timbal balik antara berbagai kehidupan bersama. Dalam hubungannya dengan proses sosial, komunikasi menjadi sebuah cara dalam melakukan perubahan sosial (*social change*). Komunikasi berperan menjembatani perbedaan dalam masyarakat karena mampu merekatkan kembali sistem sosial masyarakat dalam usahanya melakukan perubahan. Namun begitu, komunikasi juga tak akan lepas dari konteks sosialnya. Dapat dikatakan bahwa ia akan diwarnai oleh sikap, perilaku, norma, dan pranata masyarakatnya. Jadi antara komunikasi dan proses sosial saling melengkapi dan saling mempengaruhi. Seperti halnya, hubungan antara manusia dengan masyarakat.

Pola sistem komunikasi politik yang bersifat sosiokultural tersebut memiliki suatu acuan khusus yakni terdapat dalam suatu teori dari ilmu komunikasi yang bernama tradisi sosiokultural, tradisi sosiokultural tersebut memiliki beberapa unsur diantaranya; interaksi simbolik dan pengembangan diri, Konstruksi Ide (memperkenalkan diri), Konstruksi Emosi, dan Pembawaan Diri. Adapun jika disistematiskan dapat terlihat dalam bagan berikut ini:

Bagan 02. 03

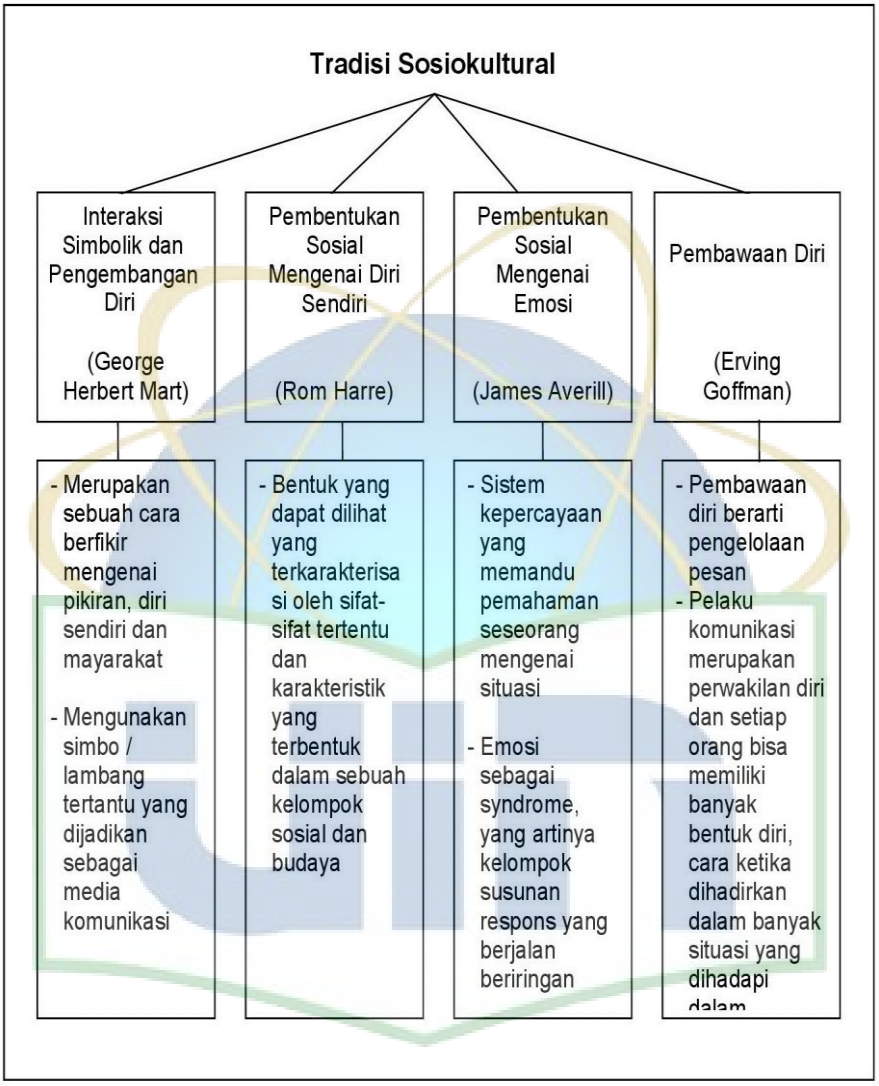
Tradisi Sosiokultural
Interaksi Simbolik dan Pengembangan Diri
(George Herbert Mart)
Pembentukan Sosial Mengenai Diri Sendiri
(Rom Harre)
Pembentukan Sosial Mengenai Emosi
(James Averill)
Pembawaan Diri
(Erving Goffman)
- Merupakan sebuah cara berfikir mengenai pikiran, diri sendiri dan mayarakat
- Mengunakan simbo / lambang tertantu yang dijadikan sebagai media komunikasi
- Bentuk yang dapat dilihat yang terkarakterisasi oleh sifat-sifat tertentu dan karakteristik yang terbentuk dalam sebuah kelompok sosial dan budaya
- Sistem kepercayaan yang memandu pemahaman seseorang mengenai situasi
- Emosi sebagai syndrome, yang artinya kelompok susunan respons yang berjalan beriringan
- Pembawaan diri berarti pengelolaan pesan
- Pelaku komunikasi merupakan perwakilan diri dan setiap orang bisa memiliki banyak bentuk diri, cara ketika dihadirkan dalam banyak situasi yang dihadapi

BAB III

KOMUNIKASI POLITIK SOSIOKULTURAL DI PKB

Dalam bab ini penulis mengulas kembali sejarah dan profil partai politik PKB secara ringkas. Sebagai partai nasional yang berbasiskan massa Nahdlatul Ulama (NU) yang telah banyak berkiprah di Indonesia baik di bidang sosial, politik dan budaya. Tidak menutup kemungkinan fenomena ini juga tidak terlepas dari hubungan PKB dengan NU itu sendiri. Mulai dari sejarah pendiriannya, para deklator partai, Visi Misi partai dan area perjuangan partai. Semua ini dikaitkan dengan segi komunikasi politik yang bersifat Sosiokultural.

A. Sejarah berdirinya PKB

Pasca pemerintahan Soeharto lengser tahun 1998, muncul babak baru perpolitikan nasional yang kita namai era reformasi. Pada era reformasi ini kebebasan politik mulai terasa, begitu juga dengan pembentukan partai politik bak rumput kering tersiram air tumbuh dan menjamur. Siapapun boleh membuat partai politik dengan ketentuan yang ada, dari mulai kelompok pengusaha, buruh, akademisi, dan organisasi-organisasi masyarakat lainnya. Begitu juga dengan Nahdlatul Ulama (NU), yang notabene organisasi masyarakat terbesar di Indonesia tidak mau ketinggalan membentuk partai politik untuk mewadahi warga NU dalam mengekpresikan hasrat politiknya.

Sehari setelah setelah Soeharto jatuh, PBNU kebanjiran usulan dari warga NU dari berbagai daerah. Tercatat ada 39 nama partai politik yang diusulkan. Nama terbanyak yang diusulkan adalah Nahdlatul Ummah, Kebangkitan Ummah, dan Kebangkitan Bangsa. Ada juga yang mengusulkan lambang partai. Unsur-unsur terbanyak yang diusulkan untuk lambang partai adalah gambar bumi, bintang sembilan, dan warna hijau. Ada yang mengusulkan bentuk hubungan dengan NU, ada yang mengusulkan visi dan misi partai, AD/ART partai, nama-nama untuk menjadi pengurus partai, ada juga yang mengusulkan semuanya.[1]

Di antara usulannya yang paling lengkap adalah Lajnah Sebelas dari Rembang yang diketuai KH M Cholil Bisri dan PWNU Jawa Barat. Dalam menyikapi usulan yang masuk dari masyarakat

---

[1]Daniel Dhakidae, *Partai-partai Politik Indonesia 2004-2009* (Jakarta: Kompas, 2004), 254.

Nahdliyin, PBNU menanggapinya secara hati-hati. Hal ini disebabkan masih menghormati keputusan hasil Muktamar NU ke-27 di Situbondo tahun 1984 yang menetapkan bahwa secara organisatoris NU tidak terkait dengan partai politik manapun dan tidak melakukan politik praktis. Dalam mengemban amanat muktamar tersebut, PBNU oleh sebagian kalangan Nahdliyin belum memuaskan warga NU.Sebagian kalangan NU dengan tidak sabar bahkan langsung menyatakan berdirinya partai politik untuk mewadahi aspirasi politik nahdliyin setempat. Misalnya Partai Bintang Sembilan di Purwokerto dan Partai Kebangkitan Ummat di Cirebon.

Atas desakan warga NU dari berbagai daerah di Indonesia, Akhirnya, PBNU mengadakan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 3 Juni 1998, yang menghasilkan keputusan untuk membentuk Tim Lima yang diberi tugas untuk memenuhi aspirasi warga NU. Tim Lima diketuai oleh KH Ma'ruf Amin (Rais Suriyah/Koordinator Harian PBNU), dengan anggota, KH M Dawam Anwar (Katib Aam PBNU), Dr KH Said Aqil Siradj, M.A. (Wakil Katib Aam PBNU), HM Rozy Munir,S.E., M.Sc. (Ketua PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekretaris Jenderal PBNU). Untuk mengatasi hambatan organisatoris, Tim Lima itu dibekali Surat Keputusan PBNU.[2]Selanjutnya, untuk memperkuat posisi dan kemampuan kinerja Tim Lima seiring semakin derasnya usulan warga NU untuk menginginkan partai politik, maka pada rapat Harian Syuriah dan Tanfidziyah PBNU pada tanggal 20 Juni 1998 memberi Surat Tugas kepada Tim Lima, selain itu juga dibentuk

Tim Asistensi yang diketuai oleh Arifin Djunaidi (Wakil Sekjen PBNU), dengan anggota H Muhyidin Arubusman, H.M. Fachry Thaha Makruf, Lc., Drs. H. Abdul Aziz, MA., Drs. Andi Muarli Sunrawa, H.M. Nasihin Hasan, H.Lukman Saifuddin, Drs. Amin Said Husni dan Muhaimin Iskandar. Tim Asistensi bertugas membantu Tim Lima dalam menginventarisasi dan merangkum usulan yang ingin membentuk partai politik baru dan membantu warga NU dalam melahirkan partai politik baru yang dapat mengaspirasi politik warga NU.

Pada tanggal 22 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan rapat untuk mendefinisikan dan mengelaborasi tugas-tugasnya. Pada tanggal 26-28 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan pertemuan di Villa Citra Cipanas untuk menyususun

---

[2]Musa Kazhim dan Alfian Hamzah, *5 Partai Dalam Timbangan, Analisis dan Prospek* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), 238.

rancangan awal pembentukan partai. Dari rapat-rapat Tim Lima tersebut menghasilkan: Pokok-pokok Pikiran NU Mengenai Reformasi Politik, Mabda' Siyasiy, Hubungan Partai Politik dengan NU, AD/ART dan Naskah Deklarasi.[3]

Kemudian, pada tanggal 4-5 Juli 1998 diadakan Silaturrahim Nasional Alim Ulama dan Tokoh NU di Bandung guna memperoleh masukan yang lebih luas dari warga NU. Dalam kesempatan ini muncul tiga alternatif mengenai nama parpol, yakni Nahdlatul Ummah, Kebangkitan Umat, dan Kebangkitan Bangsa. Berikutnya, setelah melalui diskusi verifikasi pada tanggal 30 Juni 1998, pertemuan finalisasi pada tanggal 17 Juli 1998, dan konsultasi dengan berbagai pihak, Tim Lima dan Tim Asistensi menyerahkan hasil akhir kepada rapat harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU pada tanggal 22 Juli 1998. Rapat tersebut telah menerima rancangan yang disiapkan Tim Lima dan Tim asistensi untuk diserahkan kepada pengurus parpol sebagai dokumen historis dan aturan parpol.

Akhirnya pada tanggal 29 Rabiul Awwal 1419 H/ 23 Juli 1998 M, di kediaman Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di Ciganjur Jakarta, dideklarasikan partai politik dengan nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dengan dideklarasikan oleh para kiai-kiai dan tokoh-tokoh NU, para Deklarator itu ialah Munasir Ali, Ilyas Ruchiyat, Abdurrahman Wahid, A. Mustofa Bisri, A.Muhith Muzadi. Di bawah ini naskah Deklarasi pendirian Partai Kebangkitan Bangsa yang dibacakan oleh salah satu deklator yaitu KH Muchit Muzadi.

Dari mulai dideklarasikan sampai sekarang kepengurusan PKB sudah lima kali pergantian kepemimpinan, KH Ma'ruf Amin (Ketua Dewan Syuro) - Matori Abdul Djalil (Ketua Umum Dewan Tanfidziyah) 1998-1999, KH Abdurrahman Wahid - Matori Abdul Djalil (2000-2001), KH Abdurrahman Wahid - Alwi Shihab (2002-2005), KH Abdurrahman Wahid - Muhaimin Iskandar (2005-2010). Terakhir KH Abdul Aziz Manshur - Muhaimin Iskandar (2008-2015) sesuai versi hasil Muktamar Luar Biasa PKB 2008.

---

[3]Musa Kazhim dan Alfian Hamzah*, 5 Partai Dalam Timbangan, Analisis dan Prospek*

B. Struktur Organisasi PKB

Partai mempunyai struktur antara lain adalah Pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, pimpinan kecamatan atau yang sering disebut pimpinan ranting. Struktur diatas mempunyai anggota-anggota yang berbeda latarbelakang mulai dari pendidikan, agama, etnis, ekonomi, maupun kelas sosial. Sebagai partai yang lahir dari rahim NU, baik secara struktur maupun kultur PKB mengadopsi NU. Secara struktur, PKB mengkopi struktur NU yang membagi kepemimpinan dalam dua lembaga, yaitu Dewan Syura sebagai penentu kebijakan umum dan Dewan Tanfidz sebagai pelaksana kebijakan partai. Di tubuh PKB, Dewan Syura mempunyai posisi sentral dan merupakan pimpinan tertinggi yang menentukan kebijakan partai. Format ini persis seperti struktur kepemimpinan NU di mana Syuriah memegang kepemimpinan jamiyah yang dilaksanakan oleh pengurus harian yang disebut Tanfidziyah.

Jika di NU otoritas ulama ditentukan melalui lembaga Syuriah, di PKB diwadahi dalam Dewan Syura.[4] Struktur organisasi PKB[5] bersifat hirarkis dan biroratis. Kewenangan, tugas dan kewajiban di Tingkat Pusat mengikat dan harus di ikuti kepemimpinan partai di tingkat yang lebih rendah darinya. Secara lebih rinci, struktur organisasi dan kepengurusan PKB adalah sebagai berikut:

a. Organisasi Tingkat Pusat, dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat;
b. Organisasi Daerah Tingkat I, dipimpin oleh Dewan Pengurus Wilayah;
c. Organisasi Daerah Tingkat II, dipimpin oleh Dewan Pengurus Cabang;
d. Organisasi Tingkat Kecamatan, dipimpin oleh Dewan Pengurus Anak Cabang;
e. Organisasi Tingkat Desa/Kelurahan, dipimpin oleh Dewan Pengurus Ranting;[6]

---

[4]A Effendi Choirie, *Islam-Nasionalisme UMNO-PKB, Studi Komparasi dan Diplomasi* (Jakarta: Pensil-324, 2008), 118.

[5]Struktur Organisasi Partai dan Desentralisasi Kewenangan, AD/ART Hasil Muktamar Luar Biasa di Ancol, 33.

[6] Pasal 12 Anggaran Dasar PKB .

Table. 03. 01
Struktur Organisasi PKB

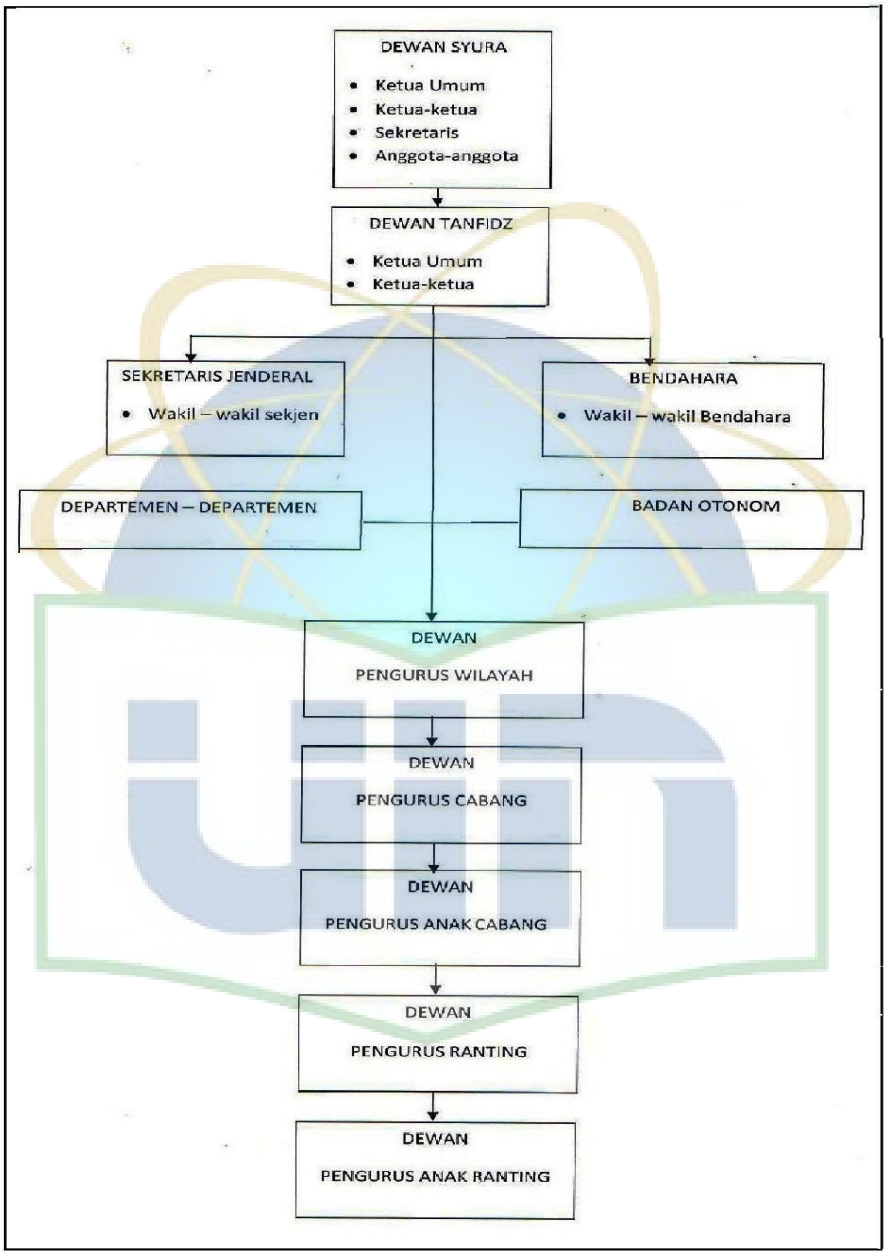

Sumber diolah dari data AD/ART 2008

Dewan Pengurus Pusat (DPP) mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan partai di tingkat nasional dan mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dan Dewan Pengurus Cabang (DPC).

Dewan Pengurus Wilayah PKB mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan partai di daerah propinsi, memberikan rekomendasi kepada DPP untuk pengesahan komposisi dan personalia DPC, serta pengesahan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) dengan memperhatikan rekomendasi DPC yang bersangkutan.[7] Dewan Pengurus Cabang PKB mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan partai di daerah kabupaten/ kota, memberikan rekomendasi kepada DPW untuk mengesahkan komposisi dan personalia DPAC, mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Ranting (DPRt), serta mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Anak Ranting (DPARt).[8]

Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) berkewenangan menetapkan kebijakan partai di tingkat kecamatan dan memberikan rekomendasi kepada DPC untuk pengesahan komposisi dan personalia DPRt.sementara itu DPRt mempunyai kewenangan mengesahkan kebijakan partai di tingkat desa atau kelurahan dan memberikan rekomendasi kepada DPC untuk mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Anak Ranting.

Adapun DPARt mempunyai kewenangan untuk melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan partai serta menetapkan dan memberhentikan komisaris/ koordinator lapangan partai pada tingkat dusun/ lingkungan/ kawasan pemukiman berdasarkan rapat pleno.[9]

Struktur kepengurusan PKB pada masing-masing tingkatan organisasiterdiri dari Dewan Syura dan Dewan Tanfidz.[10] Dewan Syura PKB adalah pimpinan tertinggi partai yang menjadi rujukan utama kebijakan-kebijakan umum partai. Sedangkan Dewan Tanfidz adalah pimpinan eksekutif partai yang menjalankan kebijakan-kebijakan strategis, mengelola organisasi dan program partai.[11] Dewan Syura merupakan dewan pimpinan kolektif yang terdiri dari para ulama dan para ahli serta mencerminkan representasi daerah, sebagai pemegang amanah kepemimpinan partai tertinggi di setiap tingkatan.

---

[7]Pasal 13 Anggaran Rumah Tangga PKB.
[8]Pasal 14 Anggaran Rumah Tangga PKB.
[9]Pasal 15, 16, dan 17 Anggaran Rumah Tangga PKB.
[10]Pasal 15 Anggaran Dasar PKB.
[11]Pasal 16 Anggaran Dasar PKB.

Sedangkan dewan tanfidz adalah dewan pelaksana harian yang bertugas mengelola organisasi partai di setiap tingkatan. Dewan Syura tingkat pusat beranggotakan sebanyak-banyaknya 19 orang, di tingkat wilayah sebanyak-banyaknya 13 orang, tingkat cabang 11 orang, tingkat anak cabang 9 orang, ranting 7 orang, anak ranting 5 orang. Dewan Syura tingkat pusat dipilih melalui muktamar, tingkat wilayah melalui konferensi wilayah, cabang melalui konferensi cabang, tingkat anak cabang melalui musyawarah anak cabang, dan tingkat ranting melalui musyawarah ranting. Periode kepengurusan Dewan Syura di semua jenjang adalah 5 tahun.[12]

Dewan Syura mempunyai wewenang untuk mengawasi dan memberikan pertimbangan terhadap kebijakan umum partai sesuai dengan AD/ART partai dan forum-forum permusyawaratan partai. Dewan Syura mempunyai tugas memelihara kemurnian perjuangan partai, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan umum oleh dewan tanfidz, dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada forum permusyawaratan tertinggi partai di tingkatnya masing-masing. Dewan Tanfidz adalah dewan pelaksana harian yang bertugas mengelola organisasi partai di setiap tingkatan. Dewan Tanfidz di setiap peringkat organisasi dipilih oleh forum tertinggi di tingkatan organisasi masing-masing untuk masa jabatan lima tahun dan mempertanggungjawabkan tugas di forum tertinggi tersebut. Dewan Tanfidz di tingkat pusat terdiri dari ketua umum, beberapa ketua sekretaris jenderal, beberapa wakil sekretaris jenderal, bendahara umum dan beberapa wakil bendahara. Sedangkan Dewan Tanfidz mulai dari tingkat wilayah sampai tingkat anak ranting terdiri dari ketua, beberapa wakil ketua, sekretaris, beberapa wakil sekretaris, bendahara dan beberapa wakil bendahara. Dewan Tanfidz memiliki wewenang untuk menentukan pola pengelolaan partai sesuai dengan kebijaksanaa Dewan Syura, serta membentuk perangkat dan kelengkapan partai di tingkatannya masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.[13]

Proses pengambilan keputusan di PKB ditempuh melalui dua cara. Pertama, dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat. Kedua, bila cara pertama tidak berhasil, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak atau voting. Untuk mengambil keputusan

---

[12]Pasal 18 Anggaran Rumah Tangga PKB.

[13]Pasal 19 Anggaran Rumah Tangga PKB dan Pasal 21 Anggaran Rumah Tangga PKB.

partai, PKB memiliki beberapa jenis permusyawaratan partai, yaitu Muktamar, Muktamar Luar Biasa, Musyawarah Kerja Nasional, Musyawarah Pimpinan, Musyawarah Wilayah, Musyawarah Cabang, Musyawarah Ranting, dan Musyawarah Kerja Ranting.[14]

C. Hubungan Komunikasi Politik PKB dan NU Berdasarkan Unsur Sosiokultural

Munculnya kembali *girah* euforia politik warga *Nahdhiyyin* ini tentu bukanlah sekedar ingin ikut-ikutan atau tanpa sadar. Secara internal oganisasi, keinginan warga NU tersebut pada umumnya didasari oleh tiga hal. *Pertama*. Bermotif berdakwah dalam rangka menjalankan *amar ma'rūf nahi munkar* yang sudah lama menjadi doktrin ajaran politik NU. Kedua, potensi sosialogis dan historis dimana solidaritas dan emosionalitas ke-NU-an yang potensial untuk menjadi kekuatan politik. Dan ketiga, dalam sejarah, peran politik warga NU selama hampir tiga dasawarsa termarjinalisasi dalam politik dan seolah tidak habis-habisnya mendapat perlakuan yang tidak adil, baik dari negara maupun dari kelompok Islam lainnya.[15]

Sepanjang bulan Juni, Gus Dur masih saja tidak yakin mengenai arah yang harus di tempuhnya. Akan tetapi, ia merasa sangat khawatir bahwa jika dalam kekosongan situasi setelah masa Soeharto, Golkar mempunyai posisi baik untuk melakukan konsolidasi dan melaksanakan kampanye pemilu secara profesional, tidak menutup kemungkinan Golkar akan keluar sebagai pemenang, apalagi jika PPP bersedia untuk membentuk koalisi dengan Golkar. Secara bersama-sama, kedua partai yang besar ini mungkin ini bisa mengumpulkan cukup suara yang di perlukan untuk membentuk pemerintahan, khususnya jika sebagian dari partai-partai Islam juga bergabung.[2]

Dari rasa kekhawatiran Gus Dur itu. Maka pada akhirnya PB NU mengadakan Rapat Harian Suriyah dan Tanfidziyah PBNU pada tangal 3 Juni 1998 yang menghasilkan keputusan untuk membentuk

---

[14]Anggaran Dasar PKB pasal 18 (1)

[15]Selanjutnya, untuk memperkuat posisi dan kemampuan kerja Tim Lima dalam mewujudkan keinginan warga NU untuk membentuk partai politik sendiri, maka dibentuk Tim Asistensi yang diketuai oleh Arifin Djunaedi (Wakil Sekjen PBNU) dan anggota H. Muhyiddin Arubusman, H.M Fachri Thaha Ma'ruf, Lc., Drs. Amin Said Husni dan Muhaimin Iskandar. Tim Asistensi bertugas membantu Tim Lima dalam menginventarisasi dan merangkum usulan yang ingin membentuk partai baru, dan membantu warga NU dalam melahirkan Parpol baru yang dapat mewadahi politik warga NU. Ahmad Hakim Jaily dan Muhammad Tohadi, *PKB dan Pemilu 2004* (Jakarta: Lembaga Pemenangan Pemilu PKB, 2003), 4.

Tim Lima yang diberi tugas untuk memenuhi aspirasi warga NU. Tim Lima diketua oleh K.H. Ma'ruf Amin (Rais Suriyah/Koordinator Harian PBNU), dengan anggota, K.H. M. Dawam Anwar (Katib'Aam PBNU), Dr. K.H. Said Aqil Siradj, M.A. (Wakil Katib 'Aam PBNU), H.M. Rozy Munir, S.E., M.Sc (Ketua PBNU), dan Ahmad Bagja (Sekertaris Jenderal PBNU). Untuk mengatasi hambatan organisatoris, Tim Lima itu dibekali Surat Keputusan.

Setelah Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan rapat untuk mendefinisikan dan mengelaborasikan tugas-tugasnya pada tanggal 22 Juni 1998 yang kemudian disusul dengan mengadakan konsinyering di Villa La Citra, Cipanas untuk merancang pembentukan Parpol dengan menghasilkan lima rancangan, yaitu: Pokok-pokok pikiran NU mengenai Reformasi Politik, Mabda' Siyasi, hubungan Partai Politik dengan NU, AD/ART, dan naskah Deklarasi.[16]

Komunikasi politik antara NU sebagai ormas dan PKB sebagai partai politik, sejatinya menjadi mitra dalam mengartikulasikan aspirasi politik warga nahdliyin. PBNU dibawah kepemimpinan Hasyim Muzadi, berjarak dengan PKB, berbeda pada masa Abdurrahman Wahid, PKB menjadi anak emas NU. Hubungan NU dan PKB dilihat dari sisi historis cukup baik, namun dalam perjalannya tampak adanya demarkasi. Namun NU dan PKB memiliki tujuan politik yang jelas.

Organisasi NU menekankan pengikutnya pada mazhab tertentu,[17] yang sangat mengapresiasi mazhab Syaf'i disamping juga mempergunakan mazhab fiqh Sunni yang lainnya, sebuah mazhab yang sangat toleran dan akomodatif terhadap zaman. Sehingga perubahan setting tempat dan waktu akan memungkinkan perubahan fatwa, istilah *qaul qadīm* (fatwa lama) dan *qaul jadīdd* (fatwa baru) merupakan sebuah bentuk bahwa fatwa tentang sesuatu cenderung dinamis. Dalam konteks politik, Mazhab Syafi'i juga cenderung sangat akomodatif bahkan dalam batas tertentu "ada ruang pragmatisme" yang cukup kental demi tercapainya kemaslakhatan. **Table. 03. 02**

Komunikasi Politik NU

---

[16]Abdurrahman Wahid, *Deklarasi Partai Kebangkitan Bangsa*, (NU Jawa Timur, 2000), 28. Lihat situs resmi DPP PKB: http://www.dpp.pkb.or.id/sejarah-pendirian (di akses 10 Oktober 2012).

[17]Andi Faisal Bakti, *Nation BuldingKontribusi Muslim dalam Komunikasi Lintas Agamadan Budaya terhadap Kebangkitan Bangsa Indonesia* (Ciputat: Churia Press, 2010), 165.

Organisasi (PBNU) dan Partai Politik (PKB)

Tujuan Politik Elite	Organisasi NU	Partai Politik (PKB)
Visi dan Misi (politik) NU dan PKB	Visi NU berdasarkan hasil Muktamar ke-31 yakni; sebagi wadah tatanan masyarakat yang sejahtera, berkeadilan dan demokratis atas dasar Islam aswaja. Misi; mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir batin, dengan mengupayakan sistem perundangan dan mempengaruhi kebijkan yang menjamin terwujudnya masyarakat sejahtera. Mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan advokasi masyarakat dan mewujudkan masyarakat demokratis dan berakhlaqul karimah. NU sebagai organisasi sosial keagamaan tidak terlibat dalam politik praktis, partai politik atau mendukung kekuatan politik kekuasaan. NU memiliki visi politik untuk pendidikan politik kerakyatan sekaligus membawa misi politik untuk memperjuangkan aspirasi warga NU dan warga negara pada umumnya demi kemaslahatan. Untuk itu, NU mengembangkan politik kebangsaan atau kerakyatan, bukan politik kekuasaan. Dalam hal ini, NU melakukan kontrol atau presser terhadap kebijakan pemerintah yang menyimpang.	Visi PKB sesuai demokratisasi adalah menciptakan tatanan politik yang demokratis, bebas korupsi, berkeadilan dan mensejahterakan masyarakat. Sedangkan misinya adalah melakukan penataan kelembagaan negara yang dapat mendukung proses demokratisasi. Kemudian mendorong tumbuhnya sistem politik yang demokratis, mengimplementasikan penegakan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta mendorong munculnya masyarakat dan kepemimpinan sipil yang kuat.
Tujuan Politik	Hasil muktamar NU ke-30 di Solo 2004, tidak spesifik menyebut tujuan politik jam'iyah. Tapi dikemukakan program pemberdayan politik warga NU adalah menyusun konsep pendidikan politik melalui lembaga pendidikan NU, memfasilitasi pemantauan kinerja dewan perwakilan, mengembangkan sikap kritis warga terhadap kinerja partai, mewujudkan rekonsiliasi nasional, menjalin kerja sama untuk menyalurkan aspirasi politik warga NU melalui komponen politik yang bermanfaat bagi NU	Mewujudkan cita-cita kemerdekaan RI sesuai amanat UUD 1945, mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir-batin dan material-spritual, mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhlaqul karimah.

Sumber: Berdasarkan Data Hasil Muktamar NU ke-31 dan Muktamar PKB 2004

Tujuan komunikasi politik elit NU dan PKB secara riil dapat dikatakan bahwa PKB memiliki tujuan politik praktis untuk meraih kekuasaan, diantara dengan menempatkan kader-kadernya di parlemen untuk menyuarakan aspirasi politik Nahdliyin. Sementara NU sebagai

jam'iyah mengusung cita-cita politik kerakyatan untuk kemaslahatan warga NU dan negara-bangsa. Cita-cita politik NU tersebut tidak terlepas perannya sebagai organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia sehingga harus turut serta dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan mengawal keutuhan negara bangsa dalam koridor NKRI. Dalam hal ini, tujuan politik NU bukan pada kekuasaan politik, tetapi pada upaya membangun citra dan pengaruhnya demi eksistensi NU sendiri.

Sementara hubungan NU dan PKB sejatinya berjalan sinergis dengan wilayah masing-masing. PKB tentunya bertugas menyalurkan aspirasi politik warga NU. Sementara itu, Arifin Junaidi menggambarkan NU dan PKB sebagai dua sisi mata uang. Dengan demikian, memperjuangkan tercapainya tujuan NU berarti memperjuangkan tercapainya tujuan PKB, demikian juga sebaliknya. Namun pencapaian tujuan tersebut tidak dapat dicapai dengan politik. Karenanya PKB dapat memainkan perannya sebagai alat politik, sementara NU tetap memainkankan perannya sebagai gerakan jam'iyah di wilayah sosial, keagamaan dan kultural. Peran politik yang dapat dijalankan NU adalah politik kerakyatan atau moral kebangsaan. Jika polarisasi peran tersebut dilanggar, bisa terjadi disharmoni.[18]

D. Mendeklarasikan Partai Advokasi dan Sebagai Partai Terbuka

Partai Kebangkitan Bangsa melalui forum Muktamar II PKB di Semarang tahun 2005 telah mendeklarasikan diri sebagai partai advokasi. Sebagai partai advokasi, PKB bertekad mengkhidmatkan perjuangannya untuk memberikan pembelaan terhadap kepentingan kelompok-kelompok yang rentan, yang selalu terpinggirkan dan acap dikorbankan dalam proses pembangunan, seperti masyarakat di pedesaan, petani, guru swasta, nelayan, institusi pondok pesantren, dan lain sebagainya yang secara faktual merupakan basis konstituen PKB.[19]

Sebagai organ perjuangan PKB di Dewan Perwakilan Rakyat, Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR RI dituntut untuk mampu menerjemahkan garis-garis besar kebijakan partai yang diamanatkan

---

[18]Arifin Junaidi, "Belajar dari Sejarah PKB" dalam, *9 Tahun PKB: Kritik dan Harapan,* (Jakarta: DPP PKB, 2007), 40.

[19]Helmy Faishal Zaini (ed), *Khidmat Kami Bagimu Negeri. Laporan Kinerja Fraksi Kebengkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (FKB-DPR RI)* (Jakarta: FKB-RI), 114-116.

dalam Muktamar II PKB di Semarang tersebut, dalam proses pergulatan di parlemen, meskipun dengan kekuatan yang terbatas. 52 (lima puluh dua) anggota FKB menyikapi secara kritis berbagai rencana kebijakan dalam perspektif pembelaan terhadap kepentingan kelompok- kelompok marginal, seperti undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang tentang Penyuluh Pertanian, UU tentang Guru dan Dosen, dan lain- lain. Begitu juga dalam proses pembahasan Rancangan Anggaran Belanja Negara, FKB DPR RI berjuang keras untuk mengalokasikan anggaran yang berpihak kepada kelompok marginal seperti anggaran Bantuan Operasional Siswa (BOS) Pesantren, tunjangan untuk kesejahteraan guru swasta, bantuan untuk pondok pesantren. Semua upaya ini dilakukan untuk mendharmabaktikan perjuangan FKB dan PKB guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi anak-anak negeri.

Advokasi juga bisa menjadi momentum untuk mengembalikan peran ulama di tengah kehidupan masyarakat bangsa dan rakyat banyak, di mana salah satu sumber opini hukum (legal opinion) yang menjadi ciri khas PKB adalah farwa para ulama, Dengan karakter seperti ini, hubungan historis, kultural dan aspiratif antara Nahdlatul Ulama dan PKB bisa berjalan seiring, saling melengkai dan menguatkan, tanpa harus membuat PKB kehilangan watak aslinya sebagai partai terbuka dan partai nasional.[20]

Di samping itu PKB membangun sebuah citra sebagai partai yang terbuka dan modern, PKB dikenal sebagai partainya orang NU dan pemilihnya adalah kalangan NU.[21] PKB tidak menjadi partai lokal dan eksklusif. maka PKB harus disebutkan sebagai partai yang terbuka dan modern.[22] Menjadi partai politik yang terbuka meski berbasis

---

[20]Karena alasan-alasan rersebur, memperj uangkan dan mewujudkan PKB sebagai partai advokasi sudah menjadi kornirrnen saya sebagai pribadi dan sejak saya dipercaya menjadi Sekreraris jenderal DPP PKB. Pasca Muktamar di Semarang, saya berharap bisa diletakkan landasan yang kokoh bagi PKB sebagai partai advokasi yang akan terus diperjuangkan dan dipertahankan di masa yang akan datang sebagai praktek polirik harian yang berkelanjutan. Dalam konreks ini, advokasi dengan sendirinya abo menjadi kerja politik dan kampanye partai sepanjang wakru yang akan membesarkan dan memperkokoh eksistensi dan peran PKB di tengah masyarakat, sekaligus memberinya peluang untuk berperan dalam wilayah yang lebih luas. A. Muhaimin Iskandar, *Melampaui Demokrasi Merawat Bangsa Dengan Visi Ulama* (Yogyakarta: DPP PKB dan KLIK.R, 2006), 30.

[21]Sebagaimana tertuang dalam AD/ART Partai bersifat kebangsaan, demokratis dan terbuka. Pasal 6.

[22]DPP PKB. Dokumen Muktamar Luar Biasa Partai Kebangkiten Bangsa. (Jakarta: DPP PKB, 2002), 47-49.

massa pendukung umat Islam. Pancasila tetap sebagai asas dan Islam menjadi semangat serta nilai yang mendasarinya. Berpijak pada AD/ART basis ideologi PKB adalah Pancasila dan memiliki sifat sebagai partai terbuka dalam pengertian lintas agama, suku, ras dan lintas golongan yang dimanifestasikan dalam bentuk visi, misi, program perjuangan, keanggotaan dan kepemimpinan.[23]

Islam lebih dimaknai sebagai motivator kebangkitan bangsa. PKB melihat ajaran Islam terdiri dari dua macam. Pertama, ajaran yang sifatnya formal, dan ajaran yang sifatnya etik.[24] Formal harus dilakukan sesuai dengan apa adanya seperti bidang ritual shalat, tetapi yang etik harus diambil semangatnya sementara tentang teknik operasionalnya diserahkan kepada manusia, hal ini seperti ajaran tentang politik.

Karenanya, dalam memandang soal politik PKB menjadikan Islam sebagai landasan etik tersebut, bukan sebagai azas seperti dalam PPP.[25] Sebagai bukti, PKB memaknai etik Islam dalam konteks politik di Indonesia pada era reformasi ini sebagai "kebangkitan" dan "kebangsaan" seperti terlihat pada namanya. Bagi PKB Islam harus membangkitkan semangat umat yang sedang mengalami peminggiran dan ketidakadilan selama Orde Baru. Bagi PKB komitmen Islam tidak hanya kepada umat Islam saja yang terbatas, tetapi harus kepada seluruh bangsa Indonesia. Komitmen itu terlihat pada slogan, "PKB dari ulama untuk bangsa."

---

[23]Anggaran Dasar Bab IV Sifat dan Fungsi Pasal V Partai Bersifat Kebangsaan, Demokratis dan Terbuka. Hasil Muktamar Luar Biasa di Ancol, 14.

[24]Moh. Nurhakim, "Pemaknaan Agama dalam Partai Politik" dalam jurnal *Humanity,* Volume I Nomor 1 September 2005: 61 – 68. versi HTML dari file http://ejournal.umm.ac.id/index.php/humanity/article/viewFile/807/844_umm_scientific_journal.pdf. (di akses 12 Januari 2013).

[25]PPP memandang Islam sebagai *way of life.* Dalam arti bahwa Islam diyakini sebagai ajaran yang menyeluruh meliputi urusan ukhrawi dan duniawi, serta urusan roham danjasmam. Selanjutnya, sebagai ajaran yang menyeluruh, Islam dijadikan pedoman hidup dalam seluruh dimensinya, termasuk dimensi politik. Dalam kehidupan politik sekalipun Islam telah memberi petunjuk dan pedoman yang jelas. Karena itu misi politik Islam harus diperjuangan lewat jalur politik yang berlandaskan pada Islam pula. Praktik politik pun haruslah merujuk pada akhlak Islam, tidak yang lain, apalagi penduduk mayoritas di Indonesia adalah orang Islam. Lebih jauh lagi, dalam konteks politik PPP berusaha memaknai Islam sebagai kekuatan pemersatu dan pendorong pembangunan nasional. Hal ini terlihat pada *platform* partai dan namanya: Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Moh. Nurhakim, "Pemaknaan Agama dalam Partai Politik," dalam jurnal *Humanity,* 65.

Tetapi, di samping itu PKB memaknai Islam sebagai simbol yang mampu menjadi faktor integrasi dan pencetak identitas. Karenanya di antara ketiga partai ini, PKB adalah yang paling berhasil menggunakan politik simbol, di mana ia banyak menggunakan dan memanfaatkan simbol-simbol keagamaan dalam berpolitik yang telah tampak pada *platform* dan simbol partai. Sebagaimana diketahui bahwa simbol merupakan tanda yang menunjuk kepada nilai-nilai.[26]

Melihat posisi agama yang spasial dengan politik ini, sepintas memperlihatkan PKB tidak konsisten. Secara formal menolak agama sebagai asas Partai, tetapi secara fungsional terdapat koneksitas antara keduanya.[27] Bahkan, bentuk koneksitas itu secara terang-terangan ditunjukkan dalam penggunaan simbol-simbol keagamaan dalam partai yang sangat dominan. Diperkirakan, tanpa politik simbol ini, PKB kurang mendapat dukungan yang signifikan.

Dalam platform PKB dijelaskan bahwa sifat Partai Kebangkitan adalah kebangsaan, demokratis dan terbuka (inklusif). Menurut Matori Abdul Jalil, inklusifitas PKB mewarisi watak inklusifnya NU dalam beragama, maka ketika PKB lahir sebagai partai yang inklusif orang tentu saja tidak terkejut, sebab inklusifisme sudah mendarah daging di tubuh NU.[28] Menurut Masykur Maskub, NU tidak hanya membatasi diri pada upaya pemecahan masalah-masalah yang menyangkut kepentingan warga Nahdliyin saja, tetapi diperluas hingga mencakup kepentingan bangsa.[29] Disadari bahwa Indonesia bukanlah

---

[26] Keterkaitan antara nilai, simbol dan bahasa memiliki pengaruh yang sangat kuat. "Ungkapan simbolik yang saling terjalin dan diartikulasikan melalui bahasa, merupakan sarana sosialisasi yang sekaligus dapat menciptakan suatu ikatan sosial antara individu dan kelompok, sebab peran-peran dan relasi-relasi sosial yang ada di masyarakat disampaikan melalui bahasa." Kyosti Pakonen, "Symbols and Politics as Culture in the Modern Situation: The Problem and Prospects of the 'New.'" In John R. Gibbons (ed), *Contemporary Political Culture Politics in a Postmodern World* (London: Sage Publications, 1989), 132.

[27]Kesan ketidakkonsistenan ini terlihat pula antara sikap dan pandangan sang deklarator, Abdurrahman Wahid dengan realitas massa pendukung PKB. Abdurrahman Wahid menghendaki spasialisasi tegas atau bahkan "sekularisasi", tetapi umumnya massa bahkan elit ulama tidak dapat membedakan antara keduanya, bahkan cenderung "mempolitisir agama". Fenomena ketegangan bahkan konflik antarwarga NU yang mendukung PPP dan yang mendukung PKB disebabkan salah satunya karena ketidakkonsistenan atau ketidakjelasan posisi agama dengan politik di sini. Sekularkah, spasialkah, atau terintegrasi.

[28]Matori Abdul Jalil, *Dan NU untuk Kebangkitan Bangsa*, 187-190.

[29] Masykur Maskub, "Agenda Ke Depan NU Pasca Gus Dur dan Gus Dui Pasca NU", dalam Marzuki Wahid. Abd. Moqsith Ghazali dan Suwendi (ed.),

negara yang dihuni oleh kelompok tunggal masyarakat, melainkan beraneka ragam etnis, budaya, bahasa, dan agama yang dibingkai dengan bhineka tunggal ika dengan ikatan Pancasila. Keadilan dan kemakmuran yang akan diwujudkan oleh PKB tidak terbatas hanya keadilan dan kemakmuran untuk warga NU saja, atau umat Islam, melainkan untuk bangsa secara keseluruhan. Hanya persoalannya, apakah inklusifisme NU itu hanya dalam retorik yang dituangkan dalam platform partai, atau menjadi kenyataan politik? Said Aqil Siraj, Katib Syuriah PBNU pada waktu itu, menyangsikan sifat terbuka PKB dapat menjadi kenyataan. Begitupun Ulil Abshar Abdalla, generasi muda NU yang progresif dan aktif di Lakpesdam juga sangsi, karena menurutnya tidak ada partai politik yang betul-betul inklusif.[30] Ahmad Thohari juga menyangsikan kesungguhan PKB menjadi partai inklusif, karena untuk menentukan ketua PKB dipilih yang ke NU-annya tidak diragukan. Semua pengurusnya NU, lambang partainya pun gambar jagat dengan tali melingkar plus sembilan bintang, struktur organisasi PKB sama dengan struktur organisai partai Islam dahulu.[31]

Inklusifisme PKB memang perlu dipertanyakan, karena walaupun setiap kesempatan bahwa PKB menerima anggota dari non-Muslim dan dari Tionghoa,[32] tetapi dalam kenyataannya sulit untuk menemukan nama non muslim atau Tionghoa dalam kepengurusan partai. Dalam kepengurusan PKB Jawa Tengah ada nama H. Gautama Setiadi—seorang Tionghoa muslim—Ketua Pembina Iman Tauhid Islam (PITI) yang dipercaya menduduki jabatan bendahara.[33] Kepengurusan partai dari tingkat pusat sampai ke bawah selalu didominasi oleh orang-orang NU. Dengan demikian, inklusifitas PKB hanyalah strategi untuk menarik simpati dari massa yang berada di

---

Dinamika NU Perjalanan Sosial dari Muktamar Cipasung (1994) ke Muktamar Kediri (1999) (Jakarta: Kompas-Lakpesdam NU, 1999), 201.

[30]Kompas. 25 Juli 1998.

[31]Ahmad Tohari, "PKB Optimisme Berlebihan?," dalam Suara Merdeka, Rabu 29 Juli 1998.

[32]Surya, salah seorang warga Tionghoa yang menghadiri deklarasi PKB di Ciganjur mengaku ada sekitar 6 juta warga keturunan Cina akan bergabung dengan partai ini, baik yang beragama Islam maupun non muslim. Lihat Suara Merdeka, Jumat 24 Juli 1998. Bahkan vang mengejutkan pengakuan Gus Dur bahwa dirinya adalah campuran keturunan Cina dan Arab, sehingga setengah Cina dan setengah Arab. Cerita lebih lengkap tentang pengakuan Gus Dur ini, lihat M. Mas'ud Adnan (ed.), *Presiden Dur Yang Gus Itu, Anekdot-anekdot K.H. Abdurrahman Wahid* (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), 84-85.

[33] Suara Merdeka, Rabu 5 Agustus 1998.

luar NU. Karena kalau hanya mengandalkan massa NU sendiri tidaklah memberi harapan yang pasti, mengingat selama sejak tahun 1973 massa NU telah bergabung dengan PPP. [34]

[34]Sudarno Shobron, *Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam Pentas Politik Nasional*, 158-159.

BAB IV

APLIKASI KOMUNIKASI POLITIK: DINAMIKA KETERLIBATAN PKB PADA PEMILU 2009

Bab ini menguraikan inti analisis teori pada bab II yang menekankan pada aplikasi partai sebagai komunikator berkaitan dengan dinamika yang terjadi pada Pemilu 2009 yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut berisi pembahasan mengenai interaksi simbolik yang ada di PKB, dari konstruksi ide, diaplikasikan sebagai bentuk menjaga eksistensi diri dengan kegiatan memperkenalkan diri, konstruksi emosi lebih menekankan kepada ikatan emosinal dan yang terakhir pengelolaan kesan lebih kepada pencitraan.

Komunikasi memiliki beberapa jenis pembagian dalam hal ini lebih membahas mengenai komunikasi dalam ranah politik, dalam definisi komunikasi secara politik, karena itu dikatakan Rush dan Althoff, komunikasi politik memainkan peran yang amat penting di dalam suatu sistem politik. Ia merupakan elemen dinamis, dan menjadi bagian yang menentukan dari proses-proses sosialisasi politik, partisipasi politik, dan rekrutmen politik.[1]

A. Interaksi Simbolik di PKB

Meskipun PKB bersifat terbuka dan dihuni oleh orang-orang dengan latar belakang budaya yang beragam, namun kultur NU tetap menjadi dominan. Dalam berbagai acara yang digelar PKB, baik di pusat maupun di daerah, kultur dan simbol NU masih menjadi *mainstream* (arus utama). Sebagaimana contoh kecil, pembacaan shalawat dalam acara-acara yang digelar PKB adalah indikasi penetrasi kultur NU terhadap budaya komunikasi PKB. Budaya NU menjadi rujukan reproduksi simbol-simbol PKB. Simbol-simbol PKB adalah modifikasi simbol-simbol NU yang ditransformasikan ke dalam

[1]Sosialisasi politik adalah proses yang membuat individu dapat mengenali sistem politik; partisipasi politik adalah keterlibatan individu dalam sistem politik; rekrutmen politik adalah proses dengan mana individu menjamin atau mendaftarkan diri untuk menduduki suatu posisi politik tertentu. Lihat, Michael Rush dan Phillip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Rajawali Press, 1997), 23-24.

lingkungan yang lebih luas.[2] Sebagai partai politik yang kelahirannya dibidani oleh PBNU, PKB seharusnya mencerminkan sikap seperti yang dikembangkan oleh NU dan pesantren.[3] Sebab NU adalah berbasis pesantren, dan PKB juga harus berbasis pesantren. "Nilai-nilai pesantren itulah dijadikan acuan, sederhana menjaga persaudaraan.[4]

Tradisi NU juga memengaruh tingkah laku perorangan NU dalam proses interaksi dan penentuan sesuatu. Hal ini berhubungan dengan perilaku tradisi pesantren, Perilaku tradisi pesantren terkait dengan lingkungan pesantren, apakah pesantrennya tergolong tradisional atau modern. Kiai sebagai aktor sangat dominan dalam menentukan perilaku muridnya. Demikian juga perilaku para kiai NU, apakah kiai tersebut berpolitik atau tidak, dipengaruhi juga oleh kondisi politik nasional.[5]

Mengikuti teori interaksi simbolik menggunakan paradigma individu bahwa subyek utama dalam percaturan sosial maupun politik, meletakkan individu sebagai pelaku aktif dan proaktif. Pada dasarnya teori interaksi simbolik mengetengahkan soal diri sendiri (*the self*) dengan segala atribut luarnya. Menurut pandangan interaksi simbolik, manusia dipandang sebagai pelaku, pelaksana, pencipta, dan pengarah bagi dirinya sendiri. Manusia adalah makhluk yang memiliki jiwa dan semangat bebas dilihat dari kualitas manusia yang tercipta secara sosial.[6] Begitu pula pada budaya pesantren dipengaruhi oleh sistem dan pandangan individu, terutama para kiai, sehingga perilaku individu dan kelompok orang-orang NU ditentukan oleh budaya mereka. Dengan kata lain, budaya adalah nilai-nilai yang tersembunyi yang kemudian berproduksi berupa tingkah laku. Demikian juga dalam

---

[2]Karim Suryadi Transformasi Loyalitas Primordial sebagai Basis Identifikasi Kepartaian: Kasus Partai Kebangkitan Bangsa dalam Pemilihan Umum 1999 dan 2004," dalam *Mediator,* Vol. 6 No.2 Desember 2005, 284.

[3]Saifullah Ma'sum, Umaruddin Masdar, *Partai NU Ya PKB Pernyataan dan Sikap KH Said Aqil Siradj Ketua Umum PBNU* (Jakarta: LPP DPP PKB, 2012), 21.

[4]Pernyataan Said Aqil Siradj Ketua Umum PBNU disampaikan di bandara Surabaya, usai menghadiri acara DPC PKB Lumajang, 2011. Dikutip dari Saifullah Ma'sum, Umaruddin Masdar, *Partai NU Ya PKB Pernyataan dan Sikap KH Said Aqil Siradj Ketua Umum PBNU*, 21.

[5]Kang Young Soun, *Antara Tradisi dan Konflik: Kepolitikan Nahdlatul Ulama* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2008), 30.

[6]Stephen W. Littlejohn dan Karen A.Foss, *Teori Komunikasi*, Edisi. 9, Penerjemah: Mohammad Yusuf Hamdan (Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2009), 121. Lihat, Barbara Ballis Lal, "Symbolic Interaction Theories," *American Behavioral Scirntist* 38 (1995), 421-441.

budaya politik suatu bangsa. Budaya politik membantu dalam memahami perilaku politik. Dalam organisasi NU, budaya pesantren mempengaruhi NU dalam bertingkah laku dalam politik. Inilah yang disebut perilaku politik NU. Mengkaji masalah tradisi NU adalah mengkaji tradisi pesantren karena pesantren adalah basis tradisi NU (subkultur).[7]

Seperti terlihat dari susunan struktur organisasi PKB memiliki persamaan kepengurusan dalam organisasi NU, yang terdapat dalam Anggaran Dasar Partai,[8] antar tingkat kepengurusan PKB saling berkaitan satu sama lain dalam aktivitas keorganisasiannya satu sama lain, dimulai dari kepengurusan DPP, DPW, DPC, DPAC, DPRt sampai ke DPARt. Sistem koordinasi antar tingkat kepengurusan PKB dapat terlihat juga dari Bab III, Anggaran Rumah Tangga PKB mengenai Kedudukan, Tugas dan Wewenang Kepengurusan Partai. Dalam hal objek penelitian adalah DPP PKB adalah pimpinan tertinggi partai yang bersifat kolektif, DPP memiliki wewenang: menetapkan kebijakan partai di Tingkat Nasional sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Tingkat Nasional serta Peraturan Partai; mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dan Dewan Pengurus Cabang (DPC); Membekukan kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Pengurus Cabang dengan prosedur sebagaimana diatur dalam pasal 26,[9] Anggaran Rumah Tangga. DPP berkewajiban: melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Tingkat Nasional serta Peraturan Partai; menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Muktamar.

Jika melihat wacana di atas, PKB pun memiliki unsur kedekatan pada hubungan antara PKB dengan masyarakatnya yakni warga Nahdliyin (NU). Meskipun sosialisasi partai itu sendiri tidak terlepas dari peran dan hubungan komunikasi di dalam struktur partai (DPP, DPW, DPC, DPAC dan DPRt) untuk diberikan ruang dan peran oleh partai agar melakukan dalam mengalang sosialisasi dan

---

[7]Kang Young Soun, *Antara Tradisi dan Konflik: Kepolitikan Nahdlatul Ulama,* 31.

[8]Struktur Organisasi Partai dan Desentralisai Kewenangan. Pasal 12 DPP (AD/ART PKB Hasil Muktamar Ancol, 2008), 32.

[9]AD/ART PKB Hasil Muktamar Luar Biasa PKB 2008.

komunikasi kepada masyarakat luas, dan khususnya kalangan Nahdliyin.

Adapun program yang dijalankan berupa program pelatihan dan pembekalan, salah satunya *program perekonomian kerakyatan dalam mengentaskan kemiskinan*. Di samping itu, bentuk sosialisasi partai lainnya yang bersifat kultural yang sudah berkembang seperti ikut *berpartisipasi dalam pengajian, tahlilan, dan kegiatan ritual keagamaan yang telah berkembang di kalangan masyarakat Nahdliyin*, dengan muatan visi dan misi partai. Hal ini, dilakukan dalam rangka pendekatan dan konsolidasi kepada masyarakat.[10]

Simbol keagamaan lainnya yang digunakan PKB sebagai komunikasi sosiokultural adalah *Istighāthah.* Secara ritual ia hampir sama dengan praktik *Istisqa,* yakni kegiatan do'a bersama dengan membacakan *wirid-wirid* tertentu memohon sesuatu, dalam *Istighāthah,* biasanya dibacakan do'a *rātib haddad,* yang berisi permohonan pertolongan dari Allah Swt. Tentang penyelesaian masalah yang sedang dihadapi, dan permohonan agar musuh-musuh agama dapat segera dihancurkan. Dalam praktiknya, *Istighāthah* biasanya dipimpin oleh seorang kiai senior yang dalam istilah tasawuf telah mencapai tingkatan *ma'rifah.* Siapa yang memimpin *Istighāthah* menjadi ukuran diterima atau tidaknya suatu do'a, dan karena itu berkolerasi dengan banyak sedikitnya massa yang datang.[11] Lewat *Istighāthah* pula pesan-pesan komunikasi sosiokultural dapat disampaikan secara efektif kepada massa pendukungnya.[12] Karena dari sisi peristilahan yang digunakannya pun *Istighāthah* memiliki muatan spritual yang berarti menuntut kepatuhan secara tulus dari setiap individu yang meyakininya. Menurut Direktur Lembaga Pemenangan Pemilu DPP PKB Abdul Kadir Karding, doa bersama ini adalah upaya batiniah bagi keberhasilan pekerjaan jasmaniah.[13]

---

[10]Wawancara pribadi dengan H. M. Saiful Bahri Anshori, MP, Ketua DPP PKB di kantor DPP PKB. 9 Januari 2013.

[11]Asep Saeful Muhtadi *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif*,, 71-72.

[12]Wawancara dengan H. M. Saiful Bahri Anshori, MP, Ketua DPP PKB di kantor DPP PKB. 9 Januari 2013.

[13]Acara *Istighāthah* digelar di makam Ki Ageng Pandanaran, Jalan Mugas, Semarang, Jawa Tengah, oleh sejumlah kader PKB dan kalangan ulama, siang. Turut mendoakan untuk keberhasilan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono pada pilpres 2009. Sumber:

Banyak Partai Politik yang bisa menciptakan kemampuan kompetitifnya, namun sedikit yang dapat menjaga daya kompetitifnya sehingga berkesinambungan atau bertahan lama. Kesalahan utamanya karena mereka tidak mampu memelihara dan menghasilkan keunggulan kompetitif serta mewariskannya kepada generasi selanjutnya. Hal-hal yang diwariskan itu tentulah tidak sekedar material tetapi kemampuaan yang sifatnya non material. Warisan berbentuk non-materi dapat berbentuk pengetahuan. Pengetahuan yang berguna untuk dirinya sendiri, masyarakat ataupun organisasinya.[14] Singkatnya, rangkaian agenda PKB memilikai dua langkah. *Pertama* menguatkan konsistensi terhadap basis dukungan utama. *Kedua*: menampilkan wajah baru, di antaranya, 1. Pendidikan politik 2. Green Party 3. Refreshing penampilan pengurus partai.[15]

PKB membentuk "Green Party" sebagai bentuk untuk menyadarkan akan pentingnya lingkungan hidup. Momen ini terjadi pada tanggal 25-26 Februari 2007, bertempat di Bali. PKB mendeklarasikan dirinya sebagai "Partai Hijau" atau *green party*. Definisi Partai Hijau bukan dalam pengertian keagamaan, seperti yang dikenal selama ini, melainkan lebih menunjuk pada kepedulian PKB terhadap isu-isu lingkungan hidup. Selain dihadiri pengurus harian DPP PKB, termasuk Ketua Dewan Syuro, Gus Dur, deklarasi PKB; Partai Hijau ini juga dihadiri sejumlah LSM lingkungan baik dalam

---

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wTdSrdllZ-s (di akses 17 Januari 2013), dan sumber lain: www.Liputan6.com Senin (1/6).

[14]Asari, et. al., "Menimbang Nasib Kaderisasi Parpol" dalam *Oase Politik Catatan-catatan politik untuk Indonesia* (Purwakarta: al-Asy'ari Publishing House, 2013), 60-63. Dicetak dengan teknologi Print on Demand (PoD) melalui www.nulisbuku.com.

[15]Partai hijau yang dimaksud disini adalah partai yang *concern* terhadap penghijauan. Pengakuan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengungkapkan, banyak pihak yang mempertanyakan maksud PKB menjadi partai hijau Sebab, banyak penafsiran mengenai partai hijau. Namun partai hijau disini bukan berarti PKB berubah menjadi agama. Dan juga bukan berarti PKB menjadi partai mata hijau. Atau partai buto ijo. Tetapi partai hijau yang dimaksud yakni menjadi partai yang peduli lingkungan.Wawancara Metro TV Online-Save Our Nation-Muhaimin Iskandar Part 5. Diupload pada 25 Des 2008. httpwww.youtube.comwatchv=qiEvWjJcyFA (di akses 25 Oktober 2012). Kemudian, melalui iklan dengan slogan: Muda, Berani & Teruji. Part 8 Metro TV Online-Save Our Nation-Muhaimin Iskandar Diupload pada 25 Des 2008 httpwww.youtube.comwatchv=DkB_SqbVt5A.

negeri maupun luar negeri, antara lain; WALHI, Flora Fauna Intemasional, WWF, *Greenpeace* dan lain-lain.

Dalam upaya untuk pengawalan kebijakan sektor lingkungan hidup, PKB melalui Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR RI, telah berkomitmen untuk mengawal secara penuh ‘’Paket RUU Hijau”, sebutan PKB untuk RUU- RUU yang berkaitan secara langsung dengan lingkungan. Hasil dari RUU Hijau tersebut adalah :

1. RUU Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA)
2. RUU Tentang Pemberantasan Pembalakan Liar (Illegal Loging)
3. RUU Tentang Lahan Abadi Pertanian
4. RUU Tentang Revisi UU Kelautan
5. RUU Tentang Pengelolaan Sampah
6. RUU Tentang Penataan Ruang
7. RUU Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir
8. RUU Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan
9. RUU Tentang Energi

Fraksi dari Partai Kebangkitan Bangsa (F-KB) DPR-RI juga menyambut baik disahkannya RUU Pengelolaan Sampah ini menjadi Undang-Undang.[16] Sebab bagi F-KB hal tersebut merupakan komitmen dan bentuk perjuangan PKB sebagai green party serta semua teman-teman dari fraksi DPR lainnya sebagai salah satu ikhtiar bersama dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup Indonesia. Empat RUU yang terakhir, [17] sedang dalam pembahasan Pansus Komisi maupun Pansus Lintas Komisi.[18] Menurut Lukman Edy Partai

[16]Pendapat Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR-RI Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Sampah. Sumber: http://www.dpr.go.id/archive/minutes/Risalah_Rapat_Paripurna_Ke-30_Masa_ Sidang_III_Tahun_2007-2008.pdf. (di akses 17 Agustus 2012).

[17]Helmy Faishal Zaini (ed), *Khidmat Kami Bagimu Negeri. Laporan Kinerja Fraksi* Kebengkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (FKB-DPR RI) (Jakarta: FKB-R, 2007I), 114-116. Diskusi Marathon ini diawali dengan acara launching diskusi dengan thema utama RUU PSDA, yang digelar di depan Gedung Nusantara III, kompleks DPR RI pada tanggai 28 Maret 2007. Hadir dalam acara ini Menteri Lingkungan Hidup, Ir. Rachmat Witoelar, aktifis LSM dan perwakilan masyarakat. Acara ini juga diisi dengan penyematan pin greenparty kepada 9 (sembilan) orang tokoh penting sebagai simbol dimulainya gerakan reformasi lingkungan.

[18]Saat deklarasi PKB menjadi partai hijau di Bali, Senin 26 Feb 2007. Gus Dur mewanti-wanti agar PKB tak ikut permainansejumlah LSM karena memutuskan partai hijau. Sebab, dia menilai LSM mempunyai agenda tersembunyi di balik hal

hijau yang diusung PKB hanya gerakan kultural bukan gerakan politik seperti di Eropa, ujarnya. Ia menjelaskan, semua partai hijau yang ada di Eropa cenderung beraliran kiri. Tujuan mereka pun menggulingkan pemerintahan.

PKB bisa fokus dalam upaya-upaya politik yang lebih kongkrit menyangkut penyadaran, pendidikan dan pengembangan masyarakat menuju kemakmuran dan keadilan yang lebih nyata. Sementara upaya politik untuk kembali memperjuangkan negara Islam, formalisasi syariat atau memasukkan Piagam Jakarta ke dalam Pembukaan UUD 1945, bagi PKB bukan hanya mengancam disintegrasi bangsa, tetapi juga membawa bangsa berjalan mundur.[19]

Dari uraian di atas jika mengacu kembali pada prinsip-prinsip lain yang digunakan oleh ahli interaksi simbolik dalam riset ilmiah adalah mengamati dan mendeskripsikan subyek penelitian dalam setting nyata, yakni bagaimana politisi berinteraksi dengan orang lain dan dirinya sendiri dalam situasi yang harus dilalui. Para ahli interaksi simbolik berpendapat bahwa tindakan ada dua macam, yaitu tindakan nyata dan tersembunyi. Tindakan tersembunyi berarti memasuki pikiran manusia. Hal ini berarti peneliti berupaya memahami tingkah laku orang yang mendefinisikan situasi aktual, bagaimana mereka mengembangkan, menggunakan dan mengubah perspektif, mengambil peran, memecahkan masalah, berbicara dengan diri sendiri dan mengambil suatu keputusan. Untuk mengerti tindakan tersembunyi berarti kita perlu mempelajari pikiran sebagai tindakan daripada pikiran sebagai isi. PKB pun telah melaksanakan hal tersebut sebagaimana PKB telah malaksanakan sosialisasi partainya yang bersifat kultural yang sudah berkembang seperti ikut berpartisipasi dalam pengajian, tahlilan, *Istighāthah,* dan kegiatan ritual keagamaan yang telah berkembang di kalangan masyarakat Nahdliyin.

Adapun aplikasi perwujduan Interaksi Simboliknya dapat dilihat dengan melihat hubungan PKB dengan Masyarakat yakni:

1. PKB Memperkenalkan Diri dengan Masyarakat Nahdliyin

Dalam platform PKB dijelaskan bahwa sifat Partai Kebangkitan adalah kebangsaan, demokratis dan terbuka (*inklusif*). Menurut Matori Abdul Jalil, inklusifitas PKB mewarisi watak

---

ini. http://preview.detik.com/detiknews/read/2007/03/28/110041/759746/10/jadi-partai-hijau-pkb-soroti-9-ruu-lingkungan-hidup. (di akses: 27 Mei 2012).

[19]Said Aqil Siradj & A. Muhaimin Iskandar, *Melanjutkan Pemikiran dan Perjuangan Gus Dur* (Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang, 2010), 61.

inklusifnya NU dalam beragama, maka ketika PKB lahir sebagai partai yang inklusif orang tentu saja tidak terkejut, sebab inklusifisme sudah mendarah daging di tubuh NU.[20] Menurut Masykur Maskub, NU tidak hanya membatasi diri pada upaya pemecahan masalah-masalah yang menyangkut kepentingan warga Nahdliyin saja, tetapi diperluas hingga mencakup kepentingan bangsa.[21]

Disadari bahwa Indonesia bukanlah negara yang dihuni oleh kelompok tunggal masyarakat, melainkan beraneka ragam etnis, budaya, bahasa, dan agama yang dibingkai dengan bhineka tunggal ika dengan ikatan Pancasila.[22] Ahmad Thohari juga menyangsikan kesungguhan PKB menjadi partai inklusif, karena untuk menentukan ketua PKB dipilih yang ke NU-annya tidak diragukan. Semua pengurusnya NU, lambang partainya pun gambar jagat dengan tali melingkar plus sembilan bintang, struktur organisasi PKB sama dengan struktur organisai partai Islam dahulu.[23]

Ada beberapa hal yang dilakukan oleh PKB dalam membangun diri dengan masyarakat diantaranya dengan melakukan aktifitas–aktifitas yang bersifat kebudayaan (sosiokultural) yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Nahdliyin diantaranya yakni: berpartisipasi dalam pengajian, tahlilan, halal bi halal dan kegiatan ritual keagamaan yang telah berkembang di kalangan masyarakat Nahdliyin.

Sebuah hal yang harus diperhatikan, yaitu gerakan Islam apapun dan dimanapun senantiasa terkait dengan pilihan berikut: gerakan mereka sebagai kultur atau sebagai institusi atau lembaga.[24] Sebagaimana masyarakat Nahdliyin memperhatikan seksama "budaya NU" seperti yang dijelaskan di atas. Mereka tidak peduli dengan keadaan lembaga-organisai yang mereka dukung, dipimpin oleh orang yang tepatkah atau tidak. Said Aqil, menegaskan hubungan antara

---

[20]Matori Abdul Jalil, *Dan NU untuk Kebangkitan Bangsa*, 187-190.

[21] Masykur Maskub, "Agenda Ke Depan NU Pasca Gus Dur dan Gus Dui Pasca NU," dalam Marzuki Wahid. Abd. Moqsith Ghazali dan Suwendi (ed.), *Dinamika NU Perjalanan Sosial dari Muktamar Cipasung (1994) ke Muktamar Kediri (1999)* (Jakarta: Kompas-Lakpesdam NU, 1999), 201.

[22]Kompas. 25 Juli 1998.

[23]Ahmad Tohari, "PKB Optimisme Berlebihan?," dalam Suara Merdeka, Rabu 29 Juli 1998.

[24]Mukhlas Syarkun, *Ensiklopedia Gus Dur Jilid 1 Riwayat Gus Dur* (Jakarta: PPPKI, Gedung Perintis, 2013), 225.

PBNU dengan PKB sebatas hubungan kultural dan emosional, tak ada hubungan struktural yang sifatnya koordinatif.[25]

Begitu juga lazim diketahui, pendukung terbesar NU ada di pelosok-pelosok desa. Mereka bukan saja terbelakang secara ekonomi, melainkan juga pendidikan dan sarana informasi.[26] Mereka kebanyakan masyarakat awam yang mengambil suatu keputusan, sering—untuk tidak mengatakan selalu—tidak percaya diri, otonom, dan independen.

2. Peran dan Pengaruh Tokoh Sentral

Kiai yang merupakan tokoh sentral di lingkup pesantren, juga memiliki kedekatan pada sebagian besar masyarakat khususnya di kalangan NU. Menurut Masdar F Masudi, masyarakat Nahdliyin yang mempunyai ketergantungan amat tinggi pada kepemimpinan seorang tokoh (kiai) panutan. Mereka bergantung pada kiai, bukan saja hendak memilih (ibadah) untuk menuju tuhan-nya, melainkan juga saat memilih jalan (politik) untuk membangun dunianya, membangun masyarakat dan negaranya.[27] Sedangkan pengakuan ketua umum PKB Muhaimin Iskandar, berpendapat bahwa: kiai sebagai eksponen yang melahirkan dan membesarkan PKB, dan juga kyai sebagai kunci utama dalam pendidikan politik terhadap masyarakat.[28]

Figur inilah yang ditampilkan oleh PKB agar lebih dekat dengan masyarakat dengan menggunakan figur dari kiai, karena kharisma dan senioritas yang dimilikinya dalam komunitas tersebut, dan bukan karena posisi formalnya dalam organisasi. Secara sosiologis, mereka biasa disebut sebagai pemimpin simbolik.[29] kiai dikenal

---

[25]"Meneropong Masa depan Politik Nahdliyin." Majalah Risalah Nahdlatul Ulama Edisi 18 / TAHUN III / 1431 H / 2010, 23.

[26]Muhtadin A.R., "Suara Nahdliyin di Pemilu Presiden,"dalam Khamami Zada, A. Fawaid Sjadli, *Nahdlatul Ulama Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010), 141.

[27]Masdar F Masudi. Tulisan dan wawancara Masdar dapat dilihat di www.islamlib.com, Jawa Pos, Minggu, 18 Januari 2004.

[28]Wawancara Metro TV Online-Save Our Nation-Muhaimin Iskandar Part 2, Diupload pada 25 Des 2008. httpwww.youtube.comwatchv=NjvNkram50o (di akses 23 Novevember 2012).

[29]Berbeda dengan pemimpin organisasi, pemimpin simbolik biasanya tidak memiliki posisi formal dalam organisasi. Mereka sangat dikenal di dalam masyarakat karena faktor-faktor tertentu, sehingga komunikasinya tetap efektif. Lihat, Dan Nimmo, *Komunikasi Politik:Khalayak dan Efek* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993), 46.

sebagai pribadi yang memiliki tempat istimewa. Pendapatnya menjadi rujukan utama dalam proses pengambilan keputusan bukan saja dalam masalah-masalah agama tapi juga sosial, politik dan kebudayaan baik yang mengikat kepentingan individu maupun kolektif. Penyampaian pesan-pesan dalam komunikasi yang diperankannya pun dinilai efektif, meskipun cenderung satu arah. Sehingga, karena posisinya yang istimewa itu, dalam lingkup formal, kelompok Kiai sering ditempatkan pada lembaga tertinggi, seperti *Dewan Syuro* ataupun *Majlis Syuro*.[30]

Sedangkan bila dilihat dari segi sosial, menurut Dhofier, kekuatan kiai terletak pada dua hal, yaitu: (1) memiliki perasaan kemasyarakatan yang dalam dan tinggi *(high developed social senses)*; dan (2) selalu melandaskan sesuatu kepada kesepakatan bersama *(general consensus)*.[31] Kedua hal inilah barangkali yang menjadi alasan utama penerimaan masyarakat, ketimbang faktor keturunan sebagai alasan seseorang menjadi kiai, dengan kedua kekuatan tersebut, peranan kiai dalam masyarakat tidak terbatas hanya dalam bidang keagamaan, tetapi juga dalam bidang-bidang sosial lainnya. Sehingga ia bisa berperan sebagai *pressure group* dan *rulling class* di tingkat pedesaan,[32] yang pengaruhnya dapat melampaui kekuasaan pemimpin formal di tingkat lokal dan bahkan nasional. Mereka dapat berperan sebagai juru bicara masyarakat, dan pada saat yang sama, dapat pula berfungsi sebagai jembatan penghubung dengan kekuasaan.

Sejalan dengan kultur di NU, kiai menduduki posisi dan peran yang sangat penting di PKB. Secara struktural, kiai ditempatkan pada Dewan Syuro, lembaga perumus kebijakan tertinggi partai sekaligus pemegang otoritas moral untuk mengawasi pergerakan partai dalam upaya menggapai cita-cita politiknya.[33] Dalam setiap episode konflik berimbas pada keberadaan kiai, baik yang ada dalam struktur PKB maupun yang berada di luar struktur partai. Sedangkan peran kiai

---

[30]Asep Saeful Muhtadi, *Komunikasi Politik Indonesia Dinamika Islam Politik Pasca-Orde Baru* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 195.

[31]Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren* (Jakarta: LP3ES, 1982), 120.

[32]Untuk deskripsi lebih luas tentang masalah ini, lihat, Munandar Soelaiman, *Dinamika Masyarakat Desa Sebagai Sumber Daya Sosial Budaya dan Agama dan Peranannya dalam Keberhasilan Pembangunan* (Jakarta: P3M-Dikti, 1992).

[33]Asep Saeful Muhtadi, *Komunikasi Politik Indonesia Dinamika Islam Politik Pasca-Orde Baru* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008).

dalam sosiokultural merupakan bagian dari *orientational others*,[34] yang berpengaruh dalam kehidupan di kalangan santri dan masyarakat Nahdliyin yang terikat secara emosional dan psikologis.

Sedangkan bila dilihat dari model kepemimpinannya, menurut Dhofier,[35] kebanyakan kiai di Jawa beranggapan bahwa pesantren dapat diibaratkan sebagai suatu "kerajaan kecil" dengan kiai sebagai sumber "mutlak" dari kekuasaan dan kewenangan *(power and authority)* dalam kehidupan dan lingkungannya. Dengan kata lain, sebagai "raja kecil," kiai cenderung otoriter dalam memerankan fungsi kepemimpinannya. Tidak seorangpun santri atau orang lain yang dapat melawan kekuasaan kiai (dalam lingkungan pesantrennya) kecuali bila ada kiai lain yang dipandang lebih besar pengaruhnya. Konsekuensi logisnya, informasi apapun yang disampaikan kiai akan diterima dan pesan-pesannya akan disikapi sebagai suatu keharusan.

Inilah, antara lain, beberapa karakteristik kiai yang dapat memperlicin penyampaian pesan lewat komunikasi yang diperankannya sendiri. Di samping itu, dikenal pula ada beberapa faktor yang, ikut membentuk kebesaran pengaruh seorang kiai. Salah satunya adalah, karena di kalangan masyarakat Muslim, secara teologis, kiai dipandang sebagai pewaris para Nabi. Fungsi kiai sebagai pengganti peran Nabi ini sebetulnya berasal dari struktur hierarkis kewenangan individu dalam hal menafsirkan kitab suci. Karena ketinggain ilmu agama (Islam) yang dimilikinya, Kiai dipandang sebagai sosok yang paling punya kapasitas untuk itu. Tidak ada figur lain yang dianggap mampu menerjemahkan pesan-pesan ajaran seperti yang termaktub dalam firman-firman Tuhan baik itu yang tersurat maupun yang tersirat. Kenyataan ini sebetulnya dapat digambarkan dengan meminjam teori penjulukan *(labelling theory)*.[36] Dalam analisis teori ini, fenomena kiai dapat dilihat sebagai "korban" penjulukan yang sedemikian hebat, sehingga ia tidak lagi mampu menahan akibatnya.[37] Karena masyarakat telah terlanjur menjuluki kiai sebagai

---

[34]Stephen W. Littlejohn dan Karen A. Foss, *Teori Komunikasi*, Edisi. 9, 122.

[35]Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, 196.

[36]Penjelasan lebih rinci tentang "Teori Penjulukan" atau *Labelling Theory* ini dapat dilihat, antara lain, pada Haralambos and Holborn, *Sociology: Themes and Perspectives* (London: Harper Collins, 1995), 406.

[37]Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi, Suatu Pengantar* (Bandung: Rosdakarya, 2001), 70. Lihat Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosia lainnya* (Bandung: Rosdakarya, 2001).

sosok yang paling tahu, paling salih, dan beberapa julukan lainnya, maka akhirnya ia meneguhkan dirinya sebagai sosok tunggal yang menguasai dan memerankan masalah itu.

Selain itu, faktor kharisma[38] yang terbentuk secara alamiah juga ikut menentukan tinggi rendahnya pengaruh seorang kiai. Kharisma kiai pada masyarakat tradisional menjadi alasan utama yang menyebabkan ia menjadi aktor perubahan sosial. Dalam kelas masyarakat tertentu, khususnya masyarakat Muslim tradisional, unsur kharisma ini memang memainkan fungsi dominan, meskipun ketaatan kepada pemimpin formal juga tetap tampak selama dia dapat memerankan kesalehannya secara spiritual. Perbandingan pengaruh antara kedua model kepemimpinan ini memang tidak ketat, tetapi hal itu tampak hampir pada setiap aktivitas sosial yang dilaluinya. Sehingga pemimpin formal pada akhirnya seringkali memanfaatkan pengaruh Kiai sebagai pemimpin non-formal, seperti untuk kepentingan penyebaran informasi pembangunan. Fenomena seperti ini secara sederhana dapat digambarkan dengan melihat interaksi-interaksi antar individu yang berlangsung secara simbolik *(symbolic interactionism)*,[39] sehingga terjadi proses orientasi, peniruan dan peneguhan untuk memerankan sesuatu perilaku, seperti apa yang diperankan orang lain.

Di tengah-tengah masyarakatnya, kiai adalah aktor komunikasi yang dapat memainkan peran-peran perubahan sosial. Ia memiliki pengaruh kuat karena beberapa hal. Di antaranya adalah, karena kiai merupakan pemangku hukum agama Islam yang tidak hanya mengatur hubungan antara individu dengan Tuhan, tetapi juga hampir semua hubungan sosial dan personal. Hal ini memberikan kekuasaan yang sangat luas kepada kiai dalam kehidupan masyarakatnya. Masyarakat

---

Deddy Mulyana dan Rakhmat Jalaluddin (ed.), *Komunikasi Antarabudaya, Panduan Bekomunikasi dengan Orang-orang Berbeda Budaya* (Bandung: Rosdakaya, 1996).

[38]Konsep kharisma di sini digunakan dengan mengacu pada konsep *"Charismatic Authority,"* yang berperan sebagai the power that derives from a ruler's force of personality. It is the ability to inspire passion and devotion among followers. Lihat, Tischler, *Introduction to Sociology* (Chicago: Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1990), 492.

[39]Konsep yang digagas oleh George Herbert Mead (l863-1931) ini melukiskan terjadinya proses internalisasi perilaku melalui interaksi secara simbolik antar individu. Lihat, misalnya, Tischler, *Introduction to Sociologyls,* 106-107; Haralambos and Holborn, *Sociology: Themes and Perspectives*, 891. Stephen W. Littlejohn dan Karen A. Foss, *Teori Komunikasi*, Edisi. 9, 67.

dengan demikian mempercayakan kepada kiai untuk memberikan bimbingan dan keputusan tentang hak milik, perkawinan, perceraian, warisan dan sebagainya. Itulah sebabnya pengaruh mereka sangat kuat. Selain itu, karena keengganan sikapnya terhadap urusan-urusan formal kenegaraan, pengaruh mereka juga memberikan kekuasaan moral yang luar biasa, sekaligus mempersembahkan kedudukan kepada mereka sebagai suatu kelompok intelektual yang bermoral. Komunikasi politik kiai dalam setting pedesaan menggunakan atribut keagamaan sebagai otoritas yang membentuk kiai sebagai tokoh politik dalam komunikasi politik.[40]

Secara spesifik, di kalangan masyarakat Islam, kiai merupakan salah satu kelompok elit[41] yang mempunyai kedudukan sangat terhormat di antara kelompok-kelompok elit lainnya. Kiai merupakan sosok pemimpin informal yang memiliki posisi tersendiri. Secara sosiologis, kehadirannya dapat dipandang sebagai salah satu agen perubahan, sebab masyarakat, dalam banyak hal, hampir selalu mendasarkan kegiatannya pada petunjuk ulama. Kiai juga merupakan salah satu golongan pemimpin di masyarakat desa, di samping aparatur pemerintah sebagai pemimpin formal, petani kaya, tokoh pemuda, tokoh wanita, dan lain sebagainya. Mereka dapat dikategorikan sebagai pemimpin lokal yang cukup berpengaruh di dalam masyarakat setempat.

Untuk menganalisis peranannya di dalam masyarakat, salah satunya, dapat dilihat dalam kaitannya dengan karakteristik pribadi mereka. Berkenaan dengan hal tersebut, menyatakan bahwa karakteristik pemimpin yang berpengaruh. terhadap kelompok di antaranya adalah pandangan, sikap, kedudukannya dalam kelompok, dan lamanya seseorang menempati kedudukan tersebut. Karena itu, peranan kiai sebagai pemimpin agama dalam masyarakat juga berhubungan dengan pandangan mereka mengenai masyarakat itu

---

[40]Dalam *Religion and Political Development*, Donald E Smith menggambarkan model politik negara berkembang yang menggunakan agama sebagai sistem politik tradisionalnya. Agama memberikan kerangka makna dan pengalaman umum bagi masyarakat, sehingga dengan sosialisasi sederhana melalui simbol agama, ritual, kharisma orang suci, fatwa halal-haram, dan lain-lain masyarakat tradisional dapat disatukan dalam format tertentu. Syaiful Arif dalam Esay: Menguji Religiopolitik NU (04/07/2004) http://islamlib.com diakses 17 Januari 2013.

[41]Asep Saeful Muhtadi, *Komunikasi Politik Indonesia Dinamika Islam Politik Pasca-Orde Baru,* 198.

sendiri serta kedudukannya di dalam struktur masyarakat tersebut. Lebih dari itu, kekuatan pengaruh serta kedudukannya yang tinggi di dalam tatanan kehidupan masyarakat karena kiai juga dipandang memiliki kelebihan dalam hal spiritualitas serta mencerminkan tingkat kesalihan yang tinggi bila dibandingkan dengan anggota masyarakat pada umumnya.[42]

Karena kedudukannya itu, kiai memiliki peluang untuk dapat memainkan peranannya secara maksimal dalam masyarakat, khususnya sebagai komunikator sosial untuk menyosialisasikan nilai-nilai serta hukum-hukum yang berlaku di dalam kehidupan. Dalam posisinya yang berada di antara dua arus sosial informal horizontal dan formal-struktural, kiai pada gilirannya dapat menjadi sumber dinamisasi masyarakat. Bahkan dalam konteks pembangunan seperti yang berlangsung selama ini mereka juga dapat menjadi pemrakarsa pembangunan, atau sekurang-kurangnya menjadi aktor partisipatif dalam proses pembangunan sosial politik masyarakat. Fakta sosial komunitas kiai pesantren, dimana ketokohan kiai pesantren ada yang berada pada level lokal dan ada pula ketokohan kiai pesantren pada level nasional atau bahkan berada pada level internasional dalam hal ini diwakili oleh Gus Dur, sebagai perwujudan dari sebuah kesempurnaan sumber kewibawaan yang dimiliki.[43]

Itulah sebabnya, dalam batasan kultural, Budiardjo[44] melihat kedudukan kiai sebagai salah satu unsur pemimpin masyarakat di pedesaan dan dikategorikan sebagai pemimpin formal. Kepemimpinannya didasarkan atas pengakuan masyarakat, dan cakupan pengaruhnya biasanya tidak dibatasi oleh satuan wilayah administratif, meskipun secara fungsional ada kiai yang hanya memiliki pengaruh pada wilayah geografis tertentu. Sedangkan bila dilihat dari sisi kelembagaan yang menjadi saluran kepemimpinannya, mereka pada umumnya memerankan fungsi sosialnya melalui lembaga-lembaga keagamaan dan pendidikan. Karena itu, pesantren misalnya, dapat dipandang sebagai salah satu wujud lembaga masyarakat dengan

[42]Asep Saeful Muhtadi, *Komunikasi Politik Indonesia Dinamika Islam Politik Pasca-Orde Baru,* 198.

[43]Marwan Ja'far, *Aswaja dari Teologi ke Aksi* (Yogyakarta: LKis, 2011) 116.

[44]Miriam Budiarjo, *Demokrasi di Indonesia, Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1996), 13.

multi peran, yang secara fungsional diwujudkan melalui proses komunikasi.

B. PKB Memperkenalkan Diri

Jika mengaca pada Pemilu 1999, itulah kala pertama PKB ikut pemilu dengan perolehan suara besar dibandingkan dengan partai-partai yang baru dan partai yang berbasiskan Islam. Meskipun pada saat itu partai baru, tetapi ia memperoleh suara tiga besar setelah PDIP dan Golkar. Ini dikarenakan PKB memiliki empat modal politik yang sangat besar. Mantan Sekjen PKB Lukman Edy menambahkan, modal *Pertama* yang dimiliki adalah kuat secara kultural karena para kiai memiliki satu visi lengan Gus Dur sebagai patronasenya.[45]

Kuatnya satu visi tersebut merupakan konstruksi ide dalam pandangan konstruktivisme merupakan sebuah pandangan, gagasan, maupun cara berfikir kolektif dari suatu kelompok yang dipengaruhi oleh interaksi, individu dengan individu lainnya, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Konstruksi ide juga dipengaruhi oleh agen-agen dalam suatu kelompok sosial melalui kegiatan communicative action. PKB sendiri, lanjut Lukman Edy mengatakan, memiliki faktor Kedua sejarah kejuangan NU yang selalu mendukung nasionalisme, Pancasila dan NKRI sehingga mendapat dukungan luas dari masyarakat. Ia menambahkan *Ketiga*, adalah para aktifisnya yang berlatar belakang wartawan, LSM dan sektor non formal masih bersatu karena mengalami nasib yang sama "hal ini, menjadi perekat yang luar biasa untuk berjuang membesarkan PKB." Terakhir, PKB juga mendapatkan dukungan eksternal yang besar sekali karena menjadi harapan banyak kalangan untuk mampu memperjuangkan kepentingan mereka, apalagi dengan Gus Dur sebagai panglimanya. Konflik yang melanda mulai terasa pengaruhnya pada pemilu tahun 2004, tetapi paling signifikan pada Pemilu 2009, dengan raihan suara kurang dari 5 persen, alias 4,85%.[46]

PKB sebagai basis dari warga Nahdliyin pun telah berusaha untuk memperkenalkan diri pada organisai partainya dengan

---

[45]Majalah Risalah Nahdlatul Ulama Edisi 18 / TAHUN III / 1431 H / 2010, 23.

[46]Lukman Edy (Mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal). Jika ditelisik lebih lanjut, banyak hal sudah hilang dari PKB seperti simbol patronase yang ada dalam diri Gus Dur, solidaritas pengurus dan aktifisnya serta kepercayaan pihak eksternal. Tak mungkin pihak eksternal mau menitipkan visinya pada partai yang sedang dilanda masalah.

melakukan sosialisasi berupa kegiatan pengkaderisasian, dan juga kegiatan keagaamaan yang menjadi tradisi dari warga Nahdlatul Ulama (NU) yang sering dilaksanakan baik itu di Pondok Pesantren maupun di lingkungan tempat tinggal mereka seperti melaksanakan kegiatan istighosah, tahlilan, dan lain sebagainya. Inti atau manfaat dari Konstruksi Ide ini lebih mengedepankan kepada pengenalan jati diri tujuan serta manfaat apa yang didapat dari berdirinya partai PKB tersebut.

Rom Harre,[47] mengakui bahwa manusia memiliki aspek individual dan sosial, seperti pengalaman lainnya, diri manusia dibentuk oleh teori pribadinya. Orang pada dasarnya mencoba untuk memahami dirinya dengan menggunakan ide atau teori mengenai manusia *(personhood)* dan teori mengenai diri *(selfhood).* Politikus yang memiliki konsep diri yang positif adalah orang yang transparan (tembus pandang) atau terbuka bagi orang lain[48] dan oleh karena itu dapat menjadi politikus dan pelobi yang baik. Pada umumnya seorang politikus memang mempunyai konsep diri yang positif, meskipun kadarnya berbeda antara politikus yang satu dengan politikus yang lain. Artinya, politikus tidak memiliki konsep diri yang negatif.

Selanjutnva, konsep diri juga memengaruhi perilaku komunikasi politik dalam aktivitas lobi, terutama dalam membuka diri untuk memilah dan memilih gagasan atau konsep baru dalam usaha membangun konsensus. Dengan membuka diri, berarti konsep diri menjadi lebih dekat dengan kenyataan. Jika konsep diri sesuai dengan pengalaman sendiri, maka ia akan lebih terbuka untuk menerima gagasan baru dari orang lain, dan lebih cenderung menghindari sikap defensif dan lebih cermat memandang diri sendiri dan orang lain, sehingga lebih mudah membangun konsensus. Selain itu, orang-orang yang sukses dalam bidang apapun, pada umumnya mendapat simpati dari orang banyak.[49] Di samping itu, kesediaan membuka diri, juga akan lebih mudah jika ada hubungan ketergantungan satu sama lain

---

[47]Rom Harre, *Social Being: A Theory for Social Behavior* (Littlefield, Adams, 1979). Lihat juga *Personal Theory for Individual Psychology* (Cambridge, MA, Harvard University Press, 1984). Lihat, Stephen W. Littlejohn dan Karen A. Foss, *Teori Komunikasi*, Edisi. 9, 123.

[48]S. Jourard, *Self Disclosure An Experimental Analysis of The Transparant Self* (New York, Wiley. 1971).

[49]Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi (Bandung: Remadja Rosdakarya, 2005), 111-117.

(dependent) atau hubungan struktural, baik vertikal maupun horizontal.[50]

Beberapa hal dalam diri PKB yang terkait dengan unsur konstruksi ide yakni:

1. Interaksi PKB dengan Konstituen

Interaksi yang dilakukan oleh PKB dengan Konstituen dalam hal ini adalah pada masyarakat Nahdliyin, karena mereka adalah pengikut setia dari basis Nahdlatul Ulama yang dalam hal ini berkecimpung dalam PKB. Interaksi tersebut adalah sebagai berikut seperti yang sudah terpapar pada bahasan sebelumnya yakni hubungan PKB dengan masyarakat yakni: Kaderisasi PKB lebih banyak dilakukan melalui jalur formal, melalui tiga jalur yaitu;

1. Melalui partai dilakukan dengan (a) Pendidikan dasar politik tingkat ranting (b) Pendidikan dasar politik tingkat anak cabang (c) kursus politik dan orientasi ideologi tingkat DPC. (d) kursus politik dan orientasi ideologi tingkat DPW (e) kursus kepemimpinan dan orientasi ideologi tingkat DPP.
2. Melalui badan otonom, yakni diatur sendiri oleh badan otonom.
3. Langsung kepada masyarakat, hal ini dimaksudkan sebagai bagian dari proses penggalangan kader partai Strategi rekruitmen kader di PKB adalah terbuka bagi siapa saja kader partai yang dianggap mampu untuk menduduki jabatan sesuai kemampuan dan posisi yang akan diduduki, dalam hal ini perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan.

Pelatihan kader ini menjadi pembekalan kepada kader Pengurus Tingkat Anak Cabang – Ranting, yang muatannya lebih kepada pemahaman ideologi dengan output dihasilkannya kader kader yang militan.[51]

Melihat teori yang dikemukakan oleh Harre sudah sangat jelas itu telah terlaksana di PKB dengan banyaknya antusias dari warga Nahdliyin yang masuk atau tergabung dalam pengkaderisasian partai ini. Mereka pun menyadari bahwa PKB adalah partai yang dibidani langsung oleh PBNU oleh karenanya dalam konteks pengenalan diri atau Konstruksi Diri PKB tidak mengalami kendala apapun.

---

[50]Anwar Arifin, *Komunikasi Politik: Paradigma-Teori-Aplikasi-Strategi & Komunikasi Politik di Indonesia,* 265.

[51]Andi Muawiyah Ramly, *Pelatihan Bagi Kader Militan Partai Kebangkitan Bangsa* (Jakarta: DPP PKB, 2012), 5.

Mengingat secara implisit PBNU menyatakan bahwa PKB adalah partainya warga NU.[52] Berbeda dengan partai-partai NU lainnya, pencapaian itu tetap luar biasa dalam konteks NU secara keseluruhan, mengingat NU sendiri sempat mengalami friksi dan konflik internal akibat munculnya empat parpol di lingkungan warga Nahdhyin Pada Pemilu 1999, yakni PKB, Partai Kebangkitan Umat (PKU), Partai Nahdlatul Ummah (PNU) dan Partai SUNI.[53] Pada Pemilu 2004 muncul Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI).[54] Kemudian disusul dengan berdirinya partai PKNU pada Pemilu 2009.

2. Fragmentasi Partai Nahdliyin di Luar PKB

Sejak PKB lahir 1998 sudah ada kemunculan partai-partai yang mengklaim berbasis NU (PKB, PKU, PNU dan SUNI) sebagai akibatnya, para politisi hampir-hampir mendominasi wacana dan kiprah organisasi. Kemunculan partai-partai yang mengklaim berbasis NU (PKB, PKU, PNU, dan SUNI) ditambah dengan dukungan warga NU dalam PPP yang masih kuat, membuka peluang konflik- konflik politik di dalam batang tubuh Jamiyyah itu.[55]

Hampir bisa dipastikan, tanpa dukungan NU, warga Nahdliyyin juga memberikan suaranya secara lebih banyak dalam Pemilu 1999 lalu kepada parpol-parpol Nahdliyyin lain, seperti PNU, PKU, atau bahkan kepada Partai SUNI.[56]

---

[52]Kang Young Soon, *Antara Tradisi dan Konflik: Kepolitikan Nahdlatul Ulama*, 24.

[53]Azyumardi Azra, *Reposisi Hubungan Agama dan Negara Merajut Kerukunan Antarumat* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2002), 134.

[54] Wawancara Metro TV Online-Save Our Nation-Muhaimin Iskandar Part 1 Diupload pada 25 Des 2008 httpwww.youtube.comwatchv=6_T10DFX1TI. (di akses 25 November 2012).

[55]Muhammad AS Hikam, "Tragedi Jepara dan Ideologisasi Agama,"dalam Deliar Noer, (et al.), *Mengapa Partai Islam Kalah?* Hamid Basyaib dan Hamid Abidin (Jakarta: ALVABET, 1999), 108. ketiga partai tersebut (PKU, PNU, PKU) sama-sama mengunakan tanda gambar bola dunia yang dikelilingi oleh sembilan bintang, mirip lambang NU, dengan berbagai perbedaan variasi oleh setiap partai. walau begitu, PBNU hanya mengakui PKB sebagai partai tunggal bagi penyaluran aspirasi politik NU. karena itu, Salahuddin Wahid (Ketua PKU) mengeritik maklumat PBNU itu sebagai bertentangan dengan jiwa khittah NU, yang menjaga kenetralan NU dengan organisasi politik manapun. (Republika, 3 Oktober 1998).

[56]Azyumardi Azra, "Kegagalan Islam Politik: Kasus PKB-NU." http://islamlib.com/?site=1&aid=222&cat=content&title=kolom. (di akses 30 Mei 2012)

Dalam melakukan komunikasi sosiokutural kepada konstituen PKU menggunakan lambang bola dunia dan bintang sembilan. Lambang-lambang partai ini tentu saja, salah satunya, dimaksudkan untuk memudahkan proses komunikasi politik dan sosialisasi sehingga mudah diterima massa NU. [57] Sedangkan PNU yang tanda gambarnya mengandung tulisan atau huruf arab, akan memetik keuntungan dari massa NU yang sebagian besar masih berpandangan tradisional.[58] Lain halnya dengan Partai SUNI merupakan salah satu partai yang melakukan Objektivitasi, meskipun tidak mungkin mengetahui secara detail dan tuntas.[59] Mengenai hubungan agama dan negara, sebuah partai dikatan melakukan objektivikasi bila (a) mengakui adanya pluralisme masyarakat dalam SARA, (b) menjadikan moral agama sebagai landasan gerakaan, (c) berusaha supaya moral agama (kemanusiaan, keadilan, dan kemajemukan) itu menjadi kenyataan objektif, (d) menjadikan Pancasila sebagai asas. Partai berdasarkan pluralisme (a), artinya terbuka bagi siapa saja, dari segi agamanya bisa Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, atau Khong Hu Cu. Mengenai agama, (b) dan (c) dibaca "sesuai agama masing-masing," dalam hal ini ialah Islam. Berdasar Pancasila (d), artinya tidak menginginkan negara agama, tapi juga tidak negara sekuler.

Keserupaan tanda gambar partai-partai di lingkungan NU itu jelas akan membingungkan konstituen utamanya pada saat pemilu. Betapapun tanda gambar PKB yang tidak memuat tulisan atau huruf arab, sepertinya lambang NU, akan terkesan kurang akrab dengan massa pemilihnya.[60]

PKU dan PNU, dengan mendasarkan pada fakta bahwa Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, keduanya mengambil posisi bersebrangan dengan PKB. Silang pendapat di antara dua bersaudara, Gus Dur dan Shalahuddin Wahid, kemudian berubah menjadi polemik panjang di harian *Media Indonesia*. Tema polemik terfokus pada masalah "Piagam Jakarta" dan peranan ayah mereka, Wahid Hasyim, dalam memperjuangkan negara

---

[57]Asep Saeful Muhtadi *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif*, 71.

[58]M. Arskal Salim GP, "Fragmentasi Partai Islam," dalam Deliar Noer, (et al.), *Mengapa Partai Islam Kalah?* Hamid Basyaib dan Hamid Abidin 101-102.

[59]Kuntowijoyo, Peta Politik bagi Umat Islam, dalam Deliar Noer, (et al.), *Mengapa Partai Islam Kalah?* Hamid Basyaib dan Hamid Abidin, 91.

[60]M. Arskal Salim GP, "Fragmentasi Partai Islam," dalam Deliar Noer, (et al.), *Mengapa Partai Islam Kalah?* Hamid Basyaib dan Hamid Abidin 101-102.

Islam di Indonesia. Menurut Abudurrahman Wahid, Hasyim adalah tokoh yang memperjuangkan negara berdasarkan Pancasila. Sementara Shalahuddin Wahid, dengan mendasarkan dokumen-dokumen milik Hasyim ketika melakukan negosiasi berkenaan dengan UUD 1945, berpendapat bahwa Hasyim ketika itu memperjuangkan Islam sebagai dasar negara dan mensyaratkan seorang Presiden harus beragama Islam. [61]

Yusuf Hasyim, Ketua PKU, salah satu partai berbasis NU. menegaskan perlunya usaha mencegah munculnya negara sekuler. Karena itu, menurutnya, perlu untuk meyakinkan terakomodasinya aspirasi umat Islam dalam sistem perundangan-undangan. Meskipun demikian, penegasan itu tidak ada kaitannya dengan keinginan Kiai Hasyim untuk mendirikan negara Islam.[62]

PKU, PNU dan SUNI pada Pemilu 1999 memperoleh suara sangat kecil. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan massa komunitas ini menyebrang ke PDI Perjuangan, Golkar, dan PAN.[63] Seandainya seluruh massa Islam Tradisional terkumpul ke dalam satu parpol, dapat dipastikan parpl itulah yang berpeluang menang dalam Pemilu 1999. Maka, suara warga NU pun terbelah-belah mengalir masuk ke partai-partai tersebut. belum lagi, dengan munculnya tanda gambar Ka'bah milik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Hamzah Haz yang berasal dari unsur NU sebagai ketua umumnya, telah menimbulkan spekulasi bahwa lahir partai kelima di lingkungan NU.[64]

PNU pada Pemilu 2004 berubah menjadi Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia, (PPNUI). [65] PPNUI tetap dikendalikan oleh politisi lama seperti halnya Syukron Ma'mun. PPNUI memiliki basis konstituen yang sama sebagaimana PKB yaitu warga Nahdliyin.

---

[61]Asep Saeful Muhtadi *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif* , 167-168. Lihat, Media Indonesia, edisi 8, 9, 17, dan 23 Oktober 1998.

[62]Asep Saeful Muhtadi *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif*,, 166. Lihat., "Indonesia Jangan jadi Negara Sekuler" dalam *Republika,* edisi 24 Maret 1999.

[63]Sugiono, "Islam dan Politik di Indonesia," dalam Deliar Noer, (et al.), *Mengapa Partai Islam Kalah?* Hamid Basyaib dan Hamid Abidin, 184-185.

[64]M. Arskal Salim GP, "Fragmentasi Partai Islam," dalam Deliar Noer, (et al.), *Mengapa Partai Islam Kalah?* Hamid Basyaib dan Hamid Abidin, 101-102.

[65]Asep Saeful Muhtadi *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif*,, 71.

Keduanya sama, antara PKB dan PPNUI lahir mengikuti arus reformasi setelah kekuasaan Orde Baru barakhir tahun 1998. [66]

Partai yang lahir yang menjadi simbol terakhir pergulatan nahdliyin, baik secara lokal maupun nasional.[67] Menjelang Pemilu 2009 adalah Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU). Partai ini tidak jauh berbeda dalam komunikasi sosiokultural dalam kampanye politik sebagaimana yang dimainkan oleh PKB yakni melalui pendekatan ritual keagamaan dan peran para kiai. Kehadiran dan keberadaan PKNU tak sedikit kiai-kiai NU yang dulu berbaris tangguh dalam gerakan jihad politiknya Gus Dur (PKB) kini memulai *star* politiknya di PKNU, atau bukan pula lantaran partai ini baru dan masih belum disesaki konflik di dalamnya.[68] Kelima partai politik di kalangan NU tersebut kalau dicermati tidaklah memiliki perbedaan yang prinsip, karena keempatnya tetap meletakkan paham keagamaan *ahl al-ssunnah wa al-jamaah* sebagai rujukan dalam berpolitik, bahkan dijadikan acuan etika perilakunya. Berikut gambaran fregmentasi partai di kalangan NU.

[66]Asep Saeful Muhtadi *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif*, 278.

[67]Masmuni Mahatma, "Ujian Terakhir Politik (Kiai) NU," dalam Khamami Zada, A. Fawaid Sjadli, *Nahdlatul Ulama Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010), 98.

[68]Masmuni Mahatma, "Ujian Terakhir Politik (Kiai) NU," dalam Khamami Zada, A. Fawaid Sjadli, *Nahdlatul Ulama Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan*, 99.

Tabel 04. 01
Partai Politik NU

No	Nama	Pimpinan	Asas / Sifat	Tujuan
1.	PKB	Matori Abdul Jalil	Islam / kebangsaan. demokratris dan terbuka. Akidah *Ahl al-sunnah wa al-jamaah*	- Mewujudkan cita-cita kemerdekaan RI. - Masyarakat adil & makmur - Tatanan politik demokratis, terbuka, bersih dan ber- akhlaqul karimah
2.	SUNI	Abu Hasan	Islam	- Mewujdukan kesejahteraan sosial ekonomi - Masyarakat adil & makmur
3.	PNU	K.H. Sukron Makmun	Pancasila / akidah *Ahl al-sunnah wa al-jamaah*	- Mewujudkan cita-cita kemerdekaan RI - Masyarakat adil & makmur - Kesejahteraan rakyat - Tatanan politik nasional yang demokratis, ber-akhalaqul karimah
4.	PKU	K.H. Yusuf Hasyim	Pancasila / akidah *Ahl al-sunnah wa al-jamaah*	- Mewujudkan cita-cita kemerdekaan RI - Masyarakat adil & makmur - Tatanan kenegaraan yang demokratis, akhlaqul karimah.
5.	PKNU	Choirul Anam	Ahl al-*sunnah wa al-jamaah*	- Menciptakan Negara dan bangsa yang adil, damai, dan sejahtera (baldatun thoyibatun wa rabbun ghafur) - Mewujudkan dari rasa keimanan yang berlandaskan keagamaan dan cinta tanah air

Kemudian masalah faksionalisme politik yang terjadi di dalam tubuh partai politik. Konflik politik merupakan suatu konflik yang lahir dari pertarungan kekuasaan yang bisa saja memungkinkan mereka yang berhasil mendapatkannya untuk memegang dan mempertahankan kekuasaan, tetapi juga yang memungkinkan mereka yang tidak mendapatkannya untuk menentang dan menggoyang kekuasaan itu dengan tujuan yang sama.[69] Dalam konteks perebutan kekuasaan di dalam tubuh partai politik tadi tidak terelakkan memunculkan fenomena faksionalisme politik.

Ketidakmampuan daya tampung PKB dalam mengaprisiasi komunikasi politik, menimbulkan bagi kalangan yang tidak tertampung mengambil jalan mendirikan partai baru. Fenomena ini

[69]Maurice Duverger, *Sosiologi Politik,* xiii.

menurut Muhaimin[70] sesuatu biasa di mana demokratisasi yang berlangsung di Indonesia berkonsekuensi menentukan pilihan partai politik atau mendirikan partai baru.

Terbentuknya faksi-faksi politik di kalangan elit NU sebagai bagian (sub kelompok) dari sejumlah besar kelompok individu-individu yang terorganisir, yang saling bersaing untuk merebut keuntungan yang berasal dari atau merebut keunggulan atau kekuasaan (politik) kelompok yang lebih berpengaruh tampak mewarnai kehidupan politk elite-elite yang mengendalikan partai politik. Secara tegas, menurut Bercovitch, keberadaan faksi politik tadi menunjukkan suatu keadaan dimana terjadi persaingan memperebutkan posisi.[71]

C. Ikatan Emosional PKB dengan Masyarakat Nahdliyin

Konstruksi Emosi merupakan bagian yang ketiga dari struktur tradisi komunikasi yang bersifat sosikultural dimana dalam hal pencetus teorinya Harre menyatakan, bahwa emosi merupakan konsep-konsep yang tersusun, seperti aspek lain dari pengalaman manusia karena mereka ditentukan oleh bahasa lokal dan tata susunan dari moral, kebudayaan, atau kelompok sosial.

Menurut James Averill,[72] emosi adalah sistem kepercayaan yang akan memandu definisi seseorang mengenai situasi yang dihadapinya. Emosi terdiri atas norma-norma sosial internal serta aturan tentang bagaimana mengatur perasaan. Berbagai norma dan aturan ini memberikan petunjuk kepada seseorang bagaimana menentukan dan merespons emosi. Jadi, emosi bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja. Emosi ditentukan dan ditangani menurut apa yang telah dipelajari dalam interaksi sosial dengan orang lain. Proses komunikasi merupakan kegiatan sosialisasi yang melibatkan perasaan (emosi) seseorang karena ia mencerminkan harapan komunikator. Sehingga dengan demikian proses komunikasi didahului oleh suatu proses seleksi penyaringan dan susunan berdasarkan faktor-faktor yang diingat, diinginkan atau tidak diinginkan oleh komunkator. Biasanya

---

[70] Wawancara Metro TV Online-Save Our Nation-Muhaimin Iskandar Part 1 Diupload pada 25 Des 2008 httpwww.youtube.comwatchv=6_T10DFX1TI. (di akses 25 November 2012).

[71] Jacob Bercovitch, *Social Conflict and Third Parties: Strategies of Conflict Resolution* (Massachussetts: Harvard University Press, 1983), 4.

[72] Stephen W. Littlejohn dan Karen A. Foss, *Teori Komunikasi*, Edisi. 9, 125. Lihat, James Averill, A *Constructivist View* of *Emotion* dalam *Theories* of *Emotion,* K. Plutchik dan H Kellerman (ed.), (New York, 1980), 305-339.

emosi terdiri dari norma-norma sosial yang dipelajari dan aturan yang mengatur perasaan. Emosi memiliki sebuah komponen psikologis, tetapi mengenali dan memahami perasaan-perasaan jasmani dipelajari secara sosial dalam sebuah kebudayaan. Dengan kata lain, kemampuan untuk memeahami emosi terbentuk secara sosial.

Selanjutnya, Wilbur Schramm[73] mengajukan syarat-syarat untuk berhasilnya suatu pesan kampanye yaitu (1) pesan harus direncanakan dan disampaikan sedemikian rupa sehingga pesan itu dapat menarik perhatian khalayak; (2) pesan haruslah menggunakan tanda-tanda yang sudah dikenal oleh komunikator dan khalayak sehingga kedua pengertian itu bertemu; (3) pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi daripada sasaran dan menyarankan agar cara-cara tersebut dapat mencapai kebutuhan itu; dan (4) pesan harus menyarankan sesuatu jalan untuk memperoleh kebutuhan yang layak bagi khalayak.

Sesungguhnya syarat-syarat yang dikemukakan di atas pada prinsipnya hanyalah terdiri atas intensitas dan pokok persoalannya. Jika diterapkan dalam komunikasi politik, intensitas pesan politik dapat dilakukan, misalnya pada tanda-tanda komunikasi *(sign of communication)* dan isi komunikasi politik. lsi pesan politik yang menarik perhatian apabila memuat pemenuhan kebutuhan pribadi, *(personal needs)* dan kelompok *(social needs)* dalam masyarakat. Suatu pesan politik hanya akan menarik perhatian selama ia memberikan harapan atau hasil-yang kuat relevansinya dengan persoalan kebutuhan *(needs)* tersebut.

Bahasa di dalam pesan kampanye, menurut Burke[74] selalu bermuatan emosional sehingga tidak ada kata-kata yang netral. Sebagai hasilnya maka sikap, penilaian dan perasaan khalayak secara bergantian muncul dalam bahasa yang digunakannya. Bahasa memiliki sifat selektif dan abstrak dengan fokus perhatian pada aspek-aspek tertentu dari realitas dan mengabaikan aspek-aspek lainnya. Emosi terdiri atas norma-norma sosial internal serta aturan tentang bagaimana mengatur perasaan. Berbagai norma dan aturan ini

---

[73]Lihat Wilbur Schramm, *The Nature of Mass Communication The Press and Effect of Mass Comunication* (Urban: University of Illionis Press, 1955). Anwar Arifin, *Komunikasi Politik Filsafat-Paradigma-Teori-Tujuan-Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 243.

[74]Untuk gagasan Burke tentang identifikasi dan divisi, lihat Kanneth Burke, *A Rhetoric of Motives* (Berkely: University of California Press, 1969), 21-23.

memberikan petunjuk kepada seseorang bagaimana menentukan dan merespons emosi.

Implikasinya adalah berkembangnya penggunaan ajaran agama untuk mobilisasi dukungan partai politik dengan tujuan merekatkan emosi, yang memang masih cukup ampuh. Elit agama yang juga berperan sebagai pemimpin partai-partai politik kemudian dengan mudah melakukan manipulasi terhadap ajaran dan simbol-simbol agama dalam usaha mereka memobilisasi dukungan dari para mengikutnya.

Dalam kasus NU, para kiai yang kebetulan menjadi fungsionaris partai-partai politik lantas dimanfaatkan agar dapat memberi fatwa-fatwa untuk memperkuat légitimasi partai di mata warga nahdliyin. Tak pelak lagi, "perang" ayat dan "fatwa" antar kiai-kiai NU pun tak terelakkan. Dan, dalam kondisi NU mengalami disorientasi karena perubahan cepat dalam ruang politik makro, kontrol yang dicoba dijalankan tidak efektif. Ujung-ujungnya, warga nahdliyin pun rentan terhadap friksi-friksi di dalam, sehingga membuka peluang bagi konflik-konflik tebuka.[75]

Didasari dari beberapa teori mengenai Konstruksi Emosi di atas Partai PKB memiliki hubungan tersendiri dengan yang bercirikan ikatan emosional. Hubungan antara pemilih dengan kandidat atau partai politik akan sangat bersifat emosional ketimbang rasional.[76] Bertolak belakang dengan ikatan rasional, ikatan emosional bersifat lebih dalam dan stabil. Ikatan ini tidak mudah dipengaruhi dan diubah. Dibutuhkan suatu kejadian dan peristiwa yang sangat drastis untuk bisa memutus ikatan emosional ini. Pertimbangan-perimbangan logis dan empiris tidak cukup besar untuk menggoyahkan dukungan emosional. Ketika seseorang begitu mengidolakan dan mengkultuskan suatu partai politik atau kandidat, dia akan siap melakukan apa saja demi idolanya.[77]

Bahkan sebagai juga kita ketahui bahwa unsur kejiwaan atau psikologi tidak lepas dari unsur pendukung dasarnya yakni unsur Id, Ego dan Superego, yang mana Id adalah sistem kepribadian manusia

---

[75]Muhammad AS Hikam, "Tragedi Jepara dan Ideologisasi Agama,"dalam Deliar Noer, (et al.), *Mengapa Partai Islam Kalah?* Hamid Basyaib dan Hamid Abidin (Jakarta: ALVABET, 1999), 108.

[76]Firmanzah, *Mengelola Partai Politik Komunikasi dan Positioning Ideology Politik di Era Demokrasi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 235.

[77]Sumber: Tempo interaktif (4 April 2001)

yang paling dasar, dimana Id ini berfungsi sebagai pencetus awal hati akan berkehendak, disadari atau pun tidak keberadaan aspek Id ini yang mendominasi seluruh kegiatan aktifitas yang dilakukan oleh manusia dalam kesehariannya. Tidak lepas dari hal tersebut dalam komunikasi pun demikian tidak luput dari unsur psikologi Id, dan juga dalam hal ini yakni dalam menentukan pilihan dalam pemilu unsur Id ini yang sering mendominasi nya. Superego berupa unsur kontak dengan dunia luar yang berisikan motivasi dan dorongan hasrat, adapun Super ego (*das ueber ich*) adalah sistem kepribadian yang berisi nilai-nilai atau aturan yang bersifat evaluatif (menyangkut baik dan buruk).[78]

Dalam hal ini PKB ingin mengembangkan strateginya untuk mendapatkan hasil suara terbanyak dengan menggunakan pendekatan emosional PKB dengan Masyarakat Nahdliyin nya melalui mediator atau figur kiai yang menjadi pamor utama dalam PKB.

PKB memiliki pemimpin besar yang sangat disegani karena kedalaman pemikiran sosialnya, keluasan wawasan politiknya, keawasan naluri politiknya dan besar pengaruhnya sepanjang sejarah Indonesia sejak lebih dari tiga dasawarsa yang lalu, yakni KH Gus Dur (Gus Dur). Kemampuan Gus Dur meramu tradisi pesantren dengan pemikiran-pemikiran modern menjadikannya sebagai juru bicara utama para kiai dan masyarakat NU. Kemudian muncullah kiai-kiai yang berani melakukan transformasi besar-besaran dalam tradisi berpikirnya, seperti pengembangan pemikiran madhab dari sebatas mengikuti pendapat ulama *(madhab qauly*) ke arah pemikiran mazhab yang mengikuti metodologi pemikiran ulama itu sendiri *(madhab manhajīy).*[79]

Efektifitas komunikasi politik di lingkungan kaum *Nahdliyin*, salah satunya, berkaitan dengan adanya kemasan agama dalam pesan-pesan yang disampaikannya. Karena karakteriatik sensitif yang dimilikinya, agama dapat berfungsi sebagai mediator dalam menyampaikan pesan apa pun bagi para pemeluknya. Agama secara tidak langsung menjadi wacana yang memungkinkan sesuatu provokasi dapat mudah tersosialiaasi. Lebih-lebih pada masyarakat beragama yang masih didominasi oleh dimensi-dimensi emosional,

[78] Walgito, Bimo, *Pengantar Psikologi Umum* (CV. Andi Offset, 2010), 16.

[79] A Muhaimin Iskandar, *Melanjutkan Pemikiran dan Perjuangan Gus Dur* (Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang, 2010), 64.

seperti umumnya kaum tradisionalis[80], apa pun yang dapat menyentuh kesadaran religiusitas atau keyakinannya dapat mengubah keyakinan itu menjadi perilaku yang agresif. Selanjutnya Muhaimin Iskandar menjelaskan terkait isu Islam inklusif. Kesimpulannya Islam inklusif tidak ada lagi dikotomi antara Islam dan negara.[81]

Itulah sebabnya, perang wacana selama musim kampanye dan dalam rangkaian kegiatan pemilu, misalnya, hampir selalu mengangkat tema-tema agama, atau sekurang-kurangnya menggunakan terma-terma yang secara umum telah menjadi milik agama. Salah bukti keberhasilan komunikasi politik PKB dalam hubungan emosional dapat diukur dari tingginya partisipasi politik konstituen.[82] Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kampanye pemilu tidak begitu penting terhadap pemberian suara. Justru, yang memiliki pengaruh yang besar dalam pemberian suara adalah ikatan *afeksi* atau hubungan emosional mereka kepada suatu partai tertentu.[83]

Adapun cohtoh aplikasi dari Konstruksi Emosi pada PKB dapat dilihat sebagai berikut:

1. Isu-isu yang digunakan untuk Merangsang Emosional Konstituen dalam Pemenangan Pemilu

Dalam penggunaan isu kampanye PKB melakukan pendekatan isu dan program kampanye yang berbeda-beda untuk setiap segmen pemilih. Untuk segmen basis massa PKB yakni warga NU, PKB mengunakan isu kesamaan ideologis, bahwa PKB merupakan satu-satunya partai yang dilahirkan dan diakui oleh PBNU, PKB merupakan partai yang melandaskan perjuangan partai-nya pada ajaran Islam *Ahlus Sunnah Wa al-Jamaah*, yang juga merupakan nilai ideologis yang dianut oleh warga NU.[84] Adannya kesamaan prinsip ideologis tersebut, sudah seharusnya warga NU menjadikan PKB sebagai pilihan

---

[80]Firmanzah, *Mengelola Partai Politik Komunikasi dan Positioning Ideology Politik di Era Demokrasi,* 230.

[81]Wawancara Metro TV Online-Save Our Nation-Muhaimin Iskandar Part 4 Diupload pada 25 Des 2008 httpwww.youtube.comwatchv=Oaz6QkDVU9I. (di akses 25 November 2012).

[82]Firdaus, "Komunikasi Politik Elite Nahlatul Ulama," (Jakarta: Disertasi, UIN Press, 2008), 224.

[83]Anwar Arifin, *Komunikasi Politik Filsafat-Paradigma-Teori-Tujuan-Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 243.

[84]Firmanzah, *Mengelola Partai Politik Komunikasi dan Positioning Ideology Politik di Era Demokrasi*, 310.

untuk memperjuangkan aspirasi politik mereka. Komunikasi ideologi adalah komunikasi makna dan simbol. [85] Komunikasi ideologi tidak hanya sebatas mensosialisasikan isu politik dan program kerja partai politik secara internal maupun eksternal.

Konstruksi emosi sosial-politik -keagamaan oleh elit politik (muslim) bahwa keislaman seseorang itu seolah terkait dengan pilihan politiknya. Di lingkunagn NU misalnya, Pada Pemilu 1999 terdengar kabar senter bahwa bagi warga NU hukumnya "wajib" mencoblos PKB. Karena inilah partai warga NU yang direstui Ketua Umum PBNU KH Gus Dur, dibandingkan tiga parta politik lainnya yang berdiri di lingkungan NU (PKU, PNU, SUNI). Akibatnya, jika warga NU tak mencoblos PKB, ia dituding telah "keluar" dari identitas ke NU-annya.

Paling tidak, kabar demikian dibenarkan oleh Ir. Shalahuddin Wahid, telah mengeksploitasi warga NU: "Sejak Gus Dur menderikan PKB, di daerah-daerah malah terjadi benturan yang hebat antarwarga NU. Sebab, ada anggapan bahwa yang tak mendukung PKB bukanlah warga NU lagi," papar Shalahuddin Wahid dalam Merdeka (10 April 1999).[86]

Begitulah realitas aktual-faktual saat ini. Yakni, konstruksi sosial-politik-keagamaan oleh elit politik mengindikasikan bahwa ada unsur sakral, dan karena wajib dicoblos oleh kalangan masyarakat NU. Jika tidak, ia dianggap telah berkurang identitas ke NU-nya. Dengan begitu. ke NU-nya seseorang memiliki relasi politik dengan pilihan politiknya, berupa pencoblosan partai.

Table

Isu-isu Strategis PKB ke Depan

No	Isu-isu Strategis PKB Lima Tahun ke depan	Aplikasi Program PKB Lima Tahun Ke Depan
1.	Pembenahan manajemen organisasi partai.	Memastikan partai melembagakan prinsip-prinsip demokrasi dalam segenap prosedur dan mekanisme partai. Termasuk di dalamnya adalah sistem

[85]Firmanzah, *Mengelola Partai Politik Komunikasi dan Positioning Ideology Politik di Era Demokrasi*, 315.

[86]Sukidi "Desakralisasi Partai Islam," dalam Deliar Noer, (et al.), *Mengapa Partai Islam Kalah?* Hamid Basyaib dan Hamid Abidin (Jakarta: ALVABET, 1999), 50.

		admnistrasi, keuangan dan mekanisme komunikasi internal yang melibatkan segenap elemen partai berikut anggota-anggota partai. Semua aspek itu perlu dikembangkan dalam kerangka penegakkan disiplin partai yang demokratis dan profesional.
2.	Penguatan struktur organisasi partai.	Struktur partai menjangkau setiap daerah (geografis) dan segmen-segmen dalam masyarakat (sektoral), Struktur partai juga harus mulai membedakan antara tempat para politisi dan tempat para birokrat (partai) profesional yang dibayar untuk mengelola organisasi. Pertimbangan lain dalam penguatan srruktur partai adalah meningkatkan keterkaitan struktur partai dengan kenyataan posisi PKB yang berada di luar kekuasaan.
3.	Pembentukan sistem kaderisasi dan pelaksanaannya secara intensif.	Membenahi rancangan sistem kaderisasi di pelbagai tingkatan kepengurusan dan memastikan sistem itu-serta kaderisasinya sendiri terlaksana dengan baik. Orientasi kaderisasi setiap level kepengurusan harus berbeda-beda tekanannya, disesuaikan dengan keburuhan politik setiap level kepengurusan. Di ringkar desa atau kelurahan, misalnya, kaderisasi harus diarahkan pada pembentukan kader-kader yang mempunyai kemampuan untuk berinteraksi secara intensif dengan masyarakat dan kemampuan yang handal untuk melayani mereka.
4.	Pembentukan sekolah politik dengan modul-modul yang berbeda.	Berbeda dengan kaderisasi yang mirip sekolah umum, maka sekolah politik adalah semacam sekolah kejuruan politik, Modul-modul yang dikembangkan juga harus spesifik dan khas. Misalnya: modul

		khusus calon ideolog partai, modul khusus untuk anggota legislatif, modul khusus untuk organiser partai, modul khusus untuk propagandis partai dan seterusnya.
5.	Pengembangan media pendidikan politik dan propaganda partai.	Terbitan-terbitan berkala yang sederhana dan murah perlu diproduksi secara reguler untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas politik kader. Ia juga dapat dipakai sebagai alat untuk memelihara hubungan dengan kader, anggota dan para simpatisan partai.
6.	Pengembangan kebijakan politik yang responsif terhadap masalah-masalah masyarakat.	diperlukan suatu kebijakan politik partai yang bisa menjadi dasar dan motivasi segenap pengurus dan kader partai untuk cepat tanggap terhadap perkembangan dan masalah yang muncul dalam masyarakat. Panduan praktis mengenai hal ini mungkin juga diperlukan untuk memandu bagaimana kader partai mesti bersikap dan berrindak dalam situasi-situasi krisis di masyarakat.

Pada umumnya, pilihan politik seseorang dalam pemilu dipengaruhi oleh interaksi maupun bekerjanya secara individual sejumlah faktor-faktor berikut, seperti identifikasi kepartai, pembelahan politik, tingkat melek politik, ekonomi, dan pengaruh-pengaruh kekinian. Banyak pemilih sebenarnya sudah menentukan pilihan politiknya karena adanya keterikatan politik maupun emosional yang kuat dengan partai tertentu. Keterikatan ini bisa terbentuk karena adanya kesamaan pemikiran dan ideologi yang dianutnya dengan platform partai. Demikian juga, hal ini bisa terbentuk melalui proses sosialisasi politik di keluarga maupun lingkungan yang telah berlangsung lama.

D. Pengolahan Kesan: Pendekatan PKB dengan Warga Nahdliyin

Terdapat berbagai bentuk komunikasi politik yang biasa dilakukan oleh politikus atau aktivis politik untuk mencapai tujuan politiknya. Teknik kegiatan komunikasi[87] yang dilakukan diarahkan untuk mencapai dukungan-legitimasi (otoritas sosial), yang meliputi tiga level, yaitu pengetahuan, sikap sampai dengan perilaku khalayak. Menurut Erving Goffman[88] situasi atau *setting* dalam kehidupan sehari-hari dapat diumpamakan sebagai panggung pertunjukan dan manusia adalah para aktor yang menggunakan pertunjukan drama itu untuk memberikan kesan kepada para penonton.[89] Kegiatan komunikasi politik meliputi juga, upaya yang dilakukan politikus untuk mencari, mempertahankan dan meningkatkan dukungan politik dengan jalan melakukan kesan pencitraan yang lebih diidentikan dengan figur dan membina opini publik yang positif.

Sebagaimana diketahui dalam unsur pembawaan diri ini lebih kompleks kepada hal peran drama sikap yang dimiliki oleh komunikator dalam hal ini adalah Kiai. Goffman pencetus teori ini mengakui bahwa panggung depan mengandung anasir struktural dalam arti bahwa panggung depan cenderung terlembagakan alias mewakili kepentingan organisasi atau partai politik. Sering ketika aktor politik melaksanakan perannya, peran tersebut telah ditetapkan lembaga atau partai tempat dia bernaung. Meskipun berbau struktural, daya tarik pendekatan Goffman terletak pada interaksi.[90] Ia berpendapat bahwa

---

[87]Stephen W. Littlejohn dan Karen A. Foss, *Teori Komunikasi*, Edisi. 9, 128. Lihat, Erving Goffman, *The Presentation of Selfin Everyday Life* (Garden City, NY: Doubleday, 1959); dan Goffman, *Relations in Public.*

[88]Erving Goffman, *Frame Analysis: An Essay on the Organizntion of Experience* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1974). Lihat juga Jef Verhoeven, "Goffman's Frame Analysis and Modern Micro-Sociological Paradigms." dalam *Micro-Sociological Theory: Perspectives on Sociological Theory,* ed., H J. Helle and S. N. Eisentadt (Beverly Hills, CA: Sage, 1985), 2 71-100, Stuart J. Sigman,/1 *Perspective on Social Communication* (Lexington, MA: Lexington Books, 1987), 41-56; Spencer Cahill, "Erving Goffman," dalam *Symbolic Interactionism: An Introduction, an Interpretation, an Integration,* ed., Joel M. Charon (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1992), 185-200.

[89]Sandra Metts and Erica Grohskopf, "Impression Management: Goals, Strategies, and Skills," dalam *Hardbook of Communication and Social Interaction Skills,* ed., John O. Greene and Brant R. Burleson (Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, 2003), 357-399.

[90]Dalam sifat interaksi berhadapan langsung, lihat Erving Goffman, *Encounters: Iwo Studies in the Sociology of Interaction* (Indianapolis: Bobbs-

umumnya orang-orang berusaha menyajikan diri mereka yang diidealisasikan dalam pertunjukan mereka di pangung depan, merasa bahwa mereka harus menyembunyikan hal-hal tertentu dalam pertunjukannya. [91]

Menurut Goffman, orang yang terlibat dalam suatu percakapan tatap muka pada dasarnya menyajikan drama kepada lawan bicaranya. Mereka memilih karakter tertentu dan menunjukkan karakter itu pada situasi dan lawan bicara yang sesuai dengan karakter yang telah dipilih. Dalam hal ini, seseorang harus membuat daftar dari berbagai situasi di mana ia akan menyajikan bermacam karakter berbeda yang dimilikinya.[92] Pada setiap situasi di mana aktor politik berada, maka politikus akan memilih suatu peran atau karakter tertentu dan memainkannya pertunjukkan pentas, kampanye politik. Tetapi sangat disayangkan dalam hal menjaga situasi ini PKB tidak bisa melihat kondisi terbaik di partainya. Profil Kiai yang tadinya dijadikan sebagai pedoman dalam bertindak ternyata tidak mampu membawa dirinya sebagai figur yang baik untuk dicontoh yakni dengan terjadinya beberapa konflik internal yang terjadi di dalam PKB yang disebabkan oleh tidak mampunya Gus Dur membawa dirinya untuk berpolitik yang baik di dalam PKB. Lebih jelasnya penulis akan menyampaikan hubungan erat Gus dur dengan PKB.

1. Gus Dur dan PKB

PKB sepertinya sangat sulit dan mungkin tidak bisa dipisahkan dengan sosok Gus Dur (Gus Dur). Hal ini lebih disebabkan oleh peran dan pengaruh politik Gus Dur yang sangat luar biasa besar di PKB. Begitu besarnya peran dan pengaruh politik Gus Dur di PKB setidaknya disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, menyangkut persoalan kekerabatan (*geneologis*). Sistem kekerabatan ini merupakan ciri-ciri pengorganisasian yang hadir dalam tubuh NU seperti pada kegiatan pendidikan pesantren dan lembaga sosial lainnya. Dalam

---

Merrill, 1961); *Behavior in Public Places* (New York: Free Press, 1963); *Interaction Ritual: Essays on Face-to-Face Behcvior* (Garden City, NY: Double Day, 1967); dan *Relations in Public* (New York: Basic, 1971).

[91]Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Kamunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2004), 166.

[92]Morissan dan Andy Corry Wardhani, *Teori Komunikasi, tentang Komunikator, Pesan, Percakapan, dan Hubungan*, 82. Lihat juga, Stephen W. Littlejohn dan Karen A.Foss, *Teori Komunikasi*, Edisi. 9, Penerjemah: Mohammad Yusuf Hamdan (Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2009), 129.

dinamika politik NU, sistem kekerabatan atau geneologis ini dapat menjadi faktor yang turut menentukan signifikan-tidaknya perolehan suara sebuah partai politik yang berbasis massa NU.[93]

Kekerabatan (*geneologis*) di lingkungan NU perlu diperhatikan secara cermat dan akurat karena ia dapat mengungkap pola patronase[94] antara elite partai politik di lingkungan NU, dan pola sentralisasi kekuasaannya pun terlihat sangat jelas. Otoritas dan kekuasaan elite di lingkungan NU dalam kehidupan masyarakat memunculkan asumsi bahwa tidak hanya terbatas pada interaksi sosial, tetapi juga dapat diterapkan dalam bidang politik. Asumsi ini dibuktikan oleh fakta bahwa selama Pemilu 1999, misalnya, partai-partai NU peserta pemilu berupaya memanfaatkan kekuasaan ke-NU-annya untuk meningkatkan perolehan suara mereka.[95]

Gus Dur, yang secara geneologis, sebagai seorang cucu langsung dari kiai besar pendiri NU tentu merupakan satu kelebihan, sehingga di manapun ia berada dan dalam posisi apapun kharisma seorang cucu dan anak dari kiai besar selalu muncul dalam dirinya. Kharisma itu yang kemudian memosisikan Gus Dur sebagai seorang kiai yang juga sangat dihormati dan disegani tidak hanya oleh pengikut fanatiknya tetapi juga orang-orang yang pernah kenal dan dekat dengan dirinya. Pada gilirannya, ia memperoleh apa yang disebut oleh Jackson sebagai "otoritas tradisional."

Otoritas ini adalah otoritas[96] patron yang mempengaruhi dan membangkitkan emosi para pengikutnya. Dalam situasi dan kondisi apapun para pengikutnya akan tetap mempertahankan patron mereka sekuat tenaga. Pola hubungan seperti ini sangat mengakar di kalangan warga tradisional Nahdhiyyin dan sering dimanfaatkan untuk melayani

---

[93]Ali Anwar, *Avonturisme NU: Menjejaki Akar Konflik Kepentingan Politik Kaum Nahdhiyyin* (Bandung: Humaniora, 2004), 61.

[94]Patronase dilihat sebagai sumber (tokoh) yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan material dan spiritual para pengikutnya dan pada gilirannya menuntut adanya penghormatan dari mereka. Karl D. Jackson, *Traditional Authority, Islam, and Rebellion: A Study of Indonesian Political Behavior* (Berkeley: University of California Press, 1980), 3-6.

[95]Ali Anwar, *Avonturisme NU*, 62.

[96]Temuan Jackson berlaku juga untuk hubungan yang lebih umum antara dua orang yang berbeda. Ia tidak hanya terbatas pada tokoh-tokoh seperti kyai dan pengikutnya. Sifat "otoritas tradisional" juga muncul pada seorang klien yang mungkin meminjam uang kepada seseorang yang kemudian menjadi patronnya. Klien itu secara moral akan merasa harus berbuat baik (lebih dari sekedar memberi uang) untuk menjaga integritas patronnya.

kepentingan-kepentingan politik elite karena massa pengikutnya dapat dengan mudah dimobilisasi melalui mobilisasi lapisan patron yang lebih tinggi. Perubahan apapun dalam sikap politik yang dibuat oleh patron akan dapat menyebabkan perubahan serupa dalam sikap politik para pengikutnya. Dengan pola seperti ini, pengikut yang setia akan memenuhi permintaan dukungan apapun dari elite politik mereka. Sebagian pengikut akan melakukan hal ini tanpa berpikir panjang karena mereka yakin bahwa para elite partai politik di lingkungan NU mengetahui apa yang tidak dapat diketahui oleh warga NU biasa.[97]

Tidak heran, jika kemudian kehadiran Gus Dur dengan faktor geneologisnya itu sangat berpengaruh terhadap eksistensi dan pola kepemimpinannya di PKB, sebuah Partai yang juga berbasis massa NU. Begitu juga dengan PKB ini. Menurut Muhaimin[98] adalah salah satunya partai dari runtutan perjalanan sejarah politik NU, yang lahir 1926 sebagai kekuatan sosial kemasyarakatan lalu menjadi partai politik dipaksa bergabung dengan PPP, keluar dari PPP lalu kembali menjadi ormas. Akhirnya melahirkan partai PKB.

Kedua, adanya kultur pesantren yang mempunyai hubungan unik antara kiai dan santrinya. Sebab, di pesantren santri akan merasa takut dan patuh terhadap kiai atau patronnya. Dalam budaya pesantren, para kiai dipandang sebagai pemimpin spiritual para santri yang memiliki hubungan yang erat dan diikat dalam ikatan budaya paternalistik. Petuah-petuah mereka akan selalu didengar, diikuti, dan dilaksanakan. Dengan demikian, dalam konteks politik, ajakan dan fatwa politik para kiai yang mereka sampaikan dalam kampanye-kampanye pemilu akan selalu diikuti dan dan dilaksanakan oleh para santri yang dipimpinnya.[99]

Budaya pesantren ini tentu sangat memberikan keuntungan bagi Gus Dur, karena ia adalah representasi "darah biru" pesantren kaum Nahdhiyyin. PKB yang notabene-nya memiliki basis massa yang kental dengan budaya pesantren itu juga akan sangat diuntungkan dengan kehadiran Gus Dur di PKB, karena dengan demikian kepatuhan

---

[97]Ali Anwar, *Avonturisme NU*, 62-63.

[98]Wawancara Metro TV Online-Save Our Nation-Muhaimin Iskandar Part 1 Diupload pada 25 Des 2008 httpwww.youtube.comwatchv=6_T10DFX1TI. (di akses 25 November 2012).

[99] Faisal Ismail, *NU, Gus Durisme, dan Politik Kiai* (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1999), 39.

warga NU terhadap Gus Dur akan berpengaruh terhadap eksistensi dan besarnya dukungan warga NU terhadap PKB.

Ketiga, pandangan dan pemikiran-pemikiran yang selalu muncul dari bangunan intelektual Gus Dur yang kokoh, menempatkan Gus Dur sebagai "Guru Bangsa" yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam mencari solusi terhadap segala persoalan bangsa, adalah merupakan salah satu faktor dominan mengapa Gus Dur menjadi salah satu orang yang paling berpengaruh, tidak hanya di PKB tetapi di negeri ini. Harus diakui bahwa kontribusi Gus Dur kepada wacana nasional, tanpa memandang basis institusional dan sejarah keluarganya, adalah suatu kekuatan intelektual yang besar. Greg Barton, dalam bukunya The Impact of Neo-Modernism on Indonesia Islamic Thought: the Emergence of New Pluralism, mengatakan bahwa:

Gus Dur jarang ditelaah dengan serius oleh para komentator luar dan terdapat kesan bahwa dia dianggap penting hanya karena koneksi-koneksinya, jaringan akar rumputnya dan ketajaman politisnya, bukan karena gagasan-gagasannya. Jarang para ilmuan luar mempelajari, apalagi menganggap penting, gagasan- gagasannya, namun pada akhirnya tampaklah bahwa pemikirannya adalah kontribusi yang paling penting dari semua kontribusi lainnya." [100]

Di samping itu, kepemimpinan Gus Dur, selama tiga periode di dalam NU (1984 – 1999), dengan memberikan sumbangan yang sangat penting dalam membangun dan mengembangkan intelektual dan *civil society* di negeri ini adalah merupakan salah satu bukti tingginya kecerdasan intelektual Gus Dur. Selama periode kepemimpinan Gus Dur, NU telah berhasil menciptakan suatu periode yang paling cemerlang dalam sejarah NU bagi perkembangan diskursus intelektualitas dan civil society. Keterlibatan aktivis-aktivis dan kalangan intelektual NU dalam gerakan-gerakan pro demokrasi dan hak asasi manusia, munculnya pelbagai lembaga swadaya masyarakat, dan jaringan-jaringan civil society, serta kebangkitan pesantren dalam kerja-kerja *civil society* merupakan contoh kesuksesan NU dalam mengawal gerakan intelektual dan *civil society*.

Perkembangan yang sangat baik itu tidak lepas dari model kepemimpinan Gus Dur yang didasarkan pada pemikiran yang kritis dan nonkompromis. Keberhasilan Gus Dur memimpin NU selama tiga

---

[100]Douglas E. Ramage, *Percaturan Politik di Indonesia: Demokrasi, Islam, dan Ideologi Toleransi* (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002), 84.

periode lamanya dengan gagasan-gasan cemerlangnya itulah yang kemudian menambah keyakinan dan kepercayaan warga Nahdiyyin bahwa Gus Dur akan mampu membawa PKB, sebagai partai yang lahir dari perut NU, sesukses dan secemerlang pada waktu ia memimpin NU.

Kecerdasan intelektual dan kepiawaian Gus Dur dalam memimpin organisasi, telah menjadikan PKB menjadi sebuah partai besar dan sangat diperhitungkan walaupun usianya masih relatif muda. Kebesaran nama PKB tentu tidaklah terlepas dari kebesaran nama Gus Dur. Hal ini terbukti, walaupun pada saat partai ini didirikan ikut bermunculan partai-partai lain yang berbasis NU, tetapi hal ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kebesaran nama PKB dan Gus Dur. Dalam sebuah talkshow di TPI, menjelang Pemilu 1999, Gus Dur mengeluarkan sebuah pernyataan yang sangat kontroversial berkenaan dengan hubungan partai-partai yang berbasis NU, sebab pada saat itu ada tiga lebih partai yang mengidentikkan diri sebagai partai NU. Ia mengibaratkan partai politik di lingkungan NU dengan sesuatu yang keluar dari 'anus ayam'. Menurutnya, PKB ibarat telur dan partai yang lain, yaitu PKU, PNU dan SUNI ibarat 'kotoran ayam'.[101] Pernyataan ini kemudian mendapat reaksi yang sangat kencang dari para pendiri dan kiai pendukung partai di luar PKB dengan menciptakan manuver-manuver politik untuk menghancurkan dukungan warga NU terhadap PKB dan Gus Dur. Akan tetapi, yang terjadi justru sebaliknya, nama PKB dan Gus Dur kian membesar dan dukungan warga NU semakin solid.

Keempat, faktor yang membuat besarnya peran politik Gus Dur di PKB adalah faktor struktural. Posisi Dewan Syura, sebuah lembaga tertinggi Partai yang ia duduki dalam struktur PKB dengan kewenangan yang begitu luas sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Dasar Partai, menambah besar pengaruh Gus Dur di PKB.[102] Dengan kewenangannya yang begitu luas, tidak heran jika kemudian semua pandangan, gagasan, sikap, kebijakan, dan manuver-manuver politik Gus Dur sangat kentara mempengaruhi gerak langkah PKB.

Berikut ini peneliti sampaikan konflik internal PKB tersebut:

1. Faksi Matori Abdul Djalil vs Gus Dur Tahun 2002

[101]Shalahuddin Wahid, *Negeri di Balik Kabut Sejarah* (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2000), 17.

[102] Lihat Anggaran Dasar (AD) PKB, Pasal 17

Periode awal PKB diwarnai oleh konflik yang muncul antara KH.Gus Dur (Gus Dur) dengan Matori Abdul Djalil, Gus Duryang pada saat itu menjabat sebagai Presiden RI dan Ketua Umum Dewan Syuro DPP PKB berbeda pandangan mengenai situasi politik aktualdengan Matori Abdul Djalil, Ketua Umum Dewan Tanfidz-nya. Dengan pertimbangan sendiri, Matori yang saat itu menjadi Wakil Ketua MPR RI,memutuskan menghadiri Sidang Istimewa MPR RI yang mengagendakanpelengseran Gus Dur dari kursi kepresidenan pada pertengahan tahun2001. Padahal DPP PKB saat itu telah menginstruksikan kepada seluruhanggota Fraksi PKB di DPR/MPR untuk tidak mengahadiri SI MPR.[103]

Begitulah, pada akhirnya Matori diberhentikan sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB. Dan Gus Dur dilengserkan dari kursi kepresidenan melalui SI MPR yang menegangkan. Keputusan pemberhentian Matori tersebut dilakukan melalui prosedur dan berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan AD/ART sehingga mempunyai landasan hukum yang kuat. Namun Matori melakukan perlawanan. Matori tetap mengklaim dirinya sebagai Ketua Umum DPP PKB. Sejak saat itu, kepemiminan PKB terbelah menjadi dua: PKB Kuningan (Gus Dur-Alwi Shihab) dan PKB Batu Tulis (Matori Abdul Djalil).[104]

Ketika menjabat Menteri Pertahanan dalam Kabinet Gotong Royong yang dipimpin Megawati Soekarnoputri, Matori mulai mempersoalkan dan mengajukan kasus pemberhentian dirinya ke pengadilan. Kubu Matori menang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 28 Mei 2003. Atas kekalahannya, Kubu PKB Kuningan kemudian mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Akhirnya, pada tanggal 18 Juni 2003, Mahkamah Agung memberi kemenangan kepada kubu Gus Dur-Alwi Shihab dan menyatakan PKB yang dipimpin keduanyalah yang berhak mengikuti prosesi Pemilihan Umum 2004.[105]

Gugatan yang diajukan kubu Matori dapat dipatahkan dengan argumen hukum yang mudah karena ternyata materi gugatan kubu Matori lemah secara hukum. Akan tetapi seketika kubu Matori

---

[103]Helmy Faishal Zaini, ed., *Khidamat Kami Bagimu Negeri* (Jakarta: FKB DPR RI, 2007), 118.

[104]PKB Kuningan ialah PKB yang berkantor di daerah Kuningan, dan PKB Batu Tulis ialah PKB yang berkantor di daerah Batu Tulis Jakarta.

[105]A. Effendy Choirie, *Daulat PKB: Bersama Gus Dur Menang Untuk Rakyat* (Jakarta:Firalev Foundation, 2007), 20-21.

menarik gugatannya dengan maksud mengajukan gugatan baru setelah menyadari bahwa posisi dalil-dalil pada gugatan pertama sangat lemah. Kubu Gus Dur tidak menerima usul penarikan gugatan itu dan meminta hakim untuk terus menerima dan memutuskan.

Akhirnya hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa gugatan Matori tidak diterima. Kubu Gus Dur naik banding sebab yang mereka tuntut agar gugatan Matori ditolak, bukan tidak diterima.

Sementara kubu Gus Dur mengajukan banding, kubu Matori mengajukan gugatan baru. Setelah bermain "zig-zag" untuk segera mendapat putusan banding (karena ada tendensi mengulur-ulur waktu), akhirnya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memenangkan kubu Gus Dur dengan vonis menolak gugatan Matori.

Tetapi tepat ketika jamaah PKB tengah memanjatkan syukur, tiba-tiba PN Jakarta Selatan memutuskan dan mengabulkan gugatan Matori yang kedua. Situasinya menjadi serba sulit karena ada dua putusan yang bertentangan padahal objeknya sama. Sebagai pihak yang sudah menang dan kemudian dikalahkan oleh hakim yang lain, kubu Gus Dur sangat kecewa dan berteriak bahwa kemenangan Matori itu batal demi hukum karena *nebis in idem.*[106] Tetapi PN Jakarta Selatan tidak menggubris teriakan *nebis in idem* ini dan tetap pada keputusannya.

Dalam situasi semacam itu, jika sampai di tingkat Mahkamah Agung kedua perkara itu disatukan sangat besar kemungkinan

---

[106] *Nebis in idem*, ialah prinsip hukum yang berlaku dalam hukum perdata maupun pidana.Dalam hukum perdata, prinsip ini mengandung pengertian bahwa sebuah perkara dengan obyeksama, para pihak sama, dan materi pokok perkara yang sama, yang diputus oleh pengadilan yangtelah berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan atau menolak tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Dalam hukum pidana nasional di Indonesia, asas ne bis in idem ini dapat kita temui dalam Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") yaitu seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Asas ne bis in idem ini berlaku dalam hal seseorang telah mendapat putusan bebas (vrijspraak), lepas (onstlag van alle rechtsvolging) atau pemidanaan (veroordeling) (lihat Pasal 75 ayat [2] KUHP). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23); *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No 73); Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 yaitu Perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan Dengan Asas *Nebis In Idem.*

Mahkamah Agung akan memenangkan kubu Matori dalam perkara yang kedua. Di sinilah kubu Gus Dur menggunakan taktik agar perkara itu tidak disatukan. Pengajuan kasasi atas putusan yang memenangkan Matori Gus Dur perlambat, sementara Mahkamah Agung didesak agar segera memutus perkara yang pertama. Kubu Gus Dur sengaja tidak segera mengajukan kasasi atas perkara yang kedua agar kedua perkara tersebut tidak disatukan. Sebab kalau disatukan sangat mungkin kubu Gus Dur akan kalah.

Mengingat ketentuan Undang-Undang bahwa MA harus segera memutus dalam jangka waktu sebulan perkara kasasi pertama, dengan akibat kalau tidak diputus dianggap menguatkan putusan Pengadilan Tinggi, maka Mahkamah Agung segera memutus dan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah memenangkan kubu Gus Dur. Dengan kemenangan pada tingkat kasasi tersebut maka kemenangan kubu Gus Dur tidak bisa lagi dihadang, mengingat kemenangan Matori dalam gugatan yang kedua menjadi betul-betul nebis in idem dan tidak bisa lagi diteruskan.

Meski masih akan dihambat dengan adanya isu herziening (Peninjauan Kembali), akhirnya legalitas PKB menjadi milik kubu Gus Dur. Kubu Gus Dur menang di Pengadilan setelah bertarung dengan penuh ketegangan. Jalan menuju kemenangan itusungguh berat bahkan ditingkahi dengan konflik diantara mereka sendiri, sehingga melemahkan konsolidasi ke daerah-daerah. Perlawanan Matori dijalur hukum kandas. Namun demikian, Ia terus bergerak dan membangun kekuatan konflik baru. Dengan dukungan sejumlah kiai di daerah dan sebagian politisi muda. Matori membentuk partai baru yang diberi nama Partai Kejayaan Demokrasi (PKD). Partai ini pada akhirnya gagal mengikuti Pemilu 2004. Ia tidak lolos dalam verifikasi politik yang dilakukan oleh Departemen Hukum dan HAM RI dan Komisi Pemilihan Umum.[107] Menanggung kerugian yang tidak bisa dipandang enteng. Ia kehilangan sekitar 1,4 juta suara pada Pemilu 2004. Mungkin tidak serta merta karena kasus konflik Gus Dur-Matori itu. Tetapi banyak pihak menilai bahwa konflik itu berkontribusi besar terhadap anjloknya suara PKB di Pemilu 2004. Konflik internal yang berujung pada perpecahan politik itu, menjadi salah satu episode kelam dalam sejarah politik PKB.

2. Faksi Saifullah Yusuf vs Gus Dur Tahun 2005

[107]Wawancara Pribadi dengan Wahyudin Kessa, Jakarta, 5 November 2012.

Episode kelam perseteruan Gus Dur-Matori itu, rupanya tidak cukup memberi pelajaran buat partai pimpinan Gus Dur ini. Pada periode berikutnya konflik internal kembali mencuat kepermukaan. Lagi-lagi konflik itu melibatkan Gus Dur pada satu sisi, dan kali ini terdapat Alwi Shihab dan Saifullah Yusuf[108] pada sisi yang lain.

Konflik awalnya dipicu oleh pemecatan dengan hormat Alwi Shihab dan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dari posisi Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PKB, karena Alwi Shihab dan Saifullah Yusuf rangkap jabatan sebagai menteri di Kabinet Indonesia Bersatu. Pemecatan atas Alwi Shihab dan Saifullah Yusuf terjadi pada tanggal 26 Oktober 2004.

Karena merasa tidak puas, Alwi Shihab dan Saefullah Yusuf dengan "restu politik" dari para kiai khos Langitan[109] berencana akan menggugat secara hukum keputusan DPP PKB soal pemecatan secara sepihak tersebut. Menurut keduanya, pemecatan tersebut dinilai cacat hukum, karena tidak melalui prosedur organisasi partai yang semestinya. Baru pada tanggal 11 April 2005, Alwi Shihab mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.[110]

Ketika proses hukum sedang berjalan, DPP PKB menyelenggarakan Muktamar II di Semarang pada tangal 16-19 April 2005. Muktamar II PKB diikuti oleh 33 DPW dari 33 DPW yang sah dan 394 DPC dari 430 DPC yang sah. Dalam Muktamar II PKB ini, setelah memperoleh suara mayoritas, Gus Dur ditetapkan sebagai Ketua Umum Dewan Syura (88% suara sah) dan A. Muhaimin

---

[108]Menurut pandangan Gus Ipul pemecatan tidak sesuai AD/ART, maka dengan berat hati memperkarakan Gus Dur ke pangadilan konon demi mempertahankan sebuah hak. Sebenarnya Gus Ipuk tak sampai hati memperkarakan Gus Dur mengingat hubungan dekat antara keponakan dan paman, meskipun tidak secara langsung. Mukhlas Syarkun, *Ensiklopedi abdurrahman wahid (riwayat gus dur)* Jilid I (Jakarta: PPPKI, 2013), 303.

[109]menggelar pertemuan di Pondok Pesantren Langitan Tuban, Jawa Timur. Terdiri dari para Kiai Khos Langitan diantaranya: KH Abdullah Faqih(Langitan), Abdurrahman Chudori (Magelang), KH. Abdullah Abas (Cirebon), KH. AbdullahFaqih (Tuban), KH. Mas Subadar (Pasuruan), KH. Idris Marzuki (Lirboyo, Kediri), KH. Zainudin Jazuli (Ploso, Kediri), KH. Muhaimin Parakan (Temanggung), KH. Chotib Umar (Sukabumi). Sumber: http://news.liputan6.com/read/101989/kiai-khos-mendukung-munas-ulama-mukernas-pkb (di akses: 26 Juli 2012). Sumber lainnya: http://www.indosiar.com/fokus/forum-ulama-langitan-dukung-langkah-syaifullah-yusuf_30410.html

[110]Umar Sholahudin, "Pseudo Democracy dalam Kongres Partai," artikel dia k-ses pada 17 Desember 2009 dari http://www.suarakarya-online.com/news.

Iskandar sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB periode 2005-2010 (82% suara sah).[111]

Kemenangan Gus Dur dan Muhaimin Iskandar secara demokratis dalam pemilihan Ketua Umum Dewan Tanfidz pada Muktamar tersebut ternyata tidak dapat diterima oleh para pesaingnya. Mereka selanjutnya mempersatukan diri untuk menggugat hasil-hasil Muktamar. Untuk memperkuat posisi, dimanfaatkanlah kasus pemecatan Alwi Shihab dan Saifullah Yusuf sebagai alasan pembenaran atas gerakan mereka. Pada saat Muktamar II itu terdapat beberapa tokoh partai yang menyatakan *mufaroqah* (memisahkan diri dari PKB) dan selanjutnya membikin PKB tandingan.

Konflik babak kedua di PKB masih terus berlanjut. Setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan Saifullah Yusuf atas pemecatan dirinya pada 10 Agustus 2005, kubu Saifullah Yusuf kemudian secara resmi mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 30Agustus 2005. Tidak hanya itu, kubu Saifullah Yusuf bahkan menggelar Muktamar versi Surabaya pada tanggal 1-2 Oktober 2005 yang memilih KH. Abdurrahman Chudlori dan Choirul Anam, masing-masing sebagai Ketua Umum Dewan Syura dan Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB.

Konflik semakin memanas pada saat keluarnya putusan kasasi MARI No. 1896 K/PDT/2005 tertanggal 15 November 2005 yang membatalkan SK DPP PKB Nomor: 01762/DPP-02/III/A.I/X/2004 tertanggal 27 Oktober 2004 tentang pemberhentian dengan hormat penggugat (Alwi Shihab dan Saifullah Yusuf) dari jabatan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Tanfidz DPP PKB 2002-2005, dan menyatakan bahwa proses pemecatan Alwi Shihab dan Saifullah Yusuf tidak sah secara hukum. Putusan Mahkamah Agung inilah yang dijadikan dasar oleh kubu hasil Muktamar versi Surabaya untuk mendelegitimasi kepemimpinan Gus Dur-Muhaimin Iskandar.[112]

Namun demikian, putusan Mahkamah Agung tersebut hanya bersifat deklaratoir, sehingga permohonan Alwi Shihab agar dipulihkan harkat, martabat serta kedudukannya seperti semula ditolak oleh Mahkamah Agung. Artinya, pembatalan SK DPP PK tentang pemberhentian penggugat (Alwi Shihab dan Saifullah Yusuf) dimaksud tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Makna dari putusan

---

[111]M. Hasanudin Wahid, ed., *Kronologi Muktamar II PKB: Fakta Historis, Yuridis, dan Politis* (Jakarta: DPP PKB, 2005), 20.

[112]Zaini, ed., *Khidamat Kami Bagimu Negeri*, 123.

yang bersifat deklaratoir itu adalah bahwa nama penggugat (Alwi Shihab dan Saifullah yusuf) sebagai pribadi telah direhabilitasi, namun yang bersangkutan tidak diberi hak untuk kembali ke kedudukan semula sebagai Ketua Umum dan Sekjend Dewan Tanfidz DPP PKB 2002-2005. Hal ini dikarenakan sudah ada perbuatan hukum lain yang menggantikannya, yaitu Muktamar II PKB di Semarang yang telah diselenggarakan sesuai dengan ketentuan AD/ART PKB dan UU No. 31/2002 tentang partai politik.

Sifat putusan Mahkamah Agung itu secara politis memang mengandung celah yang cukup besar untuk dipolitisasi. Celah inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh kelompok penolak hasil Muktamar Semarang yang dipimpin oleh Choirul Anam untuk mendelegitimasi kepemimpinan Gus Dur dan Muhaimin Iskandar. Gerakan politik kelompok Anam ini semakin menguat setelah mendapat "angin" dari kelompok eksternal yang sedang memegang kekuasaan.

Hal ini dibuktikan dari keluarnya SK Menkumham Nomor: M-11.UM.06.08 tahun 2005. SK itu berisi penerimaan pendaftaran DPP PKB pimpinan Choirul Anam sebagai hasil dari apa yang disebut "Muktamar Surabaya." SK Menkumham inilah yang kemudian melegalkan terjadinya dualisme kepengurusan DPP PKB, mengingat sebelumnya, pada tanggal 8 Juni 2005, Menteri Hukum dan HAM telah terlebih dahulu mengeluarkan Surat Keputusan Nomor M – 02.UM.06.08 Tahun 2005 tentang pendaftaran DPP PKB hasil Muktamar II Semarang.[113]

Berbekal pemahaman atas putusan kasasi Mahkamah Agung RI No. 1896 K/PDT/2005 serta keyakinan atas sahnya hasil Muktamar II di Semarang maka DPP PKB pimpinan Gus Dur dan Muhaimin Iskandar mengajukan gugatan kepada Choirul Anam dkk. Atas tuduhan penggunaan atribut partai, logo, dan hymne PKB pada Muktamar Surabaya secara melawan hukum. Gugatan ini dimenangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui putusan nomor 1445/Pdt.G/2005/PN Jaksel.[114]

Giliran kubu Chairul Anam yang sakit hati atas putusan hukum tersebut. Karena itulah, pada tanggal 15 Juni 2006, secara resmi kubu Choirul Anam mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Hanya saja tidak memihak kubu Anam. Pada tanggal 24 Agustus 2006, Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan kubu Choirul Anam

[113]Zaini, ed., *Khidamat Kami Bagimu Negeri*, 124.
[114]Zaini, ed., *Khidamat Kami Bagimu Negeri*, 125.

dan menyatakan Muktamar II PKB di Semarang sah sesuai dengan AD/ART PKB dan UU. No. 31/2002 tentang partai politik.[115]

Dengan demikian, sampai di sini, secara hukum PKB tidak terfragmentasi lagi. Konflik dengan kubu Choirul Anam selesai. Tidak ada lagi PKB Surabaya atau PKB Semarang, yang ada hanyalah PKB pimpinan Gus Dur-Muhaimin Iskandar. Akhirnya, kubu Choirul Anam memilih mendirikan partai baru pada tanggal 21 November 2006: Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU).

3. Faksi Muhaimin Iskandar vs Gus Dur Tahun 2008

Idealitas menjadi PKB sebagai partai besar dan berjaya tidak mungkin dicapai dengan berdiam diri. Diam adalah tindakan terburuk yang hanya akan membawa petaka. Jika tidak ingin lapuk terkena hujan dan tidak kering terkena panas matahari, maka bersatu, bekerja, dan Pemecatan dan pembekuan struktur kepengurusan PKB secara massal, baik di pusat maupun di daerah, tidak bisa dipisahkan dalam keberadaan Gus Dur di tubuh PKB. Nama Gus Dur sering dijadikan referensi dalam pemecatan dan pembekuan pengurus PKB. Padahal, jika dicermati dengan logika yang bersih, aksi pemecatan dan pembekuan kepengurusan PKB hingga ke daerah-daerah perlu dikoreksi prosedur dan pijakannya. Untuk prosedur pemecatan dan pembekuan struktur kepengurusan PKB sebetulnya sudah diatur dengan sangat rapi dalam ART PKB.[116] Dalam konteks inilah, elit-elit PKB sebagai komunikator wajib hukumnya mematuhi aturan partai yang telah menjadi konsensus bersama.

Pemecatan secara massal kader-kader dan pembekuan struktur kepengurusan PKB tidak bisa dilepaskan dari orang-orang yang berada disekeliling Gus Dur yang politis-pragmatis. Mereka memanfaatkan nama besar Gus Dur untuk kepentingan pribadi. Jadi, di samping nama besar Gus Dur yang terlalu dominan, sumber masalah di PKB juga terletak pada kader-kader yang terbiasa menggunakan nama Gus Dur di balik aksi pemecatan dan pembekuan struktur kepengurusan PKB.[117]

---

[115]A. Effendy Choirie, *Daulat PKB*, h. 21-25.

[116]M. Hasanuddin Wahid dan M. Thoriqul Haq, ed., Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa (AD/ART PKB) Hasil Muktamar II Semarang (Jakarta: DPP PKB, 2006), 28-30 dan 50-52.

[117]Wawancara Pribadi dengan Wahyudin Kessa, Jakarta, 5 November 2012.

Dengan meminjam analisis Yasraf Amir Piliang,[118] kader-kader yang memanfaatkan kharisma Gus Dur potensial menjadi kader-kader plastis (split) yang dapat berubah wajah karena alasan-alasan politis-pragmatis. Pribadi-pribadi plastis tidak hanya memiliki dua wajah, tetapi berwajah jamak. Dalam konteks ini, tidak heran jika mereka memilih mendekati Gus Dur dengan selalu berlindung dan merujuk kepadanya demi kepentingan-kepentingan tertentu.[119] Inilah gempa politik kontemporer yang melanda PKB menjelang Pemilu 2009.

Keberhasilan PKB menematkan posisi penting dalam peta partai politik di negeri ini memang perlu diapresiasi. Berkat kebersamaan, keteguhan sikap, dan kerja keras para pengurus dan kadernya di berbagai tingkatan, harus diakui, PKB mampu mempertahankan posisinya sebagai tiga besar parpol di Indonesia. Sebuah prestasi gemilang di tengah-tengah menjamurnya pragmatisme politik yang melanda banyak parpol di Indonesia. Apresiasi terhadap prestasi yang diraih PKB tidak perlu terlalu berlebihan mengingat hanya memunculkan euforia yang jika tidak dikelola secara baik akan berakhir antiklimaks. Para pengurus dan kader PKB selalu dituntut tetap waspada dan terus bekerja, karena jika lalai dan lengah, prestasi sebagai tiga besar parpol di Indonesia akan dengan mudah digunakan atau dimanfaatkan orang luar yang berkepentingan menjadikan PKB sebagai alat atau kendaraan politik.

Ironisnya, disinyalir, kekhawatiran semacam inilah yang terjadi sekarang ini. PKB yang rentan konflik kembali bergejolak sesaat setelah Lukman Edy dicopot dari jabatannya sebagai Sekjend Dewan Tanfidz DPP PKB dan diganti oleh Yenny Wahid. Masuknya Yenny Wahid sebagai Sekjend PKB yang notabene adalah puteri Gus Dur sangat mengejutkan kader-kader PKB, terutama di luar Jawa, karena selama ini mereka menganggap bahwa posisi Lukman Edy sebagai Sekjend PKB merupakan representasi kader luar Jawa di DPP PKB. Entah secara kebetulan atau tidak, setelah Yenny Wahid menjadi Sekjend DPP PKB terjadi masalah baru di partai. Dalam hitungan waktu yang tidak lama dari pengangkatannya sebagai Sekjend, Yenny Wahid "membawa serta orang luar" ke lingkungan PKB. Adalah Sigit Haryo Wibisono yang dibawa masuk ke PKB. Berkat Yenny Wahid,

---

[118]Yasraf A. Piliang, *Transpolitika, Dinamika Politik di dalam Era Virtualitas* (Yogyakarta: Jalasutra, 2005).

[119]Saiful Bari, "Mencintai Gus Dur Secara Rasional," artikel diakses pada 1 Desember 2009 dari http://masdaronline.com.

Sigit yang kala itu menjabat Wakil Ketua DPD Golkar Jawa Tengah dengan mudah bergabung di jajaran elit DPP PKB.[120] Pada saat yang hampir bersamaan, kader-kader partai yang sejauh ini bekerja tanpa mengenal lelah justru secara massal disingkirkan dari struktur kepengurusan PKB. Inilah yang menyebabkan konsolidasi PKB terganggu. [121]

Selain Sigit Haryo Wibisono, masih ada sejumlah nama lainnya yang juga masuk ke dalam struktur kepengurusan PKB tanpa melalui jejaring karir politik yang lazim. Diantara mereka adalah Muhammad Zen yang tercatat sebagai tokoh Muhammadiyah Pati, Hasyim Karim yang merupakan kader dari DPC Partai Bulan Bintang (PBB) kabupaten Jombang, dan juga Moeslim Abdurrahman yang secara tiba-tiba dipromosikan menjadi ketua DPW PKB DKI Jakarta menggantikan Nursyahbani Katjasungkana. Moeslim Abdurrahman sendiri adalah kader Muhammadiyah yang sempat mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN).[122]

Kemudian masuknya Artalita Suryani, menjabat sebagai Bendahara Umum DPP PKB.[123] Pengusaha kaya yang tercatat sebagai salah satu pengurus di yayasan pimpinan Ibu Ani Yudhoyono. Ditariknya beberapa orang luar ke dalam lingkaran inti DPP PKB sebenarnya tidak masalah manakala ia melalui proses yang benar. Permasalahan dewasa ini adalah rekruitmen orang-rang baru tersebut tidak melalui proses yang benar sesuai dengan AD/ART partai. Orang masih menjabat sebagai pengurus partai lain tiba-tiba saja bisa masuk menjadi pengurus inti DPP PKB. Padahal AD/ART menggariskan secara tegas bahwa keanggotaan ganda semacam itu tidak bisa dibenarkan. Contohnya adalah Sigit Haryo Wibisono yang pada saat

---

[120]Republika online, "Sigit Haryo Anasir Jahat dalam Konflik PKB." Dikutip dari: http://www.republika.co.id/berita/shortlink/48761 (di akses: 12 Februari 2013). wawancara Muhaimin Iskandar dan detiknews, "Virus ke PKB Melalui Yenny," dikutip dari: http://news.detik.com/read/2008/04/03/085456/917552/158/virus-ke-pkb-melalui-yenny (di akses: 14 Januari 2013).

[121]Wawancara Pribadi dengan Wahyudin Kessa, Jakarta, 5 November 2012.

[122]Moeslim Abdurrahman "Mantan Tokoh PAN Pimpin PKB DKI," Suara Merdeka, 1 September 2007.

[123]Artalyta hanya dua hari menjadi bendahara, dan sebelum mengerjakan tugas sebagai bendahara, yang bersangkutan menyatakan tidak bersedia menjadi pengurus. Alasannya, karena kesibukan di bisnis dan tidak enak dengan sejumlah partai lain. Sumber: http://news.okezone.com/read/2008/03/04/1/88920/bendahara-pkb-artalyta-suryani-terdaftar-di-depkumham. (di akses: 27 Maret 2013).

direkrut menjadi anggota Dewan Syuro PKB, masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah.

Lebih dari itu, yang menjadi masalah juga adalah bahwa masuknya orang-orang baru tersebut dibarengi dengan sejumlah pemecatan kader dan pembekuan kepengurusan di daerah. Tentu saja ini aneh mengingat partai- partai lain berusaha keras menambah anggota baru, tetapi PKB malah mengurangi jumlah anggota dan kader-kadernya. Jadi terdapat dua keanehan PKB dalam konteks ini. Pertama, merekrut orang-orang baru yang merupakan pengurus anggota partai lain, sesuatu yang tidak bisa dibenarkan oleh AD/ART PKB dan aturan partai manapun. Kedua, membuang orang-orang atau kader lama yang telah bekerja keras untuk partai, bahkan semenjak PKB didirikan.

Tentu saja masuknya orang-orang baru yang bertendensi inkonstitusional dan diprediksi karena kedekatannya dengan Gus Dur atau Yenny Wahid, memicu keresahan yang luas di kalangan internal PKB, termasuk jajaran para kiai dan bahkan NU selaku induk politiknya. Pemecatan kader dan pembekuan DPW/DPC yang begitu marak juga mengundang keprihatinan yang luas atas masa depan PKB. PKB disinyalir semakin jauh dari cita-cita politik NU karena gagal mengorganisir diri secara modern dan profesional dan pada gilirannya gagal menyuarakan aspirasi politik komunitas Nahdliyin.

a. Pemecatan Muhaimin Iskandar

Baru bernafas sebentar untuk konsolidasi barisan pengurus partai baik di tingkat pusat sampai ke tingkat daerah pasca konflik, tiba-tiba dikejutkan dengan adanya pemecatan kader-kader dan pembekuan kepengurusan DPW/DPC secara massal baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemecatan tersebut menurut Gus Dur dilandasi atas pembersihan PKB dari orang-orang yang bermasalah. Persoalan krusial yang melanda PKB kali ini adalah adanya sentralisasi kekuasaan di tangan segelintir elitnya, dalam hal ini adalah (keluarga) Gus Dur.[124] Seperti pemecatan Hanif Dhakhiri, Eman Hermawan, Imam Nahrowi, Abdul Kadir Karding, dan masih banyak lagi dari kepengurusan DPP PKB. Kondisi seperti ini, membuat di tubuh PKB tidak harmonis ditambah lagi dengan ditunjuknya Yenny Wahid

[124]"Laskar kebangkitan Bangsa Sayangkan Dominasi Keluarga di PKB," Tempo Interaktif, 10 Desember 2007.

sebagai Sekretaris Jenderal menggantikan Lukman Edy yang duduk sebagai menteri di Kabinet Indonesia Bersatu.

Dalam rapat gabungan Dewan Syura dan Dewan Tanfidz DPP PKB pada tanggal 26 Maret 2008 di kantor DPP PKB, memutuskan meminta Muhaimin Iskandar mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz.[125] Muhaimin yang pada saat itu menghadiri rapat tersebut, menerima atas pemecatannya.[126] Dengan mengatakan, saya taat, patuh dan tawadu' terhadap Gus Dur. Tetapi setelah itu, Muhaimin Muhaimin menambahkan, dirinya dan segenap pengurus PKB akan melanjutkan konsolidasi, termasuk melakukan proses pendaftaran caleg ke KPU untuk mengikuti pemilu 2009.[127]

Keputusan rapat gabungan Dewan Syura dan Dewan Tanfidz DPP PKB untuk memberhentikan Muhaimin Iskandar dari jabatan Ketua Umum disebabkan karena sering terjadi selisih pendapat antara Dewan Syura dengan Dewan Tanfidz soal penentuan calon Gubernur/wakil Gubernur dan Bupati/Wali Kota dan Wakilnya dalam Pilkada di beberapa daerah, penentuan ketua Fraksi di DPR, dan lain sebagainya.[128] Akibat dari kisruh ini beberapa daerah yang merupakan basis PKB kalah dalam pertarungan Pilkada. [129]

Pada tanggal 4 April 2008, Muhaimin menyatakan menolak Keputusan Rapat Gabungan Dewan Syura dan Dewan Tanfidz DPP PKB pada 26 Maret 2008 yang meminta dirinya mengundurkan diri.

---

[125]Dikutip dari situs kompas.com "Jalan Panjang Konflik PKB," sumber: http://regional.kompas.com/read/2008/07/19/03164441/about.html

[126]Adalah keponakan yang dibesarkan oleh Gus Dur khususnya dalam politik menurut ibu Lily Wahid adik kandung Gus Dur menyatakan, "Sumber segala konflik yang mengitari Gus Dur khususnya dengan kawan- kawan akrab Gus Dur dan para kyai yang kemudian jauh dengan Gus Dur adalah 2 keponakan yaitu Cak Imin dan Gus Ipul". Karir politik cak imin begitu gemilang, tetapi kemudian antara keponakan dan paman ini berebut PKB sampai ke pengadilan Cak Imin dibantu penguasa memenangkan pertarungan itu, akhirnya kemana-mana dalam pemilu 2009, Gus Dur menyatakan partainya dicuri Imin. Namun Cak Imin beralasan semua itu dilakukan bukan melawan Gus Dur, tetapi menyelematkan PKB dari pengaruh Sigit Cs yang telah memporak-porandakan PKB. Mukhlas Syarkun, *Ensiklopedi abdurrahman wahid (riwayat gus dur)*, 304.

[127]Warta NU: "Pengadilan Putuskan Muhaimin Tetap Pimpin PKB," sumber: http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,1-id,12959-lang,id-c,warta-t,Pengadilan+Putuskan+Muhaimin+Tetap+Pimpin+PKB-.phpx (di akses: 26 Juni 2012).

[128]Wawancara singkat dengan Marwan Ja'far disela acara Gemasabar. Jakarta, 8 Juni 2012.

[129]Wawancara Pribadi dengan Wahyuddin Kessa, Jakarta, 8 Desember 2012.

Kemudian pada tanggal 5 April 2008 rapat pleno gabungan Dewan Syura dan Dewan Tanfidz DPP PKB sepakat memberhentikan sementara Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz. Pada tanggal 6 April 2008 Muhaimin menggelar Musyawarah Pimipinan dan Silaturrahim Alim Ulama PKB di Bandung, menyatakan mengukuhkan kembali hasil Muktamar II PKB di Semarang pada tahun 2005 tentang duet Gus Dur dan Muhaimin Iskandar sebagai Dewan Syura dan Dewan Tanfidz DPP PKB. Kemudian pada tanggal 14 April 2008 kepengurusan versi Muhaimin memberhentikan Yenny Wahid dari jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal DPP PKB.[130]

Untuk melegitimasi keputusan pemberhentian Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB, maka Gus Dur dan pelaksana tugas Ketua Umum DPP PKB Ali Masykur Musa mengadakan Muktamar Luar Biasa (MLB) 30 April-1 Mei 2008 di Pesantren al-Ashriyyah Nurul Iman Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Merasa dirinya diberhentikan sepihak oleh Dewan Syura, maka Muhaimin Iskandar pun mengadakan Muktamar Luar Biasa tandingan tanggal 2-4 Mei 2008 di Hotel Mercure, Kawasan Wisata Ancol, Jakarta.

Kemudian Muhaimin Iskandar dan Lukman Edy, pada tanggal 15 Mei 2008 mengajukan gugatan ke Pengadilan Jakarta Selatan, atas pemberhentian sepihak dirinya.[131] Hasil gugatan tersebut, Pengadilan Jakarta Selatan memenangkan pihak Muhaimin Iskandar dan Lukman Edy.

Ketegangan yang terjadi antara Gus Dur dengan para Ketua Umum PKB berbuntut panjang hingga saat ini dan menjadi konflik internal yang berkelanjutan di tubuh PKB meskipun aktor-aktornya sudah berganti. Sejarah mencatat pemecatan terhadap Matori pada tahun 2001, yang tidak sesuai dengan aturan dibenarkan dan dicarikan pembenarannya, akhirnya terus terjadi. Ketua umum dan Sekjend kedua, yaitu Alwi Shihab dan Saifullah Yusuf pada tahun 2005 juga mengalami hal yang sama, dipecat tanpa menimbang aturan yang digunakan. Yang terakhir, pemecatan juga menimpa Ketua Umum generasi ketiga, yaitu Muhaimin Iskandar dan Sekjend Lukman Edy

[130]"MLB dan Ketidakpastian Karier Politik," Kompas, 9 Mei 2008.

[131]Dikutip dari sumber: Sidang Perdana Gugatan Cak Imin vs Gus Dur 15 Mei 2008 http://news.detik.com/read/2008/05/06/144503/934843/10/sidang-perdana-gugatan-cak-imin-vs-gus-dur-15-mei-2008 (di akses: 23 Maret 2012).

pada tahun 2008 hanya dalam forum pleno, tanpa peringatan dari kesalahan yang jelas dan puluhan DPW serta DPC PKB se-Indonesia juga mengalami hal yang sama.

Begitulah hari-hari PKB yang senantiasa diwarnai konflik internal. Parahnya, konflik itu selalu berujung pada pembentukan partai baru yang menjadi sempalan PKB. Konflik pertama yang melibatkan Matori Abdul Djalil menghasilkan PKD. Sementara konflik berikutnya dengan Alwi-Saifullah-Anam menghasilkan PKNU. Sedikit atau banyak, kehadiran partai-partai sempalan itu dengan segenap pendukungnya di kalangan kiai maupun kalangan muda, terus menggerogoti suara PKB dari Pemilu ke Pemilu. Semoga konflik yang terakhir ini tidak menghasilkan parti baru, agar PKB tetap mampu menunjukan taringnya sebagai partai besar pada awal pendiriannya dahulu. Tentu saja ini harus jadi perhatian semua pengurus, kader dan konstituen PKB itu sendiri.

Sebagai sebuah organisasi, PKB tentu saja menghadapi masalah kelangkaan posisi dan sumber-sumber. Tidaklah mungkin sebuah partai mampu menyediakan posisi yang sama nilainya bagi seluruh anggotanya. Tidak mungkin pula parpol memberikan imbalan materi yang merata bagi semua anggotanya. Hanya sebagian kecil anggota yang bisa menikmati fasilitas posisi dan sumber-sumber yang terdapat pada sebuah parpol. Fasilitas posisi dan sumber-sumber yang dimaksud adalah kekuasaan atau kepemimpinan di dalam parpol. Disinilah dibutuhkan pengelolaan konflik dari para pemimpin parpol untuk menghindari partai terperosok ke dalam lingkaran konflik.[132]

4. Faksi Gus Dur (2000-2009)

Gus Dur termasuk figur yang tidak pernahselesai untuk diperbincangkan mengingat sikap dan pandangannya yang selalu menuai kontroversi. Menjelang Pemilu 2009, seperti yang dipublikasikan media massa di negeri ini, Gus Dur diberitakan telah mengeluarkan 'kartu kuning' kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang saat ini dipimpin Hasyim Muzadi untuk tidak mengintervensi gempa politik yang terjadi di tubuh PKB.

---

[132]Istilah pengelolaan konflik dipakai oleh Dennis C. Pirages dalam *Stabilitas Politik dan Pengelolaan Konflik*, terj. Zulkarimein Nasution (Jakarta: FIS-UI, 1982). Istilah pengelolaan konflik perlu dibedakan dengan pengendalian konflik yang sifatnya cenderung satu arah dan kadang-kadang menggunakan cara-cara represif.

Secara genetik, mantan Ketua Umum PBNU (1984-1994) dan Presiden Republik Indonesia ke-4 ini, termasuk keturunan darah biru. Ayahnya, KH. Wahid Hasyim adalah putra KH. Hasyim Asy'ari, pendiri ormas NU dan pendiri pesantren Tebu Ireng Jombang. Ibunya, Ny. Hj. Sholehah adalah putri pendiri pesantren Denanyar Jombang, yaitu KH. Bisri Syamsuri. Dengan demikian, Gus Dur merupakan cucu dari dua ulama besar NU sekaligus tokoh penting bangsa Indonesia.[133]

Namun demikian, popularitas Gus Dur bukan semata-mata keturunan darah biru, Gus Dur dibentuk melalui proses panjang, dimana ia pernah berorganisasi dan belajar di Mesir, Irak, serta beberapa negara Eropa. Di sejumlah negara tersebut, Gus Dur tekun mempelajari berbagai macam pengetahuan baik yang lahir dari rahim (tradisi) Islam maupun Barat. Perjalanan panjang pendidikan Gus Dur tentu ikut memberikan kontribusi dalam mempopulerkan namanya.

Gus Dur juga dikenal sebagai pembela sejati orang-orang tertindas yang termarjinalkan dibanyak sektor seperti Jamaah Ahmadiyah, Masyarakat Tionghoa, pejuang pluralisme, dan masih banyak lagi yang lainnya. Hal yang sama juga ditunjukan Gus Dur di wilayah politik. Gus Dur merupakan guru bangsa yang gigih memperjuangkan tegaknya demokrasi dan toleransi dalam berpolitik dengan tetap berada dipihak- pihak yang termarjinalkan. Demokrasi dalam pemikiran Gus Dur lebih relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang pluralis.

Melalui PKB, perjuangan untuk menegakkan demokrasi dan toleransi dilakukan Gus Dur. Di banyak kesempatan, Gus Dur sering memberikan teladan soal bagaimana format politik ideal yang tidak berseberangan dengan konsep demokrasi dan toleransi pada kader-kader PKB. Hanya saja, bahwa kharisma dan posisi Gus Dur di PKB tersebut dibaca secara lain oleh sejumlah orang yang memiliki "kedekatan" dengan Gus Dur.[134] Fenomena seperti ini secara sederhana dapat digambarkan dengan melihat interaksi-interaksi antar individu yang berlangsung secara simbolik *(symbolic interactionism)*, sehingga terjadi proses orientasi, peniruan dan peneguhan untuk memerankan sesuatu perilaku, seperti apa yang diperankan orang lain.

---

[133]Greg Barton, *Biografi Gud Dur* (Yogyakarta: LKiS, 2006), 33.

[134]Konsep yang digagas oleh George Herbert Mead (l863-1931) ini melukiskan terjadinya proses internalisasi perilaku melalui interaksi secara simbolik antar individu. Lihat, misalnya, Henry L. Tischler, *Introduction to Sociology,* 106-107; Haralambos and Holborn, *Sociology: Themes and Perspectives*, 891.

Perlambangan sosok Gus Dur yang merupakan suatu identitas merek yang dibawakan dalam komunikasi politik merupakan jalan untuk mencitrakan sesuatu yang bertujuan untuk dikenal dan dilekatkan ke benak publik.

Keberanian Gus Dur mengambil keputusan kontroversial seakan menjadi justifikasi tersendiri bagi sejumlah orang dekat dan yang mendekat kepada Gus Dur untuk melakukan manuver-manuver politik dari hubungan interaksi antar individu.

Politik instrumentalis terlihat di sini. Akibatnya, pribadi Gus Dur yang dikenal sebagai demokrat sejati mulai dipertanyakan. Gus Dur digunakan sebagai referensi oleh sejumlah orang dekat dan yang mendekat kepadanya, diprediksi membawa kepentingan-kepentingan politik tertentu. Nama besar Gus Dur sering dijadikan referensi dalam pemecatan dan pembekuan struktur kepengurusan PKB yang marak dilakukan yang menjadi salah satu penyebab konflik terakhir ini. Persoalan inilah yang mengganggu konsolidasi partai.

Dari tiga episode konflik internal PKB itu terdapat hal menarik untuk dicemati, yakni posisi Gus Dur yang senantiasa tampil sebagai pihak. Bukan sebagai penengah. Jika melibatkan yang lain, misalnya seseorang atau sejumlah pimpinan PKB yang lain dalam konstalasi konflik itu, mereka pada umumnya terlibat karena mereka menjadi "pembela- pembela Gus Dur." Atau, jika pun hal-ihwal konflik itu berurusan dengan"pembangkangan" atas keputusan partai, maka hal itu pun juga lebihdalam "keputusan Gus Dur yang diamini oleh partai." Publik cukup mafhum bahwa posisi Gus Dur di PKB bisa melampaui AD/ART.

Kiranya fenomena inilah yang menyebabkan kiai-kiai NU memisahkan diri dari PKB. PKB tidak kondusif lagi bagi kiai-kiai NU untuk dijadikan rumah politik, karena Gus Dur terlalu superior. Untuk menyebut contoh, akibat terlalu dominannya Gus Dur, bukan rahasia lagi kalau kiai-kiai khos di lingkungan NU seperti yang tergabung dalam forum kiai langitan menjaga jarak dari PKB. Padahal, tanpa dukungan kiai-kiai NU yang sudah berkonstribusi banyak ke PKB, PKB tidak akan mampu menjadi partai berjaya yang diperhitungkan di tingkat nasional. Tampilnya Gus Dur sebagai pihak dalam konflik-konflik inernal PKB, membuat konflik di tubuh partai kaum Nahdliyin ini hampir selalu bersifat tak terdamaikan (*zero-sum conflict*). Artinya, konflik tidak mempunyai penyelesaian dalam arti yang sesungguhnya.

Yang muncul adalah pihak yang menang dan pihak yang kalah, dimana pada akhirnya pihak yang kalah membentuk sempalan.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, PKD dan PKNU merupakan partai sempalan PKB yang muncul sebagi pihak yang berkonflik dengan Gus Dur dan kalah secara politik maupun secara hukum di pengadilan. Munculnya kecenderungan sifat konflik internal PKB yang tak terdamaikan itu tidak terlepas dari posisi Gus Dur yang tidak terbantahkan di dalam pelbagai proses pengambilan keputusan partai. Gus Dur memang memiliki reputasi sebagai seorang demokrat di kalangan eksternal PKB,namun bagi kalangan internalnya Gus Dur merupakan pemimpin yang bisa dibantah. Keputusan bisa menerabas batas-batas aturan organisasi partai dan ironisnya sangat sedikit politisi di PKB yang beran menentang keputusannya.[135]

Keadaan semacam itulah bisa dikatakan selalu menempatkan Gus Dur sebagai pihak yang berkonflik. Dan entah karena Gus Dur menang atau karena faktor lainnya, setiap kali pimpinan Dewan Tanfidz DPP PKB berkonflik dengan Gus Dur maka kesalahan selalu dirujukkan pada pihakh itu. Boleh jadi, sekali dua kali Gus Dur berkonflik dengan Ketua Umum Dewan Tanfidz atau dengan unsur pimpinan DPP PKB lainnya, Gus Dur memang berposisi sebagai pihak yang benar. Namun jika hal demikian (konflik internal) terus berulang-ulang dengan Gus Dur sebagai pihak yang berkonflik, maka mulai muncul pertanyaan: dimanakah posisi Gus Dur pada konflik terakhir dengan Muhaimin? Atau Gus Dur mulai tampil bukan sebagai *source of solution* (sumber pemecahan) masalah), melainkan source of problem (sumber masalah). [136]

Jika dicermati fakta-fakta permukaan dari episode konflik PKB, termasuk yang belakangan terjadi antara Gus Dur dengan Muhaimin Iskandar, hipotesis itu cukup masuk akal. Dari sisi logika juga cukup memadai argumentasinya. Hampir tidak mungkin satu orang berhadapan dengan sejumlah orang pada periode waktu yang berbeda-beda, lalu yang satu orang itu selalu merupakan pihak yang benar.

Nasib Gus Dur sebagai politisi nampaknya tidak sebaik posisinya sebagai cendekiawan. Sebagai cendekiawan, ia tetap dikenal

---

[135]Wawancara pribadi dengan Wahyuddin Kessa, pada 5 Mei 2012.

[136]Wawancara pribadi dengan Darussalam (fungsionaris partai) dan Mantan Sekjen PBNU Wahyuddin Kessa (Sekretaris Dewan Syuro DPD PKB Sul-Sel) di DPP PKB, Kamis 26 April 2012 Jam 15.19

dan disegani sebagai tokoh besar yang terus menjadi rujukan dan sumber inspirasi. Ilmu dan pengetahuan memang mempunyai sifat yang abadi.

Gus Dur kurang berhasil menjaga hubungan silaturrahim yang baik dengan kiai-kiai NU, dan juga kader-kader yang dibesarkannya. Sebagian besar kader yang dibesarkannya itu justru kemudian menjadi "musuh" politiknya. Demikian juga kiai-kiai yang dahulu gigih membelanya. Karena itu tidak heran jika banyak kiai sepuh, tokoh-tokoh NU dan keluarga besar KH. A Wahid Hasyim sendiri menginginkan Gus Dur kembali sebagai cendekiawan rakyat, keluar dari politik praktis. Dengan begitulah ia akan kembali bisa diterima oleh berbagai kalangan dan selalu dirindukan pemikirannya yang mencerahkan dan mencerdaskan semua orang.

1. Efek yang ditimbulkan dari konflik yang terjadi di PKB

Koflik berkepanjangan yang dialami PKB ini sedikit banyak akan memengaruhi psikologi konstituen NU, terutama yang ada di perkotaan.[137] Melihat beberapa konflik yang terjadi secara internal di dalam PKB yang terjadi saat itu jelas nyata bahwa pertikaian antara elit politiknya tidak mempunyai titik terang untuk berdamai, artinya belum ada keserasian hati dari elit yang bertikai untuk menyudahi pertikaian tersebut. Pertikaian tersebut secara langsung maupun tidak langsung telah membuat image yang dibangun PKB selama ini menjadi partai pengayom warga NU atau Nahdliyin sudah pudar, bagaimana mau dan sanggup mengayomi warganya, jika untuk mengayomi dirinya sendiripun para Kiai tersebut tidak sanggup. Inilah yang menyebabkan para Konstituen secara berangsur angsur meninggalkan diri mereka dari PKB, dampaknya sangat jelas terlihat dari perolehan suara yang didapat oleh PKB dalam Pemilu tahun 2004 dan 2009.

Dengan kondisi sedemikian itu, PKB mengikuti Pemilu 2004. Hasilnya, perolehan suara PKB secara nasional mengalami penurunan sekitar 2,5 juta suara. Meskipun mengalami penurunan perolehan suara, PKB tetap menduduki nomor tiga dalam urutan perolehan suara nasional. Sedangkan dari sisi jumlah perolehan kursi di DPR RI , PKB berhasil menambah 1 kursi dari 51 pada Pemilu 1999 menjadi 52.

---

[137]Masmuni Mahatma, "Ujian Terakhir Politik (Kiai) NU," dalam Khamami Zada, A. Fawaid Sjadli, *Nahdlatul Ulama Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan,* 99.

Sedangkan pada Pemilu 2004, PKB mengumpulkan 11.989.546 suara (10,57 persen), merebut 52 kursi di DPR, 1753 kursi DPRD dan 120 Kepala Daerah di seluruh Indonesia.

Hasil Pemilu 2004 memperlihatkan dukungan konsisten terhadap PKB. Dukungan itu berasal dari konstituen tradisional yang tidak akan goyah kesetiaannya kepada partai. Sebagian kalangan juga berpendapat konflik internal partai bukan merupakan faktor tunggal dalam memengaruhi penurunan perolehan suara.[138] Karena disaat yang sama sebagian besar partai lainnya pun kehilangan suara. Kejenuhan masyarakat terhadap perkembangan politik, fenomena menguatnya apatisme politik dengan salah satu indikatornya adalah suara golput, ditengarai menjadi salah satu faktor menurunnya suara pemilih PKB. Dalam kenyataannya memang di semua negara demokrasi selalu terdapat sejumlah orang yang tidak ikut memberikan suaranya, baik karena disengaja maupun karena tidak terdaftar sebagai pemilih. Hal itu merupakan bentuk perilaku politik yang berkaitan dengan budaya politik setiap individu dalam pemilihan umum.[139] Hal itu harus menjadi perhatian para komunikator politik partai, agar mengefektifkan komunikasi politiknya, bukan saja menjelang pemilu, tetapi harus dilakukan jauh sebelumnya dalam waktu yang lama secara sinambung.

[138]Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar dalam sambutannya pada pembukaan Seminar dan Workshop 'Mencari Sistem Pemilu yang Berbasis Kedaulatan Rakyat' di Jakarta 14 Desember 2006 menegaskan, penurunan suara merupakan fenomena kejenuhan rakyat terhadap situasi politik.

[139]Orang-orang yang tidak memberikan suaranya itu, di Indonesia dikenal dengan sebutan "golongan putih" atau golput. Istilah golput itu pertama kali muncul dalam pemilihan umum tahun 1971 di Indonesia, sebagai bentuk gerakan moral memprotes rezim Soeharto yang sedang berkuasa.

Tabel
Perbandingan Hasil Pemilu 1999 dan 2004

Nama Partai	1999				2004			
	Jumlah Suara	%	Jumlah Kursi	%	Jumlah Suara	%	Jumlah Kursi	%
PDI-P	35.689.073	33.74	151	32.97	20.710.006	18.31	109	19.82
Golkar	23.741.749	22.44	118	25.76	24.461.104	21.62	128	23.27
PKB	13.336.982	12.6	51	11.14	12.002.885	10.61	52	9.45
PPP	11.329.905	10.71	58	12.66	9.226.444	8.16	58	10.55
Demokrat					8.437.868	7.46	55	10
PAN	7.528.956	7.12	34	7.42	7.255.331	6.41	53	9.64
PKS	1.065.686	1.01	7	1.53	8.149.457	7.20	45	8.18
PBR					2.944.529	2.60	14	2.55

Sumber: KPU 199-2004

Dari tabel itu terlihat beberapa partai politik mengalami penurunan suara seperti PKB, PDI-P, PPP dan PAN. Sedangkan partai yang mengalami kenaikan perolehan suara adalah Partai Golkar dan PKS. Performance politik PDI-P sebagai partai pemenang Pemilu 1999 yang kurang mengesankan pada saat memegang kekuasaan, ditengarai menjadi salah satu faktor hilangnya suara dalam Pemilu 2004. Diperkirakan suara hilang itu sebagian besar beralih ke Golkar. PPP mengalami penurunan sekitar 2 juta suara. Meskipun dalam perolehan kursi tetap konsisten namun berkurangnya suara PPP, diyakini sebagai imbas konflik internal yang kemudian melahirkan Partai Bintang Reformasi (PBR). Perolehan suara PBR pun nyaris sama dengan jumlah suara yang hilang dari PPP. Suara PKB yang hilang (sekitar 2,5 juta) diyakini menyebar ke beberapa partai lain atau menjadi bagian dari pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya atau yang sering disebut sebagai golongan putih (golput).[140]

Adanya sejumlah warga yang melakukan tindakan politik atau perilaku politik yang sengaja tidak menggunakan haknya untuk memilih dalam pemilu, merupakan bentuk kegagalan sosialisasi politik dan komunikasi politik. Hal itu merupakan juga bentuk tidak efektifnya pemasaran politik atau kampanye politik terutama dalam pemilu.[141] Realitas politik yang tercermin pada Pemilu 2004, bahwa

[140]Mengutip data dari M. Fadjroel Rachman dalam Golput, Pemenang Pemilu 2004, Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia. Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru* (Jakarta: Kencana, 2010), 132.

[141]Anwar Arifin, *Komunikasi Politik Filsafat-Paradigma-Teori-Tujuan-Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 226.

dukungan dari rakyat pada keberadaan PKB adalah relatif statis, artinya tidak ditemukan perubahan signifikan, meskipun dari evaluasi pelaksanaan Pemilu 1999 PKB sudah melakukan evaluasi dan refleksi.

Dalam analis Kacung Marijan,[142] prestasi politik PKB selama dua kali Pemilu , 1999 dan 2004, PKB hanya berhasil memperoleh suara 12,6 persen dan 10,6 persen. Mengapa PKB gagal meraup suara *Nahdliyin*. Menurutnya, ada dua faktor yakni: Pertama, adalah berkaitan dengan terdapatnya polarisasi politisi NU dalam membawa ideologi politik untuk warga NU. Kedua, berkaitan dengan semakin independennya warga NU di dalam menentukan pilihan politiknya. Kemudian faktor lain kekalahan PKB di kantong-kantong NU adalah semakin rasionalnya warga NU dalam menentukan pilihan politiknya. Fenomena ini dapat dilihat dari independensi dan perubahan perilaku politik warga NU.[143] Hal ini dibuktikan unggulnya perolehan suara pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Muhammad Jusuf Kalla di wilayah-wilayah yang menjadi basis NU, terutama di Jawa Timur, dalam Pemilu presiden atau wakil presidan 5 Juli 2004.

Dari hasil Pemilu 1999 dan 2004, tampak bahwa PKB masih dapat dikategorikan sebagai partai regional, karena basis konstituen terbesarnya hanya di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dari 15 kabupaten atau kota dengan perolehan suara tertinggi yang didapatkan PKB pada Pemilu 2004, semuanya ada di Jawa Timur. Hal ini tidak jauh berbeda dibandingkan hasil Pemilu 1999, dimana pada pemilu tersebut Kabupaten Brebes dan Kabupaten Cirebon masih masuk dalam 15 kabupaten atau kota penyumbang suara terbesar PKB. Jika dilihat dari posisi perolehan suaranya dibandingkan partai-partai lainnya, tampak bahwa PKB tidak bisa menjadi kekuatan dominan di daerah-daerah basis sekalipun.

Sebagai wadah aspirasi berpolitik, mereka menyatukan diri dalam satu ikatan bernama PKB. Perikatan itu kadangkala

---

[142]Kacung Marijan, "Hasil Pemilu PKB dan Partai NU: Mengapa Beda?" dalam, *9 Tahun PKB: Kritik dan Harapan,* (Jakarta: DPP PKB, 2007), 44. Dan Nimmo, *Komunikasi Politik Khalayak dan Efek* (Bandung: Remadja Posdakarya, 2000), 167-172.

[143]Dalam laporan majalah Gatra edisi 17 Juli 2004 mengenai perubahan perilaku politik Nahdliyin di basis NU, salah satunya di daerah Tapal Kuda. Dalam laporan bertajuk "Agama Manut Kiai, Politik Numt Hati." KH Hasyim Muzadi yang mendampingi Megawati sebagai pasangan capres-cawapres 2004, perolehan suaranya berada dibawah pasangan SBY-JK, padahal secara nonnatif, sejatinya warga NU memilih pasangan Mega-Hasyim.

memunculkan kontradiksi. Di satu sisi konsep partai politik yang ideal menganut sistem organisasi yang ketat, kaku, berpijak pada hirarki struktural dan ditopang manajemen pengelolaan keorganisasisan secara modern. Hubungan antar kader partai atau individu-individu di dalamnya dibangun dalam pola relasi yang bersifat rasional.[144] Komitmen politik dibangun atas dasar kesamaan ideologi dan kepentingan yang mengiringinya. Di sisi lain, fakta di masyarakat khususnya sebagian besar pesantren masih bergulat dengan manajemen pengelolaan pesantren secara tradisional dan sangat kental dengan nuansa kekerabatan. Status kepemilikan pesantren rata-rata dimonopoli keluarga kiai yang menjadi *episentrum* dalam pesantren itu. Hubungan yang terjadi antara kiai dan santri dibangun dalam pola patron klien dan bersifat irasional. Kesetiaan dibangun atas dasar ikatan emosional, psikologis dan kadangkala imbas hutang budi yang bersifat ekonomis dari santri pada kiai.

Jika sebelumnya interaksi sosial lebih didasarkan pada pola-pola kedekatan emosional, maka interaksi itu kini lebih didasarkan pada pola kedekatan rasional organisatoris. Ini akan berimplikasi pada semakin kurang efektifnya kiai ketika harus membawa komunitas tradisional ini untuk memasuki ruang kepentingan tertentu. Mereka akan menentukan pilihan sendiri tanpa harus berada pada satu payung yang sama. Kecenderungan berbeda antara kiai dan santri kini telah menjadi pemandangan biasa di tubuh NU. Anggapan bahwa yang bisa berbeda pendapat itu hanya dari lapisan darah biru, sekarang sudah berubah.

Selama perjalanan waktu, konstiteun PKB yang sudah mengalami proses pencerahan atau pencerdasan politik, kesadaran tersebut dengan melihat fenomena yang terjadi di internal partai dalam sejarah yang dilewati. Ikatan emosional PKB dan masyarakat jika ditelusuri dari sejarahnya memang mengalami banyak perubahan. Perubahan tersebut terjadi seiring dengan dinamika demokrasi yang bekelanjutan, dengan dilihat dari berbagai aspek yang berkembang baik setiap adanya pergantian kepengurusan dalam partai ataupun ketika menjelang pemilu pada saat itu dengan konteks yang berbeda.

Hubungan antara PBNU dan PKB mengalami disharmoni padahal PKB terhubung dengan NU secara historis, kultural, dan aspiratif. Sebagai illustrasi adalah perbandingan perolehan suara dalam

---

[144]Firmanzah, *Mengelola Partai Politik Komunikasi dan Positioning Ideology Politik di Era Demokrasi*, 227.

pemilu.[145] Partai NU meraih 18.4 persen pada Pemilu 1955 dan 18.7 persen pada Pemilu 1971. PKB meraih 12.6 persen pada Pemilu 1999 dan 10.57 persen pada Pemilu 2004. Ada gejala kemerosotan. Berdasarkan hasil survey Lembaga Survey Indonesia (LSI) tahun 2007, sebanyak 33 persen dari jumlah pemilih Indonesia mengaku sebagai orang NU. Namun hanya sekitar 29 persen warga NU yang memilih PKB pada Pemilu 2004. Selebihnya, warga NU memilih ke PartaiGolkar (16%), PDI Perjuangan (12%), PPP (11%), Partai Demokrat (7%), PKS (6%), dan lain-lain (19%). Data lainnya, 85 persen pemilih PKB dalam Pemilu 2004 adalah orang NU dan 71 persennya berasal dari Jawa dan etnik Jawa, separuh dari etnik Jawa itu berasal dari Jawa Timur.

Salah satu imbas dari memburuknya hubungan NU-PKB adalah kekalahan-kekalahan beruntun di sejumlah perhelatan politik, sejak Pilpres 2004 hingga Pilkada. PKB dalam menjelang Pemilu 2009 melakukan kampanye di seluruh daerah di Dalam Kampanye putaran terakhirnya, PKB mengubah model kampanye terbuka. Cara dialogis dipilih di sisa masa kampanye menjelang Pemilu 2009 demi efisiensi.[146]

Dalam memasuki pasca Pemilu 2009 suara PKB tidaklah sebesar pada dua pemilu sebelumnya yang mengalami kejayaannya sebagaimana telah dibuktikan pada Pemilu 1999 dan 2004, sehingga menduduki urutan tiga besar. Pada Pemilu 2009, kegagalan PKB untuk bisa bersaing sangat sulit dilakukan, karena kendala yang begitu besar. Kendala tersebut, merupakan kegagalan dalam melakukan komunikasi antara dua belah pihak dalam melakukan islah (damai), antara dua kubu PKB Muhaimin dan PKB pro Gus Dur.

Namun ternyata memang tidak mudah untuk memecah kebuntuan komunikasi antara berbagai kubu yang bertikai di PKB dan juga PKNU tersebut. Namun karena tak henti-henti para kiai sepuh itu menghimbau, akhirnya Sejumlah petinggi PKB hasil Muktamar Luar Biasa di Ancol maupun versi Parung serta petinggi PKNU

[145]Sebelumnya PKB mengalami pasang surut hubungan dengan PBNU PKB melakukan pendekatan dengan swing voters usia muda , dan masyarakat pedesaan. Sebelumnya PKB lebih memproritaskan melakukan pendekatan dengan masyarakat pedesaan dan juga menjalin hubungan dengan kiai. http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/100785 (di akses: 25 Desember 2012).

[146]http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,1-id,16598-lang,id-c,warta-t,PKB+Ubah+Model+Kampanye-.phpx. (di akses: 23 Juni 2012).

mendeklarasikan Komite Islah di Jakarta. Upaya untuk *ihtiar* yang dilakukan oleh para elit politik PKB dan PKNU ini akan sanggup mempersatukan kembali wadah politik warga Nahdliyin di pemilu 2014 yang akan mengembalikan kejayaan PKB sebagai partai terbesar ketiga di Indonesia, ataukan upaya itu akan gagal dan di pemilu 2014 alih-alih mengembalikan kejayaan, justru PKB akan semakin terpuruk dan bisa jadi mengikuti PKNU malah tidak lolos PT 2.5%.[147]

PKB mengakui bahwa penurunan suara dalam putaran pemilihan legislatif 2009 lebih disebabkan oleh konflik internal yang terjadi dalam tubuh partai bernomor urut 13 ini ketimbang kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang juga dipersoalkan oleh partai politik lainnya.[148]

[147]http://politik.kompasiana.com/2010/05/17/dua-kubu-pkb-dan-pknu-mencoba-rujuk/ (di akses: 05 Mei 2012).

[148]Wawancara pribadi dengan Darussalam dan Mantan Sekjen PBNU Muhyiddin Arubusman (Sekretaris Dewan Syuro DPD PKB Sulsel) Hari Kamis 26 April 2012 Jam 15.19.

Hasil Penghitungan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif Tahun 2009 dan

Parliamentary Threshold (PT)[149]

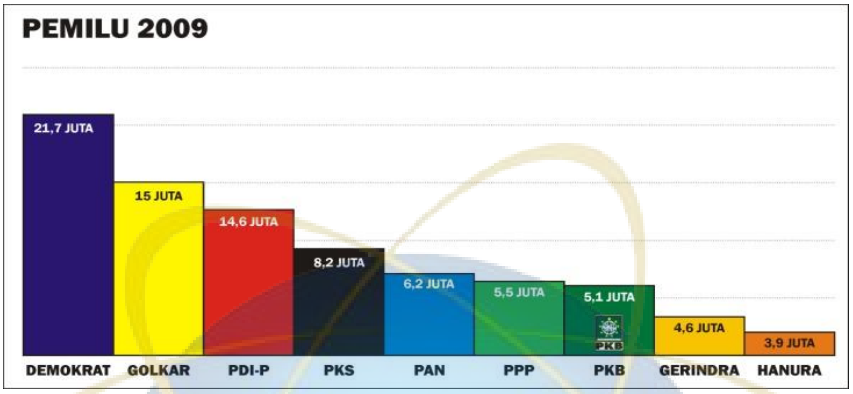

Menurut Sandy Nayoan[150] penurunan perolehan suara PKB pada pemilu kali ini bukan karena masalah DPT namun lebih disebabkan karena konflik internal PKB yang dikaji lebih dalam lagi sesungguhnya semua para kader PKB sedang mendapat ujian berdemokrasi dari KH Abdurahman Wahid. Meski demikian, Wakil Ketua Dewan Syuro PKB Lily Chodijah Wahid[151] mengatakan, justru pihaknya berterima kasih kepada KH Abdurahman Wahid alias Gus Dur atas perannya dalam mengasah kedewasaan para kader partai.

Hal tersebut juga yang menyebabkan persentase hasil penelitian untuk jumlah aspek tradisi sosiokultural pada sub bagian "*pembawaan diri*" bernilai nol (kosong). Artinya PKB gagal menerapkan ilmu komunikasi yang bersifat tradisi sosiokultural khususnya pada aspek pembawaan diri, yang terlihat secara nyata terjadi pertikaian atau kisruh dalam kubu partainya terssebut.

Dalam perolehan suara demikian, PKB mengakui bahwa Pemilu 2009 sah meski cela mewarnai hampir berbagai aspek

---

[149]Sumber: Komisi Pemilihan Umum 2009. Parliamentary Threshold (PT). Untuk Pemilu 2009.

[150]Wawancara Sandy Nayoan dengan Kompas, caleg PKB dari dapil Sulawesi Utara ini ketika membacakan pernyataan sikap PKB terhadap Pemilu 2009 di DPP PKB Jl Sukabumi.

[151]Wawancara dengan Lily Chodijah Wahid dengan Kompas. "Kita *positive thinking*. Itulah yang kita hadapi. Konflik internal itu mematangkan caleg-caleg kita sendiri," http://otomotif.kompas.com/read/2009/04/22/18324999/direktori.html (di akses: 26 Nopember 2012).

penyelenggaraannya. Lily sendiri mengakui bahwa banyak surat suara rusak yang dijumpai akhirnya menghilangkan hak suara untuk caleg PKB. Bahkan di daerah pemilihannya, Jatim II, surat suara rusak mencapai 40 persen. Namun, PKB tetap menilai bahwa penyelenggaraan Pemilu 2009 sah.

Sebelumnya dalam salah satu survey yang diadakan pada bulan Mei 2008, PKB masih memiliki harapan untuk menjadi partai terbesar keempat, dengan perolehan suara berkisar antara 5-9%. Loyalitas pendukung PKB ini juga terekam dalam survey Mei 2008 tersebut yang menunjukkan hampir separo responden yang menyatakan memilih PKB pada Pemilu 2004 akan memilih kembali PKB pada pemilu berikutnya. Tingkat loyalitas pemilih PKB ini hanya berada di bawah PKS, PDI-P, dan Partai Golkar.

Efek 2,5 persen Parliamentary Threshold (PT). Dengan adanya ketentuan ambang batas ini membuka peluang bagi parpol yang suaranya sama dengan atau diatas ambang tersebut dalam perebutan kursi. Berdasarkan simulasi tahun 2009, terjadi penambahan jumlah kursi sebesar 550 tahun 2004 menjadi 560 kursi pada tahun 2009. Hal ini berarti terjadi penambahan 10 kursi, ditambah dengan skema 2,5 persen PT, maka terjadi penambahan 37 kursi akibat dikeluarkannya perolehan suara parpol yang kurang dari 2,5 persen. Melalui ketentuan ini, maka akan ada sisa 47 kursi yang didistribusikan kepada 8 parpol yang perolehan suaranya memenuhi ambang batas PT.

Tabel 4.1
Analisis Penelitian Komunikasi Politik Sosiokultural PKB Pada Pemilu Tahun 2009[152]

No	Temuan Penelitian	Tradisi Sosiokultural			
		Interaksi Simbolik	konstruksi Sosial Diri	konstruksi. Sosial Emosi	Pembawaan Diri
1.	Adapun program yang dijalankan berupa program pelatihan dan pembekalan, salah satunya *program perekonomian kerakyatan dalam mengentaskan kemiskinan*. Di samping itu, bentuk sosialisasi partai lainnya yang bersifat kultural yang sudah berkembang seperti ikut *berpartisipasi dalam pengajian, tahlilan, dan kegiatan ritual keagamaan yang telah berkembang di kalangan masyarakat Nahdliyin*, dengan muatan visi dan misi partai. Hal ini, dilakukan dalam rangka pendekatan dan konsolidasi kepada masyarakat. (lihat hub. PKB dengan masyarakat)	√			
2.	PKB merupakan mata rantai perjuangan rakyat di masa lalu, menjadi rantai yang menyambungkan pemikiran keagamaan yang sudah dilembagakan di pesantren-pesantren sejak berabad- abad yang lalu dengan dunia modern di masa kini, termasuk dengan dunia politik. PKB juga meneruskan tradisi spiritualitas masyarakat Islam yang tersambung dengan spiritualitas peradaban Islam ribuan tahun ke belakang. (lihat hub. PKB dengan Masyarakat)		√		
3.	Agenda dalam melakukan sosialisasi ke pondok pesantren berupa ajang silaturahmi, dan terkadang juga memberikan bantuan secara simbolis kepada Kepada Ketua Yayasan berupa bantuan alat pengajaran. (lihat hub. PKB dengan Masyarakat).	√			
4.	Partai PKB memiliki hubungan tersendiri dengan yang bercirikan ikatan emosional. Hubungan antara pemilih dengan kandidat atau partai politik akan sangat bersifat emosional ketimbang rasional. Bertolak belakang dengan ikatan rasional, ikatan emosional bersifat lebih dalam dan stabil. Ikatan ini tidak mudah dipengaruhi dan diubah. Dibutuhkan suatu kejadian dan peristiwa yang sangat drastis untuk bisa memutus ikatan emosional ini. Pertimbangan-perimbangan logis dan empiris tidak cukup besar untuk menggoyahkan dukungan emosional. Efektifitas komunikasi politik di lingkungan kaum *Nahdliyin*, salah satunya, berkaitan dengan adanya kemasan agama dalam pesan-pesan yang disampaikannya. Karena karakteriatik sensitif yang dimilikinya, agama dapat berfungsi sebagai mediator dalam menyampaikan pesan apa pun bagi para pemeluknya. Agama secara tidak langsung menjadi wacana yang memungkinkan sesuatu provokasi dapat mudah tersosialiaasi. Lebih-lebih pada masyarakat beragama yang masih didominasi oleh dimensi-dimensi emosional, seperti umumnya kaum tradisionalis, apa pun yang dapat menyentuh kesadaran religiusitas atau keyakinannya dapat mengubah keyakinan itu menjadi perilaku agresif. (lihat ikatan emosional PKB dengan masyarakat)			√	
5.	Praktik komunikasi politik kiai dalam mempengaruhi kondisi psikologis masyarakat juga didasarkan atas faktor citra individu kiai sebagai seorang komunikator politik yang melakukan persuasi terhadap masyarakat, dimana aspek citra kepribadian kiai sebagai seorang komunikator politik memiliki karakter yang dalam kajian psikologi. (lihat ikatan emsoional PKB dengan Masyarakat).			√	

[152]Sumber: Hasil dari Pemilu 2009 dalam rapat kerja Lembaga Pemenangan Pemilu Partai Kebangkitan Bangsa (Raker PP KB) DPP PKB. dan Sumber Kompas "Dilanda Konflik, PKB Semakin Menarik." Senin, 14 Juli 2008: http://sains.kompas.com/read/2008/07/14/21465013/dilanda.konflik.pkb.semakin.menarik. (di akses 13 Juli 2009).

Tabel 4.2[153]
Prosentase Hasil Penelitian
Komunikasi Politik Sosiokultural PKB Pada Pemilu Tahun 2009

No	Tradisi Sosiokultural			
	Interaksi Simbolik	Pemb. Sosial Diri	Pemb. Sosial Emosi	Pembawaan Diri
1.	40 %	20 %	40 %	0 %

Grafik Hasil Penelitian
Komunikasi Politik Sosikultural PKB Pada Pemilu Tahun 2009

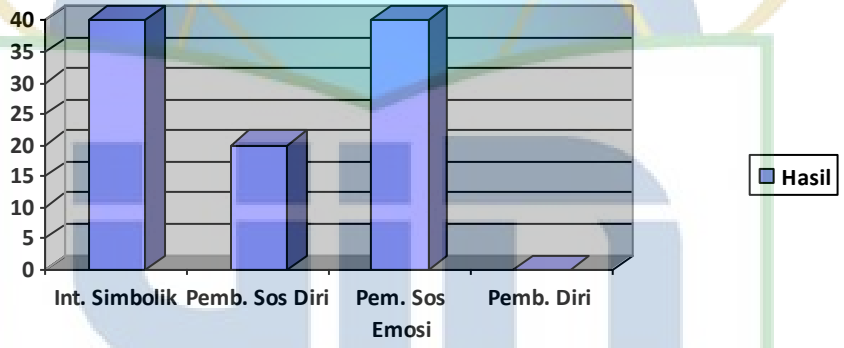

Memenangkan pemilihan umum merupakan salah satu tujuan terpenting suatu partai politik. Dengan menang pemilu, partai politik dapat lebih leluasa memperjuangkan agenda, program, dan kepentingannya. Hasil pemilu juga dapat menjadi modal politik penting untuk memerintah karena partai politik yang kuat secara elektoral, mungkin sekali untuk juga memenangkan posisi-posisi

[153]Sumber: Hasil dari Pemilu 2009 dalam rapat kerja Lembaga Pemenangan Pemilu Partai Kebangkitan Bangsa (Raker PP KB) DPP PKB. dan Sumber Kompas "Dilanda Konflik, PKB Semakin Menarik." Senin, 14 Juli 2008: http://sains.kompas.com/read/2008/07/14/21465013/dilanda.konflik.pkb.semakin.menarik. (di akses 13 Juli 2012).

eksekutif. Pada dasarnya, berpartai adalah untuk berkompetisi memperebutkan kekuasaan secara absah dalam tatanan demokrasi. Dengan berpartai, individu-individu yang memiliki garis perjuangan dan kepentingan politik makro yang sama dapat mengelola kerja kolektifnya untuk merebut posisi-posisi politik, memperjuangkan kebijakan tertentu, atau mendapatkan suara pemilih sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan posisi tawar politiknya.

Jika melihat hasil dari grafik pengamatan didapat bahwa ada satu unsur yang tidak berhasil daplikasikan oleh PKB yang ini unsur pembawaan diri, yang mana unsur ini terkait erta dengan profil dari Kiai atau pengurus besar suatu organisasi dalam hal ini di PKB yakni profil dari Gus Dur. Kedishamoniasian yang terjadi di kubu PKB tidak lepas karena ketidakpiawaian para elite politik yang berperan di dalam terutama dari Gus Dur yang merupakan Dewan Syuro PKB yang menjadi pamor utama dalam partainya, andai saja beliau bisa menata komunikasi yang baik dan harmonis dengan para pengurus besar PKB maka tidak akan pernah terjadi konflik yang pelik dan tidak berujung solusinya tanpa resolusi yang jelas dan berakhir dengan pebuatan partai baru. Dan akhirnya perolehan suara di PKB pada pemilu tahun 2009 tidak akan menurun jika kondisi dari PKB baik dan solider, tetapi sebaliknya jika keadaan di tubuh PKB carut marut maka PKB pun akan ditinggal oleh pengikutnya.

BAB V
PENUTUP

Sebagai bab penutup, pada bab ini akan dikemukakan uraian hasil penelitian dalam sebuah kesimpulan dan diakhiri dengan saran untuk pengembangan penelitian lebih lanjut.

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukan dalam bab-bab terdahulu dapat disimpulkan diambil sebagai jawaban atas permasalahan utama dalam penelitian ini adalah komunikasi politik tidak terlepas dari tradisi sosiokultural yang memengaruhi dalam dinamika politik di PKB khususnya dalam tradisi NU yang menyertainya. Keikutsertaan PKB dalam kancah politik yang mengalami berbagai dinamika politik, turut mempertegas bahwa PKB masih memiliki ikatan kuat dengan tradisi sosiokutural NU.

Sebagai realisasi dari platform inklusif NU, Anggaran Dasar PKB menyatakan bahwa partai ini "bersifat kebangsaan, demokrasi yang terbuka, yang dibentuk dengan tujuan "mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhlakul karimah." Modal ideologis ini seharusnya bisa di konversi menjadi modal politis, yaitu melimpahnya dukungan public sebagaimana sambutan hangat bangsa Indonesia atas kehadiran PKB di awal kelahirannya. Platform kebangsaan dan keterbukaan PKB seharusnya bisa mengantarkan partai ini menjadi partai besar, yang konstituennya melampaui batas-batas pendukung Nahdliyin.

Bentuk pola komunikasi tadi ditandai oleh pemakaian alat-alat retorika (baik verbal maupun nonverbal) yang bersumber dari – atau adaptasi bentuk ritual – agama dan budaya sehingga pemaknaan atas simbol-simbol tersebut bersifat isoterik sesuai dengan pengalaman religio-politik penggunanya. Proses tersebut bukan hanya memberi peluang terjadinya kesalapahaman, tetapi juga menguatkan kecenderungan menjadikan agama dan budaya sebagai alat justifikasi keputusan dan tindakan politik.

Pola sistem komunikasi politik yang bersifat sosiokultural tersebut memiliki suatu acuan khusus yakni terdapat dalam suatu teori dari ilmu komunikasi yang bernama tradisi sosiokultural, tradisi sosiokultural tersebut memiliki beberapa unsur diantaranya; interaksi simbolik dan pengembangan diri, pembentukan sosial mengenai diri

sendiri, pembentukan sosial mengenai emosi, dan pembawaan diri. Yang mana berdasarkan hasil tabel penelitian di dapatkan bahwa jumlah prosentase interaksi simbolik berjumlah 40 %, pembentukan sosial mengenai diri sendiri 20 %, pembentukan sosial emosi berjumlah 40%, dan untuk pembawaan diri bernilai 0 %, artinya tidak ada reaksi yang terjadi dalam aspek tersebut yang dipergunakan sebagai sarana komunikasi politik dari PKB.

Interaksi Simbolik, sebagai acuan dalam meniliti PKB, yakni dengan adanya respon positif dari masyarakat Nahdliyin untuk masuk ke dalam Partai Kebangkitan Bangsa, dengan mengikuti simbol-simbol komunikasi yang telah diberikan oleh PKB diantaranya: mengikuti kegiatan berpartisipasi dalam pengajian, tahlilan, dan kegiatan ritual keagamaan yang telah berkembang di kalangan masyarakat nahdliyin, hal tersebut dapat dilihat dalam hubungan PKB dengan Masyarakat khususnya Jamaah Nahdliyin. Dalam melakukan interaksi dengan konstituen, PKB melakukan pendekatan melalui sistem kultural yang bersifat *top-down*. PKB sangat cenderung mengandalkan kharisma tokoh-tokoh NU sebagai aset terpenting dalam meraih suara partai dari pada secara organisatoris menawarkan program-program yang mampu memikat pemilih pemilu. Dinamika kehidupan warga *nahdliyin* yang sebelumnya lebih banyak diwarnai oleh komunitas pesantren dan kiai, kini menghadapi kenyataan berbeda.

Selanjutnya pembahasan pembentukan sosial mengenai diri Sendiri PKB mempunyai karakteristik diri yang sejalan dengan masyarakatnya, yakni sama-sama menjadikan kehidupan NU untuk kehidupan sehari-hari dengan mengapresiasi nilai keagamaan dan kamasyarakatan, hal tersebut juga dapat dilihat dalam kedekatan PKB dengan masyarakat. Figur 'kontroversial' dari sosok KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur merupakan petronase 'ikon' khas PKB. Dukungan yang diberikan Gus Dur kepada PKB dengan memposisikan dirinya sebagai tokoh politik PKB, tokoh lintas agama, pluralis, sekaligus juga sebagai seorang kiai, kerap menimbulkan perpecahan internal yang membingungkan konstituen NU.

Pada tahapan pembentukan sosial berkaitan dengan emosi. Bisa diartikan PKB dalam hal situasi emosional keorganisasiannya, berhasil membangkitkan hasrat/ kejiwaan yang merupakan wujud emosi positif dari masyarakat nahdliyin, yang diwujudkan dengan banyaknya pengkaderisasian partainya. Sebuah tradisi yang mencerminkan ketergantungan masyarakat pada kiai dalam hal pilih-memilih. Oleh

karenanya, *taushiyah* (rekomendasi) para kiai mempunyai peran yang sangat signifikan. Dengan mengajak warganya untuk menyalurkan aspirasinya sesuai dengan keyakinan masing-masing, PKB telah memberikan "materi politik" baru terhadap warganya. Di mana masyarakat dapat memilih sesuai dengan pertimbangan dan keyakinannya sediri. Meskipun konteks saat itu tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat selama ini masih sangat tergantung kepada para elitenya, termasuk di dalamnya adalah para kiai. Pilihan masyarakat selama ini lebih didasarkan kepada pertimbangan elitenya ketimbang pertimbangannya sendiri.

Berikutnya pembawaan diri inilah yang menjadi hambatan bagi Partai ini dalam berkomunikasi, khususnya dalam pPemilu 2009, banyak terjadi gontokan fisik dari para figur Partai yang seharusnya menjadi pedoman karismatik masyarakat tetapi malahan mencontohkan sesuatu yang kemunginan kurang baik adanya. Di sisi lain kehadiran PKB menunjukkan sisi kemodernan NU. Partai itu bukan hanya eksklusif untuk satu golongan, tetapi terbuka untuk seluruh bangsa Indonesia. Dengan kehadiran PKB mau ditunjukkan bahwa Islam itu *inklusif* dan dapat menjadi berkat bagi semua orang. Modal ideologi politik PKB terletak pada jaminannya atas negara Indonesia yang multikultural. Jaminan ini penting karena penjaminnya adalah kekuatan politik yang lahir dari rahim organisasi Islam terbesar, tetapi menolak agenda-agenda formalisasi islam dalam kehidupan negara. Dari rahim organisasi ini lahir konsep trilogy ukhuwwah; *ukhuwwah islamiyyah* (persaudaraan keislaman), *ukhuwwah wathaniyyah* (persaudaraan kebangsaan), dan ukhuwwah basyariyyah/insaniyyah (persaudaraan kemanusiaan) yang merupakan sintesis dielektis dari universalisme islam, nasionalisme, dan humanisme.

B. Saran

Memperjuangkan *islah* (damai) dan konsolidasi mutlak dilakukan untuk mewujudkan partai politik yang kuat di bawah NU meskipun bukan hal yang mudah. Kedepan PKB harus mampu berjuang keras untuk mengembalikan kejayaannya, yang tiada lain dengan membangun dan mengembalikan citranya sebagai wadah aspirasi warga Nahdliyin. Hubungan komunikasi yang intensif dan kontinyu perlu dilakukan sehingga tercipta satu pemahaman yang sama mengenai peran masing-masing dalam kehidupan sosial, politik dan budaya kemasyarakatan. Jika hal itu bisa diwujudkan maka perbedaan-perbedaan politik terutama aspek pragmatisme politik seperti pencalonan dalam pemilu dan sebagainya tidak akan terulang lagi minimal bisa diminimalisir.

Penelitian berikutnya direkomendasikan mengunakan metode kuantitatif dengan mengunakan teknik survie. Penelitian kuantitatif ini tentu akan memperkaya penelitian tentang humas partai politik dilihat aspek budaya masyarakat dan juga bisa menjawab kekurangan yang dilakukan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Anderson, James A. ed. *Communication Yearbook 11.* Newbury Park, CA: Sage, 1988.

Ansor, Muhammad. "*Asas Islam dan Artikulasi Politik Partai Islam: Studi Perbandingan Terhadap PPP, PBB dan PKS (1999-2004).*" Jakarta, Tesis, Pada Nama Kampus UIN Syarif Hidayatullah 2004.

Anwar, Ali. *"Avonturisme" NU: Menjejaki Akar Konflik Kepentingan-Politik Kaum Nahdliyin*. Bandung: Humaniora, 2005.

Aranguren, J.L. *Human Communicatin*. New York: McGraw-Hill, 1967.

Ardial. *Komunikasi Politik.* Jakarta: Permata Puri Media, 2009.

Ardianto, Elvinaro dan Bambang Q-Anees. *Filsafat Ilmu Komunikasi*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2007.

Arifin, Anwar. *Komunikasi Politik: Paradigma-Teori-Aplikasi-Strategi & Komunikasi Politik di Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Arifin, Chwan. *Kiai dan Politik (Studi Kasus Perilaku Politik Kiai dalam Konflik Partai Kebangkitan Bangsa PKB) Pasca Muktamar II Semarang.* Semarang, Tesis yang tidak diterbitkan pada kampus Universitas Diponegoro, 2008.

_____. *Komunikasi Politik Filsafat-Paradigma-Teori-Tujuan-Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Amianie, Lely. Deddy Mulyana dan Solatun, (ed)., *Komunikasi Politik sebagai Interaksi Simbolik*, dalam *Metode Penelitian Komunikasi Contoh-contoh Penelitian Kualitatif dengan Pendekatan Praktis.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.

Asari, et. al., "Menimbang Nasib Kaderisasi Parpol" dalam *Oase Politik Catatan-catatan politik untuk Indonesia.* Purwakarta: al-Asy'ari Publishing House, 2013.

Azis Dy, Aceng Abdul, dkk. *Islam Ahlussunah Wa al-jama'ah. Sejarah,Pemikiran, dan Dinamika Nadlatul Ulama.* Jakarta: Pustaka Ma'arif NU, 2006.

Azra, Azyumardi. "Islam Politik pada Masa Pasca Soeharto," dalam A.M. Fatwa, Satu Islam Multi Partai: *Membangun Integritas Di Tengah Pluralitas*. Bandung: Mizan, 2000.

_____. *Reposisi Hubungan Agama dan Negara Merajut Kerukunan Antarumat*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2002.

Bakti, Andi Faisal. *Communication and Family Planning in Islam in Indonesia: South Sulawesi Muslim Perceptions of a Global Development.* Jakarta-Leiden:INIS, 2004.

_____. dkk., (Eds). *Literasi Politik dan Konsolidasi Demokrasi.* Ciputat: Churia Press, 2012.

_____. *Nation Bulding, Kontribusi Muslim dalam Komunikasi Lintas Agama dan Budaya terhadap Kebangkitan Bangsa Indonesia.* Ciputat: Churia Press, Cet. II, 2006.

Banks, Stephen P. dan Patricia Riley. and (ed)., Stanley A. Deetz. "Structuration Theory as an Ontology for Communication Research;" *Communication Yearbook* 16, Newbury Park, CA: Sage, 1993.

_____. dkk., eds. *Literasi Politik dan Konsolidasi Demokrasi.* Ciputat: Churia Press, 2012.

Barbara Ballis Lal. "Symbolic Interaction Theories," *American Behavioral Scirntist* 1995.

Barton, Greg. *Gus Dur: The Authorized Biography of KH Abdurrahman Wahid.* Yogjakarta: LKIS, 2002.

_____. *Biografi Gus Dur* Yogyakarta: LKiS, 2004, Cet. IV, 310.

Berger, Peter L dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial atas Kenyataan* Terj. Hasan Basari (Jakarta: LP3S, 2012

Budiharjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.

_____. *Demokrasi di Indonesia, Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Indonesia.* Jakarta: Gramedia, 1996.

Blake dan Haroldaen. *Political Communication: Issues and Strategies for Research.* terbitan London, 1975.

Blumer, Herbert. *Symbolic Interactionism: Perspective and Method.* Prentice-Hall: Englewood Clifts, 1969.

Bodgan, Robert dan Steven J. Taylor, *Kualitatif Dasar-dasar Penelitian* Surabaya:Usaha Nasional, 1993.

Bulkin, Farchan. *Analisa Kekuatan Politik di Indonesia*. Pilihan Artikel Prisma Jakarta; LP3ES, 1985.

Cangara, Hafiied. *Komunikasi Politik; Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009.

Charon, Joel M. (ed)., *Symbolic Interactionism: An Introduction, an Interpretation, an Integration.* Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1992.

Cheney, George dan Lars Theger Christensen., (ed)., Fredric M. Jablin dan Linda L. Putnam dan "Organizational Identity: Linkages Between Internal and External Communication;" dalarn *The New Handbook of Organizational Communication: Advances in Theory, Research, and Methods*. Thousand Oaks, CA: Sage, 2001.

Choirie, A. Efendi. *PKB Politik Jalan Tengah NU*. Jakarta: Pustaka Ciganjur, 2002

Dahlan, Alwi. "Teknologi Informasi dan Demokrasi" dalam Jurnal *Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, Vol. IV/Oktober 1999. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999.

Devito. *Human Communication: The Basic Course, 5th edition.* NewYork: HarperCollins Publisher, 1991.

Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren.* Jakarta: LP3ES, 1982.

Effendy, Onong U. *Hubungan Masyarakat: Suatu Studi Komunikologis*. Bandung: Remaja Rosdakarya,1992.

Eisenberg, Eric M. dan Patricia Riley., ed. Fredric M. Jablin dan Linda L. Putnam. "Organizational Culture;' dalam *The New Handbook of Organizctional Communication: Advances in Theory, Research, and Methods*. Thousand Oaks, CA: Sage, 2001.

Fatah, Eep Saifullah. "*Menuju Format Baru Politik Islam*," Republika, 02/01/1999 dan 04/01/1999

Fealy, Greg, dan Barton, Greg, (ed)., *Tradisionalisme Radikal Persinggungan Nahdlatu Ulama-Negara.* Yogyakarta: LkiS, 1996.

Fimanzah. *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Firdaus, *Komunikasi Politik Elit Nahdlatul Ulama Pasca Orde Baru.* Jakarta, Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah 2008.

_____. *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Geertz, Clifford. *Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology.* New York: Basic, 1983.

Goffman, Erving. *The Presentation of Selfin Everyday Life.* Garden City, NY: Doubleday, 1959.

_____. *Behavior in Public Places.* New York: Free Press, 1963.

_____.*Encounters: Iwo Studies in the Sociology oflnteraction.* Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1961.

_____. *Frame Analysis: An Essay on the Organizntion of Experience*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1975.

_____. *Interaction Ritual: Essays on Face-to-Face Behcvior.* Garden City, NY: Double Day, 1967.

_____. *Social Being: A Theory for Social Behavior.* Littlefield, Adams, 1979.

_____. *Personal Being: Theory for Individual Psychology* Cambridge: MA. Harvard University Press, 1984.

Greene, John O., and Burleson. Brant R. ed., *Hardbook of Communication and Social Interaction Skills.* Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, 2003.

Hardjana, Andre. *Audit Komunikasi: Teori dan Praktek.* Jakarta: Grasindo, 2000.

Harre, Rom. *Social Being: A Theory for Social Behavior* Littlefield. Adams, 1979.

_____. "Personal Theory for Individual Psychology Cambridge MA," Harvard

_____. "An Outline of the Social Constructionist Viewpoint,"

_____. (ed.), *The Social Construction ofEmotion.* New York: Blackwell, 1986

_____. *Is There Still Q Problem About The Self?* Communication Yearbook, Stanley Deetz ed.., dalam Littlejohn dan Foss, Sage: Thousand Oak,1994.

Haralambos and Holborn. *Sociology: Themes and Perspectives.* London: Harper Collins, 1995.

Helle, H J. and S. N. Eisentadt, (ed), *Micro-Sociological Theory: Perspectives on Sociological Theory.* Beverly Hills, CA: Sage, 1985.

Ichwan Arifin, *Kiai dan Politik Studi Kasus Perilaku Politik Kiai dalam Konflik Partai Kebangkitan Bangsa PKB Pasca Muktamar II Semarang* Semarang. Tesis diterbitkan pada kampus Universitas Diponegoro, 2008.

Iskandar, Muhaimin A. *Manajemen Komunikasi Partai Kebangkitan Bangsa dalam Pemilu 1999.* Jakarta: Pustaka Bumi Selamat, 2001.

_____. *Politik Partai Kebangkitan Bangsa.* Jakarta: DPP PKB, 2005.

_____. *Melampaui Demokrasi Merawat Bangsa dengan Visi Ulama Refleksi Sewindu Partai Kebangkitan Bangsa.* Jogjakarta: DPP PKB dan Kajian dan Layann Informasi untuk Kedaulatan Rakyat KLIK.R, 2006.

_____. *Melanjutkan Pemikiran dan Perjuangan Gus Dur* Yogyakarta: PT. *LKiS* Printing Cemerlang, 2010.

_____. *Gus Dur yang Saya Kenal Catatan Transisi Demokrasi Kita.* Yogyakarta: Lkis, 2004.

al-Jauziyyah, Ibn Qayyim, *at-Turūq al-Hukmiyyah.* Kairo: al-Muassasah al- 'Arabiyyah, 1961.

Ismail, Faisal. *Dilema Nahdlatul Ulama di Tengah Badai Pragmatisme Politik* Jakarta: PT. Mitra Cendikia, 2004.

Jackson, Karl D., *Traditional Authority, Islam, and Rebellion: A Study of Indonesian Political Behavior* (Berkeley: University of California Press, 1980.

Ja'far, Marwan. *Aswaja dari Teologi ke Aksi.* Yogyakarta: Lkis, 2011.

Jaily, Ahmad Hakim dan Muhammad Tohadi. *PKB dan Pemilu 2004.* Jakarta: Lembaga Pemenangan Pemilu PKB, 2003.

Joseph Devito. *The Interpersonal Communication Book, 11th Edition.* (Newyork: Pearson, 2007.

Jourard, S. *Self Disclosure An Experimental Analysis of The Transparant Self.* New York, Wiley. 1971.

Junaidi, Arifin. "*Belajar dari Sejarah PKB*" *dalam*, *9 Tahun PKB: Kritik dan Harapan*. Jakarta: DPP PKB, 2007.

Kartono, Kartini. *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu?*. Jakarta, 2005.

Kazhim, Musa dan Alfian Hamzah, *5 Partai Dalam Timbangan*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.

Kellerman, K. Plutchilkand H., (ed). *Theories of Emotion.* New York: Academic. 1980.

Koirudin. *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi: Menakar Kinerja Partai Politik Era Transisi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Kraus, Sidney dan Dinnie Davis, *The Effects of Mass Communication on Political Bahavior.* Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 1978.

Kriyantono, Rachmat. *Teknik Praktis Riset Komunikasi.* Jakarta: Kencana Media Group, 2008.

Liliweri, Alo. *Memahami Peran Komunikasi Massa dalam Masyarakat.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.

Littlejohn, Stephen W. dan Foss, Karen A. *Teori Komunikasi*, Edisi. 9, Penerjemah: Mohammad Yusuf Hamdan Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2009.

_____. *Theoris of Human Communication* (sevent edition). New Mexico, 2002. Theory Today, (Oxford.1998).

Lindlof, Thomas R. *Qualitative Communication Research Methods.* California USA: Sage Publications, 1995.

Lippman, Walter. *Public Opinion.* New York: Free Press, 1965.

Ma'sum, Saifullah,. Umaruddin Masdar. *Partai NU Ya PKB Pernyataan dan Sikap KH Said Aqil Siradj Ketua Umum PBNU.* Jakarta: LPP DPP PKB, 2012.

Marshal McLuhan, *Understanding Media:The extension of Man* (New York. McGraw-Hill book Company, 1964).

Malik, Dedy Djamaludin. dan Yosal lriantara, *Komunikasi Persuasif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.

Manis, Jerome G. dan Meltzer, Bernard N., (ed). *Symbolic Interaction* Boston. Allyn and Bacon, 1978.

Muhtadi, Asep Saeful. *Komunikasi Politik Indonesia Dinamika Islam Politik Pasca-Orde Baru,* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mulyana, Dedy. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Kamunikasi dan Ilmu Sosial. Lainnya* Bandung: Remaja Rosdakarya. 2004.

_____. dan Solatun, ed., *Metode Penelitian Komunikasi Contoh-contoh Penelitian Kualitatif dengan Pendekatan Praktis.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.

_____. *Ilmu Komunikasi, Suatu Pengantar.* Bandung: Rosdakarya, 2001.

_____. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosia lainnya.* Bandung: Rosdakarya, 2001.

_____. dan Rakhmat Jalaluddin ed., *Komunikasi Antarabudaya, Panduan Bekomunikasi dengan Orang-orang Berbeda Budaya.* Bandung: Rosdakaya, 1996.

McCroskey, James C. Daly J.A and J.C McCroskey, "The Communications Apprehentions Prespektive," dalam *Avoiding Communications*: *Shyness, Reticence, and Communications Apprehention.* Baverly, Hills, CA: Sage, 1984.

Muhtadi, Asep Saeful. *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama "Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan akomodatif"*. Jakarta: LP3ES, 2004.

Mulyana, Dedy. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003.

Mumby, Dennis K. "The Problem of Hegemony: Rereading Gramsci for Organizational Communication Studies:" *Western Journal of Speech Communication 61* (1997).

Morgan, Gareth. *Images of Organization.* Beverly Hills CA: Sage, 1986.

Morissan dan Andy Corry Wardhani. *Teori Komunikasi, tentang Komunikator, Pesan, Percakapan, dan Hubungan.* Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2009.

Muzadi, Hasyim. "Mengapa PKB harus Ada" dalam, *9 Tahun PKB: Kritik dan Harapan.* Jakarta: DPP PKB, 2007.

Nasution, Zulkarimein, *Komunikasi Politik: Suatu Pengantar.* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Nimmo, Dan. *Komunikasi Politik, Khalayak dan Efek.* dalam Jalaluddin Rakhmat Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.

_____. *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media.* Bandung, 2005.

Nottingham, Elizabet K., *Agama dan Masyarakat Suatu Pengantar Sosiologi Agama.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Pacanowsky, Michael E., dan ed., Brenda Darvin, et. al., "Creating and Narrating Organizational Realities;' dalam *Rethinking*

Communication: Paradigm Exemplars. Newbury Park, CA: Sage, 1989.

_____. dan Nick O'Donnell-Trujillo, "Communication and Organizational Cultures" *Western Journal oj Speecli Communiration* 46 (1982).

_____. "Creating and Narrating Organizational Realities;' dalam *Rethinking Communication: Paradigm Exemplars*, ed., Brenda Darvin, et. al. ,250-257.

Pilner, K.R. Blankstein, P. dan Polivy, J. (ed.), *Assesment and Modification of Emotional Behavior.* New York: Plenum, 1980.

Pradbanawati, Ari. "Perilaku Pemilih di Era Politik Pencitraan Dan Pemasaran Politik" dalam *Politik Pencitraan dan Pemasaran Politik* vol. 39 (2011).

Rahmat, Jalaluddin. *Psikologi Komunikasi.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

Ramly, Andi Muawiyah. (eds)., *Pelatihan Bagi Kader Militan Partai Kebangkitan Bangsa* Jakarta: DPP PKB untuk kalangan sendiri, 2012.

Reynolds, Larry T., *Interactionism: Exposition and Critique.* Dix Hills, NY: General Hall, 1990.

Ritzer, George. *Sosialogical Theory*. New York: McGraw Hill, 1992.

Rumadi, Aminudin M., (ed), *Menyingkap Kemelut PKB, Kontroversi Reposisi Saifullah Yusuf*. Jakarta: Pustaka Harapan.

Rush, Michael dan Althof, Phillip. *Pengantar Sosiologi Politik* Jakarta: Rajawali Press: 1997.

Rogers, Everett M. *Diffusion of Inovations*. New York: Free Press, 1995.

_____. dan F. Flayd Shomeker, *Communication and Innovaton.* New York: The Free Press, 1978.

Rodee (et.al)., *Introduction to Political Science.* Auckland: McGraw-Hill, 1981.

Rofieq, Ainur. "Fungsi Rekrutmen Politik Padacalon Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa PKB 2009." dalam *Jurnal governance*,Vol.1, No. 2, Mei 2011.

Rogers, Evereet M. dan Shomeker, F. Flayd, *Communication and Innovaton.* New York: The Free Press, 1978.

Romli, Lili (Ed), *Pelembagaan Partai Politik Pasca-Orde Baru: Studi Kasus Partai Golkar, PKB, PBB, PBR dan PDS.* Jakarta: P2P LIPI, 2008.

Santoso, Edi dan Setiansah, Mite, *Teori Komunikasi.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Schramm, Wilbur, *The Nature of Mass Communication The Press and Effect of Mass Comunication.* Urban: University of Illionis Press, 1955.

Scott, Craig R., S.R Corman, dan George Cheney. "Development of a Structurational Model of Identification in the Organization;" *Communication Theory* 8 (1998): 298-336.

Semin, Gun R. dan Gergen, Kenneth J., (ed.), *Everyday Vr.derstanding: Social and Scientific Implications.* London: Sage, 1990.

Simanungkalit, Salomo. (Ed), *Indonesia Dalam Krisis. 1997-2002.* Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002.

Simon, Herbert A. Administrative Behavior. New York: Free Press, 1976.

Soelaiman, Munandar. *Dinamika Masyarakat Desa Sebagai Sumber Daya Sosial Budaya dan Agama dan Peranannya dalam Keberhasilan Pembangunan.* Jakarta: P3M-Dikti, 1992.

Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D.* Alfabeta: Bandung, 2007.

Sutopo, Ariesto Hadi dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Soon, Kang Young, *Antara Tradisi dan Konflik: Kepolitikan Nahdlatul Ulama*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2008.

Susanto, Astrid S. *Filsafat Komunikasi.* Bandung: Binacipta 1995.

Tamburian, Heintje Hendrik daniel. *Strategi Komunikasi Partai Kebangkitan Bangsa PKB) Dalam Memenangi Pemilu* Depok, Tesis Universitas Indonesia, 2004.

Thayer, Lee. *Communication and Communication Systems: in Organisasion, Management, and interpersonal relation* Illinois: Richard D Irwin, 1968.

Tischler, *Introduction to Sociology.* Chicago: Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1990.

_____. *on Communication: Essay in Understanding* Norwood. Ner Jersey: Ablex Publishing Company, 1987.

_____. *Some Possible Economic Dysfuncition of The Anglo-America Practice of International Communications A Theoretical Approach* lowa: Ph. D Dissertations, The University of Lowa, 1980.

_____. "Down to Earth Communication: From Space Thegnologies and Global Economic to … Petty Humans and Their Parochial Culters!" dalam *Canadian Journal of Communication.* Vol. 17 1992.

Ulum, Bahrul. *Bodohnya NU ape NU dibodohi.* Yogyakarta: ar-Ruzz Press, 2002.

Wahid, Abdurrahman. *Deklarasi Partai Kebangkitan Bangsa*. NU Jawa Timur, 2000.

West, Richard & Turner, Lynn H, *Introducing Communication Theory: Analysis and Aplication.* 3rd. New York: McGraw Hill: 2007.

Whitman dan Foster, *Speaking in Public.* New York: Macmillan Publishing Company, 1987.

Winkler, Jürgen R. and Jürgen W. Falter dan Lynda Lee Kaid and C.B Holtz,, "Political Parties", dalam *Encyclopaedia of Political Communication.* London: Sage Publication, 2008.

Yenny Zanuba Wahid, dkk (Ed)., *9 Tahun PKB, Kritik dan Harapan.* Jakarta: Panitia Nasional Harlah ke-9 PKB, 2007.

Yin, Robert K. *Studi Kasus Desain dan Metode.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Zada, Khamami (eds)., *Neraca Gus Dur di Panggung Kekuasaan.* Jakarta: Lakpesdam NU, 2002.

_____. A. Fawaid Sjadli, *Nahdlatul Ulama Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan* . Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010

Zaini, Helmy Faishal (ed)., *Khidmat Kami Bagimu Negeri. Laporan Kinerja Fraksi* Kebengkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia FKB-DPR RI Jakarta: FKB-R, 2007.

Dokumen, Makalah Surat Kabar, dan Majalah:

Andi Faisal Bakti, Makalah dipresentasikan pada acara "Launching Jurnal Studi al-Qur‟an dan Seminar Pro-Kontra Hermeneutika sebagai Manhaj Tafsir," (Jakarta, pada Sabtu 25 Februari 2006, di Auditorium Gedung Ikhlas PSQ, Jl. KH. Fakhruddin No. 6, Tanah Abang, Jakarta).

Anggaran Dasar (AD) PKB, Pasal 3

Burke, Kanneth, *A Rhetoric of Motives.* Berkely: University of California Press, 1969.

DPP PKB. Dokumen Muktamar Luar Biasa Partai Kebangkiten Bangsa. Jakarta: DPPPKB, 2002.

Rachman, M. Fadjroel. "Golput, Pemenang Pemilu 2004." Kompas, 15 Mei 2004.

Risalah Nahdlatul Ulama Edisi 18 / TAHUN III / 1431 H / 2010.

Tim Kompas, *Partai-partai Politik Indonesia, Ideologi dan Program 2004-2009.* Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004.

_____. "Pasang Surut Hubungan NU dengan Parpol", *Kompas,* 24 Maret 2010.

Sumber Website:

Arif, Syaiful. Dalam Esay: Menguji Religiopolitik NU 04/07/2004 http://islamlib.com

Azra, Azyumardi. "Kegagalan Islam Politik: Kasus PKB-NU." http://islamlib.com/?site=1&aid=222&cat=content&title=kolom. (di akses 30 Mei 2012)

DPP PKB: http://www.dpp.pkb.or.id/sejarah-pendirian (di akses 10 Oktober 2012)

http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/100785.

http://otomotif.kompas.com/read/2009/04/22/18324999/direktori.html.

http://partai.info/pemilu2004/hasilpemilulegislatif.php access internet: 18 September 2012)

http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=42

http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,1-id,16598-lang,id-c,warta-t,PKB+Ubah+Model+Kampanye-.phpx.

http://www.republika.co.id/berita/shortlink/48761

http://news.detik.com/read/2008/04/03/085456/917552/158/virus-ke-pkb-melalui-yenny

http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,1-id,12959-lang,id-c,warta-t,Pengadilan+Putuskan+Muhaimin+Tetap+Pimpin+PKB-.phpx

http://younkhendra.wordpress.com/2008/07/17/tulisan-saya/

http://ikaba4.blogspot.com/2008/12/panduan-pemenangan-pemilu

http://abdsidiqnotonegoro.blogspot.com/2009/05/realisme-politik

http://abdsidiqnotonegoro.blogspot.com/2009/05/realisme-politik.

http://politik.kompasiana.com/2010/05/17/dua-kubu-pkb-dan-pknu-mencoba-rujuk/
http://politikprabowo.wordpress.com/2012/02/25/survey-oportunitas-dan-cara-bertahan/
http://news.liputan6.com/read/101989/kiai-khos-mendukung-munas-ulama-mukernas-pkb
http://www.indosiar.com/fokus/forum-ulama-langitan-dukung-langkah-syaifullah-yusuf_30410.html
http://news.detik.com/read/2008/05/06/144503/934843/10/sidang-perdana-gugatan-cak-imin-vs-gus-dur-15-mei-2008
I Gusti Putu Arta anggota KPU, www.detik.com
Ramdani, Taufiq, " Peran Figur/ Tokoh Dalam Alur Komunikasi." Dosen FISIP Universitas Cordova Indonesia, 04 Juni 2012. http://yayasanpendidikanmadanisumbawa.blogspot.com/2012/06/peran-figurtokoh-dalam-alur-komunikasi
Taufiq Ramdani "Peran Figur/ Tokoh Dalam Alur Komunikasi" http://yayasanpendidikanmadanisumbawa.blogspot.com/2012/06/peran-figurtokoh-dalam-alur-komunikasi.html (access internet: 18 September 2012).
The Largest Remainder:
Video wawancara Part 1 Metro TV Online-Save Our Nation-Muhaimin Iskandar Diupload pada 25 Des 2008 httpwww.youtube.comwatchv=6_T10DFX1TI
_____. Part 2 Metro TV Online-Save Our Nation-Muhaimin Iskandar Diupload pada 25 Des 2008 httpwww.youtube.comwatchv=NjvNkram50o
_____. Part 3. httpwww.youtube.comwatchv=Kk3x56eLJl0
_____. Part 4. httpwww.youtube.comwatchv=Oaz6QkDVU9I
_____. Part 5. httpwww.youtube.comwatchv=qiEvWjJcyFA
_____. Part 7. httpwww.youtube.comwatchv=vX0cq30SxCc
_____. Part 8. httpwww.youtube.comwatchv=DkB_SqbVt5A
Website DPP PKB http://www.kebangkitanbangsa.org diakses pada 15 Januari 2012, 06.00 WIB.
www.dpp-pkb.org (di akses: 12 Mei 2012).

GLOSARIUM

Al-Siyāsah al-Shar'iyyah	:	Teori yang menyatakan bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan umum, seorang pemimpin atau penguasa (*imam*) bisa mengambil atau memutuskan suatu kebijakan khusus untuk mewujudkan tujuan itu, meskipun hal tersebut tidak ditetapkan secara jelas oleh *nas* atau al-Quran dan Hadis Nabi.
Analisis bingkai (frame analysis)	:	Proses untuk menentukan bagaimana individu mengatur dan memahami tingkah lakunya dalam situasi tertentu. Analisis bingkai memungkinkan aktor atau politikus untuk mengidentifikasi dan memahami peristiwa, memberikan makna kepada peristiwa dan segala kegiatan hidup manusia.
Bingkai kerja natural (natural framework)	:	Peristiwa alam yang tidak terduga yang harus bisa di atasi oleh manusia, seperti hujan badai, gempa bumi, dan sebagainya.
Bingkai kerja sosial' (social framework)	:	Hal yang dapat dikontrol, yang dibimbing oleh kecerdasan manusia.
Citra	:	Gambaran tentang realitas, kendatipun tidak harus sesuai dengan realitas yang sesungguhnya. Kepercayaan dan harapan tentang yang dilakukan oleh sesuatu.
Citra kandidat	:	Atribut politik dan gaya personal kandidat politik seperti yang dipersepsikan oleh pemberi suara, membentuk citra para pemilih tentang orang yang berusaha jadi pejabat.
Collective Source	:	individu-individu yang berbicara tapi karena ia mewakili suatu lembaga atau menjadi juru bicara dari .suatu organisasi
Compatible	:	Mempunyai jaminan keserasian dengan ukuran norma dan nilai-nilai sosial setempat.
Demokrasi	:	Kemampuan rakyat melakukan negosiasi sejajar dengan pihak pemimpin, terutama pihak eksekutif.
Demokrasi langsung	:	Media penyampai pesan politik rakyat yang disampaikan langsung kepada negara (pemerintah).
Demokrasi tidak langsung	:	Media penyampai pesan politik kepada negara (pemerintah) lewat suatu perkumpulan yang biasa disebut partai politik dan keberadaannya diatur dalam konstitusi negara modern.
Emosi	:	Sistem kepercayaan yang akan memandu definisi seseorang mengenai situasi yang dihadapinya. Emosi terdiri atas norma-norma sosial internal serta aturan tentang bagaimana mengatur perasaan. Berbagai norma dan aturan ini memberikan petunjuk kepada seseorang bagaimana menentukan dan merespons emosi.

Endorser : Strategi penonjolan sosok ketokohan dalam sebuah partai.

Era Reformasi : Era Pasca Soeharto atau Era Reformasi di Indonesia dimulai pada pertengahan 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan wakil presiden BJ Habibie.

Ethos (ethical proof) : Menyangkut kredibilitas etis yang dimiliki komunikator

Faktor lingkungan fisik (physical suroundings) : Lingkungan tempat komunikasi itu berlangsung dengan menekankan pada aspek what dan how pesan-pesan komunikasi itu dipertukarkan.

Golkar : Partai politik yang sebelumnya bernama Golongan Karya (Golkar) dan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), adalah sebuah partai politik di Indonesia. Partai GOLKAR bermula dengan berdirinya Sekber GOLKAR pada masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno, tepatnya 1964 oleh Angkatan Darat untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik. Dalam perkembangannya, Sekber GOLKAR berubah wujud menjadi Golongan Karya yang menjadi salah satu organisasi peserta Pemilu.

Golput : Orang-orang yang tidak memberikan suaranya dalam pemilu.

Heterofili : Komunikator dan khalayak terdapat banyak perbedaan

Homofili : Komunikator dan khalayak memiliki banyak persamaan, terutama dalam hal nilai-nilai, pendidikan, status dan sebagainya.

individual source : Jika seorang tokoh, pejabat ataupun rakyat biasa, misalnya, bertindak sebagai sumber dalam suatu kegiatan komunikasi politik

Interaksionisme : Interaksi-interaksi antar individu yang berlangsung secara simbolik *(symbolic interactionism)*, sehingga terjadi proses orientasi, peniruan dan peneguhan untuk memerankan sesuatu perilaku, seperti apa yang diperankan orang lain.

Kharismatik : Kata kharisma berakar dari bahasa Yunani, 'charis', yang berarti karunia atau bakat. Sementara dalam studi psikologi sosial modern, kharisma adalah pengaruh yang dimiliki seseorang terhadap orang lainnya atau kelompok.

Khittah politik NU : Keputusan Muktamar ke- 27 Situbondo bahwa NU secara organisatoris tidak terkait dengan partai politik manapun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis.

Komunikasi : Kegiatan yang merupakan reaksi terhadap persepsi dan usaha realisasi atau penghindaran dari ide. Hasil dari sebuah persepsi maka komunikasi tentulah melibatkan totalitas dari komunikator dan komunikan.

Komunikasi politik : Komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Dengan pengertian ini, sebagai sebuah ilmu terapan, komunikasi politik bukanlah hal yang baru. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara "yang memerintah" dan "yang diperintah".

Komunikator : Pihak yang memprakarsai dan mengarahkan suatu tindak komunikasi yang dapat dibedakan dalam wujud individu, lembaga, ataupun berupa kumpulan orang.

Konflik : dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.

Konsep diri negatif : Tipe orang yang selalu atau suka berfikir negatif dan peka pada kritik, cepat marah atau emosional, bersikap hiporkritis dan cenderung merasa tidak disenangi orang lain, serta bersikap pesimistis dan tidak berani bersaing secara sehat karena selalu merasa tidak percaya diri.

Konsep diri positif : Orang yang transparan (tembus pandang) atau terbuka bagi orang lain

Konstituen : Seseorang yang secara aktif mengambil bagian dalam proses menjalankan organisasi dan yang memberikan otoritas kepada orang lain untuk bertindak mewakili dirinya.

Konstruksi sosial realitas : Ide ini menyatakan bahwa dunia sosial kita tercipta karena adanya interaksi antara manusia.

logos (logical proof) : menyangkut rasionalits argumentasi yang digunakan seorang komunikator.

Mabda Siyasī : Prinsip Politik atau pernyataan politik maupun anggaran dasar partai.

Masyumi : Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi adalah sebuah partai politik yang berdiri pada tanggal 7 November 1945 di Yogyakarta. Partai ini didirikan melalui sebuah Kongres Umat Islam pada 7-8 November 1945, dengan tujuan sebagai partai politik

yang dimiliki oleh umat Islam dan sebagai partai penyatu umat Islam dalam bidang politik.

Mazhab manhajīy : Pengembangan pemikiran mazhab sebatas mengikuti pendapat ulama ke arah pemikiran mazhab yang mengikuti metodologi pemikiran ulama itu sendiri

Mazhab qauly : Pengembangan pemikiran mazhab sebatas mengikuti pendapat ulama

Mekanistis : Paradigma yang memandang bahwa manusia hanya sekedar mesin yang juga dapat dipahami hanya dengan mereduksi bagian-bagiannya.

MLB Ancol : Muktamar Luar Biasa PKB yang memilih Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum

MLB Parung : Muktamar Luar Biasa PKB yang memilih Gus Dur sebagai Ketua Umum

Nahdliyyin : Sebutan untuk menyatakan warga NU

Natural framework : Peristiwa alam yang tidak terduga yang harus bisa di atasi oleh manusia, seperti hujan badai, gempa bumi, dan sebagainya.

NU : Nahdlatul Ulama. Sebuah organisasi Islam besar di Indonesia. Organisasi ini didirikan oleh Hayim As'ari, Kyai di Jombang berdiri pada 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi.

Opini publik : Pendapat kelompok masyarakat atau sintesa dari pendapat dan diperoleh dari suatu diskusi sosial dari pihak-pihak yang memiliki kaitan kepentingan. Agregat dari sikap dan kepercayaan ini biasanya dianut oleh populasi orang dewasa.

P3KPU : Panitia Persiapan Pembentukan Komisi Pemilihan Umum

Paradigma : cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir (kognitif), bersikap (afektif), dan bertingkah laku (konatif). Paradigma juga dapat berarti seperangkat asumsi, konsep, nilai, dan praktik yang di terapkan dalam memandang realitas dalam sebuah komunitas yang sama, khususnya, dalam disiplin intelektual.

Parpol : Organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat yaitu yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat dengan beberapa kelompok lain yang memiliki pandangan yang berbeda-beda.

Partai advokasi : Partai yang bertekad mengkhidmatkan perjuangannya untuk memberikan pembelaan terhadap kepentingan

kelompok-kelompok yang rentan, yang selalu terpinggirkan dan acap dikorbankan dalam proses pembangunan, seperti masyarakat di pedesaan, petani, guru swasta, nelayan, institusi pondok pesantren, dan lain sebagainya yang secara faktual merupakan basis konstituennya.

Partai Hijau : Kepedulian suatu partai terhadap isu-isu lingkungan hidup.

Pathos (emotional proof) : Menyangkut efektivitas respon dari komunikan

PDI-P : Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan. Sebuah partai politik di Indonesia. Lahirnya PDI-P dapat dikaitkan dengan peristiwa 27 Juli 1996. Hasil dari peristiwa ini adalah tampilnya Megawati Soekarnoputri di kancah perpolitikan nasional.

Pemilih kritis : Para pemilih yang tidak hanya berhenti menuntut agar partai politik atau kandidat selalu mampu menguak berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, melainkan juga harus memiliki cara pemecahannya. Yang terpenting bagi meraka adalah cara memecahkan masalah sosial.

Pemilih rasional : Pemilih yang hanya memberikan dukungan kepada seorang kandidat atau partai politik sejauh dianggap sesuai dengan ekspektasi mereka. Suatu partai atau kandidat yang melanggar janji dan harapan yang digantungkan para pemilih kepadanya akan membuat mereka tidak mempunyai cukup banyak alasan untuk mempertahankan hubungan mereka dengannya.

Pemilu : proses pemilihan orang(-orang) untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, Pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau ketua kelas, walaupun untuk ini kata 'pemilihan' lebih sering digunakan.

Persepsi : Pengetahuan tentang apa yang dapat ditangkap oleh indera

Politik : Proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik.

Polling Pendapat : Survei mengenai pendapat atau pandangan yang

dilakukan dengan menggunakan teknik sampel. Jajak pendapat biasanya dirancang untuk mendapatkan gambaran tentang pandangan-pandangan suatu populasi dengan mengajukan serangkaian pertanyyaan kepada beberapa orang yang dianggap mewakili populasi dan kemudian menyimpulkan jawaban-jawabannya sebagai gambaran dari kelompok yang lebih luas.

Prinsip singularitas ganda : Penerimaan pengalaman baru atau gagasan baru, sesuai dengan konsep diri yang ada pada masing-masing politikus yang berbeda pendapat.

Representativeness : Keterwakilan rakyat dalam politik pengambilan kebijakan, baik keterwakilan dalam lembaga formal kenegaraan seperti lembaga legislatif maupun keterwakilan aspirasi masyarakat dalam institusi kepartaian.

Retorika persuasif : Pesan yang disampaikan kepada kelompok khalayak oleh seorang pembicara yang hadir untuk memengaruhi pilihan khalayak melalui pengandisian

Situasi sosio-kultural (sociocultural situations) : Komunikasi merupakan bagian dari aktifitas sosial yang di dalamnya terkandung makna kultural tertentu, sekaligus menjadi identitas dari para pelaku komunikasi yang terlibat di dalamnya.

Social framework : Hal yang dapat dikontrol, yang dibimbing oleh kecerdasan manusia

Sosiokultural : terbentuk dari dua kata, sosial dan kultural. Sosial berasal dari kata Latin Socius yang berarti kawan atau masyarakat, sedangkan kultural berasal dari Colere yang berarti mengolah. Colere berasal dari bahasa Inggris yaitu Cultur yang diartikan sebagai segala daya upaya dan kegiatan manusia dalam mengubah dan mengolah alam.

Suriyah : Pemimpin umum organisasi

Tanfidziyah : Ketua pelaksana harian organisasi

Tim pertunjukan (performance team) : Pembawa peran dan karakter secara individu, aktor-aktor sosial juga berusaha mengelola kesan orang lain terhadap kelompoknya, baik itu keluarga, tempat bekerja, partai politik, atau organisasi lain yang mereka wakili.

Tradisi politik aswaja : Suatu tradisi politik Islam yang cenderung terbuka pada kompromi dan konsensus, tidak ekstrim, bersikap *tawazun* (keseimbagan), *tasamuh* (toleran) dan *tawasuth* (moderat), terhadap perbedaan pandangan dan sikap politik.

INDEKS

Abdurrahman Wahid, 1, 55, 61, 66, 68, 75, 94, 126, 128, 134
AD/ART, 8, 10, 23, 53, 55, 56, 57, 59, 61, 65, 71
Amerika, 37
Andi Faisal Bakti, 2, 3, 4, 45, 61
Anwar Arifin, 3, 4, 12, 18, 30, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 95, 123
Azyumardi Azra, 6, 86

Bandung, 1, 6, 11, 16, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 36, 39, 40, 43, 44, 46, 48, 49, 54, 55
Birokrasi, 32
Budiardjo, 82
Kanneth Burke, 41

California, 22, 41
Ciputat, 3, 61
Cirebon, 124
Citra, 8, 11, 12, 14, 25, 29, 30, 34, 39, 49, 50, 55, 61, 63, 65
Clifford Geertz, 37

Deddy Mulyana, 21, 23, 27, 49
Demokrasi, 96, 122, 125, 132
Dewan Syuro, 78, 128
Zamakhasyari Dhofier, 78, 79
DPAC, 71
DPC, 71, 85
DPP, 71, 72, 85, 122, 124, 128
DPP PKB, 7, 8, 10, 16, 19, 22, 23, 61, 63, 64, 65
DPR, 9, 23, 64
DPRD, 122
DPW, 71, 85

Ekonomi, 12, 16, 28, 56
Eksekutif, 132
Eropa, 37
Erving Goffman, 44, 45, 46

Faisal Ismail, 1, 2
Figur, 79
Filsafat, 3, 4, 18, 24, 31, 41, 42, 43
Firmanzah, 93, 95, 96, 125

George Herbert Mead, 18, 26, 30, 80
Golkar, 6, 9, 60, 123, 129
Golput, 122, 123

Harvard, 35, 44, 45
Hasyim Muzadi, 61, 124

Indonesia, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 27, 28, 30, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 53, 54, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 133, 135
Inklusif, 6, 66, 133, 135
Interaksi Simbolik (IS), 17, 19, 22, 25, 26, 51, 133, 134
Islam, 1, 2, 6, 7, 11, 15, 16, 17, 28, 45, 56, 60, 65, 66, 67, 68, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 95, 135

Jakarta, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 28, 30, 34, 35, 36, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 53, 55, 56, 60, 63, 64, 65, 67, 75, 78, 82, 93, 95, 122, 123, 124, 127
Jalaluddin Rakhmat, 36
James Averill, 39
Jawa Tengah, 124
Jawa Timur, 124, 126

Yusuf Kalla, 124
Kang Young Soon, 10, 17
Karen A. Foss, 25, 37, 38, 39, 43, 46, 50
Kharisma, 80, 81
Kiai, 78, 79, 80, 81, 124
Komisi, 128
Komunikasi, 71, 78, 79, 80, 83, 94, 95, 96, 122, 123, 126
Komunikator, 82, 122
Konstituen, 95, 122, 124
KPU, 2, 123
Kultural, 72, 75, 82, 125

Lasswell, 2
Lee Thayer, 2
Legislatif, 97, 127
LSI, 126

Majlis Syuro, 78
Marijan, 123, 124
mazhab, 94
McLuhan, 2
Megawati, 124
Michael Rush, 10
Miriam Budiharjo, 4, 5
Modernisasi, 16
Muhaimin Iskandar, 94, 122, 126
Muktamar, 71, 126
Muslim, 79, 80

New York, 2, 18, 28, 35, 37, 38, 39, 46, 49, 50
NKRI, 63
NU, 78, 81, 94, 95, 124, 125, 126

Orde Baru, 78, 81, 82, 123
Orde Lama, 28

PAN, 123
Parliamentary Threshold, 127, 128, 129
Parpol, 129
Parung, 126
PBNU, 95, 125, 126
PBR, 123
PDI-P, 1, 9, 123, 129
Pemilu, 95, 98, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131
Pemilu 1999, 5, 9, 11
Pemilu 2004, 9, 60
Pemilu 2009, 13, 14, 19, 21, 24, 25
Pesantren, 79, 82, 94, 125
Peter L. Berger, 18
Phillip Althof, 10
PKB, 69, 71, 72, 75, 78, 93, 94, 95, 96, 97, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129
PKNU, 8, 126
PKS, 123, 126, 129
Platform, 98
Politik, 75, 78, 81, 82, 85, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 131
PPP, 123, 126
Presiden, 124

Rakhmat, 80
Reformasi, 6, 11, 55, 61, 123
retorika, 28, 34, 40, 44, 49, 133
Rom Harre, 35, 36, 38, 39

Sidney Kraus, 32
Sigmun Neumann, 5
Sosiokultural, 2, 13, 17, 19, 21, 25, 35, 51, 133
Stephen W. Littlejohn, 25, 37, 38, 39, 43, 46, 50
Survey, 126, 129
Symbolic Interactionism, 80

Tasikmalaya, 1
Tempo, 93
Teori Komunikasi, 25, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50
Thomas Luckman, 18
Tradisional, 80, 81, 122, 125

Wilbur Schramm, 41

Yenny Zanuba Wahid, 1, 6, 10
Yogyakarta, 1, 3, 4, 5, 6, 9, 15, 16, 22, 41, 48, 64, 75, 94, 95, 123
Yudi Latif, 6
Yunani, 3, 4, 28

Zulkarimein Nasution, 28

Biografi Penulis

Falizar Rivani, lahir di Palembang, 12 Januari 1986. Memulai pendidikan formal SDN Padang Selasa di Palembang. Kemudian selesai di Madrasah Ibtidaiyah Mamba'ul Huda, Ngabar-Ponorogo-Ja-Tim (1999). MTs Miftahul Huda, Pulosari Papar Kediri (2002), dan MA Sunan Kali Jaga Kediri Kota (2005). Mengambil kuliah S1 di Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri, Fakultas Dakwah dan Komunikasi (2009). Kemudian meraih gelar Magister Agama dan Sains Pengkajian Islam dalam bidang konsentrasi Dakwah dan Komunikasi di Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2013).

Ketertarikan dalam mengenyam pendidikan informal khusus agama (diniyah) pernah ditempuh penulis, salah satunya di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri. Pendidikan diniyah tersebut dimulai dari tingkat madrasah ibtidaiyah, tsanawiyah sampai aliyah Hidayatul Mubtadi'in Lirboyo (1999-2010). Sebelumnya pernah bermukim di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo dan Pondok Pesantren Salafiyah Bandar Kidul Kota Kediri.

Pernah aktif dan terlibat dalam organisasi baik intra maupun ekstra di antaranya: Pengurus Jamiyah Ikatan Santri Luar Jawa (IKSALUJA) Pondok Pesantren Lirboyo (2009-2010), Pengurus BEM Fakultas Dakwah dan Komunikasi bidang Humas (2006-2007), Pengurus HMI Cabang Komisariat IAIT Kota Kediri 2007-2008), bergabung dan menjadi anggota Gerakan Pemuda Nasional (GPN), 2006-2007 dan masih banyak lagi keikutsertaan dalam kegiatan organisasi.

Saat ini terlibat di Forum Mahasiswa Alumni Lirboyo (FORMAL), Penerbit Jaringan Usaha Santri (JAUSAN) dan masih berstatus aktif mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara di Cikokol Tangerang Kota. Penulis dapat dihubungi melalui email: falizarryahoo.com, dan kontak person: 0858 8155 798 45.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Syarif Hidayatullah

JAKARTA – INDONESIA

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

PKB

Membela Yang Benar